

The background of the book cover is a dark blue night sky with a large, glowing golden cross in the center. Behind the cross is a blue globe with white grid lines. Golden chains with star-shaped pendants hang from the cross. At the base of the cross, there is a large crowd of people in silhouette, some with their arms raised. The overall theme is religious and global.

Dr. Semuel Linggi Topayung, M.AP.

PENGARUH KEPEMIMPINAN KRISTEN TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK

————— *Pengaruh*
KEPEMIMPINAN KRISTEN
Terhadap —————
KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Samuel Linggi Topayung, M.AP.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

**PENGARUH KEPEMIMPINAN KRISTEN
TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK**

Copyright @ 2025 By Dr. Samuel Linggi Topayung, M.AP.

All right reserved

Penulis

Dr. Samuel Linggi Topayung, M.AP.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (**Kantor**)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

[https://penerbitkbm. com](https://penerbitkbm.com)

[www. penerbitbukumurah. com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

[naskah@penerbitkbm. com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

Distributor

[https://penerbitkbm. com/toko-buku/](https://penerbitkbm.com/toko-buku/)

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-202-640-3

Cetakan ke-1, Agustus 2025

15,5 x 23 cm, viii + 273 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).



KATA PENGANTAR

Dalam lanskap kebijakan publik yang semakin kompleks dan menuntut, peran seorang pemimpin menjadi krusial. Kebijakan publik bukan sekadar serangkaian aturan atau prosedur, melainkan cerminan dari nilai-nilai, tujuan, dan aspirasi suatu masyarakat. Namun, sering kali kita menyaksikan bagaimana kebijakan yang dianggap baik pun justru menimbulkan pro dan kontra, bahkan jauh dari harapan masyarakat yang seharusnya

dilayani. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar responsif, adil, dan memberikan solusi nyata bagi persoalan publik?

Buku ini hadir untuk menawarkan sebuah perspektif yang mungkin terabaikan dalam diskursus kebijakan publik konvensional, yaitu Pengaruh Kepemimpinan Kristen Terhadap Kebijakan Publik. Melalui penelusuran yang mendalam, pembaca akan diajak untuk memahami bahwa kepemimpinan yang berintegritas dan secara khusus berlandaskan prinsip-prinsip luhur Kekristenan dapat menjadi kunci dalam membentuk kebijakan yang berdampak positif dan berkelanjutan.

Penulis memulai perjalanan ini dengan menyoroti urgensi peran pemimpin dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan. Pembaca akan memahami bagaimana implementasi kebijakan merupakan proses aktivitas terencana yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya institusi pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Penulis akan mengupas pentingnya analisis kebijakan untuk menghindari tumpang tindih dan kerugian publik, serta bagaimana kebijakan harus menjadi solusi, bukan pemicu masalah baru.

Selanjutnya, buku ini akan mengantarkan pembaca pada pemahaman komprehensif tentang berbagai corak kepemimpinan yang ada, sebelum kemudian memfokuskan pada dimensi unik kepemimpinan Kristen. Bagian ini akan menyoroti perbedaan esensial antara kepemimpinan yang bersumber pada pelayanan Kristus dan corak kepemimpinan lain. Integritas, etika, dan moralitas yang berakar pada prinsip-prinsip ilahi menjadi kekuatan yang membedakan, menghindarkan pemimpin Kristen dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Buku ini akan mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan Kristen ini adalah sebuah panggilan suci yang didasarkan pada prinsip teologis dan hukum alam, di mana manusia diciptakan menurut gambar Allah dan dianugerahi akal budi untuk keputusan etis.

Hubungan antara kepemimpinan Kristen yang dilandasi nilai-nilai rohani dan dinamika kebijakan publik akan diperdalam,

khususnya dalam konteks peran ini di ranah publik. Pembaca akan diajak untuk memahami bahwa pemerintahan memerlukan individu-individu bermoral dan berakhlak yang mencontohkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan pelayan Kristen. Buku ini kemudian merinci sumber dan prinsip-prinsip Kekristenan yang relevan untuk kebijakan publik, seperti kepercayaan penuh kepada Ilahi, hikmat ilahi, keputusan yang benar sesuai kaidah kebenaran Alkitabiah, konsultasi dengan sesama orang percaya yang bijak, kesabaran dalam menunggu waktu Tuhan, dan konsep kebajikan umum yang berakar pada nilai-nilai Kristen. Melalui telaah tentang mekanisme pengaruh serta studi kasus dan ilustrasi nyata, buku ini akan menunjukkan bagaimana seorang pemimpin Kristen dapat memberikan dampak signifikan dalam setiap kebijakan yang diambilnya, baik di lembaga formal maupun informal. Pembaca akan melihat contoh-contoh konkret tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip luhur Kekristenan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Akhirnya, buku ini akan menyajikan implikasi dan rekomendasi untuk membangun kebijakan publik yang benar-benar responsif. Ini adalah ajakan untuk merenungkan bagaimana kepemimpinan yang berlandaskan iman Kristen dapat menjadi fondasi bagi kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan benar-benar melayani kebutuhan masyarakat. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang mencerahkan bagi para pemimpin, pembuat kebijakan, akademisi, dan siapa pun yang peduli terhadap terwujudnya kebijakan publik yang responsif dan berintegritas, yang pada akhirnya membawa kebaikan bagi seluruh elemen masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	v
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Landasan Teori	7
A. Pengertian Istilah	8
Bab 3 Jenis-Jenis Kepemimpinan.....	21
A. Kepemimpinan Otoriter	22

B. Kepemimpinan Birokrasi.....	25
C. Kepemimpinan Partisipatif.....	29
D. Kepemimpinan Delegatif.....	33
E. Kepemimpinan Transaksional.....	35
F. Kepemimpinan Transformasi.....	38
G. Kepemimpinan Melayani (Servant).....	41
H. Kepemimpinan Karismatik.....	44
I. Kepemimpinan Situasional.....	45
Bab 4 Kajian Kepemimpinan Secara Umum.....	49
A. Kajian Tentang Kepemimpinan.....	50
Bab 5 Kajian Kepemimpinan Kristen.....	69
A. Pengertian Kepemimpinan Kristen.....	70
B. Dasar Teologis Kepemimpinan Kristen.....	70
C. Keunggulan dari Kepemimpinan Kristen.....	80
D. Karakter Pemimpin Kristen.....	82
E. Ciri-Ciri Kepemimpinan Kristen.....	88
F. Tugas-tugas Kepemimpinan Kristen.....	95
G. Kepemimpinan dalam Alkitab (PL&PB).....	97
H. Pengaruh Kepemimpinan Kristen.....	112
Bab 6 Kajian Kebijakan Publik.....	119
A. Konsep Kebijakan Publik.....	120
B. Ciri Kebijakan Publik.....	123
C. Jenis Kebijakan Publik.....	124
D. Beberapa Hal yang Berpengaruh pada Terbuatnya Suatu Kebijakan.....	125
E. Beberapa Langkah Kebijakan Publik.....	127
Bab 7 Memposisikan Kepemimpinan Kristen dalam Ranah Publik.....	131
A. Pengantar: Ketika Iman Bertemu Ruang Publik.....	132
B. Paradigma Hubungan Agama dan Negara/Publik.....	142
C. Pemahaman Kepemimpinan Kristen dalam Konteks Publik.....	156

Bab 8 Sumber dan Prinsip Kepemimpinan Kristen yang Relevan untuk Kebijakan Publik	183
A. Akar Teologis dan Etis.....	184
B. Model Kepemimpinan Kritis dalam Konteks Publik	193
Bab 9 Mekanisme Pengaruh Kepemimpinan Kristen terhadap Kebijakan Publik	201
A. Pengaruh Langsung Melalui Pejabat Publik Kristen:.....	202
B. Pengaruh Tidak Langsung Melalui Lembaga dan Masyarakat	213
Bab 10 Studi Kasus dan Ilustrasi Pengaruh	225
A. Contoh Kebijakan yang Terpengaruh: Mengurai Dampak Nyata Kepemimpinan Kristen	226
B. Tantangan dan Dilema Etis: Menelaah Pergumulan Kepemimpinan Kristen dalam Kebijakan Publik di Indonesia ..	237
Bab 11 Implikasi dan Rekomendasi: Membangun Kebijakan Publik yang Responsif	247
A. Implikasi bagi Kebijakan Publik yang Responsif: Kontribusi Kepemimpinan Kristen untuk Tata Kelola yang Lebih Etis, Adil, dan Melayani	248
B. Rekomendasi untuk Pemimpin Kristen: Saran Praktis untuk Memengaruhi Kebijakan Publik secara Konstruktif di Indonesia.....	252
C. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan: Berinteraksi dengan dan Memahami Kontribusi Potensial dari Kepemimpinan Berbasis Nilai	255
DAFTAR PUSTAKA	259
PROFIL PENULIS	273

Bab 1

Pendahuluan



Peran seorang pemimpin dalam kebijakan Publik sangatlah penting disebabkan karna pemimpinlah yang memiliki tugas pokok memastikan arah dan rumusan kebijakan dibuat sesuai dengan yang seharusnya. Sebab itulah seorang pemimpin harus memiliki berbagai karakter tidak asal terkenal. Para Pemimpin-pemimpin harus tau benar makna kebijakan publik dan bagaimana variasinya Dalam bentuk penerapan dan evaluasi. Terlaksananya kebijakan bertujuan pada terlaksananya sebuah kegiatan, aktivitas, atau suatu cara dengan bingkai pada metode tersendiri dan spesifik.

Terlaksananya suatu kebijakan adalah suatu proses aktivitas terencana yang berlangsung dengan sangat serius dengan berpatokan pada aturan tertentu dengan sasaran dalam mewujudkan keinginan tertentu. Implementasi kebijakan bukan saja berkaitan sifat tindak tanduk badan organisasi administratif berwenang dalam pelaksanaan suatu kegiatan, akan tetapi berkaitan juga pada peran masyarakat dengan semua pihak. Dalam penerapan kebijakan yang dilakukan sebaiknya sesuai yang diinginkan beserta memiliki manfaat dan bisa memberikan solusi yang terbaik, dengan banyaknya persoalan kebijakan beserta intensnya analisa yang digunakan, sehingga membutuhkan kajian beserta bekal untuk bisa memberikan penjelasan kecermatan penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan harus perlu dianalisis, terutama yang berhubungan atas apa yang berpengaruh dari hasil tersebut.

Analisis Kajian pelaksanaan kebijakan memiliki tujuan agar suatu kebijakan tidak saling bertolak belakang dan merugikan kepentingan bagi pelayanan publik masyarakat secara umum. Kebijakan publik selama ini rentan menjadi protes dari berbagai kalangan. Kepuasan dan kenyamanan masyarakat sering kali masih jauh untuk tercapai, meskipun kebijakan itu telah dianggap baik dan memadai. Hal ini lalu memunculkan bahasan dan metode baru yang tiada pernah putus-putusnya. Kebijakan publik tidak hanya sebagai alat dalam melaksanakan kepentingan pelayanan publik, tapi sudah seharusnya menjadi zona yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dan terseluruh.

Kebijakan sebagai rumusan tujuan untuk mengatasi masalah yang timbul agar terselesaikan tapi tidak menuntaskan masalah yang memunculkan masalah baru, namun sebaliknya menjadi penyelesaian dari sebuah masalah yang ada di tengah masyarakat dalam konteks pelayanan publik. Selain itu pelaksanaan kebijakan adalah rangkaian aktivitas, program, kegiatan, dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh pribadi seseorang, pimpinan, masyarakat, instansi pemerintah, dan pihak non pemerintah dalam rangka menghasilkan kebijakan menjadi keputusan yang menjadi keputusan akhir dalam pengambilan keputusan. Untuk melaksanakan kebijakan publik ditentukan oleh beberapa hal yang menjadi faktor, yaitu: Kewenangan, Sumber daya, komunikasi dan memo (disposisi).

Aspek-aspek yang diperlukan untuk melihat kembali penerapan kebijakan publik adalah: Pendirian pada prinsip, keterbukaan, dayaguna, efisiensi dan kesamarataan. Disamping itu melihat kembali penerapan kebijakan penting dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh. Dalam melakukan terobosan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat umum (publik) dapat dilaksanakan diskresi penerapan kebijakan public yang penting tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam kebijakan publik selalu beriringan secara Bersama antara keperluan, target, keinginan, dan semua settingan rencana yang terkait pada sebuah lembaga institusi. Adanya Kebijakan publik dimaksudkan agar mengatasi masalah-masalah yang ada di berbagai aktivitas penduduk dengan beragam hal dan ketetapan yang ada didalamnya. Kebijakan publik ialah pengambilan putusan oleh individu yang memiliki kewenangan di instansi pemerintah, yang sifatnya formal maupun informal. Rumusan kebijakan, implementasi atau pelaksanaan kebijakan, maupun evaluasi atau penilaian akhir kebijakan ialah pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kepada masyarakat umum (publik), hal lain yang dimaksudkan juga adalah mewujudkan terlaksananya tujuan atau sasaran dari kebijakan publik tersebut haruslah bentuk kebijakan berpatokan dari penilaian akhir

sebelumnya yang menjadi tolak ukur bagi kebijakan yang telah ada sebelumnya.

Kebijakan yang ada merupakan kesinambungan dari kebijakan sebelumnya yang tidak berdiri sendiri sebagai kontinuitas dan berkaitan untuk mendapatkan bentuk yang sesuai untuk kepentingan masyarakat yang lebih baik. Kebijakan harus di landasi oleh perubahan yang baik bagi kebijakan yang ada sebelumnya dengan berpijak dari evaluasi atau hasil penilaian kebijakan. Evaluasi atau penilaian kebijakan sebagai bentuk yang berarti agar dapat mendapatkan informasi sebagai tolak ukur kebijakan yang sudah diterlaksana sesuai dengan ketetapan yang ditentukan, hasil atau pengaruh yang diinginkan secara baik, keakuratan dalam penerapan, pencapaian yang tepat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sudah sesuai.

Kepemimpinan Kristen ialah kepemimpinan yang bersumber pada Yesus Kristus yaitu melayani sebaliknya kepemimpinan sekuler sumbernya dunia. sekalipun kepemimpinan Kristen mencakup beberapa hal yang sesuai dengan kepemimpinan secara universal atau umum, namun kepemimpinan Kristen memiliki perbedaan yang sifatnya khusus dan harus dimengerti serta dipraktikkan. saat menjalankannya ini merupakan pergumulan tersendiri bagi kepemimpinan Kristen karna berkaitan dengan pertanggung jawaban pribadi dengan Allah dan berat. Sudah ada yang kita temukan kisah para pemimpin Kristen yang terperangkap kedalam jurang dosa. Dalam menjalankan tugas tanggung sebagai pemimpin etika dan moral menjadi kekuatan yang kokoh supaya terhindar dari wewenang kekuasaan yang disalahgunakan. Kepemimpinan Kristen diperlukan tujuan dan prinsip-prinsip dasar Kekristenan. integritas sebagai seorang pelayan harus dimiliki oleh pemimpin Kristen sebagai sebuah karakteristik, dan itulah yang membedakan dengan kepemimpinan sekuler. Yang perlu diperhatikan oleh pemimpin Kristen adalah menyadari akan kekurangan serta kelemahan, mendengar suara Tuhan, pendelegasian tugas, kerja keras, efektif, menghargai teladan, sebagai pelayan, serta menjaga hubungan baik

dengan orang-orang yang dipimpin. Kepemimpinan adalah panggilan suci yang didasarkan pada prinsip-prinsip teologis dan hukum alam yang kekal bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Bahwa manusia dikaruniai iman dan akal budi untuk membuat keputusan etika dan moral dengan kehendak bebas dalam kepercayaan suci untuk memerintah diri sendiri.

Pada konteks kepemimpinan dalam pemerintahan memahami bahwa pemerintahan sendiri memerlukan orang-orang yang bermoral dan berahlak di bawah Tuhan, karena mereka mencontohkan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan pelayan di mana mereka secara kolektif berjanji untuk memajukan kehendak dan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Kepemimpinan pelayan Kristen terdiri dari dua elemen utama: pelayanan (mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan orang lain); dan penatalayanan dalam pengelolaan sumber daya yang disediakan Tuhan dengan integritas dan kompetensi. Pemimpin yang melayani mempromosikan tujuan altruistik, mengorbankan kenyamanan pribadi dan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Sebagaimana dicatat dalam Kitab Suci, pengorbanan dan pemberian terbesar adalah menyerahkan hidup Anda bagi orang lain. Kitab Suci dan sejarah menunjukkan bahwa untuk menerapkan dan memelihara prinsip-prinsip suci pemerintahan sendiri dan persetujuan yang diperintah, kita membutuhkan orang-orang dengan karakter saleh dan kompetensi untuk memerangi kekuatan sentrifugal jahat yang mengatur dunia yang jatuh ini.

Pengambilan kebijakan secara Kristiani berlandaskan pada Alkitab dengan beberapa prinsip-prinsip tertentu, seperti:

- *Percaya sepenuhnya kepada Allah*. Sepenuhnya mempercayakan bagi Allah dengan sepenuh hati dan bukan bersandar pada pengertian serta keinginan diri sendiri.
- *Hikmat dari Allah*. Sebelum mengambil keputusan Minta hikmat dari Tuhan untuk membimbing kita.
- *Keputusan yang benar*. Keputusan yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah Alkitab. Tidak perlu orang lain melihat kita seperti apa.

- *Konsultatif*. Dalam mengambil Kebijakan harus di konsultasikan dengan meminta pertimbangan nasehat dari orang Kristen bijak secara Iman, saleh yang mengenal kita secara baik.
- *Sabar*. bersabar dengan menunggu waktunya Tuhan.
- *Konsep kebajikan yang bersifat umum*. Kebijakan yang benar bertitik tolak pada konsep kebajikan yang umum.

Seorang pemimpin Kristen harus memiliki pengaruh yang significant dalam mengambil kebijakan ditengah-tengah kehidupan sekuler di setiap lembaga atau instansi yang dipimpinnya baik secara formal maupun informal agar setiap kebijakan yang diambilnya bisa berpengaruh baik bagi masyarakat umum.

Bab 2

Landasan Teori





elalui bagian ini akan mengkaji tentang Pengertian Istilah Pengaruh, kepemimpinan Umum, Kepemimpinan Kristen, kebijakan, publik.

A. Pengertian Istilah

Bagian ini menguraikan berbagai definisi dan pengertian Istilah baik secara leksikal maupun pakar.

1. Pengertian Istilah Pengaruh

Melalui Kamus KBBI (Besar Bahasa Indonesia), menjelaskan bahwa kata pengaruh memiliki arti kemampuan yang ada atau muncul dari sesuatu atau objek (orang, benda) dengan turut serta membentuk pola pikir karakter, kepercayaan (yang diyakininya), atau perbuatan seseorang. Menurut Badudu dan Zain dalam istilah kamus pengaruh adalah kemampuan yang mengakibatkan sesuatu bisa terjadi, suatu hal yang bisa membentuk atau menciptakan bahkan mengubah sesuatu bagi yang lain dan menuruti atau mengikuti karena kekuatan atau kekuasaan orang lain. Jadi, setelah memperhatikan dua pengertian diatas maka kata "Pengaruh" secara etimologis itu bisa diberikan arti sebagai daya (kemampuan) yang ada atau lahir dari sesuatu yang ikut membentuk.

Husein Umar dalam bukunya Metode Riset Bisnis menjelaskan pengaruh ialah sikap peninjauan suatu hubungan atau korelasi yang telah memiliki arah tujuan. Husein Umar menekankan bahwa "pengaruh" itu suatu hubungan yang sudah memiliki arah. Hal yang berbeda di jelaskan oleh Zamri Mohamad, Haeqal Zulqarnain bahwa pengaruh adalah bergerak bersama-sama. Sementara Hugiono dan Poerwantana berpendapat bahwa Pengaruh adalah desakan atau ajakan yang sifatnya membentuk atau menjadi sesuatu yang berdampak, sedangkan Louis Gottschalk memberikan pengertian tentang pengaruh sebagai sesuatu dampak atau akibat yang kuat dan mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia baik secara individu ataupun berkelompok.

Dari berbagai pengertian dan definisi diatas, maka dapat diartikan bahwa Pengaruh adalah suatu tindakan yang timbul dari cara akibat tekanan untuk membentuk atau merubah suatu situasi keadaan ketahap yang cukup baik hubungan yang bergerak bersama-sama yang sudah mempunyai arah, bergerak bersama, dorongan yang membentuk suatu dampak dan membentuk pola pikiran dan perilaku seseorang pribadi individu ataupun secara berkelompok atau bersamaan.

2. Pengertian Istilah Kepemimpinan Umum

Pengertian Istilah Kepemimpinan dalam KBI (Kamus Bahasa Indonesia), istilah Kepemimpinan, cara memimpin; 1. Orang yang memimpin, menjadi ketua atau menjadi kepala, (Perkumpulan, rapat, perhimpunan, persekutuan, dan lain-lain); 2.mengatur, 3.Membimbing, 4.menggerakkan 5. menuntun; 6.mengarahkan, 6.melatih (mengajari, mendidik). dalam bahasa inggris Kepemimpinan di sebut Leadership.

Kepemimpinan terdapat beberapa definisi dan pengertian seperti yang di kemukakan oleh (Wahjosumidjo 1987:56) bahwa Kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang individu yang mencakup kepribadian atau karakter, potensi, serta kemampuan yang selalu Bersamaan dengan sebuah kedudukan atau posisi, sikap dan kepribadian pemimpin serta hubungan komunikasinya dengan orang-orang yang mengikutinya dan kondisi.

Selanjutnya menurut Young berpendapat (melalui buku Kartono, 2003:37) Kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk dominion yang berpatokan melalui daya dan kesanggupan pribadi yang bisa memberikan dorongan atau ajakan bagi orang lain agar bisa melakukan sesuatu yang bisa dan dapat di terima oleh kelompoknya, dan mempunyai keahlian (keterampilan) tersendiri secara spesifik dan tepat dalam situasi dan keadaan tertentu secara khusus. Selanjutnya menurut Stogdill berpendapat melalui Stonner, (2003:161) "Kepemimpinan adalah suatu cara, metode dalam mengarahkan dan memberikan pengaruh kegiatan atau tindakan

yang berhubungan dengan aktivitas kerja dan tim dalam suatu kelompok". Apa yang dikemukakan oleh Stogdill bisa artikan kepemimpinan sebagai usaha dalam mengarahkan dan mempengaruhi suatu kelompok. Organisasi Kepemimpinan diharapkan bisa berdampak untuk orang-orang yang dipimpinnya, sehingga mereka melakukan apa yang di harapkan seperti yang dimaksudkan oleh pemimpin tersebut. Pemimpin bukan hanya bertugas untuk memberikan perintah, namun memfasilitasi dan mendorong perbaikan kualitas yang dikerjakan oleh bawahan.

Dengan berbagai pendapat dan konsep yang telah di sampaikan diatas maka bisa dikatakan kepemimpinan sebagai usaha yang melekat pada diri seseorang atau individu untuk menggerakkan, memberikan pengaruh, mendorong, mengendalikan yang lainnya atau orang yang dipimpinnya agar melaksanakan pekerjaan dengan kesadarannya untuk memberikan manfaat dalam mewujudkan apa yang menjadi sasaran yang diinginkan selain itu kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan keterampilan. Pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus bisa mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain, terutama orang yang dipimpinnya supaya memberikan sumbangan yang riil bagi pencapaian tujuan organisasi melalui pikirannya dan tindakannya.

Sedangkan menurut Mulyasari (2003:107) memberikan pengertian kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mengarahkan, mempengaruhi, memberikan motivasi, sebagai fasilitator, menasehati, dan membina serta membimbing dengan harapan agar pengelolaan dapat berjalan agar tujuan administrasi secara efektif dan efisien dapat tercapai yang kesemuanya itu manusia sebagai media manajemen. dari pendapat Mulyasa bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kepemimpinan adalah upaya dalam memberikan spirit, motivasi, rasa aman, mutu prestasi dan manajemen kerja organisasi, serta kemampuan agar berperan dalam mensupport pribadi seseorang dan kelompok dalam pencapaian sasaran organisasi. hal yang lain juga adalah munculnya proses dan saling keterkaitan pimpinan dan para pengikutnya, munculnya pengaruh

atau dampak sosial, berperannya kepemimpinan di semua tingkatan organisasi, dan focus konsentrasi pada apa yang ingin di capai dalam tujuan.

Dari berbagai pandangan para ahli dan pakar yang telah disebutkan diatas penulis mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang menjadi sebuah instrument dan seni dalam mengerakkan orang lain, dengan cara memberi pengaruh, memberikan motivasi, membimbing, serta mengarahkan secara bersama-sama dalam mencapai sebuah tujuan.

3. Kepemimpinan Kristen

Kepemimpinan Kristen ialah Kepemimpinan yang di dasari dengan unsur untuk melayani bagi orang lain. Ini adalah kepemimpinan yang telah diberikan sepenuhnya kekuasaan kepada Yesus Kristus sebagai TeladanNya. Beberapa Pemimpin Kristen menunjukkan cara-cara yang maksimal dengan perhatian dan pengabdian tanpa pamrih, belas kasihan, keberanian, kepandaian, ketegasan sebagai ciri pemimpin terhormat dan Agung. Y. Gunawan, Pr (2014) berpendapat bahwa kepemimpinan Kristen ialah bentuk kepemimpinan yang umum. Bentuk kepemimpinan Kristen di dasari dengan prinsip dan nilai kasih ikhlas dan tulus yang berkelanjutan bagi sesama manusia dan alam semesta. Bentuk kepemimpinan Kristen juga diyakini dan diamini memiliki kekuatan (kemampuan), tuntunan atau petunjuk, keterlibatan otoritas kehendak Allah.

Kepemimpinan yang sejati dan benar ialah yang memprioritaskan atau mementingkan pengorbanan dan pelayanan dengan sikap bukan mengutamakan diri sendiri. Orang angkuh dan sombong serta memuji diri sendiri, tidak mencerminkan pemimpin yang sesuai dengan Tuhan Yesus, tidaklah perlu mepedulikan orang tersebut memegang power politik atau memiliki kewenangan kekuasaan yang hebat. Yesus Kristus dilihat sebagai pemimpin yang dijadikan sebagai panutan dan teladan utama dengan menyandang kepemimpinan dengan hati melayani. Pemimpin yang melihat Yesus Kristus sebagai Pemimpin dan panutan utama kepemimpinan yang

menyadong hati pelayanan dan memperlihatkan teladan sebagai bentuk pengorbanan.

4. Pengertian Istilah Kebijakan

Kata Kebijakan akan di mulai dengan istilah bijak. dalam Kamus Bahasa Indonesia yang di sempurnakan mendefinisikan kata *bijak* sebagai: 1. Senantiasa memakai akal sehat, mahir, pandai. 2. Bertutur kata dengan baik, fasih lidah. *kebijakan* :1. Kepintaran, keahlian; kebijaksanaan; 2 rangkaian asas dan konsep yang dijadikan point utama sebagai landasan rencana pada suatu pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan atau profesi pada kepemimpinan melalui cara bertindak dan bersikap dalam pemerintahan, organisasi dan yang lainnya. Menurut kamus Wikipedia Kebijakan ialah serangkaian asas dan konsep yang menjadi dasar dan pedoman rencana dalam melaksanakan pekerjaan pada kepemimpinan melalui, cara bagaimana bertindak yang pengistilahan ini sering digunakan pada sistim pemerintahan, pihak swasta, organisasi, Lembaga dan institusi negara.

Kebijakan sebagai patokan atau penuntun yang bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Kajian Kebijakan bisa mengaju pada cara penciptaan dan penyusunan beberapa keputusan penting bagi organisasi, diantaranya pemetaan berbagai macam alternatif seperti halnya program utama serta menentukan kebijakan yang sesuai dengan pengaruhnya. Kebijakan juga bisa dikatakan sebagai cara atau proses politik, administratif, manajemen dan finansial dalam rangka tercapainya tujuan eksplisit. Dari dua pengertian diatas kebijakan bisa disebutkan sebagai suatu penyampaian yang bisa menjadikan pegangan dan acuan umum terkait dengan penetapan atau penentuan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan Batasan bagi orang yang akan melakukan sesuatu. Selain itu Kebijakan bisa juga di jelaskan sebagai suatu keberlanjutan konsep dan pedoman dasar yang akan menjadi penuntut dan arahan dalam suatu kegiatan pekerjaan melalui tindakan seorang pemimpin. Pengambilan keputusan yang dillakukan secara matang dan hati-hati bagi orang yang memutuskan suatu kebijakan yang sifatnya final tanpa terjadi lagi secara rutin yang berhubungan dengan aturan-aturan keputusan

adalah merupakan bentuk kebijakan. Kebijakan bisa juga diartikan sebagai pola dasar suatu perencanaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan sepenuhnya yang di lakukan secara logis melalui cara yang optimal dalam kerangka mencari alternatif terbaik demi mencapai tujuan yang maksimal.

Hal lain dari pengertian kebijakan adalah hasil analisa yang sangat tajam dan mendalam bagi banyak alternatif yang bertujuan kepada putusan sebagai alternatif terbaik, landasan utama suatu kebijakan adalah akal sebagai suatu pertimbangan, namun sangat disadari juga bahwa pertimbangan akal manusia bukan semata-mata sebagai penentu tapi dari berbagai macam opsi lain dalam menentukan keputusan sebagai sebuah kebijakan. Pengertian lain dari Kebijakan publik adalah kesinambungan aktivitas kegiatan yang dilakukan dan dimunculkan oleh seorang pemimpin, kelompok ataupun pemerintah pada bagian tertentu yang memiliki kesulitan-kesulitan atau bisa juga di saat waktu kebijakan tersebut disampaikan supaya bisa bermanfaat dalam mengatasi pencapaian tujuan yang dimaksudkan, hal ini bisa diartikan bahwa keputusan tepat dan terbaik dari semua pilihan akal sebagai hal utama dari keputusan yang diambil. Ada juga konsep kebijakan yang memusatkan perhatian terhadap apa yang benar-benar dilaksanakan tidak pada apa yang maksudkan sebagai sebuah usulan, hal ini karna kebijakan merupakan proses implementasi yang terlaksana secara terencana dari seseorang bahkan beberapa orang dengan adanya masalah tertentu yang di hadapi.

Selain itu kebijakan juga sebagai usaha mencari solusi atas persoalan sosial untuk kepentingan asas keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan paling tidak memenuhi 4 hal pokok yakni; (1) taraf kehidupan masyarakat ada peningkatan, (2) Keadilan bisa terwujud dan kesempatan seseorang untuk berprestasi dan berkreasi, (3) diberikannya kesempatan berperan serta dalam masyarakat (hal ini terkait dengan pembahasan mengenai perencanaan atau rancangan, putusan dan implementasi (4) adanya peningkatan berkelanjutan yang pasti. Kebijakan atau dalam Bahasa Inggris di sebut "policy" dan jika

dilihat dari sejarah katanya dalam bahasa Yunani adalah "Polis" yang artinya kota (city), pengertian tersebut bisa artikan bahwa kebijakan berdasar bagi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dalam mengatur dan mengelolah serta mengarahkan aktivitas mereka. Pada konteks ini kebijakan berhubungan dengan konsep penataan pengaturan organisasi dan menjadi bentuk yang resmi dan diterima pemerintah atau lembaga untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dimengerti Kebijakan sebagai arahan dan aturan secara umum sebagai petunjuk dari apa yang telah dilakukan dan pedoman yang perlu diikuti oleh yang menjalankan kebijakan sebab hal ini penting bagi manajemen dalam organisasi, hal tersebut dapat dikatakan kebijakan sebagai instrument dalam memecahkan masalah (problem solving) atas apa yang telah terjadi. Bisa juga Kebijakan diartikan juga sebagai keputusan formal organisasi yang diatur secara tertulis yang bersifat mengikat dengan tujuan dalam masyarakat tercipta tatanan nilai baru dalam perilaku individu atau masyarakat yang menjadi bagian organisasi rujukan utamanya adalah kebijakan. Dalam bertindak kebijakan juga bisa menjadi pedoman. Dalam makna seperti ini kebijakan bisa berupa tekad bersama dalam organisasi sebagai suatu dasar pegangan dalam melakukan kegiatan tertentu yang menjadi petunjuk pada kegiatan tertentu yang menjadi program atau menjadi rencana sebuah kegiatan sehingga kebijakan juga biasa dipakai pada hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas.

Sementara dalam kamus politik kebijakan adalah rentetan ide dan gagasan serta dasar yang menjadi petunjuk rencana atau pondasi saat melakukan suatu aktivitas pekerjaan melalui kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan sebagai tujuan cita-cita dalam mencapai tujuan. Defenisi ini bisa mengandung arti bahwa kebijakan publik yang dimaksudkan berasal dari pemerintah atau pembuatnya adalah pemerintah bukan dari kalangan swasta dengan mengikat bagi masyarakat umum, tentunya yang membuat kebijakan itu adalah otoritas publik yang dipilih oleh lembaga pemerintah itu sendiri. Ada juga pendapat lain mengenai pengertian kebijakan yang menyatakan

bahwa sederetan kegiatan yang diputuskan dan dijalankan atau tidak dijalankan dengan tujuan dan orientasi pada kepentingan masyarakat secara umum yang dilaksanakan oleh pemerintah. melalui hal inilah ditegaskan bahwa kebijakan publik benar-benar dibuat untuk kepentingan publik yang merupakan tuntutan dari semua kelompok masyarakat. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan adalah sebagai sebuah pemahaman atau pernyataan dan bahkan pengertian yang mengantar pikiran untuk mengambil keputusan, namun tidak semua kebijakan menjadi pernyataan akan tetapi biasanya diimplikasikan dari apa yang dilakukan oleh manajer. Kebijakan yang menjadi tuntutan dalam berpikir menuju kepada pengambilan keputusan memiliki batas-batas tetap dan penuh komitmen oleh sebab itu kebijakan yang dihasilkan harus dalam cakupan lingkup yang sempit bahkan yang luas.

Selanjutnya (Muhadjir 2003:90) berpendapat jika kebijakan memiliki dua jenis yakni kebijakan yang sifatnya substantif dan kebijakan yang sifatnya implementatif. Kebijakan yang sifatnya substantif ialah pengambilan keputusan yang didasari atas pilihan alternatif sesuai dengan anggapan kita yang benar dan tepat dalam menyelesaikan persoalan. Kelanjutan kebijakan substantif ialah kebijakan implementatif yang mana kebijakan ini merupakan keputusan yang harus di usahakan untuk diimplementasikan sebagai keberlanjutan kebijakan substantif. Secara empiris atau yang sesuai dengan pendekatan yang di dasari pada pengalaman di lapangan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan perundang-undangan, pedoman dan program pada negara dianggap sebagai rangkaian cara yang di lakukan dan di kembangkan institusi negara atau pemerintah dengan maksud tertentu yang pelaksanaannya diikuti oleh individu atau kelompok beserta orang-orang yang terlibat didalamnya untuk menyelesaikan persoalan tertentu. Berpatokan definisi yang di sampaikan (Bridgman dan Davis 2004:7) mengemukakan jika kebijakan publik harus meliputi beberapa bagian, diantaranya: 1) bidang yang berkaitan dan menggambarkan pernyataan pada apa yang ingin di capai secara umum. 2) program tertentu yang lebih spesifik

dengan menggambarkan beberapa keputusan yang telah dipilih oleh pemerintah, (3) hal yang berkaitan dengan kewenangan meliputi perundang-undangan dan peraturan pemerintah (4) program, hal ini berkaitan dengan aktivitas rencana penggunaan potensi yang dimiliki Lembaga.

Dari sekian angapan dikemukakan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kebijakan ialah deretan rangkaian azas dan konsep yang menjadi pedoman dasar atas adanya persoalan sebagai suatu perencanaan untuk melakukan suatu kegiatan pekerjaan dalam kepemimpinan melalui suatu sikap pernyataan apa yang akan diinginkan, strategi yang akan dilakukan, di dalamnya mengandung prinsip, dan yang terakhir adalah di dalamnya mengandung maksud untuk mencari solusi atas persoalan sebagai garis besar untuk mengelolah sebagai cara untuk mendapatkan sasaran dan tujuan. Dengan istilah lain sebagai penuntut untuk mengambil sebuah keputusan bagi para penentu keputusan sehingga kebijakan publik pada kesudahannya berkaitan dengan tercapainya apa yang diinginkan pada publik, sehingga bisa diartikan bahwa kebijakan ialah kelengkapan seorang pemimpin dalam sebuah Lembaga atau organisasi yang telah diatur untuk merealisasikan beberapa hasil tertentu yang diinginkan oleh masyarakat umum (publik)

Sederhananya bisa disebutkan jika kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pimpinan negara sekaligus sebagai pemimpin pemerintah pada sebuah Lembaga instansi yang merupakan suatu strategi dalam mengatasi dan menyelesaikan sebuah persoalan yang ada dalam bentuk tindakan atau implementasi untuk mencapai suatu tujuan secara terstruktur yang didapatkan berdasarkan koridor hukum.

5. Pengertian Istilah Publik

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “publik” dapat diartikan sebagai semua atau orang banyak yang di dalamnya mencakup keseluruhan masyarakat. Begitu pun dengan The Lexicon Webster Dictionary melalui cetakan bukunya pada tahun 1978 (dalam buku

yang di publikasikan melalui kanal situs.web.id) istilah publik diambil dari Bahasa Inggris dengan kata "public", yang etimologinya berasal dari kata Latin "publicus" yakni for populus (asal kata populus) yang berarti "people". Lebih lanjut arti kata publik merujuk bukan pada perseorangan atau individu, akan tetapi melibatkan banyak orang yang ada di dalam satu negara, yang lazim disebut dengan bangsa, atau masyarakat. Menurut pendapat (Kriyantono 2012:47) publik adalah sekelompok orang yang berada di dalam suatu daerah dengan sebutan masyarakat umum dan mempunyai perhatian atau memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam sesuatu hal. Sementara Publik didefinisikan oleh (Cutlip¹, 2006:87) sebagai bagian sosial yang berperan dari berbagai macam pihak dengan aktif dan terlibat dalam mengenali beberapa persoalan untuk mencari solusinya secara bersama-sama. Menurut Mayor Polak dalam bukunya (Sunarjo 1984:19) kata publik menyamakan dengan khalayak ramai dengan definisi sebagai orang-orang yang memiliki minat sama bagi suatu masalah tertentu. Memiliki kesamaan minat bukan berarti memiliki kesamaan pendapat. Sehingga publik diartikan sebagai orang-orang yang memiliki keinginan dan rasa ketertarikan bagi suatu persoalan atau masalah dan berkeinginan mendapatkan solusi dengan melakukan sesuatu yg nyata dan real atau pasti. Ada juga pendapat yang mengemukakan publik secara umum memiliki makna sempit dan lebih khusus yang menggambarkan sekumpulan orang-orang yang termasuk dalam suatu golongan solidaritas tertentu.

Sementara ada pendapat lain mengatakan Publik sebagai gabungan beberapa orang yang berkaitan dengan satu masalah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat atau silang pendapat bagi masalah tersebut yang terjadi dan berusaha menanggulangi masalah tersebut dengan cara diskusi sebagai sebuah solusi. Lattimore and Baskin (2012:6) "The public is a very important group of people for our organization because directly or indirectly it can train and shape them". Mereka mengatakan Publik adalah golongan masyarakat yang sangat berarti untuk sebuah organisasi kami karena langsung maupun tidak langsung bisa mengemblem dan membentuk

mereka bagi tercapainya tujuan bersama. Yang menjadi pointnya di sini adalah bagaimana masyarakat umum dalam komunitas atau kelompok masyarakat tersebut fokus pada proses tujuan bersama. Hal yang hampir sama oleh Gruth and marsh dalam (Estawara 2012:49) memberikan definisi public sebagai: "A group of people who have desires with the same goal values in a particular situation to follow through as the most important thing". dalam arti bahwa Sekelompok orang yang memiliki keinginan dengan nilai tujuan yang sama pada situasi tertentu untuk menindak lanjutinya sebagai hal yang paling penting dan utama. Dari pernyataan ini dapat di jelaskan bahwa publik yang disebut sebagai kelompok masyarakat pada dasarnya memiliki nilai serta keinginan yang sama dengan yang harus mereka tindak lanjuti. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa Publik sebagai sejumlah besar orang yang saling tidak kenal namun memiliki fokus perhatian serta minat yang persis sama bagi suatu masalah. Dengan demikian menurut (Inu Kencana Syafie, 2006) publik adalah umum dengan pengertian hal yang bertalian dengan ketertarikan yang berupa untuk umum. Publik adalah masyarakat yang termasuk dari penduduk dan tidak penduduk. Yang termasuk penduduk adalah warga negara dan orang yang berkebangsaan luar atau warga negara asing, sementara publik yang disebut dengan negara adalah merupakan sebuah kelompok, organisasi yang berdasarkan dengan kedaerahan/kewilayahan, lembaga rakyat bagiannya meliputi masyarakat berdaulat, memiliki hukum dan kepemimpinan.

Dari serangkaian pendapat dan pandangan beberapa ahli diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa istilah publik bisa disebutkan dan diartikan sebagai umum, masyarakat secara keseluruhan atau negara. Contohnya milik umum, sarana dan fasilitas umum atau tempat umum, perusahaan umum dan lain sebagainya yang bersifat dan berkaitan dengan umum. Sementara yang disebutkan dengan "masyarakat" contohnya hubungan dalam masyarakat, pelayanan masyarakat, kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat dan sebagainya. Lalu selanjutnya pengertian "negara" contohnya otoritas negara, keuangan negara, gedung

negara, dan masih banyak yang lainnya, sehingga pengertian dan arti publik ialah sejumlah orang yang memiliki persamaan berpikir, bersikap, perasaan yang sama serta perbuatan yang baik dan benar berdasarkan dengan makna dan nilai yang mereka miliki yang disebut dengan norma. Selanjutnya "masyarakat" didefinisikan dalam kaca mata publik adalah keterkaitan dalam semua orang dalam suatu daerah atau negara yang berkaitan dengan kepentingan banyak orang melalui pelayanan masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya yang berkaitan dengan istilah publik pada "Negara", contohnya semua yang berhubungan dengan otoritas negara, fasilitas negara, keuangan negara dan lain-lainya. Sehingga dari kesemua diatas dapat disimpulkan bahwa publik adalah keseluruhan masyarakat yang memiliki persamaan dalam berpikir, bersikap, perasaan dan harapan melalui tindakan yang benar dan tepat serta baik sesuai dengan norma dan nilai yang melekat pada mereka.

Bab 3

Jenis-Jenis Kepemimpinan



Setiap orang dalam menjalankan tugas kepemimpinan pada organisasi atau suatu institusi serta Lembaga memiliki sifat perilaku yang tidak sama dengan para pemimpin lainnya, ada yang memiliki gaya kepemimpinan individualistik atau seratus persen diktator, ada juga yang mau bekerja sama, ada pemimpin yang terbuka didasari dengan cara berpikir rasional. Sifat dan Gaya seorang pemimpin menggambarkan tentang caranya dalam bertindak pada konteks lembaga organisasi yang dipimpinnya. Cara yang lebih memudahkan seorang pemimpin dalam mengetahui gaya kepemimpinannya ialah dengan mengetahui jenis organisasi atau situasi kondisi yang sama dengan gaya tertentu.

Dari setiap model kepemimpinan yang ada pada diri individu pemimpin, maka akan tercipta jenis-jenis kepemimpinan. Dari rangkaian itu maka penulis akan menjabarkan 9 (sembilan) tipe kepemimpinan yang sering kita jumpai dalam organisasi atau secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

A. Kepemimpinan Otoriter

Cara kepemimpinan otoriter ialah kepemimpinan yang fokus pada semua keputusan yang telah dihasilkan berasal dari diri sendiri pemimpin tersebut dengan sepenuhnya tanpa ada intervensi dari siapapun. Segala yang berhubungan dengan pembagian atau pengaturan tugas serta tanggung jawab dikendalikan langsung pemimpin tersebut, sementara anak buah yang dia pimpin hanya melaksanakan tugas aktivitas pekerjaan yang sudah diberikan. kepemimpinan yang bersifat otoriter, pemimpin yang berperan mengatur dan mengendalikan keseluruhan aspek kegiatan. Pemimpin menginformasikan mana-mana target diinginkan untuk diraih dan cara mana saja yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, baik yang merupakan target utama maupun target minornya. Pemimpin dengan tipe seperti ini juga memiliki peran sebagai pengawas bagi semua kegiatan bawahannya dan bisa memberikan solusi jika bawahannya mengalami persoalan.

Bisa juga dikatakan bahwa bawahannya tidak penting memikirkan apapun juga bawahan cukup menjalankan apa yang telah diputuskan dan ditetapkan pimpinan. Kelebihan dan keunggulan dari tipe kepemimpinan otoriter ini adalah terletak pada tercapainya prestasi, apapun dan siapa pun juga tidak mampu menghambat langkah dari pemimpin ini. Apabila pemimpin otoriter tersebut memutuskan dan menetapkan arah yang akan dicapai atau diinginkan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, maka itu sudah menjadi hal mutlak yang tidak bisa berubah dengan alasan apapun juga dan hasil yang ada. Setiap cara yang dilakukan dari pemimpin ini adalah penuh dengan kalkulasi yang sistematis. Yang menjadi kejam pada kepemimpinan ini adalah kelemahan dan kekurangan sebagai kepribadian dari pemimpin ini. Kepemimpinan otoriter sangat mendahulukan tujuan, sehingga cara sama sekali tidak pernah dipedulikan, mengorbankan atau dikorbankan adalah sudah menjadi bagian hidupnya. Cara kepemimpinan ini memiliki anggapan bahwa keseluruhan orang adalah musuh, tidak peduli orang-orang yang dipimpin atau partner kerjanya. Tipe kepemimpinan ini acap kali menekankan bagi bawahannya agar tidak mempersoalkan sesuatu yang telah menjadi masalah, terkadang kedisiplinan yang tidak logis atau menekankan bawahannya pencapaian target yang mustahil diraih. Metode kepemimpinan otoriter tersebut dapat efektif jika ada balance antara kedisiplinan yang dicanangkan bagi semua masyarakat yang mereka pimpin serta adanya kompromi dari masyarakat itu sendiri.

Sifat Kepemimpinan otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Selalu memberikan intruksi, bawahan selalu berprinsip jika dalam menjalankan tugas dan aktivitas selalu melakukan berdasarkan intruksi dari pimpinan. Dan begitu pun sebagai pemimpin selalu menjalankan tugas kepemimpinannya berdasarkan dengan intruksi bagi bawahannya untuk menjalankan tugas pekerjaannya secara benar dan baik.
- Selalu melakukan pengawasan, seorang pemimpin selalu mengawasi dan mengontrol bawahannya dalam melakukan

tugas pekerjaannya dan para bawahan selalu berhati-hati dan tidak keliru dalam menjalankan tugas dari atasan sesuai dengan intruksi dan merasa sadar diri bahwa mereka diawasi dan dikontrol oleh pimpinan secara ketat. Pemberlakuan sanksi dan hukum bagi para bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan di dapati ada kesalahan serta kekeliruan dalam menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan intruksi pimpinan.

- Tidak adanya kebebasan dalam berinisiatif, Pada kepemimpinan ini kreatifitas dan inisiatif dari bawahan tidak dipertimbangkan untuk digunakan namun dihiraukan dan bahkan sengaja dimatikan sebab dipandang dan dianggap akan menyimpang dan tidak sesuai dengan intruksi dan perintah dari pimpinan.
- Relasi pimpinan dan bawahan, Pemimpin memiliki anggapan bahwa pimpinan kurang mempedulikan relasi hubungan dengan orang-orang yang dia pimpin, Ataupun hubungan antar bawahannya.
- Kurang percaya bagi orang lain, salah satu kelemahan pada kepemimpinan ini adalah bawahannya memiliki anggapan bahwa atasan sebagai pimpinan kurang mempercayai orang lain sekalipun orang-rang yang masuk dalam bagian kelompok organisasinya

Dampak Kepemimpinan Otoriter

Dampak kepemimpinan Otoriter terbagi ke dalam dua kategori bagian yakni pengaruh positif dan pengaruh negatif.

1. Pengaruh Positif

- kebanyakan bawahan hanya bekerja dengan baik jika dibawah pemimpin yang disiplin atau keras.
- Pekerjaan yang dikerjakan di berikan batas waktu penyelesaian dan dipersentasikan secara jelas dan akurat kepada bawahan sehingga bawahan akan memahami tugas pekerjaannya masing-masing untuk diselesaikan.
- Memungkinkan untuk memperoleh keputusan dengan cepat.

- Bawahan yang inkompeten dapat bekerja dengan baik.
- Bawahan dengan sendirinya bisa fokus dan konsentrasi dalam penyelesaian tugas pekerjaannya yang di berikan tanpa kwatir dalam pengambilan keputusan yang susah atau rumit.

2. Pengaruh Negatif

- Bawahan melihat pemimpin sebagai orang yang terlalu memerintah, mengendalikan, dan diktatorial sehingga dapat mengarahkan bawahan pada perasaan kebencian atau sakit hati pada pimpinan.
- Pemimpin mengambil keputusan tanpa mendiskusikannya dengan kelompok sehingga bawahan kurang menyukainya karena mereka tidak dapat menyampaikan pendapatnya.
- Penyelesaian masalah sering kurang diselesaikan dengan solusi yang kreatif sehingga dapat mempengaruhi kinerja kelompok.

B. Kepemimpinan Birokrasi

Kepemimpinan birokrasi bisa diartikan sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi anggota organisasi atau staf lembaga institusi dalam penyelesaian suatu tugas pekerjaan dan menuntun atau membimbing jalannya organisasi atau institusi supaya semakin menunjukkan kesolitan, bersatu dan tenang dengan memberlakukan metode yang mengutamakan ide, gagasan etika, karakter, nilai, dan keterampilan serta pengetahuan.

Dari pendefinisian diatas bisa disebutkan bahwa sebagai seseorang pemimpin dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya hanya bisa memakai wewenangnya dengan melibatkan semua unsur dan elemen yang ada dalam organisasi atau lembaga tersebut dalam mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh pemimpin dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin dianggap berhasil dan mencapai tujuan jika memaksimalkan menggerakkan semua unsur yang ada di dalam organisasi atau suatu lembaga. Seorang pimpinan dapat mempengaruhi setiap anggota organisasi atau bawahan dalam

institusi lembaga untuk mendapatkan apa yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan, dilain hal pimpinan hanya bisa menyampaikan perintah. Yang masih banyak terjadi fenomena di Indonesia adalah pimpinan bukan pemimpin, kondisi seperti ini sering kita dapati dalam organisasi institusi birokrasi instansi pemerintahan. Fenomena seperti ini terjadi sebab sistem promosi kepegawaian administrasi birokrasi kita masih dibawah standar yang sesuai keahlian. Untuk itu tidak mengherankan jika dalam suatu lembaga institusi pemerintah didapatkan seorang pimpinan unit biasanya hanya melakukan perintah yang tidak terarah, tanpa mengetahui seharusnya bagaimana memimpin pegawainya. Pimpinan organisasi institusi seperti ini biasanya diangkat dan ditentukan dengan dasar senioritas, baik dari aspek kepegawaian ataupun aspek kepangkatan, bahkan terkadang tidak melalui standar seleksi kepemimpinan. Sehubungan dengan hal tersebut ini, pada akhirnya memunculkan empat tipe sifat pemimpin, yang lebih dominan jika kita melihat dari sisi kekuatan atau potensi yang ada pada pemimpin di saat dia memimpin dengan semangat untuk lebih meningkat yaitu, meliputi: (1).Pimpinan dengan tipe yang kurang bisa menjalankan kepemimpinan dan tidak memiliki keinginan untuk meningkat serta mengalami perkembangan, (2).Pimpinan dengan tipe yang kurang bisa menjalankan kepemimpinan namun ingin meningkat dan sukses dalam kepemimpinannya. (3).Pimpinan dengan tipe kepemimpinannya yang baik dan mampu memimpin namun tidak berkeinginan untuk sukses dan meningkat. (4).).Pimpinan dengan tipe kepemimpinannya yang baik dan mampu memimpin dan berkeinginan untuk sukses dan meningkat.

Kepemimpinan birokrasi ini lebih dominan diberlakukan di organisasi instansi pemerintah, organisasi yang bersifat keagamaan, institusi militer, institusi perawatan orang sakit, institusi perusahaan yang bergerak di bidang usaha dengan dengan skala nasional ataupun kecil. Pada kepemimpinan birokrasi tradisional memiliki sudut pandang positif yang berada pada sisi penghematan melalui penerapan kinerja pekerjaan sebab pengelompokan pekerjaan harus jelas berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab utama beserta

peran dari setiap bawahan dalam lembaga institusi, standarnisasi pedoman yang di jadikan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan komitmen tentang sistim peraturan sudah tertuang dalam penetapan lembaga atau institusi organisasi. Selain itu kepemimpinan birokrasi memberikan jaminan tercapainya target periode yang singkat atau mendesak dan adanya keringanan dalam melakukan kontrol serta pengelolaan bagi karyawan. Kepemimpinan dari bentuk birokrasi yang bersifat tradisional ini memiliki cara positif yang berada pada sisi efisiensi dalam menjalankan tanggung jawab kerja berdasarkan dengan tugas utama dan fungsi staf masing-masing dalam Lembaga organisasi dan institusi, sementara itu melalui kepemimpinan dengan sistim birokrasi juga memberikan jaminan bagi tercapainya target periode yang singkat atau mendesak dengan mendapatkan kemudahan dalam mengawasi dan pengaturan pegawai atau karyawan.

Kepemimpinan dengan model birokrasi ini juga memiliki sisi negatif yang mana kepemimpinannya memiliki arah tujuan sistim kepemimpinan yang tingkat kewewenangan dari yang paling bawah sampai yang paling atas secara berurutan atau hierarkis, dalam pengambilan keputusan pegawai atau karyawan tidak diberdayakan dan dikelompokkan dalam hall kewenangan. Dalam melakukan komunikasi antara atasan dan bawahan situasinya tidak terlalu baik disebabkan pimpinan yang memiliki sifat memerintah ke bawah dengan hubungan yang selalu formal antara atasan dan bawahan, sisi negatif berikut dari kepemimpinan ini ialah loyalitas yang biasanya terlalu berlebihan pada pimpinan. Kecendrungan negatif lain dari kepemimpinan ini ialah terkadang memunculkan kekuasaan hierarkis sehingga keseringan berubah menjadi kepemimpinan feodal yang dengan kata lain bersifat tradisional dan perilakunya ikut berubah bagaikan seorang pangeran yang akan menuntut loyalitas penuh dari anak buahnya atau bawahannya, sisi negatif berikutnya adalah semakin berkembangnya sistim nepotisme yang melahirkan politik kekuasaan.

Berdasarkan uraian dari atas dengan beberapa konsep baik secara teori ataupun empirik dan referensi dari berbagai sumber, maka ada beberapa karakteristik dalam kepemimpinan jenis birokrasi seperti yang ada Berikut ini:

- *Berdasarkan negoisasi atau transaksi.* Pada Kepemimpinan dengan sifat birokrasi ini melakukan tindakan berdasarkan dengan transaksi yang kata lain jabatan dan kinerja yang ditukarkan, pekerjaan dan gaji, kerja keras serta bonus.
- *Aturan yang jelas.* Aturan dan pedoman pelaksanaan dalam menjalankan pekerjaan dan tugas dibuat dengan jelas dan baik serta diputuskan secara tetap agar di jalankan oleh bawahan untuk ditaati.
- *Berorientasi pada kontroling atau pengawasan.* Pada kepemimpinan ini membantu dan mengawasi tugas pekerjaan yang sementara dijalankan untuk mencapai tujuan periode yang pendek dilakukan sangat ketat sesuai dengan ketetapan yang telah di tetapkan.
- *Kontra perubahan.* karakteristik kepemimpinan seperti ini menolak atau tidak menginginkan perubahan yang selalu muncul dari eksternal organisasi dengan kekuatiran bakal mengganggu sistim bentuk aturan oraganisasi atau institusi Lembaga yang sudah di putuskan.
- *Orientas jabatan dan kekuasaan.* Karakteristik pada jenis kepemimpinan birokrasi lebih menginginkan berkembangnya kebiasaan yang berioentasi pada terciptanya pencapaian kekuasaan, secara hirarki (jenjang) bawahan memiliki loyalitas bagi pimpinan dari bawah ke atas.
- *berpusat pada pekerjaan.* Pada Karakteristik kepemimpinan birokrasi ini menginginkan agar pegawai atau bawahannya fokus dalam tugas pekerjaan, sehingga bawahan dalam mengembangkan diri tidak memiliki kesempatan.
- *Kewenangan Pimpinan mutlak.* Karakteristik kepemimpinan ini kewenangan dalam menentukan dan pengambilan keputusan mutlak pada atasan, sehingga bawahan tidak diberdayakan.

- *Pembatasan kreatifitas pegawai.* Karakteristik kepemimpinan birokrasi ini bawahannya diatur oleh pimpinannya dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehingga bawahan tersebut tidak bisa mengembangkan inovasi dan kreativitas.
- *Kerja sendiri.* Kepemimpinan ini cenderung Kebersamaan dalam bekerja diantara bawahan tidak diinginkan sehingga yang terjadi adalah persaingan tidak sehat serta munculnya saling mencurigai diantara sesamanya bawahan.
- *Tidak adanya hubungan yang baik dalam organisasi.* Yang sering menonjol dalam kepemimpinan ini adalah tingkatan kekuasaan, hubungan Formal, komunikasi dari bawah keatas, dan tidak adanya kerja sama antar bawahan mengakibatkan ketidak harmonisasi yang baik dalam organisasi.

C. Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan partisipatif ialah pemimpin yang mengakomodir dan memberikan kesempatan bagi bawahan agar bisa diikut sertakan menentukan dan ikut serta dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam kepemimpinan partisipatif ini ada aspek-aspek yang selalu ada, aspek itu mencakup konsultasi (diskusi), keputusan diambil secara bersama, membagi kekuasaan, pengalihan tanggung jawab dan pengelolaan yang demokratis. tolak ukur langsung dengan adanya kepemimpinan partisipatif ini berada pada perilaku pengikut-pengikutnya dengan berdasar pada pemikiran karyawan atau bawahan terhadap gaya kepemimpinan yang dipakai. Kepemimpinan partisipatif diartikan sebagai kesamaan sharing dan kekuatan dalam memecahkan masalah bersama anak buah yang dia pimpin dengan mengadakan konsultasi kepada bawahan sebelum mengambil suatu keputusan. Kepemimpinan partisipatif berkaitan langsung dengan menggunakan beberapa prosedur putusan yang menyetujui pengaruh anak buah dalam mempengaruhi keputusan pimpinan. kepemimpinan partisipatif ialah termasuk dari beberapa model kepemimpinan yang melekat pada diri seorang pimpinan. salah satu yang melekat pada kepemimpinan partisipatif adalah menekankan pada kepercayaan dan

kredibilitas yang kemudian memberikan motivasi bagi bawahannya dengan memberikan kesempatan dan peran mereka pada pengambilan keputusan. Untuk itu kepemimpinan partisipatif ialah kepemimpinan yang memberikan kesempatan kepada bawahan secara signifikan agar berperan dalam menjalankan kegiatan proses pengambilan keputusan.

Akan halnya definisi kepemimpinan partisipatif memiliki empat hal penting yang meliputi:

- Mempertahankan dan mengembangkan interaksi yang aktif.
- Selalu bertukar informasi dan komunikasi.
- Melahirkan putusan sebagai ketetapan.
- Berpengaruh bagi yang lainnya.

Tipe kepemimpinan Partisipatif ini kian condong dengan mengutamakan pada banyaknya dukungan dalam memutuskan sebuah keputusan atau kebijakan tetapi tidak banyak arahan. Model ini juga memiliki dukungan besar dari pemimpin akan tetapi sedikit memberikan pengarahan atau petunjuk. Dalam hal ini Pengarahan yang dimaksudkan adalah "partisipatif" sebab dengan situasi kontrol atas pencarian solusi dalam sebuah persoalan dan keputusan yang telah diambil dilakukan secara bergantian. Dalam pelaksanaan model kepemimpinan ini atasan dan bawahannya saling berdiskusi dengan bertukar pikiran mengenai ide dan konsep dalam mencari sebuah solusi atas persoalan dalam pengambilan putusan sebagai suatu ketetapan. Dalam menjalankan roda organisasi kepemimpinan ini lebih condong dan keseringan menggunakan gaya dengan berorientasi untuk memberikan motivasi yang lebih kepada bawahannya di bandingkan memberikan pengawasan ke mereka dengan ketat. Para bawahan diberikan peluang oleh pimpinannya untuk mengambil peran secara partisipatif dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan ini juga menumbuhkan kembangkan situasi dan suasana yang akrab bersahabat serta menciptakan suasana saling menghormati dan percaya dengan para bawahannya dalam suatu organisasi.

Ada empat Manfaat positif dari kepemimpinan partisipatif adalah seperti berikut ini:

- *kualitas pengambilan keputusan.* Kepemimpinan ini sering menyertakan dan melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan karna sangat di sadari akan memberikan kualitas pada pengambilan keputusan karna dari bawahanlah mendapatkan data dan informasi pengetahuan yang mencukupi yang belum di dapatkan oleh pimpinannya serta ada kemauan kerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik terhadap persoalan dan dan permasalahan yang ada. Hal Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa ahli yang penulis telah simpulkan bahwa komunikasi dan partisipasi setiap personel atau bawahan yang ada di sebuah institusi organisasi bisa mendorong peningkatan mutu kualitas untuk mengambil sebuah putusan yang akan dijadikan kesimpulan pada tercapainya tujuan institusi organisasi.
- *Respon terhadap keputusan.* ialah pemikiran orang lain bisa menjadi rujukan untuk dipertimbangkan dalam proses penentuan dan penetapan keputusan sehingga orang lain (bawahan tersebut) merasa bahwa mereka diterima atau direspon pemikirannya dalam pengambilan keputusan yang telah ditetapkan sehingga bisa berpengaruh terhadap kinerjanya dalam meningkatkan motivasi kerjanya secara baik. Karna pemikiran dari orang lain inilah bisa direspon atau diterima dalam pengambilan keputusan sehingga point ini disebut dengan Respon terhadap keputusan.
- *Proses pengambilan putusan yang memuaskan.* Ada beberapa penemuan oleh para ahli berpendapat jika seseorang diberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapatnya maka mereka tarasa terhormat dan bangga akan kesempatan itu karna diikut sertakan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga orang tersebut merasa puas dan senang atas keterlibatannya dalam mempengaruhi keputusan.

- Keterampilan/Keahlian Partisipan yang dikembangkan. Keterlibatan orang lain sebagai partisipan dalam mempengaruhi dan membuat keputusan yang penuh dengan masalah akan berdampak besar pada pengembangan keahlian atau keterampilan dan keyakinan dari partisipan itu sendiri.

Seberapa besar keuntungan yang didapatkan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan dan peran partisipan pada proses pengidentifikasi sumber persoalan atau masalah, mendapatkan solusi sebagai jalan keluar yang memungkinkan, melihat kembali penyelesaian masalah sebagai solusi yang tepat dan terbaik, serta merencanakan cara pengemlementasian.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa kepemimpinan dengan jenis Partisipatif berusaha mengoptimalkan pemahaman bawahan terhadap sebuah persoalan dan berusaha meyakinkan bawahan untuk mendapatkan pandangan yang baru. Dengan model kepemimpinan ini maka pimpinan akan secara terus menerus menumbuhkan semangat kreatif pada pegawai dan mengarahkan untuk mendapatkan cara-cara yang lain dan terkini atas persoalan-persoalan yang sudah ada. Pegawai dalam hal ini bawahan atau staf didorong agar berpikir atas relevansi cara, bentuk organisasi yang ada, harapan dan sistem nilai. Bawahan diharapkan untuk melaksanakan inovasi agar menyelesaikan permasalahan dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan diri, mendorong untuk menentukan target yang menantang sebagai tujuan. Bisa juga dikatakan bahwa bawahan diberi peluang dalam mengepresikan dan menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya melalui tanggung jawab yang ada dihadapannya.

Kepemimpinan jenis partisipatif memiliki sikap kepedulian yang besar bagi bawahannya yang sifatnya pribadi dengan arti pimpinan dapat memahami dan peduli bagi kebutuhan dan masalah setiap bawahannya. Hal seperti ini bisa terlihat dari pikiran bawahan yang beranggapan bahwa pemimpinnya dapat memahami pribadi dirinya. Setiap bawahan merasa selalu dekat dengan atasannya dan merasa diberikan perhatian khusus. Perhatian kepada pribadi bawahan bisa

berupa kegiatan pembimbingan dan monitoring yang tidak lain adalah proses pemberian masukan yang selalu berkesinambungan dan berkaitan misi organisasi lembaga untuk kebutuhan pribadi bawahan. Oleh sebab itu bawahan akan semakin menyadari bahwa sangatlah penting untuk berusaha kerja seoptimal mungkin dengan dasar professional karna merasa berkaitan langsung apa yang menjadi kebutuhan mereka sendiri sebagai bawahan. Anak buah akan terasa respek terhadap pimpinannya yang memiliki kompeten jika dibandingkan pemimpin lain yang lebih mengutamakan dimensi struktural.

Sehingga semua uraian dari atas bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan dengan jenis partisipatif ialah pemimpin dengan kemampuannya terlibat langsung secara pribadi dan melibatkan orang lain, termasuk bawahannya serta bekerjasama dalam organisasi pada pengambilan keputusan.

D. Kepemimpinan Delegatif

Sebagai ciri dari Kepemimpinan delegatif adalah pemimpin kurang memberikan bimbingan dan arahan bagi bawahannya dalam penyelesaian sebuah masalah dalam organisasi yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, namun yang ada adalah membiarkan bawahannya dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri, karna jenis kepemimpinan ini merasa bahwa bawahannya sanggup menyelesaikannya.

Jenis kepemimpinan ini tepat sekali terealisasi apabila bawahan memiliki potensi dan semangat yang besar dalam melaksanakan tugas kerjanya dalam organisasi sehingga pemimpin tidak terlalu banyak menyampaikan perintah kerja bagi pegawainya yang dibawah, malahan pimpinan makin dominan membiarkan bawahannya untuk melaksanakan pekerjaannya dalam organisasi sampai mendapatkan hasil. Selain itu kepemimpinan ini memberikan wewenang secara lengkap kepada bawahannya, dengan pengertian bahwa kewajiban menjalankan tanggung jawab pekerjaan dilimpahkan terhadap bawahan dengan harapan dan keinginan dari pimpinan agar

bawahannya mampu mengendalikan dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang telah dilimpahkan baginya. Pada konteks ini anak buah diharapkan memiliki kematangan (kemampuan) dalam pekerjaan dan kemauan (keinginan) yang besar. kematangan dalam pekerjaan berkaitan dengan kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakan suatu tugas pekerjaan berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan, sementara keinginan (kemauan) yang besar berkaitan dengan semangat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan erat dengan keterikatan tanggung jawab dan rasa yakin. Kepemimpinan delegatif juga bisa diartikan bahwa seorang pemimpin yang memberikan wewenang pada bawahannya yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas kegiatan menggantikan atasannya untuk sementara waktu disebabkan karna pimpinannya tidak dapat melakukannya karna berbagai macam kendala. Ada juga pendapat lain mengenai Kepemimpinan delegatif ini sebagai suatu gaya kepemimpinan yang pemimpinnya tidak terlalu mau mencampuri teknis pekerjaannya hanya memberikan arahan bagi bawahannya dan dianggap mampu untuk mengidentifikasi masalah serta memiliki tanggung jawab dalam mengatasi dan menyelesaikan tanggung jawab itu secara tuntas untuk mendapatkan hasil yang akan diserahkan kepada pimpinan. Bawahan diberikan kepercayaan dalam melaksanakan sendiri rencana tersebut, baik berkaitan dengan penetapan prosedur maupun teknis kegiatan. Langkah ini penting bagi pemimpin untuk diambil mengingat bawahan yang diberikan wewenang sudah memiliki tingkat kematangan dan kemampuan secara operasional kegiatan maupun semangat juangnya yang tinggi. Ada juga kepemimpinan delegatif ini dicirikan dari perilaku pemimpinnya yang kurang dalam memberikan support dan kurang dalam memberikan arahan, namun dalam melaksanakan tugas dan pendelegasian keputusan diberikan pada bawahan. Kepemimpinan dengan dukungan yang sedikit dan arahan yang sedikit bagi bawahan menjadi rujukan delegasi karna pimpinan membicarakan persoalan dalam bentuk diskusi dengan bawahan sampai masalah tersebut bisa dapatkan titik temunya yang kemudian berkelanjutan ke proses pengambilan keputusan yang secara keseluruhan didelegasikan

kepada bawahan. Gaya kepemimpinan delegatif ini adalah kematangan tingkat tinggi dan mempunyai suatu keyakinan dalam memikul dan mengemban tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang yang akan mendapatkan delegasi.

Adapun ciri kepemimpinan delegatif yaitu:

- Menyampaikan arahan jika dianggap diperlukan saja.
- Motivasi dianggap tidak perlu lagi diberikan.
- Penyerahan tanggungjawab diberikan bagi bawahan adalah untuk menangani dan menyelesaikan serta menuntaskan tugas.
- kematangan bawahan sudah tingkat tinggi.

E. Kepemimpinan Transaksional

Defenisi dari Kepemimpinan jenis Transaksional ialah suatu kepemimpinan dengan pola mendukung institusi organisasi dalam pencapaian target yang lebih efisien sesuai dengan konsep yang telah ada dengan cara mengkorelasikan kepuasan kerja bawahan atas penilaian dengan memberikan penghargaan terhadap prestasi kerjanya yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki berdasarkan hasil kerja dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai tujuan organisasi. Pemberian apresiasi atau penghargaan kepada bawahan atas tugas pekerjaannya yang diberengi dengan kontrol dan bimbingan dari pimpinan agar memperjelas tugas masing-masing menuju pada ketetapan tujuan organisasi adalah merupakan jenis kepemimpinan transaksional.

Pada jenis kepemimpinan ini, pemimpin perhatiannya fokus pada pertukaran atau transaksi secara pribadi antara atasan dengan bawahan, yang didasari dengan kesepakatan yang berkaitan dengan pengelompokkan tujuan, tugas pekerjaan, standar pekerjaan, dan jenis penghargaan yang akan didapatkan. Hal ini dengan jelas tergambar bahwa penghargaan sebagai bagian dari transaksi merupakan hal yang paling penting dan utama dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan sasaran

pencapaian organisasi. Transaksi seperti ini didasari atas serangkaian kesepakatan yang terjalin secara bersama-sama oleh pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya. Sebagai Karakter kepemimpinan transaksional ialah penghargaan kontingen dan pengelolaan dengan pengecualian. Pada penghargaan kontingen bisa berupa apresiasi dari atasan kepada bawahan karena tugas pekerjaan telah selesai dilakukan, sehingga diberikan bonus atau ditambahkannya penghasilan dan fasilitas. Bentuk seperti ini sebagai pemberian penghargaan ataupun pujian bagi bawahan yang telah berupaya dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, atasan bertransaksi pada bawahannya dengan menitik beratkan melalui aspek kesalahan yang dibuat oleh bawahan sehingga atasan untuk sementara waktu tidak mengambil keputusan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya sesuatu hal yang bisa berpengaruh terhadap kesalahan yang terjadi.

Ada beberapa faktor yang ada pada kepemimpinan Transaksional seperti berikut ini:

1. Imbalan

Jika bawahan dalam melakukan dan melaksanakan pekerjaan mementingkan keuntungan perusahaan, maka bagi mereka akan diberikan imbalan yang sesuai dan berupa penghargaan dari atasan dalam bentuk bonus atau pemberian fasilitas dan tambahan penghasilan.

Faktor imbalan bisa dijabarkan seperti dibawah ini :

- Atasan atau pimpinan menyampaikan kepada bawahan apa yang seharusnya diperbuat jika mengharapkan atau mendapatkan prestasi dan penghargaan. Pimpinan memberikan nilai yang bagus apabila karyawan bisa merampungkan tugas dengan bagus dan maksimal.
- Atasan akan memberikan sebuah keyakinan bagi bawahan dalam pemenuhan kebutuhan dan keperluan bawahan sebagai imbalan.

2. Pengelolaan dengan Pengecualian.

Menekankan peran pengelolaan sebagai kontrol. Atasan hanya mengamati dan melakukan evaluasi jika terjadi sesuatu kesalahan untuk dikoreksi, atasan akan mengintervensi bawahannya bila standar kerja tidak bisa dipenuhi oleh pegawai bawahannya. Praktek pengelolaan dengan pengecualian, ditindaklanjuti dengan cara memberikan pujian kepada bawahan agar menyenangkan hatinya disertai dengan hadiah bila laporan kerja yang dibuat sesuai standar.

Faktor Pengelolaan dengan pengecualian bisa jabarkan seperti dibawah ini:

- Pemimpin memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang tidak tercapai dan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan standar.
- Apabila segala sesuatunya efektif berjalan dengan semestinya dan baik, maka pimpinan tidak merubah apapun juga.
- Pimpinan menginformasikan mengenai sesuatu yang seharusnya dilakukan bawahan dan harus diketahui apa yang dikerjakan.

3. Pembiaran

Pemimpin melakukan pembiaran kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya tanpa pengawasan dari pemimpin itu sendiri. Kualitas dan efektivitas kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab bawahannya.

Faktor Pembiaran dijabarkan seperti dibawah ini:

- Pemimpin sebagai atasan melakukan pembiaran bagi pegawainya dalam melaksanakan tugas pekerjaan seperti cara yang sama dengan biasanya.
- Dalam mendorong inisiatif pegawai pimpinan tidak melakukannya.
- Pimpinan sebagai atasan tidak bertanya bagi pegawainya lebih dari inti persoalan dalam melakukan pekerjaan.

Karakter diatas menggambarkan bahwa hakikat kepemimpinan transaksional ialah proses transaksi timbal balik antara atasan sebagai

pemimpin dan pegawai sebagai bawahan. Pemimpin dengan gaya transaksional sudah mengenal keinginan khusus anggotanya serta memberikan beberapa hal yang bisa memenuhi keinginan tersebut, namun bawahan harus menjalankan tugas khusus agar tercapai tujuan tertentu sebagai gantinya. Maka dengan itu bawahan menerima penghargaan atas hasil pekerjaannya dengan baik, sementara pimpinan mendapatkan keuntungan dari tugas yang telah selesai. Transaksi tersebut mencakup keadaan yang bersifat khusus, bisa diperhitungkan, dan nyata. Kepemimpinan transaksional berfokus melalui usaha-usaha memelihara kelancaran dan efisiensi institusi organisasi. Pemimpin seperti demikian baik sebagai fungsi pengolahan alami misalnya perencanaan dan pembuatan anggaran serta secara keseluruhan berfokus pada dimensi-dimensi non personal dari kemampuan kerja.

F. Kepemimpinan Transformasi

Transformasi adalah sebuah istilah kata yang memiliki arti “merubah sesuatu”. Kata merubah ini dapat diartikan lagi sebagai sesuatu pergeseran bentuk dan wujud serta sistem yang terjadi menjadi bentuk, wujud dan sistem yang baru dari yang ada sebelumnya. Kata transformasi ini juga bisa diartikan dengan perubahan sesuatu yang terjadi pada sesuatu atau suatu objek dari yang ada sebelumnya menjadi hal yang baru. Perubahan yang dimaksudkan juga bisa terjadi pada perubahan sistem pada suatu objek dalam ekosistem atau lingkup tertentu seperti perubahan pada lingkup organisasi atau institusi. Kali ini transformasi yang akan dibahas adalah transformasi pada kepemimpinan yang menjadi salah satu bagian dari jenis kepemimpinan. Konsep ini biasa dirujuk sebagai jenis kepemimpinan yang efektif, dengan susunan berdasarkan sudut pandang hubungan pemimpin pengikut. Kepemimpinan ini ialah sebagai proses pemimpin mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan kematangan semangat bagi bawahannya serta mendorong agar melebihi minatnya mereka sendiri demi mencapai manfaat organisasi. Kepemimpinan ini merupakan jenis

kepemimpinan yang tergolong baru dan dianggap berhasil serta berkontribusi dalam mendorong terjadinya sebuah perubahan yang lebih baik, terutama saat kondisi terjadi perubahan sistem dalam lingkungan suatu organisasi. Jenis Kepemimpinan ini pada dasarnya menitik beratkan bagi pemimpin bahwa betapa penting memberikan motivasi bagi bawahannya agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melebihi atas apa yang telah di targetkan oleh pimpinan dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan dengan jenis tipe ini diharapkan bisa mendefinisikan, mengkomunikasikan, menyampaikan visi organisasi dengan baik sehingga bawahannya bisa mengakui dan menerima kredibilitas pimpinannya itu sendiri. Dalam Kepemimpinan transformasional harus juga memiliki kompetensi untuk menyamakan atau menyatukan visi organisasi kedepan dengan bawahannya, serta menaikkan keperluan bawahan lebih tinggi lagi dari yang mereka perlukan sebelumnya. Untuk mengetahui pemimpin tersebut adalah tipe kepemimpinan transformasional bisa diukur dan dilihat dari tingkat kepercayaan, keaungan, kepatuhan, kesabaran, dan memiliki rasa hormat dan menghargai bagi bawahannya sehingga bawahan tersebut akan termotivasi dan lebih giat untuk melaksanakan tanggung jawabnya lagi dengan baik supaya tujuan organisasi bisa tercapai sesuai yang diharapkan.

Karakter dari kepemimpinan transformasi adalah sebagai berikut:

- Memiliki naluri dan tujuan yang besar kedepan
- Memposisikan dirinya menjadi lokomotif untuk berubah
- Memiliki keberanian dalam mengambil resiko disertai pertimbangan matang
- Memberikan kesadaran kepada orang-orang yang dia pimpin untuk memikirkan pentingnya hasil akhir dari apa yang telah dikerjakan.
- Percaya sepenuhnya atas potensi kemampuan yang dimiliki bawahan.
- Terbuka dan Bebas untuk hal yang baru.

- Memiliki tekad dan usaha dalam meningkatkan semangat yang lebih lagi daripada sekedar semangat yang sifatnya materi.
- Memiliki kemauan tekad agar bawahan mendahulukan kepentingan institusi organisasi di atas kepentingan golongan dan pribadi.
- Mampu menjewantakan inti nilai budaya dalam membimbing kebiasaan bawahan mereka.

Yang menjadi perhatian utama dari kepemimpinan transformasi ini ialah komitmen tanggung jawab dan kemampuan kerja bawahan dalam institusi yang dianggap bisa menghasilkan produktifitas secara lebih baik dan meningkat agar pendapatan bisa tercapai sesuai dengan target dan keinginan.

Kelebihan dan keunggulan dari kepemimpinan transformasional:

- Dalam operasional tidak membutuhkan biaya yang besar.
- Komitmen yang ada bagi bawahan bersifat mengikat.
- Bisa memberdayakan potensi bawahan.
- Bisa meningkatkan hubungan antar pribadi.

Kekurangan dan kelemahan Kepemimpinan transformasional:

- Tidak efektif dan maksimal dalam kondisi bawahan memiliki pengalaman dan keterampilan yang minim sebagai kebutuhan dalam menyelesaikan tugas (minimnya motivasi) tanpa adanya imbalan (penghargaan) langsung dan nyata.
- Hasil dari kepemimpinan ini membutuhkan waktu yang lama. Hasil kepemimpinan transformasional tergolong lama karena pemimpin harus membutuhkan waktu dan energi dalam meyakinkan bawahan untuk menyatukan visi bersama.
- Dalam kepemimpinan transformasional memiliki teori yang menjelaskan "apa" namun tidak mempunyai rincian tentang "bagaimana". Tidak banyak informasi yang diberikan atas bagaimana seorang pemimpin harus bisa menyampaikan visi dan memberdayakan bawahan.

- Sering adanya penyalagunaan. Kepemimpinan transformasi-onal dominan lebih kuat namun terkadang tidak dipergunakan dalam kaca mata moralitas.

Pusat kepemimpinan transformasional ialah berada pada kemampuan kerja dan komitmen bawahan dengan melihat kinerjanya yang berkembang besar untuk mendapatkan hasil produktivitas yang besar juga sesuai dengan harapan institusi organisasi tersebut.

G. Kepemimpinan Melayani (Servant)

Istilah kepemimpinan melayani dimulai oleh karya tulis Greenleaf, yaitu adanya peralihan radikal pada dunia industri mengenai pemimpin yang memiliki otoritas berkuasa penuh sebagai pahlawan yang serba bisa dan tahu. Sementara Greenleaf (1977), melalui buku yang dia tulis dengan judul *The Servant as Leader* menyampaikan jika pimpinan yang hebat adalah sesungguhnya pemimpin yang dipandang sebagai pelayan”.

Pemikiran Greenleaf ini terkait kepemimpinan melayani didasari pada berbagai perubahan yang ada di dalam masyarakat, dimana masyarakat semakin mempersoalkan otoritas dan kekuasaan, serta bermunculannya hubungan kerja yang baik dan saling mendukung antara pimpinan dan bawahan sebagai salah satu cara yang sangat baik dalam sebuah organisasi. Yang menjadi perhatian pada kepemimpinan melayani adalah berfokus pada sudut pandang perilaku kepemimpinan dengan menunjukkan konsep kekuatan dan janji yang ditawarkan. Pelayanan sebagai karakteristik paling penting dari kepemimpinan melayani yang merupakan kepemimpinan sejati. Para peneliti-peneliti yang fokus pada kepemimpinan menetapkan bahwa yang terpenting bagi pemimpin adalah sifat-sifat dan kepribadian pemimpin. mereka mengatakan bahwa jika seorang pemimpin di lahirkan dengan berbagai macam karakter yang melekat pada dirinya namun yang menentukan seseorang untuk menjadi pemimpin ialah kepribadiannya, sekalipun berupaya untuk belajar sesuai dengan kemampuannya tapi kalau tidak didukung oleh kepribadian yang baik maka tentulah tidak akan bisa menjadi

pemimpin. Kesimpulan dari beberapa orang yang melakukan penelitian mengisyaratkan sebaiknya kepemimpinan ini bisa terbentuk dan tercipta secara alami melalui kepelatihan atau pengalaman yang didapat melalui waktu yang telah ditentukan dalam periode itu. Dari berbagai pendapat para peneliti, penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya seorang pemimpin tidak dilahirkan untuk menjadi pemimpin akan tetapi belajar disertai kerja keras dengan proses waktu serta lingkungan yang tepat menjadikan seorang pemimpin. itu berarti bahwa perilaku bisa terbentuk dari proses belajar dan dikembangkan terus menerus yang disertai keinginan yang besar dan kuat. Dari beberapa peneliti mendapatkan hasil bahwa kepemimpinan melayani bisa berhasil karna memiliki keinginan yang kuat untuk dibimbing pada arah kehidupannya yang jelas dan dijadikan sebagai sumber kekuatan dan energi serta petunjuk bagi seseorang untuk menjadi pemimpin dengan proses yang alami.

Kepemimpinan melayani memiliki karakteristik seperti berikut dibawah ini:

- *Mendengarkan.* Pada Kepemimpinan Melayani yang penting diperhatikan adalah mendengarkan bawahannya dengan tujuan mengidentifikasi dan membantu untuk memperjelas keinginan masyarakat pada suatu tempat atau kelompok.
- *Empati.* Pada Kepemimpinan ini berupaya untuk memahami dan memiliki empati kepada bawahannya
- *Penyembuhan.* Kepemimpinan melayani mampu menciptakan kesembuhan secara emosional dan berdamai dengan dirinya sendiri, atau membangun relasi yang baik dengan bawahannya, karna dari hubungan baiklah akan menjadi kekuatan dalam membangun transformasi dan integritas.
- *Kesadaran.* Kepemimpinan ini harus memiliki kesadaran terhadap berita-berita yang berkembang dengan melibatkan dan mengedepankan nilai-nilai sopan santun, dan norma kekuasaan serta selalu berpandangan pada sesuatu dengan mengedepankan keadaan yang stabil secara menyeluruh

- *Pendekatan persuasif.* pada kepemimpinan persuasif ini pemimpinnya berusaha melayani dengan meyakinkan orang-orang yang dia pimpin dari pada memaksa dengan kepatuhan. Cara inilah yang membedakan dengan kepemimpinan otoriter.
- *Konseptualisasi.* Kepemimpinan ini berusaha berpikir jangka panjang dengan kemampuannya dan memiliki sejumlah konsep basis yang luas.
- *Kejelian.* Kejelian dan ketelitian sangat diperlukan dalam kepemimpinan melayani untuk memahami dan mempelajari setiap kejadian yang terjadi di masa lalu, saat ini dan sebagai pijakan untuk keputusan yang akan datang.
- *Keterbukaan.* Dalam membangun kepercayaan dengan orang lain atau bawahan dibutuhkan keterbukaan dari seorang pemimpin.
- *Komitmen untuk Pertumbuhan.* Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap peningkatan profesionalisme bawahan serta organisasi atau institusi.
- *Mendirikan dan mengembangkan Komunitas.* Hal ini dimaksudkan agar mampu memecahkan masalah yang ada dan sebagai salah satu dianggap penyelesaiannya adalah membangun komunitas sebagai sebuah solusi.

Ciri-ciri Kepemimpinan Melayani.

- *Kasih Sayang.* Ciri khas pemimpin melayani adalah memiliki cinta dan kasih sayang dengan maksud bahwa setiap apa yang dilakukan selalu disertai dengan cinta dan sayang sehingga yang dilakukan selalu benar dengan waktu yang tepat dan terbaik dalam mengambil keputusan.
- *Pemberdayaan.* Mendengarkan saran dari orang lain atau bawahan dan sekali-kali Memberikan kepercayaan bagi bawahan dalam mengambil keputusan.
- *Visi yang jelas.* sebagai pemimpin selalu memiliki visi yang jelas sebagai arah organisasi kedepan yang akan menginspirasi apa

yang akan dilakukan dalam mengelolah organisasi dan membantu untuk bertindak dimasa mendatang.

- *Rendah Hati.* Selalu memiliki sikap yang rendah hati dan menghormati bawahannya serta memberikan pengakuan dan penghargaan bagi bawahan terhadap apa yang telah dilaksanakan dalam institusi organisasi.
- *Kepercayaan.* Pemimpin melayani adalah orang-orang yang lebih unggul dari yang lainnya dengan kelebihan kepribadian yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan.

H. Kepemimpinan Karismatik.

Karisma adalah sifat dasar yang di melekat pada diri seseorang yang membuat orang tersebut dikagumi atau disegani oleh orang lain. Dan sebagai pemimpin yang berkarisma muncul dari proses interaksi dengan orang-orang disekitarnya atau bawahannya yang memunculkan suatu atribut tersendiri yang membuat orang disekitarnya atau bawahannya merasa terpikat, segan atau menghormatinya. Atribut-atribut (indentitas) tersebut adalah adanya sikap percaya diri, memiliki sifat yang tenang, kemampuan komunikasi yang baik, keteguhan yang tinggi, dan yang terpenting ialah indentitas dan wawasan sang pemimpin ini sesuai dengan indentitas para pengikut bawahannya. Kepemimpinan ini memiliki teori bahwa menekankan indentitas yang melekat pada pribadi seseorang baik membangkitkan semangat dari pemimpin itu sendiri dan pengaruhnya bagi sesuatu yang akan dicapai sehingga bawahannya memiliki rasa keyakinan yang kuat. Melalui teori atribut lebih memperhatikan pada indentitas pribadi yang menjadi proses penting dalam mempengaruhi internalisasi sebagai proses sekunder. Sementara itu juga ada yang disebut sebagai paham penularan sosial yang menjelaskan tentang perilaku para bawahannya dipengaruhi oleh pimpinan itu sendiri dengan cara penularan sosial.

Pada kepemimpinan karismatik memiliki lima karasteristik. Kelima tersebut karakteristik itu adalah ada di bawah ini:

- *Memiliki Visi atau pandangan dan membangun komunikasi*, memiliki orientasi pandangan kedepan yang jelas dan ditujukan bagi sasaran yang ideal dengan harapan masa depan lebih baik dari kondisi saat sekarang ini, serta mampu melakukan pengelompokkan visi dengan begitu jelas dan dapat dipahami bawahannya.
- *Risiko personal*, Pada kepemimpinan kharismatik pemimpinnya tidak mempersoalkan berhadapan dengan resiko pribadi yang tinggi, bersedia dengan biaya yang besar, dan bersedia pada pengorbanan diri dalam meraih visi.
- *kepedulian bagi keadaan lingkungan*, Pemimpin yang karismatik memiliki kepedulian dalam melihat dan merasakan apa yang terjadi berkaitan dengan persoalan lingkungan dan potensi yang diperlukan dalam membuat perubahan.
- *Kepedulian bagi kebutuhan bawahan*, pemimpin karismatik sangat mengerti mengenai kemampuan bawahannya dan respon bagi setiap kebutuhan dan keperluan bawahannya.
- *Perilaku yang mempertimbangkan adanya kesepakatan bersama atau umum*, melalui Kepemimpinan ini sering terlibat pada pemikiran dan perilaku yang mempertimbangkan kesepakatan umum dan sesuai dengan norma-norma yang ada.

I. Kepemimpinan Situasional

Saat sekarang ini beberapa ahli memberikan tawaran jenis kepemimpinan yang bisa meningkatkan kualitas kerja bawahan, mulai dari cara kepemimpinan yang di dalamnya mengandung konsep yang lama seperti rancangan-rancangan konsep teori hingga sampai pada konsep yang sifatnya aplikatif situasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari organisasi. Para ahli selalu melakukan penelitian untuk mencari format kepemimpinan yang paling ideal dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh organisasi menuju pada hasil kerja yang baik. Atas berbagai jenis kepemimpinan dalam mengelolah kinerja organisasi telah ditawarkan oleh beberapa

ahli, maka jenis kepemimpinan inilah yang selalu digunakan oleh pemimpin sekarang ini dan menurut para ahli tata kelolah manajemen bahwa jenis kepemimpinan situasional yang sangat tepat diterapkan untuk saat sekarang ini. Sementara bagi bawahan yang telah dianggap sudah matang yakni bawahan yang belum mampu tetapi memiliki kemauan dan tekad untuk belajar, maka kepemimpinan situasional seperti demikian masih membutuhkan pengarahan disebabkan kurang mampu namun perilakunya yang mendukung.

Melalui hal tersebut pemimpin perlu membangun komunikasi dua arah, yakni untuk menolong bawahan agar meningkatkan semangat kerjanya, selanjutnya ada bawahan yang mampu akan tetapi tidak memiliki keinginan untuk melaksanakan tanggung jawab tugasnya. Agar bawahan bisa meningkatkan produktivitas kerjanya maka atasan harus pro aktif membangun komunikasi dua sisi dalam mendengarkan apa yang bawahan inginkan. Dengan adanya penerapan jenis kepemimpinan ini, maka bawahan terasa diperhatikan dari atasannya, sehingga harapannya ada kenaikan produktivitas kerja.

Pada kepemimpinan situasional memiliki 4 (empat) perilaku dasar yaitu:

- *Perilaku direktif.* Pada perilaku ini diterapkan jika bawahan dihadapkan bagi pekerjaan yang sulit dan belum mempunyai motivasi dan pengalaman dalam melaksanakan tugas tersebut, atau mereka pada posisi tertekan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan.
- *Perilaku konsultasi.* Perilaku ini sering diberlakukan oleh pemimpin jika bawahannya sudah berpengalaman dan memiliki semangat yang tinggi dalam menghadapi tugas yang ada. Hal seperti ini atasan tidak terlalu fokus pada hal-hal yang mendetail dan penjelasan yang terperinci. Akan tetapi jika situasi dari bawahannya belum memiliki pengalaman dalam menghadapi tugasnya maka atasan akan teliti dan terperinci secara mendetail pada bawahannya dan dibutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan baik.

- *Perilaku partisipatif*. Ini diberlakukan jika bawahan telah mengetahui cara-cara yang diinginkan dan sudah terjalin hubungan yang dekat dengan atasan. Atasan mengambil waktu untuk membangun komunikasi bersama anak buahnya dan mengikut sertakan dalam pengambilan beberapa keputusan yang berkaitan pekerjaan dengan mempertimbangkan saran dan masukan mereka yang berkaitan efektivitas kerja.
- *Perilaku delegatif*. Perilaku ini diberlakukan jika bawahan sudah memahami betul dan efektif dalam tugas pekerjaan, sehingga atasan bisa membiarkan mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sendiri.

Berdasar pada pendekatan situasional ini menjadi metode yang dianggap terbaik dalam memimpin sehingga bawahan atau orang lain bisa dipengaruhi. Strategi situasional didasarkan pada korelasi sikap dalam tugas pekerjaan, sikap komunikasi, serta kemampuan kinerja bawahan.

Pemimpinan dengan jenis situasional ini didasari atas adanya saling keterkaitan yang berpengaruh melalui:

- Adanya arahan serta petunjuk (sikap dalam pekerjaan) dari pimpinan ke bawahan.
- Adanya dukungan yang lebih dekat secara emosional (perilaku hubungan) yang diberikan oleh pemimpin.
- Kematangan yang bawahan tunjukkan saat menjalankan pekerjaan khusus, dalam hal fungsi atau sasaran.

Bab 4

Kajian Kepemimpinan Secara Umum



A. Kajian Tentang Kepemimpinan.

Kepemimpinan (leadership) bisa disebutkan sebagai suatu cara seorang pemimpin untuk mengarahkan memberikan dorongan atau stimulus dan mengatur semua komponen dalam suatu organisasinya atau kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan kelompok organisasi yang ingin dicapai sehingga mendapatkan kemampuan daya kerja pegawai yang baik dan maksimal. Apabila terjadi kinerja peningkatan daya kerja pegawai secara baik itu berarti kinerja pegawai tercapai dalam upaya terwujudnya sasaran yang hendak dicapai dalam organisasi.

Semua institusi sudah tentunya memiliki atasan yang disebut dengan pimpinan dan ada orang-orang yang dipimpin disebut bawahan. Tercapai tidaknya tujuan organisasi sangatlah ditentukan oleh cara seorang pemimpin dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Salah satu cara yang terpenting adalah pimpinan sebaiknya berinteraksi bagus dengan siapapun yang dipimpinnya. Pemimpin harus mengetahui dan mengenal semua bawahannya atau dalam organisasi tersebut. Pemimpin harus bertanggung jawab untuk pada segala sesuatu yang berkaitan atau berhubungan dalam organisasi yang dia pimpin dan kelola. Akan efektif terlaksana secara baik seluruh hal yang terkait dalam organisasi jika pemimpinnya menjalankan dengan sebaik-baiknya yang didasari rasa tanggung jawab dengan penuh, akan tetapi jika aturan main yang ditetapkan tidak dijalankan secara baik oleh peran pemimpin pada organisasinya, maka akan muncul beberapa masalah yang kemungkinan jadi kendala dalam mempengaruhi etos kerja bawahannya bagi organisasi.

Dari gambaran yang telah ada sebelumnya bisa kelihatan secara seksama jika keberhasilan atau gagalnya sebuah organisasi ditentukan oleh kemampuan kualitas seorang pemimpin dalam kepemimpinannya pada organisasi tersebut. Jika dicermati dari berbagai sudut pandang dalam organisasi maka pemimpin senantiasa berada dalam posisi keadaan yang paling vital dan urgent. Sebagai pemimpin dalam sebuah institusi atau organisasi sangatlah penting atau vital perannya, sebab dari kapasitas atau kedudukan pemimpin

membantu institusi atau organisasi dalam terwujudnya visi misinya. Sebagai pemimpin dalam organisasi sangat ditentukan perannya secara efektifitas dan setiap saat harus dilatih atau diasah serta di kembangkan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan setiap keadaan yang ada sehingga dapat mempengaruhi semua unsur yang ada dalam ekosistem organisasi supaya pelaksanaan kepemimpinan bisa berjalan dengan lancar dan cara yang tepat.

Sekalipun kondisi situasi tersebut berasal dari bawahan atasannya di mana dia bernaung. Hal seperti ini bisa terlihat jika pemimpin itu penting sekali dalam menjalankan tugas kepemimpinannya yang mana bisa menggali potensi dirinya sendiri sebelum menggali potensi orang lain. Ada tiga point yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh pemimpin yaitu sebagai pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri, memimpin individu atau orang dan memimpin jobnya atau tugas. Secara efektif dalam menjalankan tugas kepemimpinan sebaiknya dimulai pada diri sendiri.

Pemimpin yang gagal tidak mungkin membuat dirinya akan efektif bisa berhasil untuk memaksimalkan orang lain ataupun apa yang mereka kerjakan. Jika berbicara mengenai memaksimalkan potensi diri sendiri, maka yang perlu dimiliki sebagai seorang pemimpin adalah memiliki kemampuan dalam memilih indentifikasi bagi kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Potensi tersebut akan menjadikan manfaat yang sangat kuat untuk seorang pemimpin dalam mengembangkan dirinya sendiri sehingga pemimpin yang menempati posisi tersebut dan sementara menjalani kepemimpinannya tidak hanya bergantung pada posisinya saat sekarang tetapi lebih dominan pengaruh-pengaruh yang asalnya dari potensi dan kemampuan dirinya sendiri. Pengaruh-pengaruh atau efek seperti inilah yang menentukan kemampuan pada pemimpin tersebut dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas kepemimpinannya. Seorang pemimpin tugasnya bukan hanya bisa menyampaikan dan memberi perintah, memberikan intruksi, menjatuhkan hukuman, mengancam, menyerahkan hadiah,

mengarahkan, disamping itu posisinya akan memberikan pengaruh yang sangat significant dalam kepemimpinannya bagi orang-orang dalam organisasi bahkan berpengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya. Ciri atau tanda jika seorang pimpinan bisa berdampak baik dan positif bagi yang lainnya apabila selalu diinginkan keberadaannya dan bisa diandalkan oleh orang lain pada situasi apapun, orang-orang akan kehilangan jika pemimpin itu tidak bersama-sama atau selalu ada dalam situasi apa pun. Pemimpin sesungguhnya berperan sentral dalam lingkungan organisasinya karena mereka yang akan mengatur dan menentukan arah kebijakan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sudah banyak contoh kepemimpinan yang menjadi bukti sejarah tentang pemimpin yang berdampak besar bagi generasi kepemimpinan masa kini yang begitu kuat dan perlu kita syukuri, seperti tokoh Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep pemimpin harus menjadi teladan jika didepan, memberikan semangat sebagai motivasi jika berada ditengah, dan mampu sebagai pendorong jika berada dibelakang. Ini adalah filosofi sebagai pegangan kepemimpinan yang masih aktual dan dalam pemaknaannya untuk kita praktikan menhadapi setiap tantangan atau masalah serta dinamika hidup saat sekarang ini. Semua orang memiliki hak untuk menjadi top leader dalam sebuah komunitas atau organisasi, namun tidaklah semua orang jika menjadi pemimpin sanggup menjalankan kepemimpinan itu dengan baik sesuai dengan tanggung jawab komitmennya. Siapa pun dia bisa menempati posisi sebagai pemimpin, akan tetapi menemukan sosok pimpinan yang tepat dan berkualitas akan sedikit sulit untuk ditemukan, terkadang pemimpin yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari sebuah kenyataan dan sering juga tidak sesuai dengan prosedur yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apabila pada kepemimpinan memberikan dampak yang baik dan positif maka hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang positif dan baik juga, namun begitu sebaliknya apabila kepemimpinan berdampak negative atau kurang baik maka hasilnya pun pasti tidak baik atau negatif.

Sebelum lebih lanjut menjelaskan mengenai pengaruh kepemimpinan, penulis terlebih dahulu menguraikan mengenai Teori-teori Kepemimpinan, Tipe Kepemimpinan, Fungsi Kepemimpinan, Indikator Kepemimpinan, Sifat-sifat Kepemimpinan seperti di bawah ini.

1. Teori - teori Kepemimpinan

Dari sekian banyak orang berpendapat mengenai Teori-teori Kepemimpinan, saya menyimpulkannya dan berpendapat bahwa teori kepemimpinan yaitu cara seseorang sebagai individu menjadi pemimpin atau sebuah proses munculnya individu sebagai pemimpin atau bagaimana proses menjadinya sebagai seorang pemimpin. Untuk itu saya mengangkat Teori- teori kepemimpinan seperti berikut ini:

- *Teori Keunggulan*, pada konsep ini disebutkan jika seorang individu yang nantinya akan tampil sebagai pemimpin ialah mereka yang memiliki keunggulan dan kelebihan dari orang-orang yang ada didalam lingkungan organisasinya sebagai seorang pemimpin dengan hakekatnya harus memiliki tiga kelebihan. 3 (Tiga) kelebihan tersebut adalah kelebihan atau keunggulan spritual yang berkaitan dengan agama, kelebihan ratio atau daya pikir dan yang terakhir adalah sehat Badaniah.
- *Teori Sifat*, Teori ini berpendapat bahwa sebagai individu bisa menempati posisi sebagai pemimpin yang cukup baik jika pada dirinya melekat sifat-sifat yang baik agar orang-orang yang mengikutinya bisa menjadi pengikut yang baik, secara umum sifat-sifat kepemimpinan bisa dicontohkan memiliki sifat melindungi, bersifat adil, punya tanggung jawab, memiliki rasa percaya diri, mempunyai sifat komunikatif dan kreatif yang baik, selalu inisiatif dalam berbagai macam hal, memiliki sifat yang selalu energik, memiliki pendekatan persuasif yang cukup baik bagi semua orang.
- *Teori Keturunan*, pada teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi pemimpin bisa berdasarkan dengan faktor keturunan, karna orang tuanya sebagai pemimpin lalu dengan sendirinya

anaknya yang akan menggantikan orang tuanya menjadi pemimpin.

- *Teori Pendengar yang baik*, melalui konsep ini sosok yang akan jadi ialah orang yang memiliki pengaruh cukup besar atau berkharisma karna selalu bijak dan mendengarkan orang lain dalam berpendapat. Pemimpin seperti ini memiliki dan mempunyai kewibawaan daya tarik serta berpengaruh cukup besar.
- *Teori Bakat*, Pada teori ini memiliki pemahaman bahwa bakat dari seseoranglah yang menjadikan dia menjadi pemimpin dan orang tersebut menempati posisi sebagai pemimpin karna bakatnya. Bakat kepemimpinan yang dimilikinya harus terus dikembangkan, seperti memberikan kesempatan dan peluang bagi orang tersebut untuk menempati suatu posisi atau kedudukan dalam suatu organisasi.
- *Teori interaksi*, dalam konsep ini memiliki pandangan bahwa siapapun pribadi atau individu bisa menduduki jabatan menjadi pemimpin asalkan dia diberikan kesempatan melalui sebuah jaringan atau interaksi yang selama ini sudah terbangun. Semua orang bisa terbentuk dan diarahkan untuk menjadi pemimpin karna kepemimpinan itu bisa dan dapat dipelajari melalui pendidikan formal ataupun pengalaman praktek.

2. Kriteria Menjadi Pemimpin

Dalam memimpin sebuah organisasi atau lembaga pemimpin diharuskan memiliki kriteria sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi. secara umum seorang pemimpin memiliki beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Pemimpin dengan Visi

Sebagai pemimpin harus melihat dan memiliki masa depan dengan rancangan rencana untuk mendapatkan tujuan organisasi. Selain itu pemimpin harus mempunyai paparan yang jelas kedepan terkait dengan apa yang diharapkan oleh pemberi mandat untuk bisa dicapai. Jika memiliki pandangan yang kuat kedepan maka akan

memberikan motivasi bagi pimpinan itu sendiri secara tegas dan berani untuk melakukan segala sesuatunya dengan berbagai macam rintangan tanpa mengingatkannya waktu kerja yang melelahkan. Visi bagi seorang pemimpin sangat penting agar bawahannya bisa mengetahui gambaran masa depan yang diinginkan supaya bisa menjadi visi bersama dalam mengelola sebuah institusi organisasi. Visi dari seorang pemimpin tersebut harus disusun dalam bentuk rencana secara tertulis dengan penyusunan berdasarkan dengan tahapan jangka waktu sebagai perencanaan pencapaian visi.

b. Pemimpin dengan Karakter Baik

Karakter ialah sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai pribadi yang menggambarkan ekspresi kepribadian dengan aktualisasi melalui tutur kata dan sikap perilakunya di dalam lingkungan kesehariannya. Karakter menjadi hal yang penting karena menjadi dasar utama dalam kepemimpinan. Karakter yang baik jika dimiliki dan melekat pada sang pemimpin itu akan membuat orang-orang disekelilingnya menghormatinya bahkan orang lain ingin memiliki karakter yang sama. Pengaruh sosok pemimpin pada bawahannya ditentukan oleh sejauh mana kredibilitas pimpinan yang bersangkutan. Karakter yang harus dimiliki oleh sang pemimpin ialah harus memiliki visi, tegas, berani, ber hikmat, humoris, membela kebenaran, sabar dan tekun, rendah hati, pergaulannya cukup bagus, cekatan, integritas iman yang bagus, tidak ternoda dan tercela. Karakter seorang pemimpin menentukan siapa dia sebenarnya, apabila sikapnya tidak sesuai dengan yang dia sampaikan maka mencerminkan karakter pemimpin itu tidak baik. Jika kepribadian seorang pemimpin dengan karakter yang cukup baik maka akan jadi contoh untuk diteladani bagi bawahannya dan orang disekitarnya, namun begitu sebaliknya sekalipun seorang pemimpin sangat hebat dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya tapi tidak memiliki karakter yang baik maka pemimpin tersebut tidak akan berpengaruh sehingga bisa ditarik kesimpulan jika keberhasilan pimpinan tergantung oleh karakter pribadi seseorang.

c. Pemimpin yang Menekankan Interaksi yang baik.

Kepemimpinan yang mengutamakan sinergitas ialah pemimpin yang bisa mendengarkan dan menyatukan semua sumber potensi yang ada untuk melebihi hasil yang diharapkan sehingga pemimpin tersebut menjalankan kepemimpinan yang diberikan. Kepemimpinan yang diberikan berarti pemimpin tersebut dipercayai, diberi kewenangan dalam membuat keputusan.

d. Pemimpin yang sanggup membentuk Jejaring hubungan.

Maksud dari kemampuan dan kesanggupan dalam membentuk jejaring hubungan ialah kecakapan seorang pemimpin dalam mengamati dan mencermati potensi yang lebih pada orang lain untuk bisa berpatner kerja dengan mereka. Seorang pemimpin harus bisa mengharagi potensi dan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain bahkan bisa mengakuinya sebagai sebuah kelebihan dan tidak merasa rendah diri dirinya. Pemimpin dimungkinkan bekerja sama dan bahkan bisa berpandangan bahwa setiap bawahannya dalam sebuah tim dapat memberikan sumbangsi kontribusi yang membanun secara positif bagi institusi organisasi. Sesungguhnya tidak ada bawahan yang buruk untuk bisa bekerja sama, apabila pimpinan mampu mengarahkan dengan baik bawahannya, untuk itu seorang pemimpin harus fokus dalam strategi mengelola dan menata hati dengan maksud memungkinkan dan memahami bawahan supaya sesuai dengan harapan sang pemimpin.

e. Pemimpin yang Berpengalaman dan Cekatan.

Seorang pemimpin harus memiliki pengalaman yang mumpuni dan harus cekatan (terampil) dalam memimpin sebuah organisasi. Bagaimanapun juga orang akan lebih rela dan mudah mengikuti pemimpinnya jika pemimpin memiliki ketrampilan yang mumpuni. Penguasaan aspek teknis (technical skill) yang tepat sebaiknya diimbangi dengan ketrampilan pengelolaan orang (people skill) dan aspek konsep yang baik. Penguasaan aspek teknis yang handal membuat pemimpin menjadi sumber solusi masalah teknis. Penghargaan bawahan pun meningkat karena dipimpin oleh sosok yang pandai dan mengerti. hal-hal yang membuat seorang pemimpin

memiliki ketrampilan teknis yang tinggi adalah; 1). Keinginan belajar yang tinggi. Keingintahuan atas hal baru dan masalah baru membuat pemimpin belajar baik dari literatur maupun dari sosok lain yang lebih menguasai. Mencatat dan berkonsentrasi melihat proses secara detail akan mempermudah menemukan sumber masalah dan penyelesaiannya. Keinginan belajar yang tinggi juga akan membuat seorang pemimpin sering melakukan eksperimen-eksperimen baru untuk mendapatkan cara atau teknik baru penyelesaian pekerjaan. 2). Pengalaman dengan terlibat dalam menyelesaikan masalah. Banyak pemimpin yang memilih memimpin dari belakang meja dan jarang bersama bawahan menyelesaikan masalah langsung di lapangan. Pemimpin yang sering berada di lapangan untuk menyelesaikan masalah teknis yang berbeda-beda akan terasah ketrampilannya secara tidak langsung. Melihat di lapangan, berdiskusi bersama bawahan, melihat eksekusinya dan mengantisipasi resiko kegagalan eksekusi. Melakukan adalah cara terbaik didalam belajar. Mendengar membuat tahu, melihat membuat mengerti, dan mengerjakan membuat mampu. Banyak orang handal secara teknis namun gagal menjadi pemimpin. Penyebab dominannya adalah mereka mampu menyelesaikan teknis pekerjaannya tetapi gagal dalam mengelola orang-orang yang ada dibawahnya. Selain menguasai ketrampilan teknis maka seorang pemimpin harus menguasai ketrampilan dalam pengelolaan orang.

f. Pemimpin yang bisa Melakukan kadernisasi.

Sebagai pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang bisa melakukan regenerasi bagi orang lain agar bisa melanjutkan perjuangannya, harus ada kader yang dipersiapkan agar program yang pernah dijalankan bisa berkelanjutan. Begitu sebaliknya banyak pemimpin yang gagal karna tidak bisa melakukan kadernisasi sebagai tindak lanjut program yang pernah dijalankan. Seorang pemimpin dikatakan berhasil apabila dia tidak menciptakan ketergantungan terhadap dirinya namun ada bawahannya yang bisa diberdayakan dan diberikan tugas untuk bertanggung jawab dan diberikan ruang dan

waktu dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan institusi organisasi untuk mencapai misi bersama

3. Tipe Kepemimpinan

Dalam kepemimpinan ada lima (5) jenis type kepemimpinan dengan memiliki ciri tersendiri diantaranya:

- *Tipe Otokrat*, kepemimpinan dengan tipe ini bisa dikategorikan sebagai tipe kepemimpinan yang memiliki ciri negatif, sebab memiliki prinsip yang selalu merasa diri paling benar, paling bisa, paling tepat, dan mementingkan diri sendiri, atau dengan kata lain bahwa tipe kepemimpinan ini sifatnya egois yang berlebihan karna terkadang sering memutarbalikkan fakta kebenaran dan kenyataan yang ada sehingga sesuatu yang tidak benar terkadang menjadi benar sebagai sebuah kenyataan dan begitu sebaliknya. Kepemimpinan seperti ini pemimpinlah yang akan memutuskan sendiri dan segala otoritas dari dia sendiri dan beranggapan bahwa bawahan tidak mampu dan bisa untuk memutuskan sesuatu.
- *Tipe paternalist*, jenis tipe ini ialah pemimpin dengan tipe yang 1.memiliki sifat ciri menggabungkan dua ciri yaitu ciri positif dan ciri negatif, adapun ciri yang dimaksudkan adalah memiliki sikap yang selalu melindungi; 2. Dalam mengambil sebuah keputusan jarang menyerahkan wewenang bagi bawahannya sendiri; 3.bawahan yang dia pimpin tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan inisiatifnya dan mengembangkan apa yang dia pikirkan sekaitan dengan kemampuan kreativitasnya sendiri. 4. Keseringan menunjukkan diri paling mengetahui segala sesuatunya; 5. Dalam pekerjaannya selalu diawasi dan di control secara ketat.
- *Tipe Kharisma*, jenis kepemimpinan ini ialah mereka yang mempunyai kemampuan kekuatan, memiliki wibawa dan ketertarikan orang lain secara yang begitu besar sehingga orang tersebut bersedia dengan sepenuh hati dan semangat untuk ikut bersama pemimpin tersebut apapun yang

disampaikan dan tidak memiliki penjelasan alasan untuk kesediaan mengikutinya. Seorang pemimpin kharismatik keseringan dilihat sebagai individu yang memiliki kualitas atau kemampuan melebihi dari yang biasanya dan memiliki kemampuan yang istimewa. kekuatan ini berasal dari sang Illahi sehingga berdasarkan hal tersebut orang yang bersangkutan dianggap dan disebut sebagai seorang pimpinan. Pimpinan yang memiliki kharisma selalu mendapatkan daya tarik dari orang-orang yang dia pimpin untuk menggunakan penjelasan mengenai visi untuk mengembangkan dan menumbuhkan tujuan serta sasaran kepada bawahannya, sehingga selanjutnya mengkomunikasikan keinginan kerja yang tinggi dengan menumbuhkembangkan kepercayaan diri terhadap bawahannya bahwa karyawannya atau orang yang dia pimpin dapat mencapainya sesuatu yang dia kerjakan untuk mencapai apa yang dimaksudkan, selanjutnya pimpinannya memberikan teladan melalui tindakan dan kata-kata yang dapat ditiru untuk diikuti oleh bawahannya.

- *Tipe Laissez Faire*, Pada kepemimpinan ini tipenya adalah keseringan mendelegasikan wewenang kepada orang yang dia pimpin serta lebih suka dengan situasi mengambil kebijakan serta keberadaan pada organisasi lebih bersifat responsif dan kooperatif pada suatu hal. Kepemimpinan ini tidak suka mengambil tindakan yang beresiko dan selalu menghindari hal-hal yang memunculkan masalah sehingga kecondongannya selalu berada pada usaha bertahan pada status kondisi yang ada saat sekarang ini dan sedang berjalan (kondisi sekarang)
- *Tipe Demokratis*, Pada pemimpin seperti ini kepemimpinannya sering melimpahkan tugasnya secara realistis, praktis dan selalu mengontrol dengan memakai orang-orang yang dia pimpin dalam pelaksanaan roda organisasi untuk menentukan dan menetapkan arah organisasi kedepan serta berperannya bawahan dalam proses mengambil atau

menentukan sebuah keputusan dengan prinsip dan menganggap bawahannya (orang-orang yang dia pimpin) sebagai sosok manusia berpolitik,bersosial, berekonomi dan sebagai sosok pribadi yang berkarakter dan memiliki jati diri.

Kepemimpinan seperti ini adalah pemimpin yang disegani dan dihormati bukan pemimpin yang ditakuti karna sikap dan perilakunya dalam kebiasaan organisasinya, hal ini memberikan semangat dan motivasi orang-orang yang dipimpinnya menumbuhkan dan menumbuhkan semangat inovasi dan kreatifitasnya.

4. Fungsi Kepemimpinan

Hal ini berkaitan dengan situasi keadaan hubungan beberapa orang yang berada dalam kelompok organisasi yang mana pelaksanaan fungsi pemimpin tetap berjalan antar pribadi sebagai individu dengan individu.

Dalam pelaksanaannya kepemimpinan fungsi pokoknya dapat dibedakan seperti berikut ini:

- *Fungsi Instruktif*, Pada Fungsi memiliki sifat komunikasi yang satu arah. Hal ini dimaksudkan bahwa pemimpin itu jadi komunikator sebagai pihak yang memastikan dan menentukan bagaimana, apa, bilamana, dan saat kapan perintah itu bisa dilakukan supaya keputusan yang akan diambil bisa diimplementasikan secara baik dan maksimal. Pada kepemimpinan yang baik dan maksimal diperlukan upaya dan daya dalam mobilisasi gerakan serta memberikan semangat bagi orang-orang yang dipimpin untuk bersedia dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan sebagai pemimpin.
- *Fungsi konsultasi*, pada konsultatif ini sifatnya umpan balik dengan maksud agar bisa mendapatkan masukan yang berupa umpan balik dalam membenahi untuk terus menyempurnakan setiap hasil keputusan yang telah diambil dan ditetapkan untuk dilaksanakan. Dalam melaksanakan fungsi konsultatif sangat diharapkan agar setiap keputusan

dari pimpinan akan mendapatkan suport sehingga memudahkan untuk memberikan intruksi perintah agar dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

- *Fungsi Partisipatif*, Pada konteks pelaksanaan fungsi ini seorang pemimpin berperan aktif secara partisipasi untuk mengupayakan agar bawahannya bisa secara maksimal mengambil peran dalam pengambilan putusan maupun pada pelaksanaannya agar tujuan organisasi bisa tercapai. Pada fungsi partisipasi bukan dalam pengertian bebas melakukan semuanya, akan tetapi dilaksanakan secara terukur dan terkendali sehingga memiliki arah yang jelas agar masing-masing bisa menjalankan tugas pokoknya dengan baik dan tidak mencampurkan serta mengambil pekerjaan orang lain sebagai tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas kepemimpinan harus tetap pada tugas fungsi sebagai pimpinan bukan sebagai yang melaksanakan tugas organisasi.
- *Fungsi Pendelegasian*, hal ini dilakukan sebagai pemindahan (penyerahan) kewenangan pada bawahan dalam hal tanggung jawab pekerjaan yang berkaitan dengan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Hal inilah yang disebut dengan fungsi pendelegasian atau memberikan mandat. Lewat fungsi delegasi ini biasa terjadi adalah dalam membuat dan menetapkan keputusan, baik yang sudah melalui persetujuan ataupun yang belum persetujuan dari seorang pimpinan. Hakikat dasar pada fungsi delegasi adalah kepercayaan. Bawahan yang diberikan mandat oleh pimpinan adalah mereka yang diyakini mampu menjalankan tugas pimpinan dengan kesamaan persepsi, prinsip dan aspirasi.
- *Fungsi Pengendalian*, yang dimaksudkan dengan Fungsi pengendali ini adalah kepemimpinan yang efektif dan sukses untuk mengatur dan mengelola kegiatan anggotanya atau orang-orang yang dia pimpin tertuju atau masih dalam koridor dan dalam koordinasi yang maksimal efektif agar tercapainya tujuan bersama yang efektif dan maksimal. melalui

fungsi ini bisa tercapai melalui aktivitas bimbingan, koordinasi, pengarahan dan pengawasan.

Dari berbagai macam pendapat tentang Fungsi kepemimpinan kami simpulkan bahwa Fungsi kepemimpinan adalah menuntut dan memandu, memberikan motivasi kerja, membimbing, membangun, mengarahkan organisasi melakukan pengawasan yang efisien, membangun dan menjalin relasi komunikasi yang bagus, dan mengarahkan orang-orang yang dia pimpin kepada sasaran dan tujuan yang diinginkan seperti apa yang telah direncanakan sesuai dengan target. Supaya target organisasi terlaksana dengan baik dan maksimal maka sebaiknya pimpinan semestinya menjalankan fungsi pokok (utama) seperti: a). Fungsi Solusi, yaitu tugas yang berkaitan dengan pencarian solusi atas persoalan yang ada untuk diberikan pendapat, informasi, masukan saran, sebagai bentuk penyelesaian; b). Fungsi pendampingan dan pemeliharaan, hal ini dimaksudkan sebagai pendampingan bagi kelompok masyarakat social dalam pelaksanaan tugas organisasi sehingga bisa berjalan dengan lancar dan efektif sampai mencapai target yang diinginkan.

5. Indikator Kepemimpinan

Dalam Kepemimpinan memiliki indikator-indikator, secara garis besarnya indikator-indikator tersebut meliputi:

- *Bersifat adil*, Pada kegiatan aktivitas organisasi, kebersamaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihiraukan namun sesuatu yang harus dan mutlak dilakukan dan dipelihara, karna sesungguhnya kebersamaan adalah cerminan yang muncul dari kesepakatan orang-orang yang dipimpin maupun antara para pimpinan yang proses terjadinya harus adil dari hubungan itu tanpa ada keberpihakan dari salah satunya untuk mencapai target dan tujuan dalam organisasi.
- *Memberi saran*. Pada kepemimpinan dengan indikator kepemimpinan yang selalu memberi sugesti merupakan imbas pengaruh yang bisa menggerakkan sugesti dan hati orang lain agar berperan penting dalam merawat dan membina.

- *Mendukung tujuan*, dicapainya tujuan pada sebuah lembaga organisasi bukan terjadi dan terbentuk secara sendirinya, akan tetapi harus didukung dan disuport oleh adanya kepemimpinan. untuk itu, pada sebuah institusi organisasi bisa berjalan dan beraktivitas dengan lancar dan efektif serta mampu mencapai atau menggapai tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. bila setiap tujuan yang akan di dapat atau diinginkan perlu dan penting penyesuaian dengan situasi keadaan organisasi tersebut serta memungkinkan orang-orang yang dipimpin untuk mempererat kerja sama. sa pengabdian, kebersamaan sesama bawahan dan memilki rasa partisipasi.
- *Katalisator*, Sebagai seorang pemimin harus berperan sebagai orang yang mempercepat perubahan pada suatu kejadian baru. Jika pemimpin itu setiap saat meningkatkan potensi manusia yang ada (bawahannya) dan memaksimalkan raksi yang bisa menimbulkan motivasi dan kemampuan kerja secepat mungkin denan hasil yan maksimal.
- *Menciptakan rasa aman*, Seorang pemimpin diharuskan membuat suasana rasa tenang bagi orang-orang yang diia pimpin. Hal ini bisa terlaksana jika setiap pimpinan bisa merawat situasi dan kondisi yang baik dan selalu menciptakan hal-hal positif serta optimis dengan dasar jiwa dan pikiran tenang jika diperhadapkan pada persoalan-persoalan yang ada agar selalu mengkondisikan rasa aman bagi bawahannya saat menjalankan setiap tugas-tugasnya, mendapat perlindungan keamanan dari pemimpinya, terbebasa dari perasaan kuatir dan gelisah.
- *Sebagai wakil organisasi*, Sebagai bawahan yang berada dan melakukan aktivitas kerja pada organisasi apapun selalu melihat dan beranggapan bahwa atasannya memilki peranan dalam segala bidang apapun terlebih beranggapan bahwa pemimpinnnya memilki prinsip sifat keteladanan atau panutan. Individu sebagai sosok pimpinan ialah segala-galanya, oleh sebab itu semua sikap dan perlaku serta perkataannya harus

selalu memberikan situasi yang berkesan tertentu bagi organisasi yang dia pimpin.

- *Pemberi semangat dan inspirasi*, seorang pemimpin selayaknya sebagai sumber inspirasi penyemangat bagi orang-orang yang dia bawahi maka dari itu atasan sebagai pimpinan diharuskan selalu bisa memberikan atau membakar semangat orang-orang yang dia pimpin agar bawahannya tersebut dapat menerima serta memahami maksud dari apa yang menjadi target organisasi sehingga bisa memaksimalkan tugas pekerjaannya dengan semangat yang penuh agar bisa efektif bagi terciptanya tujuan dan maksud organisasi.
- *Menumbuhkan sikap menghargai*, sebagai individu hakekatnya ingin selalu diakui dan ingin mengharapkan penghargaan pada dirinya dari setiap apa yang telah dilakukannya. Seperti itu juga yang melekat pada anak buah di suatu organisasi atau institusi ingin di hargai dan di akui oleh atasannya melalui apa yang telah dia lakukan. untuk itu harus menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang pimpinan untuk selalu memperhatikan pemberian penghargaan dan mengakui bawahannya atas kinerja tugasnya yang telah dilakukan.

Dari beberapa penjelasan yang telah di sampaikan dari atas, bisa ditarik kesimpulan jika kepemimpinan ialah suatu cara yang terproses dengan sendirinya dalam suatu kelompok organisasi yang di dalamnya ada reaksi berpengaruh satu dengan yang lainnya, baik sebagai atasan maupun bawahan dan di dalamnya saling mendorong, mengarahkan, mengajak serta menganjurkan orang-orang yang ada di dalam organisasi agar bekerja sama secara bersama-sama melakukan sesuatu yang produktif sesuai dengan tugas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar tujuan organisasi bisa tercapai maka indicator kepemimpinan harus terpenuhi dengan menggunakan variabel teori kepemimpinan yang memiliki rasa keadilan, adanya rekomendasi dan saran, memberikan dukungan untuk terlaksananya pencapaian tujuan yang ingin dicapai,

memiliki kemampuan untuk menjadi pendorong bagi orang lain yang ada disekitarnya untuk bergerak maju, mampu memberikan suasana yang nyaman, mampu menjadi keterwakilan institusi organisasi, sebagai pusat inspiratif, dan memiliki sikap menghargai.

6. Sifat - sifat Kepemimpinan

Pada kepemimpinan memiliki sifat-sifat penting, yaitu:

- *kemampuan*, Agar pemimpin menciptakan kepemimpinan dengan harapan yang sesuai keinginan dari setiap orang atau organisasi untuk lebih baik maka diperlukanlah suatu energi, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sebagai seorang pemimpin diharuskan mampu bekerja dalam periode waktu yang panjang dengan batas waktu periode tidak ditentukan. Bisa setiap waktu diperlukan tenaganya, pemimpin tersebut harus mampu dan selalu siap menjalankan tanggung jawabnya karna berkaitan dengan fungsi dan kedudukan yang diembannya. Untuk itu sebagai pemimpin diharuskan betul-betul memiliki mental yang cukup baik dan kesehatan fisik yang baik.
- *Memiliki stabilitas emosi*, Sebagai pemimpin yang baik dan diharapkan oleh setiap orang ialah pemimpin yang harus meninggalkan sifat prasangka, menduga-duga, sifat kecurigaan bagi bawahannya (orang-orang yang dia pimpin), namun kebalikannya seorang pemimpin memiliki sifat tegas, konsisten dan konsekuen bagi apa yang dilaksanakannya, pemimpin juga harus melekat pada dirinya jiwa sosial bagi bawahannya dan harus memiliki sifat percaya diri sendiri.
- *Motivasi pribadi*, sebagai seorang pemimpin yang memiliki kemauan untuk menjadi pemimpin harus dimulai pada dirinya sendiri yaitu datang dan bersumber dari batin hatinya sendiri, bukan dari luar dirinya secara terpaksa. Pengaruh dan dorongan dari luar hanya sifatnya rangsangan sementara saja terhadap apa yang menjadi keinginan dan kemauan untuk menjadi pemimpin. Hal ini terlihat dari kekuatan konsistensi

pendiriannya, tekad yang keras untuk bekerja dan cara menerapkan sifat dan perilaku pribadinya secara baik melalui pekerjaan yang tugasnya.

- *Kepiawaian dalam membangun hubungan*, sebagai pimpinan diharapkan mahir dan piawai dalam menjalin dan membangun komunikasi untuk menyampaikan konsep serta ide-ide yang baik untuk keberlangsungan di dalam organisasi. Hal ini dipandang perlu sebagai sesuatu yang terpenting sebagai pemimpin untuk menerima dan memberikan informasi untuk perkembangan dan majunya sebuah organisasi.
- *Kepiawaian dalam memberikan pengajaran*, biasanya orang-orang selalu mendengar jika ada orang lain apalagi sebagai pemimpin memberikan pengarahan dalam bentuk pengajaran karna kepiawaiannya dan orang lain atau bawahannya menganggap sebagai sosok guru yang harus didengar secara baik dan seksama. Dengan memberikan pengajaran maka setiap orang dapat memahami dan memudahkan untuk menjalankan tugasnya secara baik dan lancar sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- *Kemampuan interkasi*, Sebagai pimpinan sebaiknya mengetahui atau paham benar mengenai bawahannya. Mereka harus memiliki kemampuan dalam menjalin kerja sama dengan orang yang dipimpinnya, supaya bawahan tersebut bisa dipastikan benar-benar loyal dalam bekerja dibawah kepemimpinannya.
- *Kemampuan teknis*, biarpun sering kita dengar pernyataan bahwa seseorang yang semakin diatas (tinggi) level kepemimpinannya semakin berkurang kemampuan teknisnya diperlukan, karna yang lebih besar di perlukan atau utama adalah keterampilan manajemen dan keakuratan kebijakkannya, namun sesungguhnya kemampuan atau potensi teknisnya masih sangat diperlukan juga, karna jika pemimpin yang sudah tingkatan tinggi tersebut bisa lebih dahulu dikoreksi kesalahan pelaksanaan tugasnya jika ada.

Dari penjelasan yang telah uraikan diatas atas bisa dikemukakan bahwa kepemimpinan sebagai suatu aktivitas kegiatan yang berpengaruh bagi orang lain supaya orang tersebut bisa bekerja sama (mengkolaborasikan potensinya) agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Tercapai atau tidak tercapainya misi misi bagi organisasi adalah ditentukan oleh kepemimpinan yang di sepakati bersama oleh pihak-pihak yang menentukan dalam organisasi itu sendiri, bahkan perkembangan positif atau negatifnya organisasi sangat bergantung pada pimpinannya. Ada pendapat yang mengatakan dengan kepemimpinan itu bisa mempengaruhi persepsi atau pengaruh pikiran bagi orang-orang yang dia pimpin dan memberikan motivasi dengan cara mengarahkan bawahannya pada kejelasan tugas pekerjaan, tercapainya tujuan, pekerjaan yang memuaskan, terlaksananya pekerjaan yang efektif atau bisa juga dikatakan bahwa kemampuan seorang pemimpin mempengaruhi pen capaian sasaran tujuan yang sudah tentukan.

Maka Dengan itu, pemimpin diharapkan punya tanggung jawab bagi pelaksanaan lembaga organisasi atau institusi yang dia pimpin, dengan demikian pemimpin ditempatkan pada posisi yang begitu penting pada suatu lembaga atau institusi organisasi tertentu agar bisa mempengaruhi orang-orang sehingga mau bersedia melaksanakan segala tindakan yang terarah secara baik pada tercapainya tujuan dengan keberanian mengambil tindakan sebagai sebuah keputusan melalui kegiatan yang dilakukan. Dari kesemuanya itulah yang maksudkan dan disebut oleh Penulis sebagai pengaruh kepemimpinan.

Bab 5

Kajian Kepemimpinan Kristen



A. Pengertian Kepemimpinan Kristen

Kepemimpinan Kristen adalah kepemimpinan dengan sumber utama mengutamakan motivasi kasih sayang berdasarkan pengajaran dari Tuhan Yesus untuk memperoleh dan mendapatkan Tujuan yaitu untuk melayani. Melayani sebagai Hamba untuk kemuliaan Tuhan Allah dan melayani sesama manusia. Menurut Yesus Kristus, pemimpin yang sejati dan benar ialah dengan melayani, rela berkorban, dan mengutamakan kepentingan orang banyak dari pada kepentingan pribadi sebagai hal yang utama dan terdahulu. Menjadikan Yesus Kristus sebagai pemimpin yang sejati dan teladan utama adalah pemimpin yang memiliki hati pelayanan sebagai hal yang paling pokok pada kepemimpinan Kristen. Pengorbanan mereka sebagai bentuk keteladanan dari pribadi seorang pemimpin Kristen. Pemimpin sebagai pelayan sudah di sampaikan Yesus Kristus di dalam Kitab injil Markus 9:35 yaitu *"Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya"*. Dan pada Markus 10:43-45 *"Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang."* Dari ayat tersebut diatas dapat diartikan bahwa kepemimpinan yang sejati tidaklah mengenai kekuasaan dan prestasi seseorang yang besar dan tinggi akan tetapi sikap hati dengan kesungguhan untuk hidup kepada Elohim yang ada dalam kerajaan sorga dan melayani manusia sebagai sesamanya. Penjelasan dari atas sudah sangat jelas bahwa kepemimpinan yang diinginkan oleh Yesus Kristus adalah Kepemimpinan melayani untuk sesama manusia dalam berbagai macam bidang.

B. Dasar Teologis Kepemimpinan Kristen

Kepemimpinan Kristen tak akan bisa disamakan seperti kepemimpinan secara umum sebab cara kepemimpinan Kristen harus

berpatokan secara Alkitabiah sebagai ukuran kebenaran. Sebagai pemimpin yang baik harus memahami dan mengetahui asal muasal mengenai kedaulatan pemimpin itu sendiri. Awal mula kedaulatan dan sumber bermulanya kepemimpinan itu adalah diawali dari Elohim yang seutuhnya memiliki kedaulatan. Allahlah (Elohim) memiliki kedaulatan sepenuhnya untuk menentukan pilihan dan memanggil serta menetapkan seseorang menjadi pemimpin dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sesuai dengan rencana kerja Allah. Di dalam Alkitab sudah banyak dicatat mengenai beberapa sosok pemimpin atau tokoh dari masa dekade ke masa dekade yang tidak sama atau berbeda. Pada saat bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah ada di tanah kekuasaan Firaun yaitu Mesir dengan keadaan dan kondisi yang menderita serta tertekan akibat penindasan raja Firaun, Allah yang juga Elohim mengangkat Musa untuk memimpin dan membebaskan umat Israel. Musa Menjadi Pemimpin tidak karna inisiatifnya apalagi mengajukan dirinya sebagai pemimpin, namun Allahlah yang memanggil secara khusus. Allah memanggil Musa dapat kita lihat dalam kitab Keluaran 3:10-12 *"Jadi sekarang, pergilah, Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari Mesir."* Tetapi Musa berkata kepada Allah: *"Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya: "Bukankah Aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa Aku yang mengutus engkau: apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini"*. Melalui perspektif Alkitabiah Kepemimpinan lahir karna dipilih dan panggil oleh Allah. Beberapa pemimpin yang telah ditentukan dan dipilih oleh Allah Elohim sendiri, mulai dari Musa, Yosua, Daud (sang pengembala), Salomo dan Tokoh dalam Perjanjian Baru seperti Petrus dan Paulus. Karna Tuhan sendirilah yang menentukan dan berketetapan untuk tugas tanggung jawab dalam Kepemimpinan Kristen, maka seluruh pemimpin Kristen harus mempertanggung jawabkan sendiri kepemimpinannya bagi Allah. Sekalipun orang-orang tersebut dipilih sendiri oleh Allah, namun dalam penerapannya tidak berarti seorang pemimpin melakukan sesuatu pasif. Dari Allah menuntut seorang

pemimpin Kristen memiliki ketaatan. Karna Allah sendiri yang memilih maka Dia sendiri sudah jauh melihat kedepan dan mengenal setiap orang dengan apapun yang Allah sendiri hanya menuntut untuk setiap pemimpin Kristen taat kepadaNya serta mengikuti syarat-syarat rohani yang diinginkanNya. Jika tidak menjalankan persyaratan ketetapan rohani maka pemimpin Kristen tersebut tidak bisa melaksanakan kepemimpinan dengan baik. Jika pemimpin mentaati apa yang Tuhan kehendaki maka segala pengetahuan, penampilan bisa berarti.

Ada beberapa orang merasa dirinya tidak pantas dan layak dalam melayani sebagai pemimpin dengan alasan tidak memiliki karunia yang bisa diandalkan. Akan tetapi Rasul Paulus menulis ke jemaat yang ada di Korintus terang bederang dijelaskan dan tersampaikan bahwa masing-masing orang Kristen diberikan talenta dan karunia, salah satu karunia talenta itu adalah untuk bisa menjadi seorang pemimpin, namun ada juga orang yang merasa tidak sanggup dan layak karna merasa kurang memiliki talenta karunia untuk layak menjadi pemimpin, namun sudah sangat jelas melalui pesan Rasul Paulus melalui tulisannya di kitab 1 Korintus 12:4-12 disampaikan dengan terang jelas bahwa seseorang yang telah diberikan kedaulatan oleh Allah untuk memimpin tidaklah orang yang harus sempurna dengan memiliki sejumlah talenta dan karunia untuk melaksannakan apa saja. Sebagai pribdi pemimpin kristen mengabdikan dengan talenta yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Selain itu pemimpin tidak dilihat atau ditentukan dengan ketergantungan apa yang kelihatan dari luar fisiknya seperti yang disebutkan namun Tuhan memilih dengan melihat hati seperti kitab 1 Samuel 16:7 dengan jelas memberikan pengajaran bagi kita semua jika bukan karna sesuatu yang kelihatan dari luarnya seseorang untuk bisa dijadikan sebagai pemimpin atau sebagai penentu pantas tidaknya melainkan Allah telah melihat hati seseorang sehingga kesediaan hati menjadikan layak untuk menjadi pemimpin selain memiliki karunia dari Allah. Karunia dan kesiapan hati seseorang menjadi hal yang melandasi kelayakan dalam pengabdian dari seorang menjadi pemimpin terlebih

khusus sebagai pemimpin rohani Kristen. Pemimpin rohani yang kompeten adalah sosok pimpinan yang muncul dari dan bersumber dari pengikut Kristus yang baik. Seorang pemimpin awal mulanya muncul dari sebuah ketekunan dan kesetiaan pada hal yang rendah dan kecil seperti halnya seorang jendral muncul dari tingkatan prajurit, inilah yang membuktikan jika seorang pimpinan yang berkompeten adalah diawali dari pengikut yang setia. Pemimpin Kristiani yang baik sudah tentu mereka yang berasal dan datang dari umat gereja yang baik juga, karna dengan kerendahan hati yang dimilikinya sudah memperlihatkan keseriusan dan kesungguhan hatinya untuk mengabdikan dengan penuh ketangguhan dan ketekunan. Jika seorang pemimpin sudah bisa merendahkan dirinya sendiri maka dia akan merendahkan diri kepada Allah. Tugas sebagai pemimpin Kristen tidaklah hanya untuk memberikan ide gagasan serta kosep dalam sesuatu hal akan tetapi memberikan semua total hidupnya termasuk jiwa karakternya sebagai teladan.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa " sesuatu yang sudah kamu pelajari dan yang sudah didapatkan, dan sesuatu yang sudah didengar serta yang sudah dilihat dari padaku perbuatlah itu "pernyataan ini adalah sebuah perintah yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh." Untuk menjadi seorang pemimpin sebaiknya memiliki tingkat keagamaan yang cukup baik sebagai indikator utama. Sebagai pemimpin kristen yang diterapkan adalah menerapkan kehendak yang dimiliki oleh Yesus Kristus sebagai teladan yang agung dan mulia. Seluruh umat kristiani yang memimpin sebaiknya dan seyogyanya melaksanakan kepemimpinan yang bersumber dari Allah Elohim yang dalam Perjanjian Baru sama dengan Tuhan Yesus Kristus, namun kebanyakan dari mereka sudah kehilangan akal untuk melaksanakan kepemimpinan yang bersumber dari kerajaan Sorga sehingga mengambil cara-cara kepemimpinan dunia yang sudah ada dan populer tanpa mereka sadari sebagai suatu jebakan lingkaran setan. Hal seperti ini tidak hanya berlaku di dunia kerja sekuler namun ini juga sudah sedang merebak melalui kehidupan organisasi rohani di

komunitas-komunitas umat kristiani, dapat kita lihat melalui tempat-tempat persekutuan, tempat-tempat Pendidikan Kristen, rumah-rumah sakit Kristen, maupun dalam gereja itu sendiri, contoh yang kita bisa lihat sendiri saat seorang pemimpin kristiani menjadi pemimpin bagi orang-orang di komunitasnya, terkadang sang pemimpin tersebut lebih condong menggunakan praktek-praktek kepemimpinan yang lagi trend pada kondisi dunia sekuler saat sekarang ini seperti kepemimpinan dalam dunia kerja yang pada umumnya selalu mengejar hasil sebagai sebuah tujuan akhir sekalipun dalam melewati tahapan proses tidak begitu maksimal dan bahkan tidak menghargai sebuah proses, sementara melalui kepemimpinan rohani Kristen antara proses dengan pencapaian hasil harus seimbang dan berjalan beriringan tanpa ada salah satu yang lebih mendominasi pusat perhatian.

Yesus Kristus atau Yeshua (ישוע) adalah contoh pemimpin Rohani kristiani yang sejati dan mulia, namun sekalipun sifat keIlahiannya tetap ada menjadikan bentangan jarak dengan manusia tidak dapat terjangkau akan tetapi ketika sifat manusianya ada saat perjalanan hidupnya dalam dunia dijadikan role model atau gaya kepemimpinan kristiani dan itu yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan Yesus saat itu sampai sekarang ini di jadikan oleh para tokoh-tokoh umat kristiani dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Ketokohan Tuhan Yesus saat di dunia yang disebut dengan Sang Mesias (Yeshua Hamashiach) berdampak besar dalam kepemimpinan masa kini adalah kepemimpinan melayani dengan penuh kerendahan hati sehingga segala sifat karakter manusiaNya diberikan untuk kita sebagai manusia biasa agar diterima. Semua yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus dapat kita lakukan juga. Tuhan Yesus tidak pernah beranggapan bahwa kita sebagai kelas dua. Tuhan tidak mnyembunyikan apapun kepada kita.

Dengan banyak belajar dan menggali akan kepemimpinan Tuhan Yesus di dalam Alkitab dan beberapa tulisan Rohani Kristen maka kita dapat menemukan beberapa prinsip untuk menjadi pemimpin umat Kristen guna mengembangkan kepemimpinan rohani

Kristen bagi gereja masa kini. Sadar atau tidak sadar harus diakui bahwa setiap orang yang memimpin tidaklah sempurna untuk berdampak positif dan bertujuan secara baik, ada pemimpin yang dalam menjalankan kepemimpinannya memiliki tujuan tertentu karena ambisi kekuasaan dan target keuntungan, baik keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompok/golongan yang terkadang merugikan dan merusak orang lain bahkan nyawa orang lain pun terancam. Namun lebih banyak juga kepemimpinan yang dijalankan dengan baik dan bertujuan baik sehingga manfaat kepemimpinannya bagi orang lain sangat terasa secara positif untuk kelangsungan hidup dan lingkungan sekitarnya, hal ini terjadi karena dilandasi kepemimpinan dengan nilai-nilai agama yang baik. Dari dua sisi kepemimpinan ini dapat terpotret bahwa jika kepemimpinan dilandasi dengan nilai-nilai agama maka hasilnya juga akan baik dan bermanfaat dengan baik pula. Dalam Kitab Perjanjian Baru sudah mencatat jika Tuhan Yesus kadang kala menarik perbedaan yang kuat antara nilai-nilai Rohani murid-muridNya dengan yang bukan murid-muridNya sebagai sebuah standar nilai, ini biasa terjadi saat Tuhan Yesus mengambil kontras antara orang yang bukan Yahudi (bangsa-bangsa yang menyembah berhala) dan murid-murid Yesus itu sendiri. Contoh lain yang sering bertentangan nilai spiritual yang ditarik Tuhan Yesus adalah antara pengikut-pengikutNya dengan kalangan ahli Taurat dan orang Farisi sebagai pemuka rohaniawan yang taat. Pahami dan konsep pada kepemimpinan yang dipakai di gereja dan konsep yang dipakai secara sekuler sangat berbeda dan tidak indentik karena pada kepemimpinan gereja bertitik tolak dari landasan teologis sehingga kuat dan kokoh karena dasarnya adalah Iman Alkitabiah sehingga membangun paham dan konsep kepemimpinan Kristen di gereja bisa dikembangkan dengan baik dan lancar, sementara secara sekuler dunia kepemimpinan yang ada adalah selalu melihat pada sisi populer yang selalu melihat pada pencapaian hasil yang terkadang titik akhirnya sendiri tidak sesuai yang diharapkan. Disinilah sangat jelas perbedaannya bahwa kepemimpinan kristiani merupakan karunia rohani yang diberikan oleh Allah bagi umatNya, tinggal bagaimana umat Kristiani dengan semaksimal mungkin untuk hidup yang

benar, suci memiliki komitmen patuh dengan mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui hal ini sangat diperlukan seorang pemimpin atau para pemimpin yang bisa melakukan sesuatu dalam kerangka membantu setiap manusia yang cenderung melakukan dosa, terlalu berorientasi pada keinginan pribadinya semata dan terkadang menyimpang dari apa yang sesungguhnya baik, untuk itu diharapkan agar kepemimpinan Kristiani ini bisa kembali memiliki karakter sifat seperti Yesus Kristus.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa kepemimpinan Rohani Kristen lewat 2 (dua) gaya bahasa atau majas. Pertama, memimpin diupamakan laksana kisah perjalanan dan kedua adalah laksana suatu api. Hal ini bisa diumpamakan kepemimpinan adalah sebagai sebuah perjalanan proses kepemimpinan bisa dimaksudkan sebagai gerak atau dinamika yang berarti dalam proses perjalanan kepemimpinan, sang pemimpin tersebut harus paham benar tujuan perjalanan, sepenuhnya mengerti dan memahami benar sejauh mana mereka telah melakukan perjalanan mereka, komitmennya untuk melepaskan masa lalu yang mereka telah tempuh dan mengarahkan pandangannya kedepan, dan untuk metafora api pada kepemimpinan kristen sebagai sebuah gambaran bahwa kepemimpinan itu memberika kejelasan arah secara terang bederang. Dengan cara seperti itu seorang pemimpin dapat memberikan kehangatan hati bagi bawahannya atau pengikutnya. Seorang pemimpin juga bisa membuat bawahannya atau orang yang dipimpinnya semakin berkualitas dan terampil dalam menjalankan tugasnya dan memiliki karakter yang lebih baik. Sebagai pemimpin bisa memberikan semangat motivasi bagi orang-orang yang menjadi pengikutnya atau yang dipimpin agar tercapai sesuatu hal yang lebih baik dan dapat berpengaruh baik, sementara api didapatkan oleh seorang pemimpin dari Allah Bapak Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus.

Pondasi yang kuat secara teologis bagi kepemimpinan Kristiani adalah: Pertama, manusia sebagai rupa Allah adalah hakikat kepemimpinan Rohani Kriisten, Kedua, Kepemimpinan Kristen ialah jalur memuliakan dan menyembah Alohim, Ketiga, Kepemimpinan

Kristiani adalah jalan untuk memberikan ucapan syukur bagi Alohim, dan yang terakhir Keempat ialah jalan responsibility terhadap Anugrah Allah.

1. Manusia Sebagai Gambaran Allah merupakan Hakikat Kepemimpinan

Manusia sudah diciptakan secara khusus oleh Allah seperti gambaranNya sudah melekat dalam dirinya untuk menjadi pemimpin sebagai sebuah hakikat. hal ini terdapat di kitab perjanjian lama kej.1:26 yang bisa dijelaskan bahwa manusia telah di jadikan Allah segambar dan serupa (imago dei), supaya manusia bisa menguasai ikan-ikan yang ada di laut, bisa menguasai semua jenis burung yang ada di udara, ternak dan berkuasa atas semua isi bumi serta seluruh jenis binatang melata yang merangkak di bumi. Hal ini sudah menunjukkan bahwa manusia sejak pertama diciptakan oleh Allah sudah memiliki hakikat sebagai kepemimpinan dalam dirinya. Hal diatas menunjukkan jika setiap orang dengan tidak terkecuali adalah sama-sama jadi pemimpin yang ditentukan Allah untuk memimpin. Dari hal ini dapat lebih dijelaskan lagi bahwa Allah menciptakan setiap manusia untuk memerintah, menguasai, mengelolah, mengatur, mengendalikan dan lingkungan sekitarnya bisa dipimpin, ini pertanda kalau manusia memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, hal yang sama pada burung diciptakan dengan sifat bawaan untuk terbang, begitupun pada ikan diciptkan untuk berenang, maka hal itu juga sama dengan manusia mempunyai kapasitas dalam memimpin dan mengendalikan kehidupan ini.

Untuk menapaki kehidupan bersama kepemimpinan tidak bisa terelakkan, akan tetapi dalam memimpin mestinya berpatokan dari yang memberikan kewenangan dalam memimpin sesuai dengan ketetapan dari Allah sebagai satu-satunya pemimpin untuk menjalankan konsep dan cara saling tolong menolong pada sebuah kesepadanan sesuai dengan taraf dan kesetaraannya. Untuk itu kepemimpinan manusia sebaiknya menggambarkan kepemimpinan Allah. Kekristenan sangat meyakini jika Yesus Sang Mesias sudah sangat sempurna mengaktualisasikan kepemimpinan dari Allah (Elohim)

itu sendiri sebagai role model kepemimpinan Rohani Kristen yang sejati dan sesungguhnya. Melalui kitab injil Perjanjian Baru secara menyeluruh sangat jelas mengenai eksistensi Yesus Kristus yang dilihat dari semua sudut pandang selalu terpusatkan bagi diriNya seperti perbuatanNya dan perkataanNya yang menjadi panutan. Para murid-muridNya menjadikan panutan yang diikuti sebagai inspirasi dan contoh sebagai seorang pemimpin karna Dia sendiri mengatakan bahwa "Aku sudah mmberikan dan mencontohkan teladan bagi kamu, agar kamu bisa berbuat sama dengan apa yang telah Ku perbuat bagimu". Bahwasanya sebagai Hamba pastinyalah tidak lebih tinggi dari tuannya sendiri. Seperti itulah kepemimpinan kristen yang berlaku dengan menteladani Yesus sebagai pemimpin pelayan bagi orang lain

Pemimpin-pemimpin Kristen ialah gambaran dan rupa Allah sebagai manusia karna dari dimensi role model keteladananNya pada cara manusia memimpin. Melalui hubungan antar manusia dengan manusia yang lainnya dalam hal memimpin yang terlaksana adalah pola kepemimpinan yang bersumber dari Allah atau ungkapan lain tercermin pada kepememimpinan Yesus Sang Jurus Selamat.

2. Kepemimpinan Kristen Sebagai instrumen untuk Memuliakan Allah

Dasar kepemimpinan Kristiani diharuskan berawal dan bersumber melalui otoritas Allah karna semua yang Dia ciptakan akan dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan bagi diriNya sendiri, salahsatunya ialah kepemimpinan karna sesungguhnya kepemimpinan seperti yang penulis sampaikan sebelumnya diatas bawa kepemimpinan yang dimiliki seseorang adalah sesungguhnya karunia dari Allah, seperti yang telah di sampaikan Paulus atau Saulus bagi umat Tuhan yang ada di kolose bahwa Dialah yang telah menciptakan segala sesuatunya yang ada di kerajaan surga dan semuanya yang ada di dalam seisi bumi, baik yang nampak terlihat maupun yang tidak nampak terlihat termasuk manusia. Dari sini sangat jelas bahwa semuanya yang dimiliki manusia adalah bersumber dari Dia, maka dengan itu segala potensi yang melekat pada diri manusia, salah

satunya potensi kepemimpinan adalah ciptaan Allah. Seperti halnya kepemimpinan Kristiani yang mula-mula dan pertama adalah dari Allah Sang Pencipta yang kemudian kembali ke Dia untuk kemuliaaNya. Kemuliaan bagi Allah sangat dipahami secara sempurna oleh Yesus Kristus sebagai tujuan utamaNya datang ke bumi, untuk itulah Yesus Kristus berbicara kepada bapa di Surga, bahwa aku sudah memuliakan Engkau di bumi (Adamah =bahasa Ibrani Alkitab: אָדָמָה), dengan cara menyempurnakan semua tugas yang Engkau mandatkan bagiKu sebagai pekerjaan. untuk itu sebagai orang Kristen kepemimpinan sebagai wahana dan alat memuliahkan Allah sang Pencipta.

3. Kepemimpinan Kristen Adalah Sarana Untuk Mengucap Syukur

Melalui Kepemimpinan juga bisa menjadi alat atau instrument untuk mengucap syukur bagi Allah. Sebagai pengikut kristus yang benar-benar mengasihi dan mengenal Yesus Kristus pasti sudah menjadikan seluruh hidupnya sebagai simbol syukur bagi Allah. Diantaranya adalah melalui semua yang dilaksanakan,diantaranya ialah kepemimpinan.Paulus menyampaikan bahwa apapun yang kamu akan perbuat atau lakukan, perbuatlah dengan kesungguhan hati sama dengan apa yang akan diperbuat bagi Tuhan dan tidaklah bagi manusia. Melakukan suatu kepemimpinan dengan mendasari dan mengingat dan pada Tuhan, dilaksanakan sebagai perbuatan rasa syukur dengan memfokuskan kepemimpinan kristen bertitik tolak dengan fokus pertama dan utama bagi Tuhan setelah itu baru tertuju bagi manusia. sebagai seorang pimpinan umat Kristiani sebaiknya melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan penuh semangat dan segiat mungkin sesuai dengan karunia yang Allah telah berikan.

4. Kepemimpinan Kristen Adalah Tanggung Jawab Atas Anugerah

Melalui kebenaran Firman Tuhan sangat jelas menyampaikan jika orang-orang yang telah mengakui dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi maka mendapatkan pula Anugrah Kepemimpinan,

dengan menerima urapan agar mendapat kuasa dari Allah untuk menjadi anakNya sehingga dalam dirinya ada kekuatan, punya kemampuan dan kapasitas, memilki otoritas dan berpengaruh dalam memimpin. Sebagai murid Tuhan Yesus diberi mandat kuasa agar bisa menjangkau orang-orang disekitarnya yang belum kenal pengasihian dari Tuhan Yesus. Dengan adanya Kuasa yang telah diberikan Allah ini sebagai bukti bahwa siapapun oran Kristen ialah pemimpin. Dari hal ini dapat dijelaskan bahwa Pemimpin Kristen ialah orang yang dalam dirinya telah terima Tuhan Yesus secara pribadi dan sudah berubah secara rohani yang nantinya akan membimbing orang lain agar tergerak lewat apa yang telah dia terima dari Tuhan. Sebagai pemimpin kristiani kelebihan yang ada padanya bukan berasal dari dirinya sendiri namun namun bersumber dari keintiman dengan Tuhan dan selebihnya itu ialah anugrah pemberian dari Tuhan. Orang yang menjadi pemimpin umat kristiani bergantung sepenuhnya bagi Allah dan bukan berdasarkan dengan apa yang lebih pada dirinya, sehingga pemimpin tersebut menjadi peka pada suara Tuhan, mengenal VisiNya, lebih patuh dan taat kepada Tuhan dan semakin terus bertumbuh didalam Tuhan. Pertumbuhan tersebut meliputi aspek knoledge, dan perilakunya.

C. Keunggulan dari Kepemimpinan Kristen

Beberapa keunggulan dari kepemimpinan Kristen Sebagai berikut:

- *Pemimpin Kristen ialah mereka yang memeluk agama Kristen.* Pemimpin Kristen ialah sesorang Kristen yang secara pribadi telah mengaku dan terima Yesus Sang Mesias sebagai Tuhan dan Juruselamat dunia. Serta menyadari diri sebagai orang berdosa. Untuk itu dengan menjadi orang Kristen menaruh harapan pada Yesus kristus.
- *Pemimpin Kristen ialah seseorang pemimpin yang menjadi pengikut kristen yang memlki komitmen.* Tidak cukup hanya sebagai pemimpin Kristeni jika tidak mengambil langkah untuk beriman dalam Tuhan Yesus dan menempatkan dirinya

dibawah hadirat Tuhan yang dengan komitmen komitmen penuh dalam dirinya kepada Tuhan Yesus.

- *Wahyu Illahi adalah sumber kebenaran dari kepemimpinan Kristiani.* Seorang pemimpin kristiani yang tepat adalah pemimpin yang memiliki dasar kebenaran dari pewahyuan Illahi. Pewahyuan itu didapatkan melalui Iman kepada Yesus Kristus atas Anugerah dan kemurahannya menyatakan diriNya turun kedalam dunia.
- *Karakter Illahi sebagai perhatian utama pada Kepemimpinan Kristen.* Karakter Illahi adalah hal yang terpenting bagi seorang pemimpin kristen dalam memimpin orang lain. Seperti halnya Rasul Paulus yang membekali Titus dan Timotius serta semua jemaat yang ada untuk memiliki karakter Illahi agar menjadi pemimpin pada tempat ibadah yang mula-mula di zaman para Rasul.
- *Kepemimpinan Kristiani sangat paham sekali bahwa Tujuan memiliki Peran Penting.* Bentuk dan Tujuan menjelaskan mengenai dasar pemimpin bertingkah laku dengan cara tertentu dalam melakukan sesuatu sehingga pada akhirnya motivasi pemimpin secara langsung dan tidak langsung memiliki dampak pengaruh pada karakternya.
- *Roh Kudus menjadi kekuatan dalam pelayanan seorang pemimpin Kristen.* Salah satu kelebihan berikut pada kepemimpinan kristen adalah Pemimpin melayani dengan kekuatan yang bersumber dari Roh Kudus sementara kepemimpinan yang tidak memahami kekristenan memimpin dan bekerja dengan kekuatan sendiri, yang didasari pada keinginan ambisi semata (kedangian). Hal ini bukan berarti bahwa pemimpin umat kristiani atau umat kristiani secara universal tidak melakukan hal-hal duniawi, akan tetapi yang membedakan adalah berjalan dengan kekuatan Roh Kudus.
- *Seorang pemimpin Kristen mempraktekkan pemimpin yang berhati Hamba yang Illahi.* Sebagaimana yang Yesus sampaikan bahwa pemimpin yang memiliki hati seorang Hamba adalah pribadi yang siap melayani dengan penuh

kerendahan hati. Memiliki sikap hati yang rendah berkaitan dengan cara dalam memimpin, sementara pelayanan ialah substansi atau pokok dari kepemimpinan kristen, yang mana orang lain yang mendapatkan manfaat dan faedahnya. Orang kristen hadir untuk memberikan pelayanan bagi orang lain bukan untuk mengejar keinginannya semata demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya yang pada kesimpulannya melayani diri sendiri. Melayani orang lain dengan penuh kerendahan hati adalah sesungguhnya tujuan dari kepemimpinan kristiani.

- *Memiliki karunia khusus dalam kepemimpinan.* Paulus mencatat bahwa kepemimpinan merupakan karunia khusus dari Yesus Kristus bagi gerejaNya. Pribadi yang memiliki karunia kepemimpinan pastilah selalu menarik pengikut. Mereka yang memiliki karunia kepemimpinan mestinya menunjukkan pribadinya sebagai pemimpin yang lebih bagus, memiliki kelebihan jika di dibandingkan dengan para pimpinan-pimpinan yang lainnya yang tidak memperoleh karunia sebagai pemimpin dari Tuhan.

D. Karakter Pemimpin Kristen

Pada kepemimpinan Kristiani, yang dimaksudkan dengan pemimpin yang tepat ialah seseorang yang memiliki karakter dan hidup untuk bisa memberikan pengaruh dan motivasi bagi bawahannya agar bisa mengikutinya, terlebih khusus lagi untuk mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Sebagai pimpinan umat kristiani seseorang telah memiliki karakter tersendiri yang melekat pada dirinya berdasarkan dengan karunia yang telah di peroleh dari Tuhan.

Karakter-karakter kepemimpinan Kristen itu ialah sebagai berikut:

1. Pemimpin bisa di percaya

Menjadi pemimpin yang sejati adalah mereka yang mengutamakan kepentingan orang banyak diatas segala-galanya dan

menghilangkan motivasi pribadinya untuk mencari keuntungan demi terpenuhinya ambisi dan keuntungannya serta kelompoknya. Apabila seseorang yang melekat pada dirinya sebagai pemimpin dan hanya memikirkan/mendahulukan diri sendiri maka orang tersebut tidak akan memiliki pengikut bahkan orang-orang disekitarnya akan menjauhi bahkan meninggalkannya, itu pertanda pemimpin seperti ini tidak dapat kepercayaan, karna pemimpin yang ideal dan tepat ialah pemimpin yang bisa dipercaya. Tanpa mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka orang tersebut tidak akan bisa menjadi pemimpin karna menyangkut hajat hidup dan masa depan orang banyak berada ditangannya, begitu sebaliknya pemimpin yang baik dan tepat adalah mereka yang bisa di percaya. Seorang pemimpin bisa dipercaya berawal dari sikap dan perilakunya dalam memimpin yang mencerminkan kesalehan dan bijaksana untuk menggerakkan semua kemampuan, serta potensi yang mereka miliki untuk keperluan atau kepentingan para pengikut.

2. Pemimpin mampu menarik keputusan tepat

Mengambil keputusan yang tepat adalah ciri pemimpin yang ideal dan mampu mengembangkan roda organisasi dengan baik sehingga mencapai target tujuan yang diharapkan. Demikian halnya dalam kepemimpinan Kristen mengambil keputusan yang tepat adalah pemimpin Kristen ideal dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang cermat untuk memikirkan baik buruknya sesuatu apa bila keputusan itu diambil, Yang tentunya pertimbangan-pertimbangan itu di dasari dengan hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan maka keputusan yang diambil terhindar dari masalah dan segala resiko yang kemungkinan akan terjadi serta dengan hikmat dari Tuhan maka pemimpin tersebut akan konsentrasi untuk mempersiapkan semua rencana dalam tata kelola organisasi atau komunitas. Dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan tentunya selalu ada masalah yang akan timbul dan terkadang menjadi sebuah ancaman, akan tetapi jika kita meminta himat dari Tuhan maka kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat.

3. Pemimpin membina Kesetiaan bawahannya

Mambangun hubungan yang baik dengan bawahan adalah salah satu kunci dari pemimpin yang ideal. Hubungan yang baik itu dilakukan dengan banyak cara dan jenisnya, apakah itu dilakukan dengan menjadikan bawahan sebagai sahabat sejati, atau membangun hubungan dengan bawahan didasari dengan sifat kekeluargaan. Apabila sudah terjalin hubungan yang baik dan saling percaya dengan bawahan sendiri maka dari situ akan muncul kesetiaan dari bawahan itu sendiri, begitu pun sebaliknya dari pimpinan harus merawat dan membina kesetiaan bawahan tersebut dalam organisasi. Kesetiaan adalah karakter yang melekat sama diri seseorang dengan bermula dari sikap kepercayaan, tindakan yang memberi dukungan dan patuh dengan disertai keteguhan hati. Terkadang kesetiaan pimpinan terhadap bawahan di sepelekan dan bahkan ada yang menentang kesetiaan ini sebagai sebuah prinsip oleh beberapa orang karna dianggap tidak berguna dan penting, mereka selalu memperhatikan pada hal-hal yang besar secara kasat mata dan yang bisa cepat memiliki pengaruh atau dampak yang besar, akan tetapi jika terlalu lama di sepelekan atau tidak diperhatikan maka akan menjadi sebuah masalah besar dikemudian waktu. Betapa pentingnya seorang pemimpin harus membina kesetiaan bagi bawahan karna dengan membina dan merawat kesetiaan itu akan berpengaruh besar terhadap kinerja dari bawahan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, untuk itu seorang pemimpin harus membina kesetiaan itu sebagai hal yang terpenting karna sama saja setia kepada Yesus Tuhan Sang Juruselamat dan setia bagi kebenaran.

4. Pemimpin sebaiknya Jelas dan Tegas

Sebagai pimpinan sebaiknya dalam mengambil tindakan keputusan harus berpikir yang jernih, didasari dengan cara proaktif, dan bertitik tolak untuk menyelesaikan masalah. Sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memberikan pokok-pokok program kerja utamanya sebagai sebuah sasaran utama secara baik dan benar serta terperinci dan dalam menyampaikan gagasan program kerjanya tetap mempertimbangkan perasaan bawahan

dengan penuh rasa empati dan memahaminya. Seorang pemimpin dalam membangun komunikasi dengan bawahannya tidak boleh bebas berkata dengan sembarangan sesuka dia secara berapi-api, apa lagi yang disampaikan tidak jelas. Akan tetapi sebagai pemimpin sebaiknya memberikan penyampaian yang tepat dan jelas bagi bawahannya. Pemimpin tersebut tidak akan diikuti jika banyak orang tidak yakin apakah pemimpin mereka sudah yakin dengan dirinya sendiri.

5. Pemimpin harus berhikmat

Pemimpin Kristen yang baik adalah mereka yang memiliki hikmat dari Tuhan sehingga dalam mengambil setiap keputusan selalu berpikir sehat dan tepat sasaran serta berakar kuat sehingga keputusan tersebut bisa mendapatkan keputusan yang terbaik dan berdampak besar bagi orang banyak dan lingkungan sekitarnya. Dengan selalu dituntut hikmat dari Tuhan maka kita juga dapat menfilterisasi hal-hal dunia yang bisa merusak tujuan kepemimpinan Kristen yang telah terbangun secara baik dari awal. agar selalu mendapatkan hikmat dari Tuhan maka harus selalu memelihara dan komitmen dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui persekutuan doa.

6. Pemimpin harus Optimis dan motivasi

Motivasi kerja yang paling berperan adalah rasa optimis yang tinggi, yang dalam sebuah organisasi harus dimulai dari seorang pimpinan agar bisa memberikan penguatan kepada anggotanya dalam menjalankan tanggung jawab yang ada pada dirinya masing-masing. Rasa optimisme sebagai penguatan kepada bawahan akan memberikan pengharapan besar terhadap mereka bahwa tanggung jawab yang mereka dapatkan akan memiliki hasil yang baik dan memiliki manfaat besar dikemudian hari. Namun begitu sebaliknya jika seorang pemimpin tidak memiliki rasa optimis maka anggotanya juga tidak akan memiliki semangat dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai atau bisa berdampak pada kegagalan.

7. Pemimpin harus Disiplin

Sikap mengendalikan diri harus dibutuhkan oleh seorang pemimpin agar bisa mencapai kesuksesan pada setiap perjuangan yang dilakukan dalam semua lini kehidupan. Pengendalian diri ini adalah bagian dari kedisiplinan diri yang bisa menjadi modal utama menjadi pemimpin yang baik, karna dari kedisiplinanlah akan menghasilkan pengelolaan diri yang baik agar setiap etos kegiatan kita bisa teratur dengan baik dan sistematis secara rapi dan sederhana sehingga orang yang ada disekitaran kita bisa menerima kita dengan baik juga agar apa yang ingin kita sampaikan atau wujudkan pada orang lain bisa diterima dengan baik. Ada beberapa orang yang berprestasi secara akademik maupun sukses dalam bidang ekonomi tapi tidak mampu mempengaruhi orang banyak secara positif karna memiliki kelemahan dalam manajemen diri serta pengendalian diri yang masih sangat lemah sehingga kemampuan adaptasi secara social dengan orang lain tidak bisa dilakukan dengan tepat bahkan terkadang salah penempatan diri untuk melihat kondisi orang lain terutama dalam hal bersikap dan bertutur kata. Kedisiplinan adalah bagian terpenting dalam kepemimpinan karna dengan mendisiplinkan diri maka segala sesuatunya kita bisa mengatur diri kita untuk melakukan tindakan yang tepat, teratur dan terukur sehingga tindakan atau keputusan yang kita ambil tepat sasaran dan memiliki kualitas yang bagus dan berdampak besar bagi orang lain dan sekitarnya. Kedisiplinan seorang pemimpin akan berdampak besar terhadap kewibawaannya dalam organisasi yang mereka pimpin sehingga selalu diterima oleh bawahannya akan setiap apa yang akan dilakukannya dan disampaikan bagi bawahannya. Begitupun sebaliknya jika seorang pemimpin tidak bisa mengendalikan dirinya maka pemimpin tersebut akan mendapatkan banyak kendala dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya bahkan ada dari mereka yang jatuh bahkan gagal sebagai pemimpin. Banyak tokoh-tokoh Kristen dalam Alkitab gagal dalam kepemimpinannya karna tidak bisa mengendalikan diri dalam hal kedisiplinan, seperti Simson yang kekuatannya hilang akibat tidak bisa mengendalikan diri dalam

kedisiplinan. Salomo jatuh dalam dosa karna tidak biisa mendisplinkan dirinya dalam hal pengendalian diri.

8. Seorang pemimpin harus memberi penguatan bagi orang lain.

Esensi sesungguhnya sebagai pemimpin adalah membawa ketenangan dan kesejukan bagi orang-orang yang ada disekitarnya untuk lebih baik dan lebih meningkat pada hal-hal yang positif. Salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang agar orang lain di sekitarnya lebih baik adalah dengan memberikan penguatan agar orang tersebut lebih tenang dan lebih stabil untuk menjalani kehidupannya sehingga segala sesuatu yang direncanakan dan dicita-citakan bisa tercapai. Demikian pula dalam sebuah komunitas kelompok atau organisasi seorang pemimpin harus mampu memberikan penguatan terhadap orang-orang yang dia pimpin agar para bawahannya tersebut bisa kuat dan stabil dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya serta terpenting adalah selalu termotivasi dari penguatan tersebut. Begitu halnya dalam organisasi kekristenan seperti organisasi gerejawi yang mengutamakan pelayanan, saling menguatkan adalah hal yang paling terpenting dan sangat berperan, karna dengan saling menguatkan maka misi pelayanan gerejawi akan bisa berjalan dengan lancar. Penguatan dalam pelayanan gereja yang disebutkan diatas adalah salah satu bagian dari penguatan seorang pemimpin Kristen pada sebuah organisasi dan hal ini telah dilakukan oleh Rasul Paulus kepada para tawanan lain ketika mereka dalam pelayanan yang berada diatas kapal saat sedang berlayar dan ombak menerpa mereka. Rasul Paulus menyampaikan agar menabahkan hati karna percaya kepada Allah bahwa kesemunya pasti terjadi sesuai yang telah di sampaikan Allah kepada Paulus itu sendiri. Keyakinan Iman Rasul Paulus inilah yang menjadi penguatan bagi mereka yang Bersama-sama diatas kapal ketika diterpa ombak dan sekaligus penyemangat.

9. Seorang Pemimpin Mempunyai Simpati dan Belas Kasihan

Terkadang dalam melakukan sesuatu kita diperhadapkan pada sebuah kenyataan kegagalan yang tidak bisa terelakkan, dan kegagalan tersebut acap kali membuat patah semangat bahkan ada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi atas kegagalan tersebut bahkan tidak bisa bangkit lagi dengan kejadian yang dialaminya. Kejadian-kejadian seperti ini berlaku untuk setiap orang tanpa memandang bulu mengenai status dan latar belakang profesi seseorang sehingga keadaan seperti ini dibutuhkan orang lain untuk memberikan semangat agar bisa bangkit kembali. Simpati dan belas kasihan adalah salah satu bentuk cara untuk memberikan dukungan semangat bagi orang-orang yang mengalami kejadian seperti ini dan jika hal yang serupa terjadi pada salah satu anggota dari seorang pemimpin maka pimpinan tersebut harus memiliki rasa simpati dan peduli sehingga anggotanya tersebut bisa bangkit kembali. Para pengikutnya jika terjadi hal yang demikian perlu dibantu untuk diberikan rasa simpati dan belas kasihan seperti Yesus Kristus memiliki rasa simpati terhadap murid-muridnya.

10. Pemimpin Mencontohi Kristus

Karakter merupakan hal yang berperan penting pada diri seseorang dalam memimpin karna dari karakter inilah akan muncul kehormatan seorang pemimpin dan dari karakter jugalah akan muncul kepatutan sebagai pemimpin, integrity, ketulusan, kesucian, kesetiaan dan kemurnian moral. Semua karakter yang disebutkan ini ada pada pribadi Yesus Kristus sebagai Teladan yang Agung dan dijadikan sebagai role model yang sempurna sebagai kepemimpinan Kristen yang sejati dan mulia.

E. Ciri-Ciri Kepemimpinan Kristen

Sudah menjadi hal yang pasti pada kepemimpinan Kristen, bahwa sebagai pemimpin adalah kunci bagi para bawahannya untuk tetap memiliki motivasi dan semangat yang besar dalam bekerja.

Ciri-Ciri pemimpin Kristen adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Memiliki Tanggung Jawab

Dalam suatu kepemimpinan, kebanyakan pemimpin sering kali lari dari tanggungjawab karna tergoda dengan hal-hal lain sehingga melemparkan tanggung jawab bagi bawahan apabila kesalahan itu terjadi. Sudah sangat jelas Alkitab mencatat dan menyampaikan mengenai sikap yang selalu mencari-cari alasan yang tidak masuk dalam akal yang baik maka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya juga tetapi begitu sebaliknya jika mereka melakukan kebaikan maka mereka akan mendapat pahala yang besar. Karna Tuhan Yesus Sang Juruselamat akan meminta pertanggung jawaban dari apa yang setiap orang lakukan.

Cara-cara menjadi pimpinan yang memiliki tanggung jawab:

- Memiliki semangat yang kuat, beberapa hal yang berpengaruh terhadap motivasi yang kuat, sebagai salah satu faktor utama kepemimpinan adalah bertanggung jawab. Sebagai pimpinan harus memiliki pertanggung jawaban penuh terhadap setiap hal yang telah dilakukan sendiri dan yang telah mereka lakukan (percayakan) bagi bawahannya sebagai bentuk tanggung jawab sehingga pemimpin tersebut dihormati dan disegani oleh orang-orangnya sebagai pengikut dan pastinya mereka tetap akan setia Bersama-sama dalam situasi apapun.
- Sebagai pemimpin tidak diperkenankan untuk membenarkan diri sendiri dan tidak bertanggung jawab.

2. Pimpinan yang Efektif

Sebagai pemimpin cara yang pertama harus dilakukan adalah meminta hikmat dari Tuhan apa yang harus dilakukan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk diperbuat kepada bawahannya, dan berikut yang dilakukan adalah menjadikan karakter Yesus Kristus sebagai role model pada kepemimpinannya. Dengan menerimanya hikmat dari Tuhan maka semua yang dilakukan itulah pasti efektif dan berdampak besar dalam kepemimpinan.

Cara-cara sebagai pimpinan yang Efektif:

- Komunikasi yang baik dengan bawahan, seperti halnya Tuhan Yesus mampu berkomunikasi secara baik dengan murid-muridnya sehingga apa yang diinginkan oleh Bapa di surga terlaksana dengan baik sebagai misi mulia dan abadi. Demikian pula dengan pemimpin Kristen diharuskan mampu mengkomunikasikan segala sesuatu secara baik dan benar terhadap bawahannya dalam menjalankan suatu kegiatan atau misi yang telah ada agar bisa berjalan secara baik.
- Berbagi tanggung jawab, sama seperti Musa saat memimpin umat Israel keluar dari Tanah perbudakan mesir, ia berbagi tanggung jawab dengan beberapa orang yang taat dan bisa dipercaya untuk membantu mengurus umat pilihan Allah Israel yang sangat banyak. Musa memberikan tanggung jawab itu karna merasa letih dan terasa capek akan tanggung jawab yang diberikan Allah tersebut
- Selalu bersedia setiap saat, sebagai pimpinan harus siap selalu dalam situasi apapun jika dibutuhkan dan menjadikan dirinya sebagai sahabat.
- Memberikan penilaian dengan teratur, penilaian yang diberikan oleh seorang pemimpin harus berdasarkan dengan kejadian-kejadian yang real dan sesuai secara objektif atas kinerja bawahannya berdasarkan dengan konsep yang sedang diperbincangkan.

3. Pemimpin membangun komunikasi,

Hal terpenting dalam suatu organisasi adalah komunikasi, karna dari komunikasi itulah akan mengurai setiap hal yang berkaitan dengan organisasi, baik tujuan yang akan dicapai ataupun masalah yang terjadi dalam organisasi. Untuk itulah seorang pemimpin harus memastikan komunikasi sebagai hal yang terpenting dan harus dilakukan secara efektif dan tepat kepada orang-orang yang dia pimpin agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Dari komunikasi ini akan mengurai sasaran-sasaran yang akan dijadikan sebagai sebuah target dengan sumber-sumber yang jelas dan

memadai berupa informasi, baik dari pimpinan maupun dari bawahan, akan tetapi yang harus memastikan komunikasi itu efektif berjalan adalah dari pimpinan. bila segala sesuatunya bisa dikomunikasikan maka segala sesuatunya juga akan bisa berjalan dengan lancar dan efektif tanpa ada kendala yang berarti. Jika maksud dan tujuan dari organisasi itu tersampaikan melalui komunikasi dari pimpinan maka anggota kelompok atau bawahan dalam organisasi tersebut bisa mereka mengerti dan menerimanya dengan baik untuk segera ditindaklanjuti sebagai sebuah program kerja yang akan diimplementasikan. Selain itu seorang pimpinan harus memperhatikan efektivitas komunikasi karna melalui komunikasi ini bawahan atau anggota kelompok dalam organisasi tersebut dapat menyampaikan kebutuhan yang mereka akan perlukan sekaitan dengan program kerja yang ada, akan tetapi apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik dari kedua belah pihak maka akan menghambat jalannya program kerja organisasi. Hal terpenting lain dari terbangunnya komunikasi yang baik dari pimpinan ke bawahannya adalah memberikan semangat dan motivasi serta mempengaruhi perilaku tersendiri bagi anggota-anggotanya dalam menjalankan tugas kerjanya masing-masing sehingga berdampak besar bagi pencapaian hasil sebagai sebuah tujuan.

4. Pimpinan yang dapat menyatukan

Sama dengan Yesus Kristus dapat mempersatukan murid-muridnya, maka begitu halnya seorang pemimpin Kristen dapat mempersatukan anggota-anggotanya karna dari kesatuanlah akan tercipta kerukunan dan ketenangan untuk mendapatkan sumber kekuatan dalam melakukan segala sesuatunya terutama satu kesatuan hati untuk memuliahkan Allah, sama seperti dalam Roma 15:5-6 Yesus Kristus menginginkan agar tercipta kerukunan dalam satu kelompok agar terjadi apa yang di kehendaki Yesus Kristus bisa terjadi sehingga dengan satu kesatuan hati dan suara dapat memuliahkan Allah bapak yang bertahta dalam kerajaan Surga. Beberapa cara yang dapat berpengaruh dalam proses berlangsungnya kebersamaan sebagai satu kesatuan pada suatu kelompok telah disampaikan oleh salah satu

tokoh Alkitab yaitu Salomo. Beberapa cara atau hal tersebut, seperti berikut dibawah ini:

- *Mengasihi*, dalam Amsal 10:12 perkataan Salomo bisa dijelaskan, bahwa kebencian akan menimbulkan suatu pertengkaran, akan tetapi kasih akan menutupi semua pelanggaran karna dengan adanya kasih akan menciptakan suasana yang damai dan tenang. Dengan memiliki kasih akan berdaya guna bagi setiap pribadi untuk berusaha melakukan sebuah kebaikan dalam suatu kelompok, maka dari itu pemimpin harus mengutamakan kasih.
- *Pengendalian*, kata pengendalian yang dimaksudkan di sini adalah pengendalian diri atau dengan kata lain penguasaan diri. Salomo sudah dengan jelas menyampaikan dalam Amsal 25:28 bahwa orang yang tidak bisa menguasai dirinya diandaikan seperti sebuah kota dengan tembok yang jebol. Artinya seseorang pemimpin dituntut agar bisa menguasai dirinya agar tidak seperti sebuah kota dengan kekuatan temboknya yang jebol.
- *Berlaku baik, sebagai raja*, salomo menunjukkan beberapa hal yang baik saat dia menjadi raja, salah satu ialah salomo bijaksana dalam mengambil keputusan tanpa membedakan orang lain tetapi tetap berlaku adil. Kebaikan salomo yang lain saat menjadi pemimpin adalah melayani. Sekalipun salomo sebagai raja tetapi tetap melayani rakyatnya secara baik dan menyeluruh, dan kebaikan yang terakhir salomo tunjukkan adalah kerendahan hati, sekalipun dia sebagai raja tetapi dia tetap menunjukkan kerendahan hatinya sebagai sebuah kebaikan.

5. Pemimpin yang meningkat

kunci keberhasilan seorang pemimpin adalah saat dirinya mengalami peningkatan yang terus menerus dari berbagai sisi aspek secara efektif dan menyeluruh serta sistematis. Pemimpin yang mengalami peningkatan adalah pemimpin yang bertumbuh secara Iman kristen dengan melandasi segala sesuatunya melalui kebenaran

Firman Tuhan, sama seperti yang telah di Firmankan dalam (Kisah Para Rasul 20:32) *"Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan-Nya"*. Ayat ini sangat jelas bahwa seorang pemimpin yang ingin berkembang atau bertumbuh adalah harus mengambil waktu untuk fokus kepada Firman Tuhan.

a. Penghambat perkembangan atau pertumbuhan ialah:

- Sombong dan congkak, Salomo telah menyampaikan dalam kitab Amsal 16:18) *"Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan"*. Ayat ini sudah sangat jelas bahwa kesombongan dan kecongkakan akan menjatuhkan diri sendiri. Hal ini sudah banyak bukti yang kita lihat orang yang congkak dan tinggi hati selalu gagal dalam hidupnya untuk melakukan sesuatu, baik karier, ekonomi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan atau prestasi dalam hidupnya bahkan ada yang jatuh dalam hidupnya. Orang seperti ini sudah pastilah menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Sama halnya yang kita lihat banyak dari pemimpin yang gagal karna sifat sombongnya dan congkaknya melekat pada dirinya sehingga segala sesuatunya tidak berjalan dengan maksimal bahkan ada yang gagal dan justru jatuh dan hancur.
- Malas, sudah tentunya jika kemalasan melekat pada diri seseorang maka kegagalan pastinya menunggu di depan, apalagi kalau disertai dengan malas berdoa. Seperti halnya jika seorang pimpinan dirinya melekat kemalasan otomatisnya akan gagal dalam kepemimpinannya, apalagi kalau sudah malas berdoa atau meluangkan waktunya untuk datang kehadiran Tuhan. Kitab Amsal sudah mencatat di Amsal 18:9 bahwa *"orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak"*. Dari ayat ini justru lebih tajam dan jelas mengatakan bahwa jika bermalas-malasan akan menjadi perusak bagi orang lain.

b. Yang mendukung perkembangan atau Pertumbuhan.

- *Rendah hati*, seorang pemimpin bisa berkembang atau bertumbuh jika memiliki kerendahan hati, karna dengan kerendahan hati maka membuka diri untuk datang kehadirat Tuhan agar mendapatkan hikmat dari Tuhan supaya selalu dituntun dalam mengemban tanggung jawabnya. Dengan kerendahan hati sama saja sudah mentaati kebenaran Firman Tuhan dan memuliahkan Allah itu sendiri karna sudah mengikuti kehendakNya. Dalam konteks kepemimpinan Kristen, kitab Amsal 15:33 sudah sangat jelas menyampaikan bahwa orang yang rendah hati mendahului kehormatan, artinya apa bila seorang pemimpin memiliki sifat kerendahan hati maka mereka akan dihormati dan di segani sehingga otomatis bisa didengar oleh orang lain terutama bawahannya.
- *Saleh*, ketaatan dan kepatuhan secara sungguh-sungguh untuk datang kehadirat Tuhan adalah bukti seseorang mengalami pertumbuhan Iman. Sikap seperti inilah yang disebut dengan kesalehan. kesalehan menjadi hal terpenting dan utama sebagai seorang pemimpin terutama sebagai pemimpin Kristen. Karna dengan berkepribadian yang saleh maka segala sesuatu yang akan dilakukan selalu dituntun oleh Roh Kudus dengan hikmat dari Tuhan sehingga tidak salah melangkah untuk melakukan segala sesuatunya terutama dalam mengambil keputusan. Dengan memiliki karakter yang saleh memudahkan seorang pemimpin untuk bertumbuh mengikuti karakter dan teladan Yesus sang Juruselamat sebagai pemimpin dunia.
- *Bijaksana*, seorang yang bijaksana tentunya sudah memiliki kemampuan berpikir yang baik dengan menggunakan akal sehatnya yang disertai dengan kehendak hati dalam bertindak atau memutuskan sesuatu. Kebijakan juga erat kaitannya dengan kedisiplinan karna dengan mendisplinkan diri berarti kemampuan untuk mengatur dan menata hidupnya secara baik dan teratur yang dimulai dengan pemikiran yang matang secara bijak. Seperti halnya pada kepemimpinan terutama

kepemimpinan Kristiani yang paling berperan penting adalah memimpin dengan hati yang bijak seperti kepemimpinan salomo.

F. Tugas-tugas Kepemimpinan Kristen

Pemimpin kristiani berbeda dengan pemimpin yang umum atau pemimpin sekuler dan tidak bisa disepadankan bahkan disamakan sekalipun melalui cara kepemimpinan Kristiani memiliki beberapa prinsip dan cara yang sama dengan kepemimpinan pada umumnya. Akan tetapi melalui cara memimpin pada Kekristenan memiliki sifat yang tersendiri yang hanya bisa di mengerti dan di pahami serta dipraktekkan oleh orang yang percaya kepada Allah Tri Tunggal.

Ada beberapa tugas yang harus dimiliki oleh pemimpin Kristen, seperti berikut ini:

- *Pimpinan Kristen selalu menggerakkan orang-orangnya sesuai dengan kehendak Allah*, sebagai pemimpin Kristiani harus memahami betul apa yang dikendaki Allah dalam memimpin orang lain agar bisa mengikuti kehendak dan rencana Allah sehingga afektivitas organisasi bisa berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan organisasi dan terpenting adalah nama Allah dimuliahkan. Seorang pemimpin Kristen harus berangkat dari pemahaman bahwa kepemimpinan ini adalah tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai utusannya di bumi untuk membimbing dan menggerakkan umatNya sesuai kehendakNya sehingga dalam menggerakkan orang-orang yang dia pimpin selalu tergerak dengan hati yang tulus sebab sudah tergerak berdasarkan dengan tuntunan Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan. Pada kepemimpinan kristiani selalu berangkat dari dimensi Alkitabiah, yaitu selalu memberikan arahan dan selalu mengorganisir orang-orang yang akan dipimpin, sebab dengan dua hal ini merupakan sifat yang di miliki Yesus Kristus saat memimpin murid-muridNya. Yang dimaksud mengarahkan disini adalah Mengarahkan orang lain bersandar

dan bergantung kepada Tuhan dan tidak pada dirinya sendiri, sementara mengorganisir di sini adalah mengelolah orang lain untuk pengenalan terhadap Allah secara lebih sungguh. Mengarahkan dan mengorganisir yang melekat pada diri Yesus Kristus telah dijadikan sebagai role model teladan kepemimpinan Kristen.

- *Kepemimpinan Kristiani sepenuhnya dalam Tuntunan Roh Kudus*, sebagai pemimpin kristiani diharuskan untuk selalu dalam tuntunan Roh Kudus agar tidak salah melangkah dan bersikap namun selalu berdasarkan dengan Firman Tuhan sebagai sebuah pedoman hidup, karna Allah menginginkan agar seorang pemimpin membawa umat-umatNya kepada pertumbuhan rohani menuju pada kemuliaan namaNya. Pemimpin yang senantiasa di tuntut oleh Roh Kudus dalam tugas kepemimpinannya tidak akan salah melangkah dan bersikap ketika selalu dalam Tuntunan Roh Kudus dan orang-orang yang dia pimpin juga akan ikut dalam tuntunan Roh Kudus sehingga hadirat Tuhan hadir dalam kelompok tersebut dan tanggung jawab yang ada mereka laksanakan berjalan dengan lancar dan efektif hingga mencapai tujuan yang diharapkan oleh kelompok organisasi tersebut dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Akan tetapi jika seorang pemimpin tidak dalam tuntunan Roh Kudus maka tugas kepemimpinannya tidak akan berjalan dengan baik dan selalu menghadapi masalah dan bahkan ada yang gagal bahkan jatuh.
- *Pimpinan Kristiani harus memiliki tanggung jawab terhadap Allah*, Pada kepemimpinan Kristen, pemimpin di sebutkan sebagai utusan Allah, maka dari itu seorang pemimpin harus mempertanggung jawabkan kembali kepada Allah apa yang telah dia lakukan. Pemimpin harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawabnya karna dari dialah yang menentukan nasib atau keadaan dari sebuah kelompok atau organisasi, baik bruknya, berhasil tidaknya sebuah organisasi dan menjadi penentu nasib orang banyak atau orang-orang

yang ada disekitarnya. Sebagai pemimpin tidak diperbolehkan lepas tanggung jawab apalagi menyalahkan bawahannya, karna bawahan selalu mengikuti perintah dari pimpinannya, selain itu tanggung jawab seorang pimpinan yang dimaksudkan disini ialah lebih kepada mengarahkan dan menggerakkan anggota-anggotanya. Tanggung jawab utama sebagai pemimpin Kristen sesungguhnya adalah mengarahkan orang lain pada pertumbuhan rohani dan menggerakkan orang lain agar menuruti apa yang diinginkan oleh Allah.

- *Kepemimpinan Kristiani bisa berpengaruh kesemua orang*, harapannya agar kepemimpinan Kristen tidak hanya berpengaruh pada orang-orang yang mengikut Kristus saja, akan tetapi diharapkan bisa berpengaruh kesemua orang sekalipun bukan pengikut Kristus karna kepemimpinan Yesus Kristus sendiri bukan hanya tertuju pada orang yang mengikutinya tetapi melalui kepemimpinanNya Dia menyuarahkan suara kebenaran dan keselamatan.
- *Seperti Allah bekerja di banyak tempat tanpa batas*, cara kerja Allah tidak di batasi oleh ruang dan waktu. Allah bekerja di mana saja dengan menggunakan banyak cara dan banyak tempat sehingga tidak terbatas seperti dalam Roma 8:28 menyampaikan jika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Nya. Ayat ini dengan jelas bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, artinya Allah bekerja tanpa batas untuk memandang kebaikan. Berangkat dari ayat ini maka diharapkan kepada pemimpin kristiani bekerja di mana saja tanpa di batasi tempat dan waktunya kapan saja bisa bekerja saat sedang dibutuhkan oleh orang lain.

G. Kepemimpinan dalam Alkitab (PL&PB)

Allah menciptakan manusia dengan konsep kepemimpinan seperti dalam kitab kejadian 1:26, dinyatakan jika Allah menciptakan manusia untuk berkuasa terhadap alam. Berkuasa dalam ayat ini

berorientasi pada otoritas untuk menguasai atau memimpin bumi dan lingkungannya. Dari konsep ini terlihat jika setiap manusia sudah memiliki kondrat untuk bisa memimpin sehingga pengertian pemimpin dalam Alkitab diartikan sebagai seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi “wakilNya” agar memimpin bumi dan alam sekitarnya termasuk umatNya sendiri namun Allah tetap sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Semua keputusan dan kebijakan berada diatas otoritas tangan Allah. Kekuasaan dan kedaulatan ini mutlak milik-Nya. Kita bisa memperhatikan cara kepemimpinan Nabi Musa yang ada dalam kitab Perjanjian lama. Musa tidak pernah melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kemauan dia, namun selalui berpatokan pada perintah dan amanat serta petunjuk dari Allah. Allah sudah menetapkan dan menentukan tugas dan pekerjaan kepemimpinan kristen yang akan dipertanggungjawabkan bagi Allah sendiri karna Allahlah yang telah memilih orang tersebut untuk memimpin.

Pada dasarnya prinsip kepemimpinan kristen mempunyai persamaan denan kepemimpinan secara umum, akan tetapi kepemimpinan kristen memiliki perbedaan secara hakiki dan mendasar, yang mana kepemimpinan kristen berdasarkan dengan Alkitab dan kepemimpinan kristen memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah aspek utama untuk sebuah pengalaman dan ini menjadi suatu perbedaan yang unik dengan kepemimpinan secara umum. Sangat jelas juga dalam Alkitab menyatakan jika kepemimpinan kristen termotivasi dari kasih yang khusus disediakan untuk melayani. Sementara kepemimpinan umum lebih dominan unsur kekuasaan mutlak yang melihat pemimpin sebagai “bos”, pengambil kebijakan dan keputusan selalu menuangkan kepentingan pimpinan sehingga terkadang pragmatisme. Disinilah sangat jelas perbedaan kepemimpinan kristen dengan kepemimpinan umum kepemimpinan umum di peruntukkan untuk kepentingan kekuasaan sementara kepemimpinan kristen tertuju pada melayani. Penekanan kepemimpinan kristen dengan melayani ialah Pelayanan bagi Allah Bapa, pelayanan bagi gereja, dan pelayanan di dalam dunia. Secara Alkitabiah hakikat khusus tentang

kepemimpinan kekristenan ialah pemimpin kristen tidaklah yang harus ditinggikan diatas lainnya akan tetapi selalu ada ditengah-tengah bawahannya atau sekitarnya agar bisa membimbing, menjadi teladan, mengarahkan ke koridor yang benar dan semestinya berdasarkan kehendak Allah. Kepemimpinan kristen juga memiliki tujuan agar membawa orang-orang yang mereka pimpin menuju ke keselamatan dan memeliharanya untuk mendapatkan penggenapan di dalam kemuliaan Allah. Sebab itu menjadi pemimpin kristen haruslah memikul sebuah tanggung jawab bukan mencari kedudukan kekuasaan. Yang harus diutamakan dan didahuluhkan dalam kepemimpinan kristen ialah tanggung jawab dan fungsi baru menyusul kedudukan atau posisi.

1. Kepemimpin dalam Perjanjian Lama

Pemimpin dalam perjanjian lama menggunakan dua kata istilah yaitu yang pertama adalah kata "sare" bisa dilihat dalam kitab keluaran 18:21, kata ini empat kali digunakan, yang kedua ialah istilah kata "Nesi'e" terdapat di kitab keluaran 16:22. Istilah kata sare berawal dari kata "sar" yang berarti pemimpin, pejabat. Pada konteks ini istilah kata *Sar* jika di hubungkan dengan istilah kata *Nesi* (kepala, pemuka, raja) dan jika seorang kepala, pemuka, raja identik seperti orang yang kuat, cakap/pintar, kaya sehingga sebutan ini lebih condong dengan kata "*seret*" (melayani). Dalam Holy Bible istilah yang digunakan adalah kata "sare" yang berarti "Leaders". Dalam Kitab Perjanjian Lama seseorang dipilih menjadi pemimpin ialah yang telah dipersiapkan oleh Allah dengan dasar tujuan agar kuat dan bijak sehingga tidak cepat runtuh oleh setiap masalah yang ada. Melalui hal ini seorang pimimpinan seharusnya sudah disiapkan agar kuat dan cakap dalam memimpin, seperti Nabi Musa, Musa dipersiapkan Allah agar kuat dan cakap dalam memimpin umat Israel. Atas diangkatnya menjadi pemimpin, musa berhikmat untuk membagi tugas dan kekuasaan bagi beberapa orang yang mengikut dia, itulah kecakapan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Melalui hal tersebut didalam Perjanjian Lama sudah jelas bahwa untuk memilih seorang pemimpin tidaklah sembarangan, karna berproses dan pada dirinya melekat karakter dan sifat yang

tepat sebagai pimpinan sama dengan Musa yang telah di percaya dan dipilih oleh Allah.

Melalui Alkitab Perjanjian Lama (PL) kita banyak mengenal pemimpin besar, namun Tokoh Pemimpin besar yang penulis akan angkat dalam buku ini adalah Abraham, Yusuf, Musa, Samuel, Daud, Nehemia.

a. Kepemimpinan Abraham

Dari kepemimpinan Abraham memiliki tiga bentuk kepemimpinan yaitu pemimpin menjadi berkat, pemimpin yang rela berkorban nyawa demi masyarakat yang lain, dan pemimpin yang membayar harga.

Pertama, *kepemimpin menjadi Berkat* (Kejadian 12:2-3) dalam ayat ini sifatnya perintah "jadilah berkat". Ini merupakan perintah agar menjadi saluran berkat bagi yang lainnya. Kepemimpinan dalam alkitab memerintahkan agar bisa memberkati yang lainnya. Kedua, *Pemimpin yang rela mengorbankan nyawanya untuk orang lain*. Pada point ini pengorbanan nyawa Abraham bisa terlihat ketika Allah akan menghancurkan sodom. Abraham dengan sikap berani terlibat di dalamnya demi orang banyak.

Ketiga, kepemimpinan yang harus membayar sebuah harga. Untuk mengikuti kehendak Allah dalam memimpin "harus menyerahkan seluruhnya" seperti Abraham yang telah mengorbankan Ishak.

b. Kepemimpinan Yusuf.

Karakteristik Kepemimpinan Yusuf sebagai berikut:

- *Kepemimpinan yang berdasarkan pada visi*. melalui Kejadian 37:5-11, menjelaskan pandangan Yusuf. Saat Yusuf diberikan nubuatan oleh Allah dalam mimpinya mengenai kehidupan Yusuf sangat jelas dinyatakan jika akan menjadi seorang pemimpin diantara manusia. Visi sering kali membawa pada sebuah persoalan yang sulit namun apabila dijalani dengan baik maka memiliki hasil akhir yang baik dan menyenangkan, seperti yang dialami oleh Yusuf akhir kisahnya menyenangkan

ketika visinya dilalui dengan proses yang sulit. Namun harus disadari dan menjadi sebuah pelajaran jika nubuatan yang Allah berikan senantiasa disertai sebuah cobaan sebagai sebuah penderitaan.

- *Pemimpin berkarismatik.* Dalam Kitab Kejadian 39:2,21 menyebutkan jika Yusuf senantiasa disertai oleh Allah, sementara dalam kitab Kejadian 41:38 menyebutkan jika Roh Allah selalu memenuhi Yusuf. Dari itulah sehingga orang lain banyak memberikan kepercayaan bagi Yusuf dan menghormatinya serta mengaguminya sebagai pemimpin di Mesir.
- *Peka dan peduli terhadap kondisi dan situasi.* Yusuf dalam kehidupannya selalu mengandalkan Allah, sehingga ia tidak pernah menyerah atau mundur dalam menjalani sebuah proses yang terkadang disertai dengan sebuah masalah. Yusuf terus melangkah dengan penuh semangat dalam mengatasi dan menyelesaikannya dengan mengandalkan Petunjuk dari Allah. Situasi dan Keadaan disaat Raja Firaun dan bangsanya berada dalam masa kemakmuran dan kelimpahan, sangat berbeda jauh disaat bangsa Mesir dilanda kelaparan dan situasi itulah yang dimiliki Yusuf untuk memiliki kepekaan keluar dari masa sulit tersebut. Langkah yang dilakukan Yusuf adalah melakukan perencanaan secara matang.
- *Mengelolah potensi yang ada secara tepat.* Pada kepemimpinan Yusuf saat di Mesir mereka mengambil langkah yang tepat dalam mengelolah potensi yang ada di Mesir untuk kebutuhan dan keperluan rakyat yang disertai dengan kerja keras. Segala manajemen dilakukan dengan jelas dan tepat disaat Mesir mengalami kelimpahan selama tujuh tahun. Situasi itu Yusuf tidak bersantai dalam zona kenyamanan akan tetapi Yusuf mengelolah bahan makanan yang berada di kota-kota.
- *Bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat.* Yusuf sebagai pemimpin yang peduli dan berorientasi pada kesejahteraan orang Mesir pada saat mereka kekurangan, itu kita lihat dalam

kitab kejadian 41:56,57. Dalam ayat ini jelas bahwa Yusuf membuka semua lumbungnya bagi orang mesir yang dilanda kelaparan.

c. Kemimpinan Musa.

Musa sebagai tokoh pemimpin Kristen yang selalu diangkat dalam beberapa hal melalui karya-karya tulis di beberapa artikel, karna banyak dari pemikiran-pemikiran musa dan cara hidupnya menjadi inspirasi dan teladan. Saat Allah memanggil Musa untuk berangkat ke tanah mesir menghadap Firaun agar memimpin umat Allah keluar dari Mesir, musa dengan rendah hati menolak panggilan Allah itu karna merasa tidak mampu, bahkan musa menyampaikan bagi Allah agar mengutus yang lainnya, namun Allah berjanji untuk menyertainya sehingga Musa menerima perintah dari Allah itu untuk berangkat ke Tanah Mesir untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Dari cara dan sikap Musa ini menjadi penting untuk dicintahi dari kepemimpinannya sehingga ada beberapa poin yang harus di garis bawahi untuk menjadi contoh seperti berikut ini:

- *Dalam menjalankan kepemimpinan musa selalu berdasarkan atas nama Tuhan.* Karna kepemimpinan musa berdasarkan panggilan dari Allah bukan ambisinya maka selalu mengatasnamakan Allah. Tiidak pernah musa dalam melakukan sesuatu untuk kepemimpinannya berdasarkan dengan kemauannya sendiri. Dan dalam menjalankan itu tidaklah begitu muda dengan melihat karakter bangsa israel.
- *Selalu rendah hati dihadapan Allah.* Musa selalu menaklukkan dirinya kepada otoritas dan kehendak Allah, melakukan apa yang di perintahkan oleh Allah, selalu mendengarkan Allah, sebelum melakukan sesuatu musa bertanya terlebih dahulu kepada Allah, musa membangun hubungan yang baik dengan Allah, dalam melakukan sesuatu tidak tergesa-gesa.
- *Memimpin berdasarkan Kuasa Allah,* Musa dalam kepemimpinan bangsa israel selalu mengandalkan Kuasa Allah.

- *Memiliki tata kelolah manajemen yang baik dalam memimpin.*
Dalam hal kepemimpinan Musa memiliki tata kelolah manajemen yang baik seperti halnya saat sesudah mendengar permintaan beberapa usulan dari mertuanya, Musa terlebih dulu merumuskan peraturan dan ketetapan kepada Israel mengenai hak budak, jaminan hidup sesama manusia, peraturan mengenai ibadah, dan yang berhubungan nasib orang tidak mampu.

d. Kepemimpinan Samuel

Sejak masih muda Samuel sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang dinyatakan oleh Allah pada dirinya.

Melalui kepemimpinan Samuel beberapa karakter dan teladan yang bisa dipelajari seperti yang ada dalam ayat berikut ini. Dalam menyatakan kebenaran Samuel tidak ragu, (I Samuel 3:18) "lalu Samuel menyampaikan dari kesemuanya itu pada Elia dan tidak sesuatu pun yang disembunyikannya. Lalu Elia katakan: Dialah Tuhan, biarkanlah dilakukanNya apa yang dianggapNya baik." Dari ayat ini ada beberapa point yang bisa di pelajari:

- Dengan jelas sama sekali Samuel tidak mengambil kesempatan dengan kekuasaan yang dia miliki untuk kepentingan dan keinginannya sendiri
- Dengan sepenuhnya Samuel mentaati Allah
- Selalu mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan.
- Dalam mengambil keputusan ("kebijakan" istilah birokrasi sekarang ini) Samuel selalu meminta petunjuk dari Allah melalui doa.

e. Kepemimpinan Daud

Daud hanyalah anak belia yang mengembalikan kambing dan domba dalam kesehariannya. Jika dipikirkan secara pikiran manusia biasa, Daud tidak mungkin menjadi seorang pemimpin sebab umurnya masih belia atau muda dan tidak mempunyai pengalaman dalam memimpin dan tidak memiliki pengalaman dalam menyusun dan mengatur strategi perang, bisanya mengusir para bintang buas

apabila menyerang kambing dombanya. Akan tetapi keadaan seperti itulah yang dicari Allah sehingga Allah berkata kepada Daud “engkaulah yang akan menjadi pemimpin umat israel ke depan” inilah cara Allah bukan melihat fisik akan tetapi Allah melihat hati.

Karakter dan sikap Daud sebagai Pemimpin yang perlu diteladani adalah :

1) Sepenuhnya Percaya kepada Allah.

Di dalam 1 Samuel 17:45 menjelaskan bahwa Daud mendatangi orang Filistin atas nama TUHAN ALLAH Semesta Alam, bukan dengan pedang, tombak dan lembing, sekalipun goliath dengan badan yang besar lengkap dengan peralatan perang, Daud sangat memahami jika Allah sudah memanggilnya melawan goliath dan percaya sepenuhnya bahwa Allah akan sepenuhnya menolong untuk mencapai kemenangan dengan percaya apa yang disampaikan dalam ayat Alkitab mengenai keberhasilan.

2) Berani dalam menghadapi tantangan.

Cerita keberanian Daud dapat kita lihat dalam Kitab I Samuel 17 dimana Daud menjumpai Saul dan meminta untuk melawan Goliath. dalam ayat ini dijelaskan bahwa Goliath adalah golongan raksasa yang sangat lengkap dengan peralatan perang. Saul yang sangat dibanggakan oleh bangsa israel gemetar dan ketakutan melihat goliath dan para tentara filistin. melalui kisah ini sangat jelas jika Daud mempunyai keberanian dalam mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Goliath.

3) Memiliki Kepribadian yang baik

Kepribadian Daud di nilai Allah melalui sikap tanggung jawab disaat memimpin dan menjaga ternak ayahnya.

4) Memiliki mimpi yang mulia dan besar.

Sebagai seorang pemimpin daud mempunyai sebuah mimpi besar untuk pembangunan bait Allah, Musa sudah merencanakannya, sekalipun Allah tidak mengizinkannya sehingga pembangunan bait Allah tersebut bisa berhasil di bangun disaat kepemimpinan salomo anak Daud.

5) Daud Pemimpin yang bertanggung Jawab.

Bentuk Tanggung Jawab Daud sebagai pemimpin adalah sebagai berikut:

- Memiliki jiwa kepedulian bagi kesejahteraan umat yang lainnya dan Tidak mencari kedudukan dan kenyamanannya sendiri serta selalu memberikan semangat.
- Mengarahkan dan menguatkan orang lain agar memiliki keyakinan kepada Allah.
- Memiliki kedisiplinan yang baik yang disertai kasih sayang dengan mempertahankan standar ketetapan Illahi dan perbuatan moral yang baik.
- Memiliki keberanian untuk memulai sebuah usaha yang baru
- Berani dengan sebuah rencana yang baru.

f. Kepemimpinan Nehemia.

Nehemia adalah seorang Bupati di Tanah Yehuda yang menjadi pemimpin inspiratif karna metode-metode kepemimpinannya terkadang tidak masuk logika, akan tetapi Tuhan dengan metode tersebut Tetap menggunakannya Untuk menghasilkan suatu perubahan tatanan kehidupan bangsa israel dalam waktu yang begitu singkat yakni sepuluh tahun pemerintahannya menjadi bupati. Perubahan itu sangat dirasakan oleh masyarakat yang ada, dimana Nehemia tidak pernah mengambil hak pembagiannya sebagai pejabat bupati, sementara pejabat bupati yang sebelumnya memberikan beban berat bagi rakyat, yang mana para bupati tersebut mengambil 40 syikal perak dalam sehari dari rakyat.

Nilai Rohani yang dapat kita petik dari Nehemia sebagai pemimpin Bupati di Tanah Yehuda adalah sebagai berikut:

- Seorang Pejabat Publik yang takut dan mentaati perintah Tuhan. Takut dan menataati perintah Tuhan adalah kunci keberhasilan Nehemia.
- Memiliki rekam jejak yang cukup baik. Nehemia bukan seorang pemimpin yang cepat dipromosikan atau bukanlah seorang pemimpin karbitan, akan tetapi Nehemia menjadi pejabat Publik sesudah mempunyai pengalaman kepemimpinan yang

besar. Dia sudah teruji setia saat menjadi bawahan ketika di istana raja. Dia juga Sudah melalui sebuah proses ujian ketika dipercaya untuk mengelolah keuangan dan mengelolah bahan-bahan bangunan yang dipercayakan oleh raja untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia sudah teruji untuk menghadapi sebuah tantangan dan kekuatan kelompok oposisi yang bersumber dari luar maupun dari dalam sendiri. Dia sudah membuktikan terlebih dahulu kepemimpinannya yang berkualitas.

- Bukan mencari keuntungan bagi dirinya. Sebagai seorang Bupati Nehemia bukan mencari sebuah keuntungan bagi dirinya sendiri, justru tidak mau mengambil bagiannya sebagai hak bupati atau gajinya.
- Memiliki keberanian untuk tampil berbeda. Nehemia berani tampil berbeda dengan bupati-bupati sebelumnya yang memiliki kebiasaan buruk. Kebiasaan bupati-bupati sebelumnya adalah memberatkan rakyatnya dengan pungutan dan pajak yang tinggi dalam membiayai kehidupan mewah para pejabat publik saat itu. Menyengsarakan masyarakat demi untuk mendapatkan keuntungan diri dan kelompok para pejabat. hal ini sudah menjadi suatu kewajaran bagi masyarakat disaat itu. Disinilah Nehemia dengan berani tampil berbeda dengan pemimpin sebelumnya untuk tegas menolak dengan kebiasaan pejabat sebelumnya karna ini adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan tercela menyengsarakan rakyat menjadi miskin.
- Keluarganya mampu dikendalikan. Nehemia integritasnya bukan saja pada dirinya sendiri tapi keluarganya juga mampu dikendalikan. Sebagai bukti pengendalian Nehemia kepada keluarganya adalah dilarangnya untuk mengambil keuntungan dari siapapun atas jabatan yang dimilikinya.
- Pejabat publik yang memiliki hati hamba untuk melayani. Kepemimpinan Nehemia fokus untuk melayani masyarakat. Tujuan utama bagi kepemimpinan Nehemia ialah

mensejahterakan masyarakatnya dengan pola pikir selalu bekerja terus.

- Sebagai pejabat publik dengan berani berkorban untuk memberi. Nehemia adalah sosok pejabat publik yang bisa menjadi teladan pejabat publik masa kini karena dia rela berkorban untuk memberi apa yang ada pada dirinya bagi rakyatnya, tidak menjadikan jabatan itu untuk menghidupi dirinya dan keluarganya serta kelompoknya, apalagi untuk memperkaya dirinya. Hal ini kita bisa lihat di kitab Nehemia 5:17-18 di mana dalam ayat ini bisa dijelaskan bahwa begitu banyak pengusaha dan ratusan orang Yahudi duduk pada meja Nehemia, selain dari mereka datang juga bangsa-bangsa di sekelilingnya dan Nehemia menyediakan sehari tanggungan satu lembu, enam kambing domba yang dipilih, beberapa unggas serta berbagai macam anggur yang berlimpah ruah. Dari kesemuanya itu Nehemia tidak pernah menuntut bagiannya sebagai Hak seorang bupati sebab menurut Nehemia hal demikian sangatlah menekan rakyat.
- Kepemimpinan sepenuhnya bergantung pada Allah. Kepemimpinan Nehemia sepenuhnya bergantung kepada Allah. Pengorbanan dan kebaikan yang sudah dilakukan oleh sosok Nehemia tidak pernah dia berharap untuk dikembalikan oleh manusia karena Allahlah yang memperhatikan dan menilik apa yang dikorbankannya.

2. Kepemimpin dalam Perjanjian Baru

Apa yang dipikirkan oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinan Kristen sudah pastinya ada pada pikiran Tuhan Yesus Sendiri. seperti dalam Matius 20:26-27 dapat dijelaskan bahwa jika ingin jadi terkemuka atau besar dari antara manusia yang lain maka hendaklah orang tersebut menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Jika ditarik dari hal tersebut maka Kepemimpinan dengan arti sesungguhnya ialah melayani dengan sebesar-besarnya tanpa mengenal lelah untuk selalu fokus terus menerus pada perhatian dalam hal pekerjaan. Pekerjaan ini adalah bagian untuk membangun

misi kerajaan Tuhan Yesus. Kepemimpinan Kristen juga harus memiliki pondasi sebagai dasar bahwa pemimpin terpancung untuk menjadi hamba. Seseorang yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya adalah bersatu sebagai Hamba Allah dan sebagai pelayan. Kata Pemimpin di dalam Alkitab PB disebut dengan istilah "*Arkegon*" yang berasal dengan kata "*arxw*" memiliki arti "memerintah", sehingga istilah "*Arkegon*" bisa diartikan sebagai yang memerintah artinya yang menjalankan pemerintahan ialah orang sementara memerintah yaitu pemimpin. dalam Alkitab Perjanjian Baru kata Pemimpin ditemukan beberapa kali seperti dalam matius 2:6,23:10, 23:16, Lukas 22:26, Yohanes 2:8, 7:48. Penggunaan kata *Arkegon* sering berkaitan dengan kata *Swhtra* atau *soter* yang melalui konteks ini lebih diartikan sebagai penyelamat yang memiliki kemampuan, keterampilan dan kekuatan menyelamatkan orang-orang yang dipimpinnya seperti dalam Kitab Kisah Para Rasul 7:37 sangat jelas bahwa diutus Allah sebagai "Pemimpin dan Penyelamat". Disamping itu kata pemimpin bisa dikaitkan dengan kata *diakonos* (pelayan) seperti dalam kitab Lukas 22:26 "Pemimpin sebagai Pelayan". Diartikan bahwa sebagai pemimpin yang sudah dipilih adalah pemimpin yang melayani bukan pemimpin yang berkuasa. melayani orang lain dengan meneladani sikap pelayanan Yesus dengan penuh kelembutan dan sikap rendah hati serta rela berkorban dalam segala hal untuk melaksanakan tugasnya.

Apabila kita berbicara terkait dengan kepemimpinan melalui Alkitab Perjanjian Baru, akan kita menemukan dua sosok populer sebagai tokoh paling berpengaruh di dalamnya yang akan dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi kepemimpinan Kristen.

a. Kepemimpinan Yesus.

Yesus yang sejatinya adalah Allah itu sendiri dan sejatinya sebagai Manusia, akan tetapi apa yang dikerjakan oleh Yesus tidak bisa diperbandingkan apa yang dikerjakan manusia. Akan demikian bagian ini kita akan melihat fokus pada bagaimana cara Yesus memimpin. Pertamanya kita akan mendalami cara Yesus memimpin ialah memfokuskan pada "pribadi", kita bisa melihat dalam injil

menunjukkan beberapa contoh pelayanan Yesus yang berorientasi pada individuNya atau pribadi Yesus itu sendiri atau berorientasi manusia secara pribadi. Kepeduliaan Yesus bagi individu yang sangat terlihat jelas dari semua kitab yang ada adalah dalam perikop Kitab Yohanes 21, yang mana dalam perikop ini menunjukkan penampakan diri Yesus bagi murid-muridNya. Kedua, Tujuan merupakan fokus kepemimpinan Yesus. Yesus sangat mengetahui betul bahwa sangat terbatas waktunya berada di bumi sehingga Ia memahami untuk perlu mempersiapkan para muridnya untuk melanjutkan pelayananNya untuk tercapainya sebuah Tujuan yang telah diberikan Allah bagiNya. Mencari dan menyelamatkan yang telah hilang adalah tujuan terutama Yesus datang ke bumi (Lukas 19:10). Tujuan tersebut dilanjutkan kepada para muridNya untuk dilakukan dengan penuh amanah Agung sesuai di injil Matius 28:19-20. Ketiganya adalah, Kitab Suci merupakan patokan dan pusat utama pelayanan dalam kepemimpinan Yesus. Hal tersebut kita bisa melihatnya dalam kitab Matius 5:21-48 yang mana semua yang diperkatakan Yesus akan kembali untuk menyelami dan menyelidiki serta membahas Alkitab. Yesus belum pernah melalaikan dan melupakan kitab suci dalam rangka membangun dan mengembangkan pelayanan serta posisinya sebagai pemimpin. hal yang dapat dipetik sebagai pelajaran dari kepemimpinan Yesus bagi Kepemimpinan Kristen ialah memiliki fokus sebagai pokok dan pusat yang paling penting, sementara Alkitab bertujuan menjadi menjadi sarana petunjuk dan pedoman seorang pemimpin kristiani dalam mengembangkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Dasar kepemimpinan Yesus bukan hanya pada pengajarannya tetapi lebih pada keteladannya. Ia memberikan pengajaran bahwa pemimpin yang sesungguhnya ialah meneladani suatu pengajaran dan pengorbanan sebagai sebuah teladan. Cara Yesus mengajar tentang kepemimpinan adalah teladan bagi kepemimpinan Kristen saat sekarang ini. Penekanannya bukan pada orang yang di pimpin atau bawahan, untuk bagaimana mereka bisa melayani pemimpinnya akan tetapi penekanannya adalah bagaimana pemimpin menjadi pelayan bagi orang lain, karna konsep utama dari kepemimpinan Kristen ialah

bagaimana seorang pemimpin melayani sama seperti hamba, seperti itulah konsep kepemimpinan Yesus adalah sebagai Hamba untuk melayani. Jemaat mula-mula di panggil untuk melayani Allah, dari jemaat mula-mula itu, ada yang dipilih sebagai salah satu pemimpin jemaat untuk melayani. Kekhususan Yesus menjadi pemimpin adalah pemimpin melayani yang saat sekarang ini dijadikan role model atau teladan kepemimpinan Kristen dengan motivasi kerendahan hati. Keteladanan yang ditunjukkan dan diberikan oleh Yesus merupakan sebuah cara transformasi yang akurat dan efektif agar pengikut-pengikutnya bisa melihat secara langsung pada saat itu untuk diikuti. Karna para murid-murid Yesus saat itu melihat dan mendengar serta merasakan langsung apa yang diajarkan dan diperbuatNya mengenai pelayanan Yesus, seperti dalam Lukas 22:27, "*Yesus berkata: Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan*". Dan Yesus memberikan contoh teladan seperti yang ada dalam Yoh. 13:14 di mana Yesus sebagai Tuhan sekaligus sebagai Guru (pemimpin) telah memberikan teladan kepada muridNya untuk membasuh kakinya sehingga murid Yesus pun melakukan hal yang sama bagi orang lain melalui berbagai macam cara bagi orang lain. Pusat kepemimpinan Yesus berada pada pribadi manusia dalam arti bahwa kepemimpinan Yesus membentuk pribadi manusia dan memeliharanya untuk berkembang sesuai dengan yang diinginkan untuk bisa berhasil dan terpenuhinya misi panggilan (Blanchard & Hodges 2007:157-158). Kepemimpinan Kristen diharapkan untuk mengutamakan kasih dan cinta, mempunyai visi dalam melihat potensi dan bakat, melihat kepribadian yang bagus, punya keberanian dan semangat, memiliki komitmen yang tinggi. Seperti halnya yang telah diperbuat Yesus, maka kitapun seharusnya mempersiapkan diri agar memahami betul sifat-sifat kepemimpinan Yesus dan terus menerus belajar untuk membentuk karakter diri dalam memahami bagaimana menjadi pemimpin yang melayani dan yang terpenting untuk kita menyadari bahwa kita didalam dunia ini diutus dengan keadaan yang beraneka ragam masyarakatnya.

b. Kepemimpinan Paulus

Salah satu sosok lain yang berpengaruh dalam Kitab Perjanjian Baru mengenai kepemimpinan dan sangat layak dijadikan teladan untuk pemimpin masa kini ialah Paulus. Rasul Paulus sebelum menjadi pengikut Kristus memang telah memimpin akan tetapi setelah dirinya masuk Kristen barulah kepemimpinannya berpengaruh besar dan memiliki nama yang besar. Satu prinsip dasar yang bisa ditarik dari sekian prinsip besar yang melekat pada kepemimpinan Paulus ialah kepemimpinan teladan atau contoh. Semenjak memimpin orang Kristen Rasul Paulus sudah menulis 13 kitab dan telah menulis banyak prinsip Kekristenan dan doktrinnya dalam Kitab, demikian juga Paulus telah banyak menasehati orang lewat tulisannya dan orang-rang yang telah mengikutinya. Hal yang sangat dominan sekaligus menjadi ciri khas kepemimpinan dari Paulus ialah memberi contoh atau teladan. Ini menjadi menarik, sebab kepemimpinan Kristen bukanlah kepemimpinan dengan prinsip “bos”, namun kepemimpinan yang berdasarkan dengan teladan. Melalui kepemimpinan Paulus bukan hanya sebatas perkataan belaka (retorika) ataupun teori yang ditulis disetiap surat yang dikirimnya kebeberapa tempat akan tetapi disertai dengan teladan yang baik melalui perbuatan, perkataan, tingkahlaku pada kepemimpinannya. Kepemimpinan Paulus melalui Kitab Suci Kisah Para Rasul tidak hanya menyatakan tentang hubungannya dengan Murid-Muridnya seperti Titus, Timotius dan Silvanus serta yang lainnya, akan tetapi melalui tulisan itu kita dapat mempelajari bentuk dan pola sebagai strategi untuk mengembangkan kepemimpinan. Melalui kepemimpinan Paulus ditemukan dinamika sebagai perbedaan corak yang tampak berlaku di dalam surat-suratnya dan pengembangan kepemimpinannya. Wilayah, masyarakat, lingkungan pelayanan menjadi perbedaan kepemimpinan Paulus dengan Yesus akan tetapi memiliki sejumlah kesamaan pola untuk mengembangkan kepemimpinan. Seperti halnya Yesus, Paulus pun memakai tiga metode yaitu metode melalui pelatihan kepemimpinan, metode dalam pengajaran, dan metode dalam pelayanan. Tetapi ada pula beberapa hal khusus yang membedakan seperti pada proses pemilihan muridnya. Kalau Yesus memilih muridNya melalui

pemanggilan pribadi secara langsung, sementara jika Paulus caranya tidak sering demikian, namun dalam berbagai macam kesempatan pemilihan melalui rekomendasi dari jemaat setempat menyodorkan kepada Paulus orang yang akan dipilih seperti dalam Kitab Kisah Para Rasul 16:2). untuk mengembangkan cara kepemimpinannya Paulus menitikberatkan pada determinasi pribadi bukan hanya pada satu kelompok Kristen saja akan tetapi berkaitan juga dengan masyarakat yang plural yang menekankan pada individu atau secara pribadi. Dalam memilih dan menentukan rekan kerjanya dilakukan dengan pendekatan prinsip sentuhan hati dengan berbagi rasa secara mendalam untuk mengembangkan kemahiran dan kepiawaian dalam kepemimpinan Paulus itu sendiri. Melalui kepemimpinannya, Paulus lebih suka dan terbiasa melayani daripada memerintah untuk berkuasa dengan mengutamakan prioritas utama pada penguatan dan dorongan pribadi.

Kesimpulan dari dua tokoh dalam Perjanjian Baru yang dapat diambil ialah Kepemimpinan Kristen seharusnya memiliki fokus dalam kepemimpinannya. Fokus bagi manusia yang dipimpinnya, fokus pada tujuan dan fokus kepada Alkitab. Selain itu keteladanan sebagai kesimpulan yang bisa diambil dari kedua Tokoh tersebut.

H. Pengaruh Kepemimpinan Kristen

Kepemimpinan ialah sebagai sebuah proses yang berdampak atau berpengaruh secara baik bagi orang lain terutama orang-orang yang dipimpin untuk bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan Bersama dengan menggerakkan semua potensi yang dimiliki. untuk itu sebagai pemimpin sebaiknya sosok motivator yang cukup baik, namun yang sering terjadi ialah sering kali pemimpin dengan motivasi yang benar tidak memiliki pengaruh baik untuk orang-orang yang dia pimpin dan organisasinya. Hal itu terjadi penyebabnya karena pemimpin yang bersangkutan tidak mendalami karakternya pribadinya sendiri secara mendalam.emosinya terkadang tidak terkontrol, visi misinya tidak jelas karna tidak mencerminkan visi gambaran Allah dan tidak mengetahui pengaruh yang dihasilkan.

Pengaruh kepemimpinan yang diharuskan untuk dihasilkan dalam kepemimpinan ialah pengaruh yang memberikan inspirasi untuk orang lain supaya bisa mengambil sikap lebih lagi bagi kristus. Sekalipun demikian, pemimpin baik pun tidak keseringan belajar untuk menyadarkan dirinya dengan bergantung bagi kuasa Tuhan. Kepemimpinan diharuskan selalu menghasilkan pengaruh. Sebagai pemimpin seharusnya selalu menghasilkan pengaruh, seorang pemimpin sebaiknya sadar dan memahami selalu bahwa dirinya memiliki pengaruh yang baik bagi orang lain. Apapun yang ia lakukan Sebagai pemimpin harus sadar betul bahwa dirinya selalu berdampak atau berpengaruh pada orang lain atau lingkungannya dan bukan pada wilayah yang netral dalam pengertian tidak berdampak. Dari semua yang ia lakukan akan memiliki pengaruh. Dampak atau pengaruh itu berasal dari pemimpin tersebut melalui perkataannya, pembawaannya dalam pergaulan, penampilannya, dan keputusan yang diambilnya. Apa yang disampaikan atau ia tidak sampaikan dan yang tidak disikapinya, atau sekalipun tidak terlaksana tetap bisa berpengaruh terhadap orang lain serta bagi diri sang pemimpin itu sendiri. Pemimpin itu sendiri harus menyadari jika pengaruhnya bisa berpengaruh baik atau tidak baik. Oleh sebab itu sebagai pimpinan sebaiknya mengendalikan pengaruh yang ada pada dirinya untuk mengetahui permulaan apa yang akan disampaikan, keputusannya, sikap perbuatannya, kehadirannya pada setiap moment, serta gaya hidupnya.

Pada sisi lain pimpinan berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada sesuatu. perubahan yang terjadi itu baik secara eksternal organisasi maupun internal organisasi yang dia pimpin. Terlebih dari itu pimpinan sering di sebut ada untuk membawa suatu perubahan dan pembaharuan dengan mendatangkan kebaikan. Dalam sebuah kelompok atau organisasi perubahan yang dimaksud adalah kearah yang lebih baik demi tercapainya tujuan Bersama sesuai dengan visi organisasi, namun ada juga perubahan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan Bersama secara positif untuk mencapai tujuan organisasi dari seorang pimpinan dan perubahan tersebut bermuara

pada ketidakberhasilan seorang pemimpin. Pemimpin Kristen dalam menghadapi perubahan yang baik sebaiknya berawal dari cara mengubah dirinya sendiri sebagai pemimpin karena dia adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk mengubah orang lain dan sekitarnya. Setelah pemimpin Kristen tersebut mengalami perubahan positif pada dirinya maka selanjutnya adalah mempersiapkan orang-orangnya untuk ikut berubah dengan memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya perubahan itu terjadi pada pribadi seseorang sebagai individu terutama dalam menciptakan atmosfer yang baik dalam lingkungan kerja organisasi. Apabila tidak terjadi sebuah perubahan positif pada para pengikut atau bawahan dalam suatu organisasi maka akan menjadi kendala dan penghambat terhadap terciptanya perubahan menuju pada kesempurnaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk itu sebagai seorang pemimpin harus paham benar mengenai sebuah perubahan pada lingkungan kelompok organisasinya dan perubahan yang positif itu harus di perjuangkan dan mendapat dukungan dari semua sumber daya yang ada dalam organisasi itu.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi seorang pemimpin Kristen.

1. Pengaruh ucapan Pemimpin

Yang sangat menentukan dan berpengaruh dari seorang pemimpin adalah ucapannya karena dari kata-kata yang diucapkan itu mempengaruhi sikap seseorang yang berdampak kepada kondisinya, apakah bersemangat atau justru dari kata-kata itu membuat patah semangat sehingga membuat mereka kecewa dan gagal. Setiap ucapan dari seorang pimpinan akan selalu teringat dan melekat dalam hati orang lain yang mendengarnya, baik perkataan yang positif (petuah, nasehat, motivasi, anjuran, dll) maupun perkataan yang mengandung unsur mengecewakan orang lain (kasar, keras, makian, hinaan, dll). Pengaruh dari sisi lain dengan adanya ucapan dari seorang pemimpin adalah memberikan informasi sebagai bagian terpenting dalam merencanakan, melaksanakan suatu kegiatan organisasi, evaluasi kegiatan organisasi karena dari sang pemimpinlah

yang menjadi kunci utama proses dan aktivitas dalam sebuah organisasi. Sebagai kata kunci adalah seorang pemimpin harus bijaksana dalam berkomunikasi melalui ucapannya.

2. Pengaruh Perilaku seorang Pimpinan

Perilaku seorang pemimpin sangat berperan penting dalam membangun tim kerja dalam sebuah organisasi, karna dari perilaku pemimpinlah bawahan akan mendapatkan respon dari perilaku pemimpin tersebut, apakah sikap perilaku pimpinan tersebut membuat dia terasa diberikan perhatian untuk nyaman dan memiliki semangat kerja atau justru sebaliknya terasa tidak diberikan respon positif yang membuat kecewa atau terasa diabaikan sehingga berdampak pada etos kerja dalam organisasi. Bila pemimpin menunjukkan sikap perilaku yang tulus dan simpati terhadap bawahannya maka bawahannya juga akan merasa nyaman dan menunjukkan kesetiaan dan etos kerja yang tinggi pada organisasi, akan tetapi pemimpin yang menunjukkan perilaku yang tidak peduli, bahkan tidak menghargai bawahannya maka bawahannya tidak akan merasa nyaman dalam lingkungan organisasinya dan berdampak pada kinerja kerja mereka.

3. Pengaruh kebijakan Pemimpin

Putusan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan akan berpengaruh bagi kondisi psikologi bawahannya yang bisa berdampak bagi semangat kerjanya dan berpengaruh bagi kondisi sosial dalam lingkungan kerjanya organisasi. Apa bila kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin tepat dan baik maka akan berdampak baik juga bagi kondisi bawahannya dan lingkungan organisasi sehingga pencapaian terhadap hasil sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi tersebut.

4. Pengaruh Hadirnya Pimpinan

Dengan hadirnya sang pemimpin di tengah-tengah para anggotanya membawa dampak yang besar bagi situasi dalam organisasi itu sendiri, yang mana anggota-anggotanya akan lebih termotivasi dan memiliki kesan tersendiri bila pemimpin hadir di

tengah-tengah mereka. Anggota atau para bawahan dalam organisasi itu akan menghargai pemimpinnya apabila hadir di tengah-tengah mereka untuk ikut merasakan situasi yang mereka alami sehingga para bawahan tersebut terasa nyaman. Dengan kehadiran seorang pemimpin di tengah-tengah bawahan atau karyawan, mengambil hati tersendiri bagi mereka untuk terus terdorong dalam berkarya dan berkreasi memajukan program kerja yang sudah ditetapkan dalam organisasi tersebut karena mereka merasa ikut dipedulikan oleh pemimpinnya, selain itu kehadiran pemimpin ikut juga merasakan masalah-masalah yang timbul dalam proses terlaksananya kegiatan yang dilakukan oleh para bawahan bahkan dengan hadirnya pemimpin di tengah-tengah mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada serta ikut bertanggung jawab akan masalah yang timbul. Inilah bukti esensi sebenarnya dari kepemimpinan Kristen adalah ikut menanggung resiko menjadi bagian dari sebuah pelayanan. Akan tetapi sebuah persoalan tersendiri dalam sebuah organisasi jika sang pemimpin hanya mengambil keputusan dan hanya dibelakang meja tapi tidak pernah hadir di tengah-tengah bawahannya, bawahan tersebut terasa hampa dan tidak akan bekerja secara maksimal dan bahkan ada yang hanya bermalas-malasan dalam melaksanakan tugas kerjanya. Kehadiran pemimpin di tengah-tengah bawahannya sesungguhnya adalah mendengarkan, merasakan untuk ikut tergerak.

Pengaruh kepemimpinan Kristiani berteitik tolak dari keberadaan umat Kristen yang setiap saat harus mendapatkan arahan dan bimbingan secara baik untuk bertumbuh dan dewasa secara rohani, dari sinilah diperlukan pribadi yang bisa mendampingi umat kristiani tersebut sebagai pemimpin yang bisa menjadikan teladan untuk hidup umat Kristen dalam sebuah institusi yang ia pimpin, untuk itu ada persyaratan yang telah ditentukan untuk diikuti melalui kitab Suci Alkitab agar bisa menjadikan dirinya sosok pimpinan kristiani yang berkarakter dan memiliki kualitas. Sebagai sosok pimpinan harus menjadikan dirinya sebagai contoh yang bisa diikuti oleh bawahannya sebagai panutan. Manusia yang telah diberikan akal dan watak oleh Allah secara mulia untuk berpikir secara mulia sesuai dengan

kehendak Allah, yang salah satunya adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama di sini ialah melayani sesama termasuk bawahan yang dipimpin untuk diperlakukan dengan baik sehingga bawahan tersebut terasa nyaman untuk bisa mendengarkan dan melaksanakan apa yang seyogyanya dilakukan sebagai bawahan. Sikap seperti inilah yang diinginkan oleh Allah sebagai seorang pemimpin Kristen. Dengan sikap yang baik dari seorang pemimpin maka orang disekitarnya akan menjadikan dirinya sebagai sumber inspirasi bahkan jadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu pada prespektif kepemimpinan Kristen melalui Perjanjian Baru, Yesus Kristus sebagai role model kepemimpinan sebab dalam diri Yesus sebagai manusia sejati memiliki hati yang mulia dan sikap diri yang rendah hati dengan ketulusan untuk melayani murid-muridnya.

Tolak ukur dari keberhasilan seorang pemimpin adalah sejauh mana orang-orang yang dia pimpinnya mengikuti petunjuk, arahan yang telah diberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing sehingga kelihatan tanggung jawab dari seorang bawahan terhadap pimpinannya. Sebagai sosok pemimpin tanggung jawabnya adalah melindungi dan menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya sehingga menghindari hal-hal yang menjadi kebiasaan buruk bisa terjadi contohnya merokok, minum minuman keras. Sebagai seorang pemimpin seharusnya berperan penting dan sebagai penentu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, penentu pengaturan manajemen organisasi serta penentu naik turunnya grafik organisasi, terlebih penentu mati hidupnya institusi lembaga yang dipimpinnya. kualitas seorang pemimpin dalam organisasi sebagai penentu baik buruknya kondisi lembaga organisasi tersebut.

Dari uraian penjelasan diatas pengaruh dapat kemukakan suatu proses mempengaruhi dan mengarahka aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tugas kerja para bawahan yang dipimpin. Dari hal diatas pada dasarnya kepemimpinan sebagai cara seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang yang dia pimpin agar bisa bekerja sama secara efektif sesuai aturan kerja. Selain

memberikan arahan seorang pemimpin dalam kepemimpinan penting juga memberikan motivasi sebagai pendorong untuk mengerakkan bawahannya agar menciptakan suasana kerja yang produktif dan solid sehingga target yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan disepakati bisa tercapai dengan baik. Dan sebagai kesimpulan akhir bahwa institusi organisasi, Kepemimpinan sangat berpengaruh besar untuk maju mundurnya sebuah organisasi lembaga institusi apapun.

Bab 6

Kajian Kebijakan Publik



A. Konsep Kebijakan Publik

Ruang lingkup studi Kebijakan memiliki ruang gerak dan cakupan yang begitu luas karena cakupannya berbagai sektor seperti bidang sosial, ekonomi, politik, hukum budaya, dan bidang agama yang berhubungan dengan masyarakat Kristen secara Umum. Jika diperhatikan secara berjenjang, kebijakan ada pada tingkat nasional, tingkat regional provinsi, tingkat lokal.

Dari etimology Pengertian kebijakan (Policy) memiliki arti yang begitu luas untuk itu ditentukan dari mana kita melihatnya dan memberikan atau menarik pengertian. Budi Winarno dalam bukunya (2002:17) memberikan pengertian mengenai kebijakan adalah sebuah hipotesis yang didalamnya terdapat kondisi-kondisi pemula sebagai awal dari apa yang kita bicarakan atau yang sementara berkembang sebagai suatu dugaan. Kebijakan publik memiliki perbedaan dengan kebijakan yang lain seperti pada kebijakan swasta, perbedaan itu ada pada bentuk dan pola kebijakannya. Pada kebijakan publik pola kebijakannya orientasinya pada pencapaian hak-hak masyarakat umum (publik), sementara pada kebijakan swasta pola kebijakannya adalah berorientasi pada keuntungan. Pendapat lain mendefinisikan kebijakan publik (public policy) adalah sesuatu relasi yang terjadi diantara pemerintahan dengan lingkungan di mana pemerintah itu berada. Dari pengertian ini beberapa orang lain memiliki pendapat bahwa pengertian ini masih tergolong luas untuk dimengerti sebab pemahaman kebijakan publik (public policy) memiliki cakupan yang begitu luas dan meliputi banyak hal. Kebijakan publik juga memiliki arti pemberian makna yang bernilai bagi orang-orang yang ada pada batasan wilayah yang telah ditetapkan secara paksa dengan cara pelaksanaan yang terarah untuk tercapainya suatu tujuan program. Sementara kebijakan publik menurut Woll dalam bukunya Tangkilisan (2003:2) adalah sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memecahkan masalah dan persoalan yang terjadi pada masyarakat, baik secara langsung atau pun tidak langsung, yang ada di berbagai institusi lembaga yang bisa mempengaruhi tatanan hidup masyarakat. Ada juga pendapat yang menekankan kebijakan publik

sebagai pelaksanaan dari sebuah tindakan dan tidaklah merupakan sebuah pernyataan kemauan atau keinginan dari pemerintah dan pejabatnya semata. Sementara itu juga jika pemerintah tidak melaksanakan sesuatu sebagai pilihan, hal tersebut merupakan juga sebagai kebijakan publik sebab memiliki pengaruh yang sama sebagai pilihan pemerintah dalam menjalankan sesuatu. Ada juga ahli lain yang memberikan pengertian public policy adalah usaha pemerintah untuk menanggapi persoalan publik, hal yang sama juga dinyatakan jika public policy ialah usaha memberikan manfaat yang tepat atas seluruh kemampuan yang tersedia agar mendapatkan solusi atas setiap persoalan publik atau persoalan pemerintah. Berlanjut dari itu dijelaskan jika kebijakan publik sebagai suatu cara pemerintah secara terus menerus mengintervensi hajat hidup (hak-hak) orang banyak atau kelompok yang belum mendapatkan keberuntungan di tengah masyarakat supaya mereka bisa hidup yang layak agar bisa turut serta berperan dalam pembangunan yang sementara berlangsung. David Easton dalam bukunya Leo Agustino (2009:19) berpendapat bahwa hanya orang yang memiliki otoritas dalam sistem politik (pengambil kebijakan pemerintah) yang resmi dapat melakukan sesuatu bagi masyarakatnya, apakah menjadi pilihan sikap pemerintah atau bukan menjadi sikap pilihan pemerintah namun tetap diwujudkan sebagai bentuk penerapan sebuah nilai. Hal tersebut terjadi dikarenakan pemerintah sebagai bagian dalam sistem otoritas politik yang didalamnya adalah penguasa yang sehari-harinya memiliki tanggung jawab dalam mengurus setiap masalah dan persoalan tertentu yang pada batasannya akan diminta untuk bersikap dalam pengambilan keputusan dan pada kemudian hari bisa diterima serta mengikat bagi seluruh masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Demi terlaksananya study kebijakan publik yang harus dilakukan adalah dengan berbagai macam cara seperti mencermati, menggambarkan, mengelola, melakukan analisa, dan mampu memberikan penjelasan dengan baik dari beberapa sudut pandang serta melihat setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu study kebijakan publik meliputi gambaran upaya yang

dilaksanakan oleh pengambil kebijakan, melakukan penilaian mengenai dampak yang timbul dari suatu kekuatan yang bersumber dari lingkungan bagi isi yang menjadi bagian kebijakan publik, menganalisa setiap pernyataan kelembagaan institusi dan proses politik yang terjadi bagi kebijakan publik. study yang dilaksanakan secara serius sekaitan dengan apa yang akan terjadi dari beberapa kebijakan secara politis bagi orang banyak memiliki pengaruh yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

(Nugroho 2008: 58) berpendapat bahwa ada 2 karakter utama dalam kebijakan publik (public policy), yang mana:

- Sesuatu hal yang tidak sulit untuk di pahami dan dimengerti, karna kebijakan publik memiliki makna terkait dengan sesuatu yang dilaksanakan agar tercapainya target secara nasional sebagai tujuan.
- kebijakan publik bisa diukur sebab memiliki ukuran dan parameter yang jelas seperti seberapa jauhnya kemajuan yang telah dilakukan sesuai dengan cita-cita.

Kebijakan publik sangat penting untuk dipelajari dengan berbagai macam alasan seperti berikut di bawah ini:

- *pertimbangan Ilmiah*. Maksud dipelajarinya kebijakan public dengan pertimbangan ilmiah agar mendapatkan pengatutan yang lebih banyak terkait sejarah asal usulnya, proses berkembangnya, dan sebab akibat yang timbul bagi masyarakat. Pada konteks ini kebijakan bisa dilihat sebagai variabel terikat ataupun variabel independen atau variabel yang berdiri sendiri. Kebijakan disebut dengan variabel yang terikat memiliki pusat perhatian tertuju bagi aspek-aspek politik dan lingkungan sekitar yang membantu sebagai poin utama kebijakan atau terkadang mempengaruhi esensi dari sebuah kebijakan. dikatakan sebagai variabel yang independen apabila pusat perhatian fokus pada pengaruh kebijakan yang mengarah pada sistim lingkungan dan politik yang mempengaruhi suatu kebijakan publik.

- *Pertimbangan professional*. Study public policy dimaksudkan dalam upaya untuk menentukan pengatuan yang ilmiah pada bidang public policy agar bisa mencari solusi terhadap persoalan-persoalan sosial dalam keseharian.
- *Pertimbangan politik*. Pada alasan ini dimaksudkan supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat agar tujuannya bisa tercapai, sehingga program dari pemerintah yang terlaksana atau tidak terlaksana bisa diketahui dengan baik sebagai sebuah tolak ukur karna semua bertujuan pada sasaran untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik atau yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- *Pertimbangan Politik*. Study kebijakan publik dimaksudkan pada dasarnya supaya pemerintah bisa melakukan dan melewati kebijakan secara baik dan tepat sasaran dalam mendapatkan tujuan yang baik.

Dari beberapa pandangan oleh para ahli bisa ditarik kesimpulan kalau kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan terlaksana atau belum terlaksana dari pemerintah dengan orientasi kepada suatu keinginan tertentu sebagai tujuan, dengan maksud mencari solusi atas persoalan-persoalan publik yang dituangkan dalam suatu ketentuan aturan undang-undang yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan yang sifatnya terikat.

B. Ciri Kebijakan Publik

Pada hakekatnya kebijakan public adalah suatu kegiatan dengan memiliki indentitas atau kekhasan yang menjadi ciri-ciri tertentu.

Ciri-ciri yang lebih khusus dimiliki oleh kebijakan publik berasal dari sebuah kenyataan jika kebijakan sesungguhnya dirumuskan, putusan diambil oleh yang mempunyai otoritas. hal inilah yang menjadi rujukan sebagai indentitas yang bisa ditarik menjadi beberapa point pada kebijakan publik seperti berikuu ini:

- Kebijakan publik adalah suatu aktivitas atau cara menuju pada suatu pencapaian target yang diinginkan ketimbang sebagai tindakan perilaku yang teracak dan kebetulan. Pada sistem politik moderen kebijakan public adalah suatu sikap yang dilakukan secara terencana dan sistematis.
- Sesungguhnya kebijakan hakekatnya memiliki beberapa kegiatan yang selalu ada keterkaitan disertai dengan pola yang menuju pada sasaran khusus atau tersendiri dan dilaksanakan oleh para pemegang kepentingan (Stakeholder) yang ada di pemerintahan akan tetapi bukan menjadi keputusan yang mutlak karna kemutlakannya dibuktikan dengan adanya penerapan yang tepat dan benar. Kebijakan sesungguhnya bukan saja terkait dengan keputusan dalam pembuatan aturan dan perundang-undangan pada bagian yang spesifik akan tetapi berkaitan juga dengan putusan-putusan yang berhubungan dengan penerapan (implementasi) dan pemberlakuan yang terpaksa.
- Kebijakan erat kaitannya pada sesuatu kegiatan atau program yang pelaksanaannya dilakukan oleh para stakeholder pemerintah melalui bagian tertentu.
- Kebijakan publik hasilnya bisa bersifat positif atau bisa juga dalam bersifat negatif dengan kemungkinan mencakup beberapa putusan-putusan dari pengambil keputusan dari pemerintah agar tak melakukan sesuatu atau tak melaksanakan tindakan dalam bentuk apapun dengan beberapa masalah dengan harapan agar peran pemerintah yang perlu dibutuhkan.

C. Jenis Kebijakan Publik

Beberapa pakar memiliki pendapat terkait dengan jenis kebijakan publik yang didasari dari pandangan masing-masing atau sudut pandangnya. Untuk itu maka para ahli tersebut mengategorikan public policy seperti di bawah ini:

1. Kebijakan Substansi

Kebijakan substansi adalah yang berkaitan dengan sesuatu hal akan dilaksanakan atau dijalankan dalam pemerintahan, Contohnya: Kebijakan yang berkaitan kesejahteraan sosial, buruh(karyawan) hak masyarakat secara umum (sipil), dan urusan internasional.

2. Kebijakan pembagian

Kebijakan pembagian berkaitan dengan pembagian pelayanan yang sesuai dengan kegunaan bagi masyarakat umum atau secara individu.

3. Kebijakan Materil.

Adalah kebijakan yang mendapatkan keuntungan dengan berasal dari semua sumber daya yang ada bagi kelompok sasaran yang dituju.

4. Kebijakan berhubungan dengan barang publik dan barang secara khusus.

Kebijakan barang publik ialah kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan penyerahan barang atau layanan publik, sedangkan kebijakan barang khusus (privat) ialah kebijakan berhubungan pengaturan ketersediaan layanan pribadi.

D. Beberapa Hal yang Berpengaruh pada Terbuatnya Suatu Kebijakan

Cara terbentuknya kebijakan melalui sebuah tahapan dan prose yang sulit tidak semudah yang kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Sekalipun demikian, orang-orang yang mengurus administrasi dalam sebuah lembaga atau institusi tetap memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan didasari kemauan keras dalam menyelesaikan proses kebijakan itu sendiri sesuai keahlian atau kemampuannya masing-masing sekalipun kebijakan yang dihasilkan beresiko atau tidak beresiko. Dalam membuat suatu kebijakan selalu terpengaruh dari beberapa hal, yang terkadang hal-hal tersebut harus

diwaspadai untuk bisa diantisipasi karna sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Kebijakan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:

1. Pengaruh beberapa tuntutan dari luar.

Keseringan orang yang membuat atau memutuskan kebijakan harus mengakomodir tuntutan dan tekanan dari luar untuk memenuhi kepentingannya.

2. Pengaruh kebiasaan lama.

Masih adanya pola kebiasaan lama yang berlaku pada manajemen dan administrasi sering mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak profesional dan terlalu kaku dalam menjalankan fungsi birokrasi. Dan kebiasaan tersebut sering diikuti oleh mereka yang menjalankan fungsi administrasi (administrator) sekalipun cara tersebut sering dikritik karna dianggap tidak tepat untuk dipakai. Ada juga kebiasaan-kebiasaan lama yang dipertahankan dan terus menerus dipakai dalam proses pengambilan kebijakan karna hasilnya berdampak baik serta dianggap terpenuhi.

3. Adanya sifat kepribadian

Kebanyakan kebijakan yang diambil lebih dominan dan sebagai factor penentu karna pengaruh dari kebiasaan sifat kepribadian yang dimiliki oleh sang pemimpin.

4. Dipengaruhi dari eksternal organisasi.

Keseringan pengambil kebijakan dipengaruhi oleh kelompok dari luar yang bisa berdampak positif atau bisa berdampak negatif. Jika hal ini berdampak negatif maka pengambil kebijakan seharusnya berhati-hati akan pengaruh dari kelompok luar tersebut, akan tetapi jika pengaruh dari luar itu memiliki dampak positif maka pengaruh kelompok tersebut harus diberikan ruang untuk menyampaikan konsep atau idenya. Pengaruh dari luar ini selalu mewarnai pengambilan kebijakan oleh pembuat keputusan, untuk itu tim pengambil kebijakan harus betul-betul memiliki kajian yang matang

terhadap pengaruh dari luar ini untuk menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan.

5. Adanya pengaruh keadaan/situasi masa lalu.

Pengaruh ini dimaksudkan karna keadaan atau situasi masalalu sering melekat pada ingatan atau menjadi patokan dalam mengambil kebijakan. Hal ini juga bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif.

E. Beberapa Langkah Kebijakan Publik

Prosedur dan mekanisme terbentuknya suatu kebijakan publik (Public Policy) terjadi melalui berbagai dinamika yang begitu sulit sebab turut sertanya berbagai macam cara dan metode yang dikaji melalui beberapa variable. Untuk itu para pakar dan pengamat politik menaruh minat dan perhatian untuk mengkaji dan mendalami dengan membagi beberapa proses penyusunan kebijakan publik dengan beberapa langkah tahapan. Tujuan dan maksud pembagian ini ialah agar memudahkan kita untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan publik, dari beberapa ahli membagi beberapa tahapan ini dengan urutan dan sistematika yang berbeda.

Dari beberapa pandangan para ahli mengenai langkah langkah kebijakan publik bisa ditarik kesimpulan seperti di bawah ini::

1. Menyusun Jadwal Agenda

Setiap pemimpin selalu diperhadapkan pada sebuah persoalan tersendiri yang tidak akan bisa dihindari dan merupakan bagian dalam hidup kesehariannya, masalah itu adalah agenda sebagai pejabat public. Ini Persoalan menjadi agenda tersendiri bagi pejabat karna kepentingan publik adalah yang paling utama dari agenda yang lain dan terkadang menjadi persoalan jika terjadi kompetisi dalam penyusunan agenda kebijakan. Terkadang juga menjadi persoalan jika persoalan ini tidak masuk dalam agenda atau sama sekali tidak tersentuh, namun masalah lain menjadi agenda penting pada sebuah pembahasan dan lebih ironis lagi jika tidak dimasukkan dalam agenda sehingga pembahasannya tertunda dengan rentan waktu yang cukup

lama. Dalam point penyusunan agenda yang dimaksudkan ini ialah seharusnya setiap agenda disusun berdasarkan dengan kebutuhan untuk kepentingan publik.

2. Tahap Rumusan Kebijakan.

Masalah dan isu yang berkembang menjadi topik trending di dalam masyarakat akan menjadi pusat perhatian untuk dijadikan sebagai agenda untuk masuk dalam pembahasan kebijakan untuk dikaji oleh pemangku kebijakan. Bagian inilah yang disebut sebagai rumusan atau formulasi kebijakan. Isu atau persoalan yang dijelaskan seperti diatas akan diformulasi untuk mencari solusi sebagai jalan keluar yang terbaik. Solusi dari masalah tersebut bisa berasal berbagai pilihan alternatif kebijakan yang tersedia. Melalui perumusan kebijakan ini semua alternatif yang ada masing-masing akan diseleksi secara ketat untuk ditentukan dan dipilih menjadi kebijakan akhir dalam menyelesaikan akan isu dan persoalan yang ada. Melalui tahapan ini setiap aktor yang berperan di dalamnya akan bersaing dengan konsep masing-masing untuk mengusahakan agar usulannya menjadi pilihan atas semua alternatif yang ada.

3. Pengesahan kebijakan.

Langkah berikut dalam pengambilan kebijakan ialah pengesahan kebijakan. Pengesahan kebijakan ini diambil berdasarkan dengan beberapa rumusan yang telah dilakukan dan ditentukanlah salah satu alternative berdasarkan dengan mayoritas kajian yang disertai dengan dukungan semua yang berperan dalam pengambilan kebijakan dengan legitimasi dari semua pihak dan perangkat yang ada.

4. Pelaksanaan Kebijakan

Apabila rancangan kebijakaan tidak di imlementasikan maka bakal hanya jadi konsep bagi para elit yang berada dalam sistim itu sendiri, yakni dilakukan oleh badan atau lembaga administrasi dan perwakilan-perwakilan di level bawah. Kebijakan diambil akan jalankankan oleh bagian-bagian administrasi sekaligus melakukan mobilisasi potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya kekuatan financial. Melalui tahap pelaksanaan/implementasi semua

keinginan akan saling berebutan atau bersaing agar konsep atau programnya bisa yang akan terpilih. Ada sekian pelaksanaan kebijakan yang bisa mendapat dukungan dari orang-orang yang melaksanakan, akan tetapi beberapa juga dari yang lainnya menentang atau ditolak oleh orang-orang yang mengimplementasikan. implementator.

5. Evaluasi atau Penilaian.

Tahapan kebijakan yang sudah dilaksanakan akan evaluasi atau dinilai, agar mengetahui seperti apa progress mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan telah memiliki pengaruh sesuai dengan yang diinginkan terhadap penyelesaian masalah atau isu yang sementara dihadapi oleh masyarakat, untuk itu ditetapkan suatu tolak ukur sebagai parameter untuk menjadi acuan dan patokan dalam memberikan penilaian kebijakan yang pelaksanaannya berdampak baik bagi masyarakat umum sesuai dengan yang diinginkan atau belum sesuai, agar jika belum sesuai maka bisa ditinjau kembali atas putusan kebijakan yang sudah dilaksanakan.

6. Konsep Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya implementasi kebijakan (Policy) ialah suatu cara yang digunakan agar kebijakan bisa mencapai hal yang diinginkan atau tujuannya, yang mana kebijakan tersebut sangat tepat dan pas (tidak ada yang kurang dan tidak lebih). Dalam mengimplementasikan public policy ada dua langkah yang menjadi pilihan, yakni mengimplementasikan langsung melalui bentuk (formulasi) melalui bentuk derivat dari kebijakan itu sendiri. Rantai implementasi dari kebijakan bisa dicermati dengan jelas dan baik dengan diawali perencanaan kegiatan, baru pelaksanaan kegiatan. Bentuk ini menyesuaikan mekanisme pengelolaan biasa ke bidang public. Hasil dari sebuah kebijakan adalah rentetan dari beberapa program yang hasil akhirnya berupa aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah, rakyat ataupun kerja sama antara yang menjalankan pemerintahan dengan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan public dapat didefinisikan suatu kegiatan yang terlaksana pada setiap keputusan sebelumnya.

Langkah-langkah ini meliputi usaha dalam merubah sebuah keputusan untuk dijadikan sebuah pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan waktu yang telah di tentukan atau sebagai upaya melanjutkan suatu upaya agar terjadi perubahan yang diinginkan baik dalam skala besar maupun skala kecil denan melalui proses penetapan dengan suatu putusan kebijakan yang sudah dilakukan oleh institusi atau lembaga publik dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Disisi lain impementasi bisa dimaknai sebagai upaya untuk mmemahami situasi yang terjadi saat sesudah program dianggap berlaku atau bisa jua dimaknai sebagai rumusan kebijaksanaan atas setiap kejadian dan kegiatan yang ada sesudah dilegitimasi atau sahnya suatu pedoman kebijaksanaan negara dengan mencakup usaha atau upaya dalam menyusun administrasi ataupun yang menimbulkan dampak atau akibat yang nyata bagi masyarakat melalui suatu kejadian. Dengan penjelasan dari atas bisa disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan kebijakan belum akan dimulai jika penetapan atau indentifikasi tujuan dan sasaran belum ada. Sehingga implementasi sebagai suatu proses tindakan yang dilaksanakan oleh beberapa aktor yang pada ujungnya akan memperoleh putusan yang tepat seperti pada tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Dengan penjelasan dari atas dapat ditarik kesimpulan jika implementasi kebijakan ialah cara yang bersifat umum dengan melakukan proses administrasi yang bisa dicermati dan diteliti melalui tingkat kegiatan tertentu. Cara program tertentu. Serangkaian tindakan dan mekanisme kegiatan baru akan dimulai apabila penetapan tujuan sudah ada. Lebih lanjutnya implementasi sebagai persamaan fungsi dari kebijakan, implementor, formator, inisiator, dan terakhir adalah waktu. Implementasi atau penerapan kebijakan mengkorelasikan antara tujuan dari kebijakan itu sendiri beserta realisasinya dengan apa yang telah didapatkan dari kegiatan organisasi institusi itu melalui pemimpinnya.

Bab 7

Memposisikan Kepemimpinan
Kristen dalam Ranah Publik



Bagian ini akan meletakkan dasar pemahaman tentang mengapa dan bagaimana kepemimpinan Kristen memiliki peran yang tak terhindarkan dalam membentuk wacana dan praktik di ranah publik. Ini adalah landasan konseptual yang krusial sebelum menyelami secara spesifik pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik di bab-bab selanjutnya. Pemahaman yang mendalam mengenai posisi ini akan membantu pembaca mengapresiasi kompleksitas dan potensi kontribusi kepemimpinan Kristen dalam masyarakat yang majemuk.

A. Pengantar: Ketika Iman Bertemu Ruang Publik

Ranah publik adalah panggung kompleks tempat beragam gagasan, kepentingan, dan nilai-nilai berinteraksi, yang pada akhirnya membentuk arah sebuah masyarakat dan negara. Di tengah dinamika ini, kepemimpinan memegang peran sentral dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan individu dan komunitas. Namun, ketika diskusi beralih ke kepemimpinan yang berakar pada iman Kristen, seringkali muncul pertanyaan fundamental tentang batas-batas dan relevansinya. Apakah iman, yang sering dianggap sebagai urusan pribadi, harus terisolasi dari domain publik? Atau, apakah ada mandat yang lebih mendalam bagi pemimpin Kristen untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual mereka ke dalam arena kebijakan publik? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin relevan dalam konteks global dan nasional yang terus berkembang, di mana garis antara ranah privat dan publik kian kabur.

Masyarakat kontemporer dicirikan oleh dua fenomena besar: pluralisme dan sekularisasi. Pluralisme mengacu pada keberadaan berbagai sistem kepercayaan, ideologi, dan gaya hidup yang hidup berdampingan. Realitas ini menuntut adanya dialog yang terbuka dan pemahaman yang cermat tentang bagaimana setiap kelompok dapat berkontribusi pada kebaikan bersama tanpa mengorbankan identitasnya. Di sisi lain, sekularisasi sering diartikan sebagai proses pemisahan antara institusi keagamaan dan negara telah mengubah lanskap interaksi antara agama dan domain publik. Beberapa

pandangan sekularistik ekstrem bahkan berargumen bahwa agama harus sepenuhnya dikesampingkan dari proses pembuatan kebijakan, hanya menjadi urusan personal dan ritualistik. Pendekatan ini seringkali mengabaikan fakta esensial bahwa bagi banyak orang, termasuk pemimpin Kristen, iman adalah sumber nilai dan motivasi yang tak terpisahkan dari cara mereka memandang dunia, mengambil keputusan, dan berinteraksi di dalamnya (Casanova, 1994, hlm. 5-7). Oleh karena itu, dalam konteks yang menantang namun juga penuh peluang ini, menjadi sangat penting untuk secara cermat dan persuasif mengartikulasikan posisi kepemimpinan Kristen di ranah publik. Tanpa artikulasi yang jelas, potensi kontribusi signifikan yang dapat diberikan oleh kepemimpinan berbasis iman, baik dalam hal etika maupun solusi praktis bagi permasalahan sosial, bisa terabaikan atau disalahpahami.

1. Mengapa Perlu Memposisikan?

Urgensi untuk secara jernih memposisikan kepemimpinan Kristen dalam ranah publik timbul dari beberapa pertimbangan krusial yang saling terkait. Ini bukan sekadar latihan akademis atau apologetika, melainkan kebutuhan praktis untuk memfasilitasi keterlibatan yang konstruktif dan meminimalkan kesalahpahaman yang sering terjadi di tengah masyarakat plural.

a. Membangun Legitimasi dan Menjawab Tantangan Pluralisme

Pertama dan yang terpenting, dalam masyarakat yang semakin pluralistik, setiap kelompok keyakinan termasuk Kristen memiliki tanggung jawab etis dan sosial untuk mengartikulasikan kontribusinya bagi kebaikan bersama. Realitas bahwa masyarakat modern terdiri dari beragam pandangan dunia, agama, dan ideologi menuntut adanya dialog yang terbuka, rasa hormat, dan saling pengertian. Jika komunitas Kristen tidak secara proaktif memposisikan diri, maka peran dan potensi kontribusi mereka termasuk nilai-nilai etis dan moral yang dianut dapat dengan mudah diabaikan, disalahpahami, atau bahkan dinilai negatif. Ada kecenderungan umum di beberapa kalangan untuk melihat keterlibatan agama dalam politik sebagai sesuatu yang inheren memecah belah, eksklusif, atau bahkan ancaman terhadap

kebebasan beragama kelompok lain. Narasi ini perlu diluruskan dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai iman justru dapat menjadi pondasi bagi kebijakan yang inklusif, adil, dan mempromosikan keharmonisan sosial.

Di Indonesia, sebuah negara yang secara konstitusional mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, ruang bagi kontribusi nilai-nilai agama dalam pembangunan bangsa secara fundamental telah tersedia dan bahkan diharapkan. Hal ini berbeda dengan model sekularisme ketat di beberapa negara Barat yang cenderung memisahkan agama dari semua urusan negara secara radikal. Oleh karena itu, memposisikan kepemimpinan Kristen adalah langkah strategis untuk mengklaim dan menarasikan legitimasi peran mereka dalam konteks nasional yang unik ini. Ini menegaskan bahwa komitmen keagamaan tidak harus diasingkan dari tanggung jawab kewarganegaraan, melainkan dapat menjadi sumber kekuatan dan arah bagi tindakan publik. Keterlibatan ini, pada hakikatnya, merupakan wujud dari panggilan iman untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga berpartisipasi dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik bagi semua (Wolterstorff, 1983, hlm. 67-68).

b. Mengatasi Mispersepsi Sekularisme dan Mendorong Dialog Konstruktif

Kedua, adanya tren sekularisme agresif atau pandangan yang menghendaki pemisahan total antara agama dan negara seringkali menimbulkan gagasan keliru bahwa nilai-nilai keagamaan secara inheren tidak relevan atau bahkan menghambat kemajuan publik. Pandangan ini, yang mengupayakan "pengusiran" agama dari ranah publik, berpotensi menciptakan ruang hampa moral dalam pengambilan keputusan kebijakan, atau setidaknya membatasi sumber-sumber etika yang dapat diakses. Padahal, bagi banyak orang Kristen, iman bukan sekadar serangkaian ritual atau dogma pribadi; ia adalah kerangka nilai komprehensif yang memengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk panggilan untuk terlibat aktif dalam upaya membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Filsuf Jürgen Habermas (2006), meskipun seorang pemikir yang berasal dari tradisi sekuler, mengakui secara eksplisit bahwa masyarakat modern, terutama dalam fase "postsäkular", tidak dapat mengabaikan potensi sumber daya normatif yang terkandung dalam tradisi keagamaan. Habermas berargumen bahwa negara konstitusional yang liberal harus membuka diri terhadap suara-suara religius dan memfasilitasi "terjemahan" argumen-argumen religius ke dalam bahasa yang dapat dipahami secara umum, sehingga dapat berkontribusi pada diskursus publik yang rasional dan inklusif (Habermas, 2006, hlm. 9-10). Memposisikan kepemimpinan Kristen berarti mengupayakan sebuah ruang di mana nilai-nilai iman dapat diartikulasikan secara rasional dan etis, dan dapat berinteraksi secara produktif dengan argumen-argumen non-religius untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan masyarakat. Ini adalah upaya untuk menunjukkan bahwa keterlibatan berbasis iman dapat menjadi sumber etika publik yang kuat, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan belas kasihan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan memahami posisinya, kepemimpinan Kristen dapat berinteraksi secara konstruktif, menumbuhkan dialog antar-agama dan antar-golongan, serta mencari solusi yang didasarkan pada nilai-nilai universal yang selaras dengan ajaran Kristen, bukan hanya dogma partikular.

c. Memaksimalkan Kontribusi Etis dan Kemanusiaan

Ketiga, memposisikan kepemimpinan Kristen secara jelas memungkinkan optimalisasi kontribusi etis dan moral mereka terhadap kebijakan publik. Tanpa pemahaman yang terstruktur tentang bagaimana nilai-nilai Kristen dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan dan masyarakat, kontribusi yang diberikan mungkin bersifat sporadis, kurang strategis, atau bahkan tidak dikenali. Dengan pemosisian yang tepat, kepemimpinan Kristen dapat menjadi suara yang konsisten untuk keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, integritas birokrasi, dan pelestarian lingkungan nilai-nilai yang seringkali diabaikan atau terpinggirkan dalam gejolak politik. Misalnya, dalam menghadapi masalah korupsi yang merajalela, etos integritas, kejujuran, dan penolakan terhadap keserakahan yang

diusung oleh pemimpin Kristen dapat menjadi kekuatan pendorong untuk reformasi sistemik. Dalam isu-isu kemanusiaan, seperti penanganan bencana alam atau pengentasan kemiskinan, belas kasih Kristen dapat memotivasi kebijakan yang lebih responsif dan berempati terhadap kaum marjinal dan rentan (Sider, 2005, hlm. 167-170). Oleh karena itu, pemosisian ini bukan hanya tentang legitimasi, tetapi juga tentang efektivitas dan relevansi praktis dalam menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih manusiawi.

d. Memberdayakan Aktor Kristen dan Mendorong Kolaborasi Inklusif
Terakhir, memposisikan kepemimpinan Kristen secara eksplisit juga penting untuk memberdayakan para pemimpin Kristen itu sendiri. Seringkali, kurangnya pemahaman tentang bagaimana iman dapat diintegrasikan secara etis dan efektif ke dalam ranah publik menyebabkan kebingungan, rasa terisolasi, atau bahkan penarikan diri dari keterlibatan sosial-politik. Beberapa mungkin merasa bahwa "politik itu kotor" atau tidak sesuai dengan panggilan iman. Dengan penjelasan yang kokoh tentang dasar-dasar teologis dan praksisnya, pemimpin Kristen dapat merasa lebih yakin, termotivasi, dan diberdayakan dalam menjalankan panggilan mereka di tengah masyarakat yang beragam. Mereka akan memiliki kerangka kerja untuk mengaplikasikan nilai-nilai iman dalam tindakan konkret di ranah publik.

Lebih jauh lagi, pemosisian yang jelas juga membantu masyarakat umum untuk lebih memahami motivasi di balik tindakan para pemimpin Kristen di arena publik, sehingga mendorong kolaborasi dan kerja sama lintas iman daripada kecurigaan atau konflik. Ketika setiap pihak memahami dasar pijakan dan tujuan satu sama lain, potensi untuk sinergi dalam mencapai tujuan bersama seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum akan jauh lebih besar. Pemosisian ini memfasilitasi dialog yang diperlukan untuk membangun konsensus di antara kelompok-kelompok yang berbeda, mencari titik temu moral yang dapat menopang kebijakan publik yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, "memposisikan" bukan

hanya upaya internal komunitas Kristen, tetapi juga jembatan menuju partisipasi yang lebih konstruktif dalam pembangunan peradaban bersama.

2. Garis Besar Bab: Peta Jalan Pemahaman

Bab ini bertujuan untuk menyediakan peta jalan komprehensif bagi pembaca dalam memahami peran dan posisi kepemimpinan Kristen di ranah publik. Pembahasan akan mengalir secara sistematis untuk membangun argumentasi yang kuat dan koheren, memberikan landasan yang kokoh sebelum memasuki analisis lebih dalam tentang pengaruh spesifiknya terhadap kebijakan publik. Setiap bagian akan dirancang untuk secara progresif memperdalam pemahaman tentang kompleksitas dan potensi kontribusi ini.

a. Menjelajahi Paradigma Hubungan Agama-Negara

Bagian pertama dari bab ini akan menguraikan beragam paradigma hubungan antara agama dan negara/publik secara umum. Ini adalah langkah fundamental karena cara sebuah masyarakat memahami hubungan ini akan sangat menentukan ruang gerak dan penerimaan terhadap keterlibatan kepemimpinan berbasis iman. Kita akan memulai dengan meninjau model-model historis dan kontemporer yang relevan, seperti:

- **Teokrasi:** Sistem di mana otoritas agama memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, dengan hukum-hukum negara bersumber langsung dari ajaran agama.
- **Sekularisme Ketat:** Model yang mengupayakan pemisahan radikal antara agama dan negara, membatasi ekspresi keagamaan hanya pada ranah pribadi dan melarang simbol atau praktik keagamaan dalam institusi publik.
- **Sekularisme Akomodatif:** Sebuah pendekatan di mana negara bersifat netral terhadap agama tetapi memungkinkan ekspresi keagamaan di ruang publik, serta kadang memberikan akomodasi tertentu bagi praktik keagamaan.
- **Model Kemitraan/Kolaborasi:** Sistem di mana negara mengakui kontribusi positif agama terhadap masyarakat dan

berkolaborasi dengan institusi keagamaan dalam penyediaan layanan sosial atau isu-isu moral.

Setelah itu, secara spesifik, bab ini akan menganalisis bagaimana konteks Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar filosofisnya dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama memberikan ruang yang unik dan relevan bagi partisipasi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita akan mengkaji bagaimana konstitusi Indonesia menciptakan sebuah model "negara berketuhanan" yang berbeda dari sekularisme Barat, namun tetap menjamin pluralisme dan kebebasan beragama bagi seluruh warganya. Pemahaman konteks ini krusial untuk melihat bagaimana kepemimpinan Kristen dapat beroperasi secara sah, etis, dan efektif dalam kerangka konstitusional yang ada (Asshiddiqie, 2009, hlm. 28-30). Penjelasan ini akan membantu pembaca memahami landasan hukum dan filosofis bagi keterlibatan kepemimpinan Kristen, menghindari misinterpretasi bahwa keterlibatan ini bersifat subversif atau eksklusif.

b. Mendefinisikan Ulang Kepemimpinan Kristen dalam Konteks Publik

Kedua, bab ini akan memperdalam pemahaman tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepemimpinan Kristen dalam konteks publik. Definisi ini akan melampaui sekadar identitas religius seseorang yang kebetulan memegang jabatan publik. Sebaliknya, ia akan menekankan bahwa yang krusial adalah etos, nilai, dan prinsip-prinsip yang diusung oleh pemimpin Kristen dalam tindakan dan keputusan mereka di ruang publik. Kita akan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai fundamental Injili seperti keadilan sosial, integritas pribadi, pelayanan tanpa pamrih (konsep *servant leadership*), belas kasih, dan tanggung jawab sosial menjadi motor penggerak bagi keterlibatan mereka. Pembahasan ini akan mencakup perbedaan konseptual antara seorang "Kristen yang kebetulan menjadi pemimpin" dan seorang "pemimpin Kristen" yang secara sadar mengintegrasikan imannya ke dalam praksis kepemimpinannya, sehingga menghasilkan dampak yang berbeda secara kualitatif.

Lebih lanjut, bagian ini juga akan menguraikan ruang lingkup kepemimpinan Kristen di ranah publik, menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak hanya terbatas pada satu bentuk atau jabatan. Cakupan ini akan meliputi:

- **Kepemimpinan Formal:** Peran individu Kristen yang menjabat posisi strategis dalam struktur pemerintahan (legislatif, eksekutif, yudikatif), seperti politisi, birokrat senior, atau penegak hukum.
- **Kepemimpinan Informal:** Peran individu atau kelompok Kristen yang memengaruhi opini publik dan gerakan sosial dari luar struktur pemerintahan, seperti aktivis sosial, intelektual, akademisi, atau tokoh masyarakat.
- **Kepemimpinan Institusional:** Peran kolektif dari lembaga-lembaga Kristen, termasuk gereja sebagai institusi dan organisasi nirlaba yang berafiliasi, dalam advokasi kebijakan, pelayanan sosial, dan pembentukan opini publik.

Pemahaman yang komprehensif tentang spektrum ini akan menggambarkan betapa luasnya potensi dampak kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik.

c. Menggali Dasar Teologis dan Filosofis Keterlibatan

Kita akan menyelami dasar-dasar teologis dan filosofis yang menjadi fondasi bagi keterlibatan publik kepemimpinan Kristen. Ini adalah bagian yang esensial untuk menjelaskan "mengapa" di balik keterlibatan mereka, yang seringkali bersifat internal dan motivasional. Bagian ini akan membahas:

- **Mandat Kultural (Mandat Penciptaan):** Analisis tentang perintah Allah kepada manusia dalam Kitab Kejadian (Kejadian 1:28) untuk "menguasai" dan "menaklukkan" bumi, yang ditafsirkan sebagai panggilan untuk berpartisipasi dalam penciptaan dan pengembangan kebudayaan manusia, termasuk sistem sosial dan politik yang adil dan berkelanjutan. Ini adalah argumen bahwa manusia, sebagai *imago Dei*,

dipanggil untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas ciptaan.

- **Mandat Sosial (Garam dan Terang Dunia):** Penjelasan ajaran Yesus dalam Matius 5:13-16, di mana pengikut-Nya disebut sebagai "garam dunia" dan "terang dunia." Metafora ini akan diuraikan sebagai panggilan untuk membawa dampak transformatif di tengah masyarakat, bukan dengan menarik diri dari dunia, tetapi dengan terlibat secara aktif untuk membawa kebaikan, keadilan, dan kebenaran ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ranah publik dan pembentukan kebijakan.
- **Konsep Teologi Publik:** Pengenalan dan eksplorasi disiplin teologi publik, yang secara sistematis mengkaji relevansi iman Kristen bagi kehidupan publik. Ini bukan tentang menjadikan teologi sebagai kebijakan negara, melainkan tentang bagaimana wawasan teologis dapat menginformasikan dan memperkaya debat publik tentang keadilan, hak asasi manusia, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
- **Pengejaran Kebaikan Bersama (Common Good):** Pembahasan tentang bagaimana konsep "kebaikan bersama" adalah motivasi sentral bagi teologi publik dan kepemimpinan Kristen di ranah publik. Ini merujuk pada kondisi sosial yang memungkinkan semua individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai pemenuhan diri dan berkembang, melampaui kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- **Keadilan dan Belas Kasih sebagai Pilar:** Bagaimana keadilan (*mishpat* dan *tzedakah*) dan belas kasih (*hesed*) dalam tradisi Alkitabiah menjadi pilar etis yang mendorong pemimpin Kristen untuk memperjuangkan kebijakan yang adil, berpihak pada yang lemah, dan berempati.

Bagian ini akan menegaskan bahwa keterlibatan publik Kristen bukan sekadar pilihan sukarela, melainkan panggilan yang inheren dalam iman itu sendiri, sebuah respons terhadap kasih Allah dan mandat untuk menjadi agen pemulihan di dunia.

d. Menganalisis Tantangan dan Peluang Keterlibatan

Terakhir, bab ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan internal dan eksternal yang mungkin dihadapi oleh kepemimpinan Kristen ketika berinteraksi dengan ranah publik. Pengakuan terhadap tantangan ini adalah kunci untuk mengembangkan strategi yang realistis dan efektif.

1) Tantangan Internal:

- **Fragmentasi Teologis dan Politik dalam Komunitas Kristen:** Bagaimana perbedaan interpretasi doktrin atau pandangan politik dapat menyebabkan kurangnya suara yang kohesif atau bahkan konflik internal, melemahkan kapasitas mereka untuk berbicara dengan otoritas moral di ruang publik.
- **Kecenderungan Fundamentalisme dan Eksklusivisme:** Bahaya dari pendekatan yang terlalu dogmatis atau ingin memaksakan nilai agama tanpa mempertimbangkan pluralisme, yang dapat menimbulkan resistensi dan prasangka.
- **Privatisasi Iman dan Apatisme Politik:** Fenomena di mana iman dianggap hanya urusan pribadi, yang menyebabkan keengganan untuk terlibat dalam isu-isu sosial-politik dan hanya berfokus pada kehidupan gereja atau spiritualitas individu.

2) Tantangan Eksternal:

- **Dominasi Sekularisme dan Rasionalisme:** Bagaimana narasi yang mengutamakan argumen rasional semata dapat meminggirkan argumen berbasis etika keagamaan.
- **Politik Identitas dan Polarisasi Sosial:** Risiko bahwa agama dapat digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat, alih-alih menjadi kekuatan pemersatu.
- **Potensi Misinterpretasi dan Prasangka:** Bagaimana tindakan atau pernyataan pemimpin Kristen dapat disalahpahami atau dicurigai oleh kelompok lain.

Namun, di balik tantangan ini, bab ini juga akan menyoroti peluang-peluang kolaborasi dan kontribusi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai dampak positif yang transformatif. Ini termasuk potensi untuk membangun jembatan lintas iman dalam memperjuangkan isu-isu etis dan kemanusiaan, meningkatkan etika dan akuntabilitas dalam pemerintahan, mengadvokasi hak-hak kelompok rentan, serta mendorong inovasi sosial dan program pembangunan yang berakar pada nilai-nilai Kristen. Melalui pembahasan yang komprehensif ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang kokoh mengenai legitimasi, relevansi, dan dinamika kepemimpinan Kristen dalam membentuk kebijakan publik, menyiapkan mereka untuk analisis lebih lanjut di bab-bab berikutnya. Bab ini akan berfungsi sebagai dasar filosofis dan praksis bagi seluruh argumentasi buku, menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan yang sarat makna dan tanggung jawab.

B. Paradigma Hubungan Agama dan Negara/Publik

Memahami bagaimana kepemimpinan Kristen menempatkan dirinya dalam ranah publik membutuhkan tinjauan mendalam terhadap beragam cara pandang tentang interaksi antara agama dan entitas publik, termasuk negara. Sepanjang sejarah peradaban manusia, dan di berbagai belahan dunia, hubungan yang kompleks ini telah berevolusi dan termanifestasi dalam spektrum yang luas, mulai dari identifikasi total (di mana agama dan negara nyaris tak terpisahkan) hingga pemisahan ketat (di mana keduanya beroperasi dalam domain yang sangat berbeda). Fleksibilitas dan rigiditas hubungan ini seringkali menjadi penentu bagaimana pemimpin berbasis iman dapat berpartisipasi dan memengaruhi kebijakan publik.

1. Berbagai Perspektif Hubungan Agama dan Publik

Secara umum, terdapat beberapa model utama yang telah dikembangkan oleh para akademisi dan pemikir untuk menggambarkan relasi yang dinamis antara agama dan domain

publik atau negara. Model-model ini menyediakan kerangka analitis untuk memahami bagaimana otoritas, nilai, dan institusi keagamaan berinteraksi dengan struktur kekuasaan politik dan proses pembuatan kebijakan.

a. Model Teokrasi: Identifikasi Total

Di salah satu ujung spektrum adalah model teokrasi, sebuah sistem pemerintahan di mana otoritas agama memegang kekuasaan tertinggi dan mutlak. Dalam teokrasi, hukum-hukum negara bersumber langsung dari ajaran atau hukum agama (hukum ilahi), dan pemimpin agama juga merupakan pemimpin politik tertinggi. Keputusan-keputusan negara dijalankan berdasarkan interpretasi teks-teks suci atau doktrin keagamaan. Contoh historis dapat ditemukan dalam beberapa bentuk pemerintahan kuno seperti Mesir Firaunik atau kerajaan-kerajaan Israel kuno, di mana raja dianggap sebagai representasi ilahi atau pelaksana kehendak Tuhan. Dalam konteks modern, beberapa negara memiliki elemen teokratis yang kuat, di mana ulama atau otoritas keagamaan memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif yang signifikan (Philpott, 2004, hlm. 12-15). Dalam model ini, peran kepemimpinan berbasis iman tidak hanya diakui, tetapi merupakan inti dari struktur pemerintahan itu sendiri, sehingga pengaruhnya terhadap kebijakan publik bersifat langsung dan menyeluruh.

b. Model Sekularisme: Pemisahan Keta dan Akomodatif

Berlawanan dengan teokrasi adalah model sekularisme, yang mengadvokasi pemisahan antara agama dan negara. Namun, sekularisme itu sendiri memiliki gradasi dan interpretasi yang berbeda:

- **Sekularisme Ketat:** Sering juga disebut sekularisme agresif atau dalam konteks Prancis sebagai *laïcité*, model ini berupaya memisahkan agama secara total dari ruang publik. Tujuannya adalah untuk memastikan netralitas negara secara absolut dan melindungi kebebasan individu dari dominasi atau paksaan agama. Dalam model ini, ekspresi keagamaan dibatasi secara ketat pada ranah pribadi atau komunitas keagamaan. Simbol-simbol keagamaan seringkali dilarang di institusi pemerintah

dan pendidikan publik, dan negara tidak memberikan dukungan finansial atau pengakuan khusus kepada organisasi keagamaan manapun. Premis utamanya adalah bahwa agama dapat menjadi sumber perpecahan dan irasionalitas dalam politik, sehingga harus dijauhkan dari pengambilan keputusan publik. Di sini, peran kepemimpinan berbasis iman dalam kebijakan publik sangat dibatasi, seringkali hanya sebatas advokasi dari luar tanpa integrasi ke dalam struktur formal.

- **Sekularisme Akomodatif:** Model ini, yang banyak diterapkan di negara-negara Anglo-Amerika seperti Amerika Serikat, juga menganut prinsip pemisahan gereja dan negara, namun dengan pendekatan yang lebih lunak. Negara bersifat netral terhadap agama, tidak memihak agama mana pun dan tidak mendirikan agama resmi. Namun, negara tidak bersikap anti-agama; ia justru mengakomodasi ekspresi keagamaan di ruang publik selama tidak ada dukungan atau preferensi negara terhadap satu agama tertentu (Ahdar & Leigh, 2013, hlm. 23-25). Misalnya, diizinkan simbol keagamaan di tempat-tempat umum (selama tidak didanai atau dipromosikan pemerintah), pengakuan hari raya keagamaan, atau pemberian fasilitas ibadah di lembaga-lembaga publik. Dalam model ini, kepemimpinan berbasis iman memiliki ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam wacana publik dan memengaruhi kebijakan melalui lobi, advokasi, atau partisipasi politik individu, meskipun tanpa adanya penggabungan institusional dengan negara.

c. Model Kemitraan atau Kolaborasi

Di antara sekularisme dan teokrasi, terdapat model-model yang mengedepankan kemitraan atau kolaborasi antara agama dan negara/publik. Dalam model ini, agama diakui sebagai entitas yang memiliki kontribusi positif dan vital bagi masyarakat. Negara tidak hanya mengakomodasi, tetapi bahkan secara aktif berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dalam penyediaan layanan sosial, pendidikan, kesehatan, atau isu-isu moral yang menjadi perhatian

publik. Kolaborasi ini dilakukan tanpa melanggar prinsip kebebasan beragama atau melakukan diskriminasi terhadap agama lain. Contoh dapat ditemukan di beberapa negara Eropa di mana gereja secara historis memainkan peran besar dalam sistem pendidikan atau pelayanan sosial dan menerima dukungan finansial dari negara. Di sini, kepemimpinan berbasis iman dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan jaringan dan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga keagamaan.

d. Kompartementalisasi dan Transformasi: Pendekatan Jose Casanova dan Jürgen Habermas

Pemikir kontemporer telah memperkaya pemahaman tentang hubungan agama dan publik. Sosiolog Jose Casanova (1994) memperkenalkan konsep "deprivatisasi agama" yang menentang tesis sekularisasi klasik yang meramalkan hilangnya agama dari ranah publik. Casanova berargumen bahwa, meskipun proses diferensiasi institusional antara agama dan negara telah terjadi, agama justru kembali muncul sebagai aktor publik yang signifikan dalam berbagai bentuk, mulai dari gerakan sosial hingga advokasi kebijakan (Casanova, 1994, hlm. 5-7). Deprivatisasi ini berarti agama tidak lagi terbatas pada ruang privat individu, melainkan secara aktif terlibat dalam wacana moral dan politik masyarakat. Bagi Casanova, ini adalah fenomena global yang menantang pandangan bahwa sekularisme harus berarti eliminasi agama dari kehidupan publik.

Senada dengan itu, filsuf Jerman Jürgen Habermas (2006), meskipun seorang pemikir sekuler, turut berkontribusi pada diskusi ini dengan konsep "masyarakat postsäkular". Habermas berargumen bahwa negara tidak boleh lagi mengharapkan warga negaranya untuk sepenuhnya memisahkan keyakinan religius mereka dari argumen publik mereka. Sebaliknya, ia menyerukan adanya "belajar timbal balik" antara warga negara religius dan sekuler. Negara konstitusional yang liberal harus membuka diri untuk belajar dari sumber daya normatif yang terkandung dalam tradisi religius dan memfasilitasi

"terjemahan" argumen religius ke dalam bahasa yang dapat dipahami secara umum, sehingga dapat berkontribusi secara rasional dan etis pada diskursus publik yang inklusif (Habermas, 2006, hlm. 9-10). Ini bukan tentang memberikan preferensi pada agama, melainkan tentang mengakui bahwa warga negara religius memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dalam debat publik, dan bahwa perspektif mereka bisa jadi mengandung wawasan moral yang berharga bagi seluruh masyarakat.

Model-model ini, baik yang bersifat dikotomis maupun yang lebih bergradasi, memberikan kerangka penting untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan Kristen menavigasi dan beroperasi dalam ranah publik. Tidak ada satu model pun yang cocok untuk semua konteks, dan setiap masyarakat harus menentukan keseimbangan antara otonomi negara dan ruang bagi ekspresi serta kontribusi keagamaan. Bagi kepemimpinan Kristen, pemahaman atas paradigma-paradigma ini menjadi kunci untuk mengidentifikasi strategi keterlibatan yang etis, efektif, dan konstitusional dalam membentuk kebijakan publik.

2. Posisi dalam Konteks Indonesia

Indonesia menawarkan konteks yang unik dan kaya dalam hubungan antara agama dan negara, yang tidak sepenuhnya cocok dengan model-model Barat yang telah dibahas sebelumnya. Negara ini bukanlah sebuah teokrasi, di mana hukum agama sepenuhnya mendominasi hukum dan pemerintahan, tetapi juga bukan negara sekuler dalam pengertian yang memisahkan agama secara total dari kehidupan publik. Sebaliknya, Indonesia menganut suatu pendekatan yang menempatkan agama pada posisi yang sentral namun dalam kerangka pluralistik dan konstitusional. Fondasi filosofis dan hukumnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), secara eksplisit memberikan ruang bagi peran agama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

a. Pancasila sebagai Landasan Religius-Nasional

Inti dari posisi unik Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar filosofis negara. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," secara fundamental menegaskan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bukan sekadar pengakuan formal, melainkan sebuah pernyataan bahwa nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari agama-agama di Indonesia harus menjiwai seluruh aspek kehidupan publik. Makna dari sila pertama ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk para pemimpinnya, diyakini beriman kepada Tuhan (walau tidak secara spesifik pada satu agama tertentu), dan bahwa kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus dilandasi oleh moralitas ilahi. Dengan demikian, Pancasila menolak ateisme sekaligus menolak teokrasi. Ia menciptakan ruang di mana agama diakui sebagai sumber nilai-nilai luhur yang membimbing negara, namun negara itu sendiri tidak dikuasai oleh satu agama atau doktrin keagamaan tertentu (Asshiddiqie, 2009, hlm. 28-30).

Bagi kepemimpinan Kristen, Pancasila memberikan legitimasi dan mandat untuk berkontribusi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa aspirasi untuk keadilan, kebenaran, dan belas kasih yang berakar dalam iman Kristen memiliki landasan konstitusional untuk diekspresikan dan diperjuangkan dalam ranah publik. Ini bukan intervensi asing, melainkan partisipasi yang diharapkan dalam upaya membangun bangsa yang berlandaskan moralitas. Sila-sila Pancasila lainnya—Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—secara inheren selaras dengan banyak nilai universal yang juga dipegang oleh iman Kristen. Misalnya, keadilan sosial sangat bergema dengan ajaran-ajaran Injili tentang kepedulian terhadap kaum miskin dan tertindas. Persatuan Indonesia mencerminkan panggilan untuk hidup dalam harmoni dan kasih di tengah keberagaman. Oleh karena itu, bagi pemimpin Kristen, Pancasila adalah jembatan yang memungkinkan mereka menerjemahkan nilai-

nilai iman ke dalam bahasa publik yang dapat diterima dan dihayati oleh seluruh elemen bangsa.

b. UUD 1945 dan Jaminan Kebebasan Beragama dalam Bingkai Kenegaraan

Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, semakin memperjelas posisi agama dalam kehidupan bernegara. Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal ini adalah pilar penting yang menegaskan dua hal krusial:

- **Jaminan Kebebasan Beragama:** Negara secara aktif melindungi hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan agamanya tanpa paksaan. Ini berarti tidak ada agama resmi negara dan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama.
- **Peran Negara dalam Urusan Agama:** Meskipun negara menjamin kebebasan, ia juga memiliki peran dalam mengatur kehidupan beragama demi ketertiban umum dan kerukunan antarumat beragama. Ini terlihat dari keberadaan Kementerian Agama yang mengurus berbagai aspek kehidupan keagamaan, seperti pendidikan agama, pengelolaan haji, hingga pembinaan kerukunan.

Jaminan kebebasan beragama ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepemimpinan Kristen untuk berpartisipasi dalam ranah publik. Pemimpin Kristen dapat mengekspresikan pandangan yang berakar pada iman mereka, mengadvokasi kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Kristiani, dan membentuk organisasi-organisasi yang melayani masyarakat, tanpa rasa takut akan penindasan atau pembatasan yang tidak semestinya. Ini adalah legitimasi bagi pluralitas partisipasi berbasis iman dalam kehidupan publik. Dengan adanya jaminan ini, komunitas Kristen tidak perlu menyembunyikan identitas atau motivasi imannya ketika berinteraksi dengan negara atau masyarakat luas. Sebaliknya, mereka dapat berpartisipasi sebagai

warga negara yang utuh, membawa perspektif iman mereka ke dalam dialog publik tentang isu-isu nasional.

c. Model Hubungan Akodatig-Kemitraan yang Dinamis

Melalui Pancasila dan UUD 1945, Indonesia membangun sebuah model hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif dan kemitraan dinamis. Negara tidak hanya netral, tetapi juga aktif memfasilitasi kehidupan beragama dan bahkan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan. Ini berbeda dengan sekularisme ketat yang cenderung menciptakan dinding pemisah yang tinggi. Di Indonesia, organisasi keagamaan, termasuk gereja dan lembaga-lembaga Kristen, seringkali menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Misalnya, banyak rumah sakit, sekolah, dan panti asuhan yang dikelola oleh yayasan Kristen, dan keberadaan mereka diakui serta kadang-kadang didukung oleh negara. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa agama bukan hanya urusan spiritual pribadi, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan.

Peran Kementerian Agama juga menjadi indikator penting dari model ini. Kementerian ini tidak hanya mengurus administrasi keagamaan, tetapi juga mempromosikan kerukunan antarumat beragama, memberikan pembinaan, dan mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan agama. Ini mencerminkan bahwa negara melihat agama sebagai bagian integral dari moralitas dan etika bangsa, yang perlu dipelihara dan difasilitasi untuk kebaikan bersama. Meskipun demikian, model ini juga memiliki tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan agar tidak terjebak dalam favoritisme terhadap satu agama atau membiarkan agama menjadi alat politik yang memecah belah. Keseimbangan ini menuntut kearifan dari pemimpin negara dan pemimpin agama untuk terus menjaga prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Bagi kepemimpinan Kristen, model ini berarti adanya kesempatan besar untuk memberikan kontribusi yang berarti. Mereka tidak perlu beroperasi dari "pinggir", tetapi dapat terlibat sebagai

bagian integral dari masyarakat yang plural, menyuarakan nilai-nilai keadilan, integritas, dan belas kasih yang dipegang teguh dalam iman Kristen. Keterlibatan ini dapat berbentuk advokasi kebijakan, partisipasi dalam forum-forum dialog antar-agama, pengembangan program-program sosial yang inovatif, hingga menjadi teladan dalam praktik pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, posisi kepemimpinan Kristen di Indonesia bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara moral dan strategis untuk pembangunan bangsa. Ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi "garam dan terang" di tengah masyarakat, yang diakui dan dijamin oleh fondasi negara itu sendiri.

3. Argumen untuk Keterlibatan Publik Agama: Mengapa Komunitas Iman Harus Terlibat?

Pertanyaan mendasar mengenai mengapa komunitas iman, termasuk Kristen, memiliki panggilan untuk terlibat dalam isu-isu publik bukanlah hal yang baru. Sepanjang sejarah, agama seringkali menjadi kekuatan pendorong di balik perubahan sosial dan moral yang signifikan. Namun, di era modern yang semakin sekular dan pluralistik, urgensi untuk mengartikulasikan dasar-dasar keterlibatan ini menjadi semakin vital. Argumen untuk keterlibatan publik agama tidak hanya bersandar pada klaim teologis semata, tetapi juga didukung oleh pemahaman sosiologis tentang peran agama dalam masyarakat sebagai agen perubahan dan penyedia nilai.

a. Perspektif Teologis: Mandat Ilahi untuk Kebaikan Dunia

Dari perspektif teologis Kristen, keterlibatan dalam ranah publik bukanlah suatu pilihan opsional, melainkan sebuah mandat inheren yang berakar pada sifat Allah dan panggilan-Nya kepada umat manusia. Ada beberapa pilar teologis yang menopang argumen ini, semuanya menunjukkan bahwa iman Kristen secara fundamental bersifat holistik dan berorientasi pada dunia.

1) Mandat Penciptaan dan Pengelolaan (Stewardship)

Salah satu dasar teologis paling fundamental adalah mandat penciptaan, yang ditemukan dalam Kitab Kejadian. Dalam Kejadian

1:28, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk "beranakcucu dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ayat ini secara universal ditafsirkan bukan sebagai lisensi untuk eksploitasi yang merusak, melainkan sebagai panggilan untuk pengelolaan (*stewardship*) yang bertanggung jawab atas ciptaan. Manusia, sebagai *imago Dei* (gambar Allah), dipanggil untuk menjadi agen pemeliharaan dan pengembangan dunia, merefleksikan karakter Allah yang adalah pencipta dan pemelihara. Ini berarti umat Kristen memiliki tanggung jawab moral dan rohani untuk berkontribusi pada pengembangan sistem dan struktur yang kondusif bagi *flourishing* manusia dan keutuhan ciptaan.

Mandat ini melampaui batas-batas pribadi atau gerejawi; ia mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan politik. Membangun masyarakat yang adil, mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang lestari adalah bagian tak terpisahkan dari mandat ilahi ini. Oleh karena itu, bagi pemimpin Kristen, keterlibatan dalam isu-isu publik adalah wujud konkret dari ketaatan mereka terhadap perintah Allah untuk merawat dan mengembangkan dunia ciptaan-Nya. Mereka tidak dapat mengabaikan penderitaan sosial yang diakibatkan oleh ketidakadilan ekonomi, praktik korupsi yang merajalela, atau degradasi lingkungan yang mengancam masa depan, sebab semua itu merupakan bagian dari ciptaan yang perlu dipulihkan dan dikelola dengan prinsip-prinsip Ilahi. Keterlibatan ini adalah ekspresi dari kasih Tuhan yang universal terhadap seluruh ciptaan.

2) Panggilan untuk Menjadi "Garam dan Terang Dunia"

Dasar teologis lain yang kuat ditemukan dalam ajaran Yesus sendiri, khususnya dalam Matius 5:13-16, di mana Ia menyebut para pengikut-Nya sebagai "garam dunia" dan "terang dunia." Metafora ini adalah panggilan eksplisit untuk keterlibatan transformatif dalam

masyarakat, bukan penarikan diri dari dunia. Ini menuntut partisipasi aktif yang membawa dampak positif pada lingkungan sekitar.

- **Garam (fungsi pengawet dan penambah rasa):** Garam memiliki sifat pengawet, mencegah kebusukan, dan juga penambah rasa. Dalam konteks sosial, ini berarti komunitas Kristen dipanggil untuk mencegah kemerosotan moral, korupsi, dan ketidakadilan yang merusak tatanan masyarakat. Mereka harus menjadi agen yang menjaga integritas publik, menentang praktik-praktik yang merugikan, dan membawa nilai-nilai yang bermakna, bahkan rasa "nikmat" atau kebaikan, bagi kehidupan bersama. Keterlibatan ini menuntut keberanian untuk menunjuk pada hal yang salah dan menawarkan alternatif yang benar.
- **Terang (fungsi pencerahan dan penuntun):** Terang berfungsi untuk menyingkap kegelapan, memberikan petunjuk, dan memungkinkan orang melihat dengan jelas arah dan tujuan. Ini melambangkan panggilan komunitas Kristen untuk membawa kebenaran, kejelasan, dan panduan moral ke dalam isu-isu publik yang kompleks. Mereka harus menyoroti ketidakadilan struktural, menawarkan solusi yang berakar pada hikmat ilahi dan etika, serta menjadi mercusuar harapan dan kejelasan di tengah kebingungan atau ketidakpastian sosial. Terang ini memungkinkan masyarakat untuk melihat jalan menuju keadilan dan kemakmuran yang lebih besar.

Panggilan "garam dan terang" ini menegaskan bahwa iman Kristen tidak dirancang untuk diisolasi dalam ranah privat, melainkan untuk memiliki dampak positif dan transformatif di tengah dunia. Itu adalah mandat untuk menjadi agen kebaikan di setiap sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan kebijakan publik. Hal ini mendorong pemimpin Kristen untuk tidak hanya berkhotbah di mimbar atau melakukan ibadah pribadi, tetapi juga menerjemahkan nilai-nilai iman mereka ke dalam tindakan nyata yang memengaruhi

kehidupan banyak orang, meningkatkan kualitas kehidupan di mana pun mereka berada.

3) Teologi Publik dan Pengejaran Kebaikan Bersama

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep teologi publik (public theology) telah berkembang pesat sebagai disiplin yang secara sistematis mengkaji relevansi iman Kristen bagi kehidupan publik. Teologi publik berusaha menjembatani kesenjangan antara diskursus teologis di satu sisi dan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi di sisi lain. Ini bukan tentang menjadikan teologi sebagai kebijakan negara secara dogmatis, melainkan tentang bagaimana wawasan teologis dapat menginformasikan dan memperkaya debat publik tentang keadilan, hak asasi manusia, lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Teologi publik berpendapat bahwa iman memiliki sesuatu yang berharga untuk dikatakan dalam diskusi-diskusi ini, bahkan jika argumennya harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh semua warga negara, religius maupun non-religius (Stackhouse, 2004, hlm. 7-10).

Inti dari teologi publik, dan juga motivasi utama kepemimpinan Kristen di ranah publik, adalah pengejaran kebaikan bersama (*common good*). Kebaikan bersama merujuk pada kondisi sosial yang memungkinkan semua individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai pemenuhan diri dan berkembang secara holistik. Ini mencakup keadilan sosial, perdamaian, kesejahteraan ekonomi yang merata, perlindungan lingkungan, dan jaminan kebebasan sipil. Dari perspektif Kristen, kebaikan bersama adalah refleksi dari Kerajaan Allah di bumi, di mana keadilan dan belas kasih merajai. Pemimpin Kristen dipanggil untuk mempromosikan kebijakan yang melampaui kepentingan pribadi atau kelompok, dan secara tulus berorientasi pada kesejahteraan holistik seluruh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan dan terpinggirkan. Keterlibatan ini didorong oleh pemahaman bahwa Allah tidak hanya peduli pada keselamatan jiwa individu, tetapi juga pada keadilan, perdamaian, dan pemulihan seluruh ciptaan, termasuk tatanan sosial yang rusak.

b. Perspektif Sosiologis: Peran Agama sebagai Agen Sosial

Selain argumen teologis yang kuat, ada pula argumen sosiologis yang tak kalah valid mengapa komunitas iman memiliki panggilan dan kapasitas untuk terlibat dalam isu-isu publik. Sosiologi agama menunjukkan bahwa agama bukanlah sekadar fenomena privat yang terisolasi, melainkan kekuatan sosial yang signifikan dan agen yang mampu membentuk struktur masyarakat.

1) Sumber Daya Moral dan Etika yang Vital

Secara sosiologis, agama seringkali menjadi penyedia utama sumber daya moral dan etika bagi masyarakat. Banyak prinsip keadilan, kasih, solidaritas, dan integritas yang menjadi dasar hukum dan norma sosial dalam masyarakat modern berakar pada tradisi keagamaan. Komunitas iman memiliki kapasitas unik untuk menyuarakan standar moral yang tinggi dan mendorong perilaku etis, baik di tingkat individu maupun institusional. Ketika ranah publik menghadapi krisis etika, seperti korupsi yang sistemik, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakadilan struktural yang mengakar, suara moral dari komunitas iman dapat menjadi katalisator yang ampuh bagi perubahan. Mereka dapat mengingatkan masyarakat tentang nilai-nilai dasar yang mungkin telah terabaikan atau terdistorsi, dan memberikan fondasi moral yang kuat bagi gerakan reformasi sosial. Agama seringkali menawarkan kerangka makna dan nilai yang melampaui kepentingan sesaat atau pragmatisme politik, sehingga dapat memberikan arah moral yang stabil bagi masyarakat.

2) Jaringan Sosial yang Kuat dan Akumulasi Kapital Sosial

Komunitas iman, termasuk gereja dan berbagai organisasi Kristen, seringkali memiliki jaringan sosial yang luas dan kuat, serta akumulasi kapital sosial yang signifikan. Mereka memiliki struktur organisasi yang mapan (misalnya, jemaat, sinode, yayasan), basis anggota yang besar dan tersebar, sumber daya finansial yang terkumpul dari sumbangan, dan terutama, ribuan relawan yang berdedikasi. Kapital sosial ini—yang meliputi kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan hubungan yang memfasilitasi tindakan

kolektif—memungkinkan mereka untuk memobilisasi orang dan sumber daya guna mengatasi masalah sosial yang kompleks.

Sebagai contoh, lembaga-lembaga keagamaan di seluruh dunia seringkali menjadi penyedia layanan sosial utama, mengelola sekolah, rumah sakit, panti asuhan, program bantuan kemanusiaan, dan pusat rehabilitasi. Di Indonesia, banyak yayasan Kristen telah lama aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil maupun perkotaan. Keterlibatan praktis ini seringkali mengisi kekosongan yang tidak dapat dijangkau atau dipenuhi oleh pemerintah sendirian, dan secara tidak langsung, mereka memengaruhi isu-isu dan kebutuhan yang harus diatasi oleh kebijakan publik. Jaringan dan kapital sosial ini juga dapat digunakan secara efektif untuk advokasi kebijakan, melakukan lobi kepada pemerintah, atau mengorganisir gerakan akar rumput untuk menekan perubahan legislatif atau sosial.

3) Suara bagi Kaum Marginal dan Katalisator Perubahan Sosial

Dalam banyak kasus sejarah, agama telah terbukti menjadi suara yang paling lantang bagi kaum marginal dan katalisator perubahan sosial yang signifikan. Gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat pada abad ke-20, yang banyak dipimpin oleh tokoh agama seperti Martin Luther King Jr., adalah contoh klasik bagaimana iman dapat memotivasi perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan rasial di tengah diskriminasi sistemik (Wolterstorff, 1983, hlm. 67-68). Di Afrika Selatan, gereja-gereja Kristen memainkan peran krusial dalam menentang apartheid. Komunitas iman seringkali menjadi tempat berlindung, penyedia dukungan psikologis, dan pendorong bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, tertindas, atau tidak memiliki representasi di forum-forum kekuasaan.

Dorongan etis yang mendalam dari iman mendorong mereka untuk berdiri bersama yang lemah, menyuarakan keluhan mereka, dan menuntut kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Mereka tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga berusaha mengatasi akar masalah ketidakadilan. Melalui nubuatan sosial (menyatakan kebenaran di hadapan kekuasaan) dan tindakan profetik

(memodelkan cara hidup yang adil), komunitas iman dapat menginspirasi dan memobilisasi masyarakat luas untuk menuntut perubahan.

Singkatnya, baik dari perspektif teologis maupun sosiologis, komunitas iman, termasuk Kristen, memiliki panggilan yang kuat dan legitimasi yang tak terbantahkan untuk terlibat dalam isu-isu publik. Secara teologis, ini adalah bagian dari mandat ilahi untuk mengelola ciptaan dan menjadi agen transformatif bagi kebaikan dunia. Secara sosiologis, agama memiliki sumber daya moral, jaringan sosial yang luas, dan potensi sebagai katalisator perubahan yang menjadikannya aktor penting dalam membentuk masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mengabaikan atau meminggirkan peran ini berarti kehilangan potensi besar bagi kebaikan bersama dan mengabaikan sumber daya yang vital bagi pembangunan sebuah peradaban.

C. Pemahaman Kepemimpinan Kristen dalam Konteks Publik

Diskusi mengenai kepemimpinan Kristen di ranah publik seringkali memicu perdebatan dan kesalahpahaman. Sebagian orang mungkin secara simplistik mengartikannya sebagai individu beragama Kristen yang kebetulan menduduki jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan atau organisasi publik. Namun, pemahaman yang lebih mendalam dan bernuansa akan mengungkapkan bahwa esensi kepemimpinan Kristen di ruang publik jauh melampaui identitas agama semata. Ini bukan hanya tentang label "Kristen" yang melekat pada seorang pemimpin, melainkan tentang etos, nilai, dan prinsip-prinsip yang secara konsisten dipegang dan diaplikasikan dalam setiap tindakan, keputusan, dan interaksi di tengah masyarakat.

Tantangan utama dalam membahas topik ini adalah menghindari terjebak pada dikotomi yang keliru atau mereduksi kompleksitas iman ke dalam sekadar afiliasi keagamaan. Kepemimpinan yang efektif dan transformatif, terutama yang berakar pada nilai-nilai spiritual, senantiasa memanifestasikan dirinya melalui

karakter dan perilaku, bukan hanya retorika. Oleh karena itu, penting untuk secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "kepemimpinan Kristen dalam konteks publik" agar dapat mengevaluasi kontribusi dan tantangannya secara lebih akurat. Definisi ini akan membantu masyarakat memahami bahwa nilai-nilai universal yang diusung oleh iman Kristen memiliki relevansi yang signifikan bagi tata kelola yang baik, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum.

1. Bukan Sekadar Identitas, tapi Etos dan Nilai

Mengidentifikasi seorang pemimpin sebagai "Kristen" hanya berdasarkan kartu identitas atau pengakuan verbalnya adalah sebuah reduksi yang dangkal. Kepemimpinan Kristen yang autentik di ranah publik dicirikan oleh kualitas yang lebih substansial: etos yang melekat pada prinsip-prinsip Injili, nilai-nilai moral yang tak tergoyahkan, dan tindakan yang merefleksikan karakter Kristus. Ini adalah tentang bagaimana iman membentuk cara seorang pemimpin memandang dunia, membuat keputusan etis, dan melayani masyarakat. Teologi Kristen secara historis selalu bergulat dengan relevansi imannya terhadap budaya dan masyarakat luas, termasuk dalam isu-isu etis dan sosial (Olson, 2009, hlm. 370); yang menjelaskan bahwa teologi Kristen secara historis selalu bergulat dengan relevansi imannya terhadap budaya dan masyarakat luas, termasuk dalam isu-isu etis dan sosial.

a. Etos Pelayanan (Servant Leadership) sebagai Fondasi Utama

Salah satu pilar utama yang membedakan kepemimpinan Kristen adalah etos pelayanan (servant leadership). Konsep ini berakar kuat pada ajaran dan teladan Yesus Kristus sendiri, yang datang "bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani" (Matius 20:28). Dalam konteks kepemimpinan publik, ini berarti bahwa seorang pemimpin Kristen tidak berorientasi pada kekuasaan, status, atau keuntungan pribadi, melainkan pada melayani kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang rentan dan terpinggirkan. Motivasi utamanya adalah kesejahteraan orang lain, bukan penguatan diri.

Etos pelayanan menuntut kerendahan hati, empati, dan kesediaan untuk mendengarkan suara rakyat, bahkan suara yang paling tidak didengar. Ini berarti seorang pemimpin Kristen di ranah publik tidak akan menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri atau kelompoknya, melainkan sebagai platform untuk memberdayakan orang lain dan membangun sistem yang lebih adil. Prioritasnya adalah kebaikan bersama (*common good*), bukan kepentingan pribadi atau politik sesaat. Ketika dihadapkan pada pilihan sulit, pemimpin dengan etos pelayanan akan mempertimbangkan dampaknya pada warga yang paling terdampak, dan bukan hanya pada konstituen politik atau donatur. Pengambilan keputusan akan didasarkan pada prinsip keadilan dan belas kasih, bukan kalkulasi kekuasaan. Seorang pemimpin Kristen yang benar-benar menerapkan etos ini akan mengutamakan kebutuhan rakyat di atas ambisi pribadi, menunjukkan sikap proaktif dalam menyelesaikan masalah publik, dan senantiasa berupaya menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mereka memahami bahwa kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka adalah alat untuk melayani, bukan untuk mendominasi atau mengeksploitasi.

b. Integritas dan Transparansi: Manifestasi Karakter Ilahi

Integritas adalah nilai fundamental lain yang menjadi ciri kepemimpinan Kristen yang autentik di ranah publik. Integritas berarti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, antara nilai-nilai yang diyakini dan tindakan nyata. Di tengah lingkungan politik yang seringkali diwarnai oleh intrik, korupsi, dan ketidakjujuran, pemimpin Kristen dipanggil untuk menjadi teladan dalam kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka menolak praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi, karena praktik-praktik tersebut bertentangan langsung dengan karakter Allah yang adil dan kudus, serta merugikan masyarakat secara luas.

Seorang pemimpin yang berintegritas tidak akan menyalahgunakan kekuasaan atau memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi. Mereka akan membangun sistem yang

transparan, di mana setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi bukan hanya alat untuk mencegah korupsi, tetapi juga ekspresi dari penghormatan terhadap warga negara, yang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana urusan publik dikelola. Ketiadaan integritas di kalangan pemimpin seringkali menjadi akar masalah ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, kehadiran pemimpin Kristen dengan integritas yang kuat dapat menjadi katalisator bagi pemulihan kepercayaan dan reformasi sistemik, membawa etika ilahi ke dalam praktik tata kelola yang baik. Integritas juga mencakup keberanian untuk mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak berkompromi dengan standar moral, bahkan di bawah tekanan. Ini adalah fondasi yang membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas pemimpin untuk memimpin secara efektif dan menginspirasi perubahan positif yang lebih luas.

c. Keadilan dan Belas Kasih: Komitmen Terhadap yang Lemah dan Rentan

Komitmen terhadap keadilan dan belas kasih adalah inti dari panggilan profetik kepemimpinan Kristen di ranah publik. Alkitab dipenuhi dengan seruan untuk keadilan sosial, perlindungan bagi janda, yatim piatu, orang asing, dan kaum miskin. Bagi pemimpin Kristen, keadilan bukan sekadar konsep hukum, melainkan sebuah tuntutan moral yang mendalam untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial, etnis, atau agama, menerima hak-hak mereka dan diperlakukan secara adil. Mereka akan memperjuangkan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, memberantas diskriminasi, dan memberikan akses yang setara terhadap peluang bagi semua warga negara. Keadilan ilahi menuntut agar setiap sistem dan struktur dalam masyarakat mampu memberikan perlakuan yang setara dan kesempatan yang adil bagi semua. Ini berarti pemimpin Kristen harus secara aktif mengidentifikasi dan membongkar sistem yang menindas atau

meminggirkan kelompok tertentu, serta merancang kebijakan yang secara proaktif mengangkat martabat mereka yang terpinggirkan.

Belas kasih melengkapi keadilan dengan mendorong empati dan respons aktif terhadap penderitaan manusia. Ini berarti pemimpin Kristen tidak hanya berteori tentang keadilan, tetapi juga secara aktif mencari dan merespons kebutuhan konkret dari mereka yang menderita. Misalnya, dalam menghadapi krisis kemanusiaan, bencana alam, atau epidemi, belas kasih akan memotivasi pemimpin untuk bertindak cepat, efektif, dan dengan kepekaan terhadap trauma yang dialami masyarakat. Belas kasih juga mendorong kebijakan yang manusiawi, yang memprioritaskan martabat individu di atas efisiensi birokrasi semata. Perjuangan untuk keadilan dan belas kasih adalah wujud dari kepedulian Allah terhadap ciptaan-Nya yang menderita, dan pemimpin Kristen dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan kasih itu di dunia. Tanpa belas kasih, keadilan bisa menjadi kaku dan tanpa jiwa; tanpa keadilan, belas kasih bisa menjadi sekadar amal tanpa dampak sistemik. Keduanya harus berjalan beriringan.

d. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan: Merawat Ciptaan sebagai Amanah

Kepemimpinan Kristen yang mengakar pada etos dan nilai iman juga mencakup pemahaman mendalam tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Konsep *stewardship* atau pengelolaan yang bertanggung jawab atas ciptaan tidak hanya berlaku untuk sumber daya alam, tetapi juga untuk sistem sosial dan ekologi yang saling terkait. Pemimpin Kristen mengakui bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap generasi mendatang dan keutuhan bumi. Oleh karena itu, mereka akan mengadvokasi dan mengimplementasikan kebijakan yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan dampak ekologis dari pembangunan ekonomi, melindungi keanekaragaman hayati, dan mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan. Ini adalah amanah ilahi untuk merawat bumi yang dipercayakan kepada manusia.

Tanggung jawab sosial juga berarti bahwa pemimpin Kristen akan aktif terlibat dalam isu-isu yang membentuk kohesi masyarakat,

seperti pendidikan yang berkualitas, kesehatan publik yang merata, dan pengembangan komunitas yang inklusif. Mereka menyadari bahwa kesejahteraan individu tidak terlepas dari kesejahteraan kolektif dan kesehatan lingkungan. Ini adalah dimensi praksis dari iman yang melampaui doktrin semata, di mana nilai-nilai spiritual diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang berkontribusi pada kebaikan holistik bagi seluruh ciptaan. Pemimpin Kristen yang sungguh-sungguh menghayati nilai ini akan menjadi pembela lingkungan yang gigih, memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan bumi untuk masa depan. Mereka juga akan berinvestasi dalam pembangunan masyarakat yang sehat, berpendidikan, dan inklusif, karena ini adalah cara konkret untuk merefleksikan kasih Tuhan bagi semua. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kristen yang relevan di era modern harus mampu menjembatani nilai-nilai teologis dengan realitas sosial dan perkembangan teknologi, agar iman tetap relevan dan berdampak positif bagi masyarakat (Topayung, 2022, hlm. 595) yang mengulas tentang pentingnya adaptasi pedagogi Kristiani di era digital untuk menjembatani kesenjangan generasi, yang secara implisit menunjukkan relevansi nilai-nilai Kristen dalam konteks modern.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Kristen di ranah publik adalah manifestasi dari karakter yang dibentuk oleh nilai-nilai Injili. Ini adalah panggilan untuk membawa keadilan, integritas, belas kasih, dan tanggung jawab sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik, bukan sekadar memegang sebuah posisi. Pengaruh sejati kepemimpinan ini terletak pada teladan yang diberikan dan transformasi yang dihasilkan melalui penerapan prinsip-prinsip iman dalam pelayanan kepada masyarakat luas. Ini menegaskan bahwa pemimpin Kristen memiliki peran krusial dalam membentuk masyarakat yang lebih baik, di mana nilai-nilai ilahi dapat diterapkan secara praktis dan membawa kebaikan bagi semua.

2. Ruang Lingkup Kepemimpinan Kristen di Ranah Publik

Kepemimpinan Kristen tidak terbatas pada dinding gereja atau komunitas keagamaan semata. Sebaliknya, panggilannya meluas hingga ke ranah publik, di mana nilai-nilai Kristiani dapat diwujudkan untuk kebaikan bersama. Keterlibatan ini mencakup berbagai bentuk dan tingkatan, mulai dari peran formal di pemerintahan hingga pengaruh informal dalam masyarakat, serta kontribusi institusional dari gereja dan organisasi Kristen. Memahami ruang lingkup ini sangat penting untuk melihat bagaimana iman Kristen dapat secara relevan dan transformatif memengaruhi kebijakan, opini publik, dan kesejahteraan sosial, demi terwujudnya masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Keterlibatan ini juga merefleksikan pemahaman bahwa iman bukan hanya urusan pribadi, melainkan memiliki implikasi publik yang mendalam. Dengan demikian, kepemimpinan Kristen di ranah publik adalah manifestasi dari iman yang hidup dan relevan, yang berupaya membawa nilai-nilai Kerajaan Allah ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

a. Kepemimpinan Formal: Peran Politisi, Pejabat Pemerintah, atau Birokrat Kristen

Kepemimpinan formal mengacu pada individu-individu Kristen yang menduduki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam struktur pemerintahan. Ini termasuk politisi, pejabat pemerintah, dan birokrat yang beriman Kristen. Dalam peran ini, mereka memiliki kesempatan unik untuk mengimplementasikan nilai-nilai Kristiani secara langsung melalui legislasi, kebijakan publik, dan tata kelola negara. Keberadaan mereka dalam ranah kekuasaan menempatkan mereka pada posisi strategis untuk membentuk arah bangsa dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mendukung kesejahteraan seluruh warga negara. Tanggung jawab ini menuntut tidak hanya kompetensi profesional tetapi juga integritas moral yang tinggi.

Salah satu aspek krusial dari kepemimpinan formal ini adalah integritas dan etika yang dijunjung tinggi. Seorang pemimpin Kristen dalam ranah politik diharapkan untuk bertindak dengan keadilan, kejujuran, dan melayani kepentingan publik di atas kepentingan

pribadi atau kelompok. Hal ini selaras dengan ajaran universal tentang kepemimpinan yang baik, di mana keadilan menjadi pondasi utama dari tata kelola yang efektif dan dipercaya. Mereka memprioritaskan keadilan sosial, memerangi korupsi yang menggerogoti kepercayaan publik, merusak tatanan ekonomi, dan merugikan masyarakat secara luas. Perlawanan terhadap korupsi menjadi bentuk pelayanan nyata kepada bangsa dan negara. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat melayani seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan, terpinggirkan, dan kurang beruntung. Kepemimpinan yang berintegritas juga berarti menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, dan menghindari praktik-praktik nepotisme serta kolusi yang merusak sistem.

Selain itu, pemimpin Kristen formal seringkali dihadapkan pada dilema moral dan etika yang kompleks. Mereka harus menavigasi antara komitmen iman mereka yang kokoh dan tuntutan pragmatis dari politik yang seringkali penuh kompromi, bahkan terkadang menguji batas moral. Namun, justru di sinilah letak kesaksian mereka yang paling kuat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip kasih, kebenaran, dan keadilan yang diajarkan oleh Kristus, mereka dapat menjadi teladan bagi rekan-rekan mereka dan masyarakat luas. Misalnya, inisiatif untuk mengeluarkan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, atau upaya serius untuk melindungi lingkungan dari eksploitasi yang merusak demi keberlanjutan ekosistem, dapat dilihat sebagai manifestasi konkret dari nilai-nilai Kristiani tentang martabat manusia dan pemeliharaan ciptaan Tuhan. Keterlibatan mereka diharapkan membawa nuansa keadilan dan kemanusiaan ke dalam birokrasi yang terkadang dingin, impersonal, dan birokratis, sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan riil rakyat. Mereka adalah jembatan antara nilai-nilai luhur iman dan praktik kenegaraan yang realistis,

berusaha menyelaraskan keduanya demi kemajuan peradaban yang berpihak pada kesejahteraan manusia.

Sebagai contoh nyata, seorang birokrat Kristen dapat menerapkan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses tender proyek pemerintah, memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan untuk kepentingan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Seorang politisi Kristen dapat memperjuangkan undang-undang yang melindungi hak-hak kelompok minoritas, masyarakat adat, atau kelompok-kelompok rentan lainnya, mencerminkan nilai-nilai kasih, empati, dan keadilan sosial yang diajarkan dalam iman Kristen. Mereka adalah perpanjangan tangan dari iman yang beraksi, membawa cahaya Kristus ke dalam koridor kekuasaan, bukan untuk menguasai atau mendominasi, melainkan untuk melayani dan memperbaiki tata kelola negara. Ini adalah panggilan yang menuntut kebijaksanaan ilahi, keberanian moral, dan keteguhan iman di tengah tekanan, godaan kekuasaan, dan tantangan yang tak terhindarkan dalam dunia politik.

b. Kepemimpinan Informal: Peran Aktivis Sosial, Tokoh Masyarakat, Akademisi, atau Pemimpin Agama yang Memengaruhi Opini Publik dan Gerakan Sosial

Selain peran formal, kepemimpinan Kristen juga terwujud dalam bentuk informal. Ini mencakup individu-individu yang, meskipun tidak menduduki jabatan politik resmi, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik dan menggerakkan perubahan sosial. Mereka adalah aktivis sosial, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemimpin agama yang melalui advokasi, tulisan, ceramah, atau contoh hidup mereka, membawa perspektif Kristen ke dalam wacana publik. Pengaruh mereka seringkali bersifat organik, tumbuh dari kredibilitas pribadi, komitmen yang tulus terhadap nilai-nilai yang diyakini, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain.

Aktivis sosial Kristen, misalnya, seringkali menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Mereka mungkin berjuang untuk hak-hak kaum miskin dan terpinggirkan, korban ketidakadilan sistemik, atau kelompok-kelompok minoritas yang

seringkali terabaikan dan termarginalisasi. Gerakan anti-perdagangan manusia, advokasi untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan, atau kampanye melawan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia seringkali digerakkan oleh individu-individu Kristen yang merasa terpanggil untuk mewujudkan keadilan di bumi ini sebagai bagian dari panggilannya. Sebagaimana ditekankan oleh Hwa Yung, seorang teolog terkemuka dari Malaysia, "Misi Allah mencakup dimensi sosial dan politik, bukan hanya spiritual. Kita dipanggil untuk menjadi agen transformasi di tengah dunia yang rusak ini, membawa damai sejahtera dan keadilan-Nya." (Yung 2005, hlm. 121). Penjelasan kutipan ini menunjukkan bahwa pandangan Yung menyoroti bahwa pengaruh sejati dari kepemimpinan informal berasal dari perwujudan nilai-nilai Kristus dalam tindakan nyata di ranah sosial dan politik, seperti memperjuangkan keadilan dan melayani sesama, tanpa harus memegang jabatan resmi. Ini mendorong para aktivis, tokoh masyarakat, dan akademisi Kristen untuk fokus pada dampak positif dari karya mereka di masyarakat luas, sebagai bagian integral dari misi ilahi yang holistik, tidak hanya berdimensi rohani semata. Mereka adalah suara hati nurani yang terus-menerus mengingatkan masyarakat akan standar moral dan etika yang lebih tinggi.

Tokoh masyarakat Kristen, melalui reputasi dan pengaruh mereka di komunitas, dapat menjadi suara moral yang kuat. Mereka mungkin menjadi mediator yang dipercaya dalam konflik sosial, penasihat bagi pembuat kebijakan lokal, atau panutan dalam mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Dalam banyak kasus, pengaruh mereka lebih pada teladan hidup dan kekuatan persuasi dibandingkan dengan otoritas formal. Mereka membangun jembatan antar kelompok, meredakan ketegangan, mendorong dialog yang konstruktif untuk menemukan solusi bersama, dan memupuk kohesi sosial. Keberadaan mereka seringkali menjadi penyejuk di tengah polarisasi dan perpecahan.

Akademisi Kristen berkontribusi dengan cara yang berbeda, namun tak kalah penting. Mereka melakukan penelitian mendalam, menulis buku, artikel, dan jurnal ilmiah, serta mengajar di lembaga

pendidikan tinggi, menyajikan perspektif yang berlandaskan iman tentang isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks. Dengan analisis yang cermat, argumentasi yang kuat, dan integritas intelektual yang tak tergoyahkan, mereka dapat membentuk pemikiran publik dan memengaruhi kebijakan dari sudut pandang teoritis dan empiris. Pemikiran mereka dapat membantu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip iman dapat diterapkan pada masalah-masalah kontemporer yang kompleks, memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi gerakan-gerakan sosial dan inisiatif kebijakan yang berpihak pada kebaikan umum dan kemajuan masyarakat.

Pemimpin agama, di luar mimbar gereja, seringkali berperan sebagai suara kenabian bagi masyarakat. Mereka berani mengkritik ketidakadilan yang terjadi di lingkup sosial, menyerukan pertobatan sosial dari praktik-praktik yang merugikan dan tidak bermoral, dan memobilisasi umat untuk terlibat dalam aksi nyata untuk perubahan yang positif. Dalam khotbah dan tulisan mereka, mereka menginterpretasikan ajaran-ajaran Kristen dalam konteks isu-isu publik yang relevan, mendorong jemaat dan masyarakat luas untuk merenungkan tanggung jawab etis mereka sebagai warga negara dan anggota komunitas global. Kepemimpinan informal ini sangat esensial karena dapat menjangkau lapisan masyarakat yang mungkin tidak terpengaruh oleh struktur formal, menciptakan gelombang perubahan dari bawah ke atas melalui kekuatan moral, intelektual, dan pengaruh spiritual. Mereka mengisi ruang yang seringkali tidak terjangkau oleh institusi pemerintah.

- c. Kepemimpinan Institusional: Peran Gereja dan Organisasi Kristen dalam Advokasi, Pendidikan, dan Pelayanan Sosial yang Berimbang pada Kebijakan

Di samping kepemimpinan individual, gereja dan organisasi Kristen sebagai institusi juga memainkan peran kepemimpinan yang signifikan di ranah publik. Peran ini seringkali terwujud melalui advokasi, pendidikan, dan pelayanan sosial yang pada akhirnya memiliki dampak yang luas dan mendalam pada kebijakan publik. Ini adalah bentuk kepemimpinan kolektif yang memanfaatkan sumber

daya besar, jaringan luas, dan otoritas moral dari institusi keagamaan yang telah terbangun selama berabad-abad, memberikan dampak yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam ranah advokasi, gereja dan organisasi Kristen seringkali menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara, mewakili kelompok-kelompok marginal yang tidak memiliki kekuatan politik atau akses ke pembuat keputusan. Mereka dapat melobi pemerintah untuk perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, seperti penegakan hak-hak minoritas, perlindungan lingkungan dari kerusakan ekologis, atau penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui program-program yang efektif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, banyak organisasi Kristen telah aktif dalam mendorong reformasi sistem peradilan dan penjara, advokasi hak-hak pekerja yang adil, atau akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat miskin. Sebagaimana ditegaskan oleh Vinay Samuel, seorang teolog dan aktivis asal India, "Peran gereja di tengah masyarakat adalah untuk menjadi komunitas yang adil, penuh kasih, dan transformatif, yang secara aktif terlibat dalam pelayanan kepada dunia, bukan sekadar menarik diri dari dunia." (Samuel 2008, hlm. 45). Penjelasan kutipan ini menunjukkan bahwa pernyataan Samuel ini menekankan bahwa institusi gereja dan organisasi Kristen tidak boleh diam atau mengisolasi diri dari masalah sosial yang ada di dunia. Sebaliknya, mereka harus secara aktif berbicara dan bertindak untuk menantang sistem yang menindas dan mendorong perubahan sosial yang fundamental, berdasarkan prinsip-prinsip kasih dan keadilan yang diajarkan dalam iman Kristen. Ini mendasari peran advokasi dan pelayanan sosial gereja, menunjukkan bahwa keterlibatan mereka di ranah publik adalah bagian integral dari misi holistik mereka yang berdimensi sosial.

Aspek **pendidikan** adalah pilar penting lainnya dari kepemimpinan institusional Kristen. Banyak gereja dan organisasi Kristen menjalankan sekolah, universitas, atau program pelatihan non-formal yang tidak hanya memberikan pendidikan akademis yang berkualitas tinggi tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan moral

Kristiani yang kuat. Pendidikan semacam ini tidak hanya bertujuan mencerdaskan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, menumbuhkan kepemimpinan yang berintegritas, yang peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta memiliki visi untuk melayani bangsa. Mereka mencetak generasi baru pemimpin yang terbekali dengan iman yang kokoh, keahlian profesional yang relevan, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Melalui seminar, lokakarya, publikasi ilmiah, dan program-program penyuluhan, mereka juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu penting dari perspektif Kristiani, mendorong dialog konstruktif dan pemikiran kritis di tengah masyarakat yang majemuk, dan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pelayanan sosial adalah wajah nyata dan paling terlihat dari iman yang beraksi secara institusional. Lembaga-lembaga seperti rumah sakit Kristen, panti asuhan, pusat rehabilitasi bagi korban adiksi atau bencana, program bantuan bencana, dan bank makanan yang dikelola oleh gereja dan organisasi Kristen menyediakan layanan vital yang melengkapi atau bahkan menggantikan fungsi pemerintah di beberapa area, terutama di daerah terpencil atau yang terdampak krisis. Meskipun tujuan utama pelayanan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan langsung dan mendesak individu atau komunitas, dampak jangka panjangnya seringkali berimbas pada kebijakan publik. Ketika institusi-institusi ini menunjukkan kesenjangan dalam sistem layanan publik atau kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi secara memadai, mereka dapat memberikan data empiris yang valid, pengalaman lapangan yang berharga, dan model solusi inovatif yang kemudian dapat diadopsi atau didukung oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk skala yang lebih besar. Pelayanan sosial ini bukan sekadar amal atau filantropi, tetapi sebuah bentuk kesaksian profetik yang menunjukkan bagaimana masyarakat seharusnya berfungsi, yaitu dengan kepedulian yang mendalam terhadap yang paling rentan dan upaya untuk menciptakan keadilan substantif.

Melalui ketiga bentuk kepemimpinan ini formal, informal, dan institusional – kepemimpinan Kristen di ranah publik berupaya

menjadi "garam dan terang" dunia. Tujuannya bukan untuk mendominasi, melainkan untuk melayani, mempengaruhi, dan membentuk masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kasih, keadilan, dan kebenaran Kristiani. Ini adalah panggilan untuk keterlibatan yang aktif dan transformatif, bukan isolasi atau penarikan diri dari dunia. Keterlibatan ini merupakan wujud nyata dari iman yang hidup, yang membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan kolektif dan pembangunan peradaban yang lebih baik, mencerminkan kasih Kristus bagi seluruh umat manusia.

d. Dasar Teologis dan Filosofis untuk Keterlibatan Publik

Keterlibatan Kristen dalam ranah publik bukan sekadar aktivitas yang timbul begitu saja, melainkan berakar kuat pada **dasar-dasar teologis dan filosofis** yang kaya dan mendalam. Pemahaman akan mandat ilahi, identitas esensial manusia sebagai citra Allah, dan panggilan untuk memberikan dampak positif di tengah dunia ini menjadi pendorong utama bagi umat Kristen untuk tidak mengisolasi diri dari masyarakat, melainkan terlibat aktif dalam pembangunan dan perbaikan komunitas. Landasan-landasan ini secara substansial memberikan legitimasi, motivasi, serta arah yang jelas bagi segala bentuk kepemimpinan Kristen di ranah publik, baik dalam kapasitas formal, informal, maupun melalui institusi gereja dan organisasi. Ini menegaskan bahwa keterlibatan publik bukanlah pilihan sampingan, melainkan bagian integral dan tak terpisahkan dari iman yang sejati dan hidup.

3. Mandat Kultural dan Sosial: Imago Dei, Mandat Budaya, dan Garam-Terang Dunia

Keterlibatan umat Kristen di ranah publik memiliki fondasi yang kokoh dalam ajaran fundamental mengenai mandat kultural dan sosial. Ini bukan hanya sekadar opsi, melainkan sebuah panggilan mendasar yang diberikan kepada umat manusia sejak awal penciptaan, dan kemudian diperbarui serta dipertegas melalui ajaran dalam tradisi kekristenan. Panggilan ini mendorong umat Kristen untuk secara aktif membentuk dan memengaruhi dunia di sekitar mereka.

a. *Imago Dei*: Martabat Manusia sebagai Citra Allah

Konsep *Imago Dei* (gambar Allah) adalah inti dari pemahaman tentang manusia dan merupakan titik tolak filosofis dan teologis yang fundamental. Konsep ini secara tegas menyatakan tentang martabat intrinsik dan tak terhingga dari setiap manusia serta kapasitas spiritual yang unik yang diberikan kepada kita. Sebagai ciptaan yang secara khusus mencerminkan sifat-sifat Allah, manusia dibekali dengan kemampuan luar biasa untuk:

- **Berpikir secara rasional dan kompleks:** Manusia mampu menganalisis, merencanakan, dan memahami realitas di sekitarnya, membedakan antara kebenaran dan kesalahan.
- **Berinovasi dan berkreasi:** Manusia memiliki dorongan bawaan untuk menciptakan hal-hal baru, mengembangkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang mencerminkan sifat kreatif ilahi.
- **Memiliki kesadaran moral dan etika:** Manusia dapat membedakan antara yang benar dan salah, serta merasakan tanggung jawab moral terhadap tindakan mereka dan dampaknya pada orang lain.
- **Menjalin relasi yang mendalam:** Manusia memiliki kapasitas untuk berinteraksi, mencintai, dan membangun komunitas yang harmonis, baik dengan Pencipta maupun dengan sesama manusia.

Poin-poin ini secara kolektif membedakan manusia dari ciptaan lainnya dan memberikan nilai yang tak terhingga pada setiap individu, menegaskan bahwa setiap nyawa memiliki nilai inheren yang harus dihormati.

Implikasi dari *Imago Dei* sangat mendalam bagi keterlibatan publik. Jika setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka setiap individu, tanpa memandang ras, agama, status sosial, atau latar belakang, memiliki martabat yang harus dihormati dan tidak boleh direndahkan atau dilanggar. Ini menjadi dasar etis yang kuat bagi:

- **Perjuangan melawan ketidakadilan:** Melawan segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang merendahkan

kemanusiaan, termasuk kemiskinan struktural dan ketidaksetaraan sosial.

- **Pembelaan hak asasi manusia:** Menegakkan hak-hak dasar setiap individu sebagai anugerah ilahi yang tidak dapat dicabut oleh otoritas manapun.
- **Promosi kesetaraan dan inklusi:** Memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
- **Perumusan kebijakan sosial yang humanis:** Memastikan bahwa setiap kebijakan publik mencerminkan penghargaan terhadap martabat ini, berpusat pada kesejahteraan manusia, dan melindungi yang paling rentan.

Sebagai pencerminan Allah, manusia dipanggil untuk hidup dalam relasi dan mempraktikkan kasih yang inklusif. Ini memberikan dasar teologis bagi keterlibatan sosial yang aktif, mendorong umat Kristen untuk tidak hanya berinteraksi tetapi juga secara proaktif membangun jembatan kasih dan keadilan di masyarakat, menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat berkembang dan hidup dengan bermartabat penuh. Ini adalah panggilan untuk melihat wajah Allah dalam setiap sesama dan bertindak sesuai dengan penglihatan itu.

b. Mandat Budaya: Memelihara dan Mengembangkan Ciptaan

Segara setelah penciptaan manusia dalam gambar Allah, manusia diberikan **mandat budaya**. Mandat ini sering juga disebut sebagai "mandat penciptaan" atau "mandat kosmis". Ini adalah perintah yang jelas dan aktif untuk:

- **Mengelola ciptaan Allah:** Menjadi penatalayan yang bertanggung jawab atas bumi dan segala isinya, bukan sebagai pemilik mutlak melainkan sebagai pengelola yang dipercaya.
- **Memelihara lingkungan:** Menjaga kelestarian alam dan sumber daya bumi dari kerusakan, memastikan keberlanjutan ekosistem untuk generasi sekarang dan mendatang.

- **Mengembangkan potensi ciptaan:** Menjelajahi, memahami, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di alam semesta, serta memanfaatkan sumber daya secara bijaksana untuk kebaikan bersama.

Manusia tidak hanya ditempatkan di bumi untuk bersantai atau menikmati begitu saja, tetapi untuk "mengusahakan dan memeliharanya," yang menyiratkan peran aktif dan transformatif sebagai pengelola yang bertanggung jawab.

Mandat budaya ini memiliki implikasi luas bagi keterlibatan publik. Ini berarti bahwa umat Kristen tidak boleh pasif terhadap kondisi dunia, melainkan harus secara aktif berpartisipasi dalam membentuk:

- **Budaya dan seni:** Menciptakan karya-karya yang mengangkat nilai-nilai luhur, keindahan, dan kebenaran, serta memperkaya kehidupan manusia.
- **Sains dan teknologi:** Menemukan solusi inovatif untuk masalah kemanusiaan, meningkatkan kualitas hidup, dan memajukan pengetahuan demi kemajuan peradaban.
- **Sistem ekonomi:** Mengembangkan sistem yang adil dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mempromosikan kesejahteraan bagi semua.
- **Sistem politik:** Berkontribusi pada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta memastikan partisipasi publik yang luas.

Poin-poin ini adalah bagian dari respons terhadap mandat budaya ini. Hal ini juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam secara bijaksana, dan memastikan keberlanjutan bumi untuk generasi mendatang. Dengan kata lain, mandat budaya mendorong umat Kristen untuk menjadi agen kreatif, restoratif, dan inovatif di dunia, bukan hanya pengamat pasif dari kehancuran atau kemunduran. Mereka dipanggil untuk berkontribusi pada kemajuan manusia di segala bidang, dari seni hingga ilmu pengetahuan, dari tata kelola hingga ekologi,

melihat pekerjaan mereka sebagai bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta.

4. Panggilan untuk Menjadi Garam dan Terang Dunia

Dalam ajaran spiritual, panggilan untuk keterlibatan publik dipertegas melalui metafora **garam dan terang dunia**. Metafora ini tidak hanya memberikan identitas spiritual, tetapi juga misi sosial yang jelas bagi para pengikutnya, menekankan dampak transformatif yang diharapkan melalui kehadiran mereka di tengah masyarakat.

Garam pada zaman itu memiliki beberapa fungsi penting: sebagai pengawet, penambah rasa, dan pembersih. Sebagai garam dunia, umat Kristen dipanggil untuk:

- **Mengawetkan nilai-nilai moral dan etika:** Di tengah dunia yang cenderung korup dan membusuk secara moral, umat Kristen harus menjadi agen yang mencegah kemerosotan dan mempertahankan standar kebenaran. Ini berarti menyuarakan kebenaran, menentang ketidakadilan, dan mendorong integritas di semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga hingga pemerintahan, serta dalam bisnis dan pendidikan.
- **Menambah "rasa" kebaikan:** Kehadiran umat Kristen harus membawa perbedaan positif, membuat masyarakat menjadi tempat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih manusiawi. Ini terwujud melalui tindakan kasih, pelayanan nyata, dan kebaikan yang membawa dampak nyata dan dapat dirasakan oleh banyak orang di sekitar mereka, meningkatkan kualitas hidup komunitas.
- **Memurnikan dan membersihkan:** Melalui pengaruh mereka, umat Kristen diharapkan dapat membantu membersihkan praktik-praktik yang merusak dan mempromosikan pemulihan serta rekonsiliasi dalam komunitas yang terpecah belah atau terluka, membawa penyembuhan dan persatuan.

Terang melambangkan pengungkapan, bimbingan, dan pengharapan. Sebagai terang dunia, umat Kristen dipanggil untuk:

- **Mengungkapkan kebenaran dan keadilan:** Di tengah kegelapan kebohongan, ketidakadilan, dan ketidaktahuan, umat Kristen harus menjadi pembawa terang yang menyingkapkan jalan yang benar. Ini berarti berbicara kebenaran dengan keberanian, memberantas kebodohan melalui pendidikan, dan menyuarakan harapan di tengah keputusan yang melanda banyak orang, memberikan visi untuk masa depan yang lebih baik.
- **Memberi arah dan bimbingan:** Seperti pelita yang menerangi jalan dalam kegelapan, umat Kristen harus memberikan panduan moral dan etis bagi masyarakat, membantu orang menemukan jalan keluar dari masalah dan kebingungan dengan kearifan yang bersumber dari iman mereka, menawarkan solusi yang berlandaskan nilai-nilai luhur.
- **Menjadi teladan melalui perbuatan baik:** Keterangan dalam ajaran tersebut secara eksplisit menyebutkan "perbuatan baik" sebagai cara terang itu bercahaya. Ini menegaskan bahwa keterlibatan publik bukan hanya tentang perkataan atau ajaran teoretis, melainkan tentang tindakan konkret yang nyata, yang terlihat oleh orang lain dan membawa kemuliaan. Perbuatan baik ini mencakup segala upaya yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, perdamaian, dan pelestarian lingkungan, yang semuanya merefleksikan nilai-nilai iman dan kasih yang tulus.

Gabungan dari konsep *Imago Dei*, mandat budaya, serta panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia memberikan landasan teologis dan filosofis yang kuat bagi keterlibatan publik umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa iman Kristen tidak dirancang untuk hidup dalam isolasi spiritual dari realitas dunia, melainkan untuk secara aktif dan konstruktif terlibat dalam dunia, membawa pengaruh transformatif di setiap dimensi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Ini adalah panggilan untuk menjadi agen perubahan yang positif, yang mencerminkan karakter ilahi di tengah-tengah ciptaan-Nya yang

beragam. Keterlibatan ini merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah ilahi dan ekspresi kasih yang konkret kepada sesama manusia dan seluruh ciptaan, demi terwujudnya dunia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sesuai dengan kehendak ilahi.

5. Teologi Publik: Relevansi Iman Kristen untuk Kebaikan Bersama dalam Masyarakat Majemuk

Teologi publik adalah sebuah bidang studi yang secara khusus mengkaji bagaimana iman Kristen dapat dan seharusnya memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan publik. Ini bukan tentang memaksakan doktrin agama kepada semua orang, melainkan tentang mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan perspektif teologis dapat diartikulasikan dan diterapkan untuk kebaikan bersama dalam masyarakat yang majemuk. Konsep ini mengakui bahwa iman memiliki dimensi sosial dan politik yang tidak dapat diabaikan, dan bahwa ekspresi iman yang sejati harus melampaui ranah pribadi dan komunal semata.

Inti dari teologi publik adalah keyakinan fundamental bahwa:

- **Iman tidak bersifat privat semata:** Meskipun spiritualitas bersifat personal dan mendalam bagi setiap individu, iman juga memiliki dimensi komunal dan publik yang sangat kuat. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh umat Kristen, seperti keadilan, kasih, perdamaian, dan martabat manusia yang berakar pada citra ilahi, memiliki relevansi universal dan dapat berkontribusi secara signifikan pada dialog publik. Iman mendorong tindakan sosial yang bertanggung jawab, yang manifestasinya terlihat dalam upaya nyata untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Ini menantang gagasan bahwa agama harus terpisah sepenuhnya dari kehidupan bernegara, sebaliknya, ia mengklaim tempat yang sah dalam pembentukan etika publik.
- **Kekristenan memiliki pandangan holistik tentang kehidupan:** Iman tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa atau urusan spiritual semata, tetapi juga dengan pemulihan dan transformasi seluruh ciptaan, termasuk tatanan

sosial dan material di dunia ini. Pandangan ini mencakup perhatian mendalam terhadap keadilan sosial, tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan sistem ekonomi yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Teologi publik melihat seluruh alam semesta dan kehidupan manusia sebagai objek kepedulian ilahi, sehingga setiap aspek kehidupan harus diupayakan untuk selaras dengan kehendak kebaikan.

- **Masyarakat majemuk membutuhkan kontribusi dari berbagai pandangan:** Dalam masyarakat yang terdiri dari beragam keyakinan, ideologi, dan latar belakang budaya, teologi publik mendorong umat Kristen untuk berpartisipasi dalam wacana publik secara konstruktif. Ini berarti menawarkan perspektif etis yang berakar pada iman mereka, namun disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami dan dihargai oleh warga negara lainnya, terlepas dari latar belakang keyakinan mereka. Proses ini melibatkan dialog yang terbuka, tulus, dan saling menghormati, dengan tujuan mencari titik temu untuk kebaikan bersama, bukan dominasi atau pemaksaan pandangan agama.

Teologi publik mendorong umat Kristen untuk secara proaktif:

- **Menganalisis isu-isu sosial dan politik:** Dengan menggunakan lensa iman sebagai alat analisis, umat Kristen diajak untuk memahami akar masalah ketidakadilan, kemiskinan struktural, konflik sosial yang berkepanjangan, dan isu-isu lingkungan yang kompleks. Analisis ini melampaui permukaan masalah untuk mencari penyebab mendalam dan solusi yang komprehensif, berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang diyakini.
- **Mengembangkan argumen yang rasional dan persuasif:** Ketika berbicara di ruang publik, argumen harus disajikan dalam bahasa yang logis dan dapat diterima secara luas, meskipun motivasi dasarnya berasal dari keyakinan religius yang kuat. Fokusnya adalah pada kebaikan bersama yang

dapat diidentifikasi dan diakui oleh semua warga, bukan hanya kelompok tertentu, sehingga dapat menarik dukungan dan konsensus yang lebih luas dalam perumusan kebijakan. Ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan inklusif.

- **Berkolaborasi dengan pihak lain:** Teologi publik mendorong umat Kristen untuk bekerja sama dengan individu dan kelompok dari latar belakang agama atau sekuler yang berbeda, demi mencapai tujuan bersama dalam keadilan dan kesejahteraan. Ini membangun kemitraan yang efektif untuk perubahan sosial, menunjukkan bahwa iman dapat menjadi kekuatan pemersatu dan pendorong kolaborasi, melampaui batas-batas sektarianisme.

Relevansi teologi publik dalam masyarakat majemuk sangat krusial. Dalam konteks di mana berbagai pandangan hidup hidup berdampingan, teologi publik memungkinkan iman Kristen untuk menjadi suara yang konstruktif dan memberikan nilai tambah yang unik. Ini membantu menghindari segregasi iman dari kehidupan sehari-hari dan mendorong umat Kristen untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang berkontribusi secara aktif pada pembangunan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan sejahtera. Ini adalah tentang mengartikulasikan visi yang berlandaskan iman tentang bagaimana masyarakat seharusnya berfungsi, dan kemudian bekerja secara konsisten untuk mewujudkan visi tersebut melalui tindakan nyata dan partisipasi aktif. Teologi publik berfungsi sebagai jembatan antara keyakinan pribadi dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa nilai-nilai spiritual tidak hanya disimpan dalam hati, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberkati komunitas luas dan seluruh ciptaan.

Seorang pemikir terkemuka dari Israel sering menekankan pentingnya peran agama dalam ruang publik, tidak untuk memaksakan tetapi untuk menginspirasi moralitas dan tanggung jawab sosial, Rabbi Jonathan Sacks, (2011).berpendapat bahwa agama, dengan narasi dan otoritas moralnya, dapat menggerakkan hati dan pikiran manusia menuju tindakan kebaikan yang melampaui

perhitungan rasional semata, menumbuhkan solidaritas dan empati yang esensial untuk kohesi sosial. Kontribusi ini sangat berharga dalam membangun fondasi moral bagi kehidupan bernegara yang sehat dan manusiawi. Pandangan ini menjelaskan bahwa ketika iman Kristen terlibat dalam ranah publik, tujuannya adalah untuk memperkaya masyarakat dengan nilai-nilai etis yang kuat, seperti kasih, keadilan, dan belas kasihan, yang mendorong individu untuk bertindak demi kepentingan yang lebih besar dari diri mereka sendiri.

6. Prinsip Kebaikan Bersama (Common Good): Pendorong Utama bagi Kepemimpinan Kristen

Konsep kebaikan bersama atau *common good* merupakan salah satu prinsip etis dan sosial yang paling fundamental dalam pemikiran Kristen dan juga dalam filsafat politik yang lebih luas. Prinsip ini menjadi pendorong utama bagi kepemimpinan Kristen untuk berkontribusi pada kebijakan yang inklusif dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Kebaikan bersama tidak hanya merujuk pada jumlah total kebaikan individu atau akumulasi kepentingan pribadi, melainkan pada kondisi sosial yang memungkinkan setiap individu dan kelompok untuk mencapai pemenuhan diri dan potensi penuhnya dalam lingkungan yang adil, mendukung, dan kondusif. Ini adalah fondasi bagi masyarakat yang berkembang secara holistik.

Definisi kebaikan bersama melibatkan beberapa elemen kunci yang saling terkait:

- **Kondisi Sosial yang Menyeluruh:** Kebaikan bersama mengacu pada keseluruhan kondisi dalam kehidupan sosial yang memungkinkan individu dan kelompok untuk mencapai kesejahteraan. Ini bukan tentang kebaikan individu yang terpisah atau kumpulan kepentingan pribadi yang sempit, melainkan tentang struktur dan lingkungan yang mendukung *flourishing* atau perkembangan optimal setiap anggota masyarakat, menciptakan ekosistem sosial yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi ini mencakup infrastruktur fisik, sistem hukum yang adil, akses terhadap informasi, dan lingkungan yang aman.

- **Inklusivitas Universal:** Kebaikan bersama adalah untuk "semua" anggota masyarakat, tanpa diskriminasi, pengecualian, atau favoritisme berdasarkan latar belakang apapun. Ini berarti bahwa kebijakan dan tindakan harus dirancang untuk memberi manfaat bagi setiap orang, terutama yang paling rentan dan terpinggirkan yang sering kali luput dari perhatian atau terabaikan oleh sistem. Kebaikan bersama secara aktif menuntut perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan perlindungan, dukungan, dan pemberdayaan.
- **Partisipasi Aktif dari Warga:** Kebaikan bersama melibatkan partisipasi aktif dan bermakna dari semua anggota masyarakat dalam membentuk dan memelihara kondisi-kondisi yang kondusif bagi kesejahteraan kolektif. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama, serta hak untuk menyuarakan pendapat dan keprihatinan mereka. Partisipasi ini memperkuat legitimasi kebijakan dan menciptakan rasa kepemilikan.
- **Fondasi Keadilan Sosial:** Prinsip ini erat kaitannya dengan keadilan, di mana sumber daya dan peluang didistribusikan secara adil dan merata kepada seluruh anggota masyarakat. Selain itu, ketidakadilan struktural yang menghambat perkembangan individu atau kelompok harus diidentifikasi dan ditangani secara sistematis melalui kebijakan dan reformasi yang transformatif, demi menciptakan kesetaraan yang lebih besar.

Bagi kepemimpinan Kristen, prinsip kebaikan bersama berakar pada pemahaman teologis dan etis tentang:

- **Kasih kepada sesama:** Ajaran sentral tentang kasih yang melampaui batas-batas pribadi mewajibkan umat Kristen untuk peduli tidak hanya pada diri sendiri atau kelompoknya, tetapi juga pada kesejahteraan seluruh tetangga dan masyarakat yang lebih luas. Kasih ini harus diwujudkan dalam tindakan konkret yang memberdayakan, melayani, dan

mengangkat martabat sesama, terutama mereka yang tertindas atau terlupakan.

- **Keadilan ilahi:** Allah adalah adil, dan Ia menghendaki keadilan ditegakkan di bumi sebagai cerminan karakter-Nya. Oleh karena itu, umat Kristen terpenggil untuk menjadi agen keadilan, menantang sistem yang menindas dan memperjuangkan hak-hak yang benar bagi semua orang, mencerminkan karakter Allah yang adil dan penyayang.
- **Kesatuan umat manusia:** Meskipun ada perbedaan suku, ras, agama, atau latar belakang, semua manusia adalah bagian dari satu keluarga besar yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kesejahteraan satu bagian terhubung secara inheren dengan kesejahteraan bagian lainnya, menegaskan interdependensi dan solidaritas sebagai prinsip dasar kehidupan bermasyarakat.

Bagaimana konsep kebaikan bersama mendorong kepemimpinan Kristen?

- **Mendorong Kebijakan Inklusif:** Pemimpin Kristen yang berpegang pada prinsip kebaikan bersama akan memperjuangkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil elit atau kelompok tertentu, melainkan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga negara. Ini bisa berupa akses universal terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau dan merata, perumahan layak, atau jaring pengaman sosial yang kuat dan komprehensif. Mereka akan berjuang agar kebijakan-kebijakan ini menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang selama ini terabaikan dan termarginalkan, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan.
- **Fokus pada yang Rentan:** Prinsip kebaikan bersama secara khusus menuntut perhatian pada mereka yang paling rentan, miskin, dan terpinggirkan dalam masyarakat. Kepemimpinan Kristen akan memprioritaskan upaya untuk mengangkat mereka yang tertinggal, memastikan bahwa tidak ada yang

tertinggal di belakang dalam pembangunan dan kemajuan sosial. Ini bisa berarti advokasi untuk program bantuan sosial yang efektif, perlindungan hak-hak pekerja yang adil, atau pemberdayaan komunitas marginal melalui pelatihan, akses sumber daya, dan kesempatan ekonomi yang adil.

- **Mendorong Partisipasi Warga:** Untuk mencapai kebaikan bersama, partisipasi aktif dan bermakna dari semua warga sangat penting. Kepemimpinan Kristen akan mendorong dan memfasilitasi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, memastikan suara-suara minoritas didengar, dan mendorong kolaborasi lintas sektor serta antar-kelompok untuk mencari solusi bersama. Ini membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan masyarakat, menciptakan demokrasi yang lebih partisipatif.
- **Menantang Ketidakadilan Struktural:** Kebaikan bersama tidak dapat terwujud secara penuh jika ada sistem atau struktur yang secara inheren tidak adil atau diskriminatif. Kepemimpinan Kristen terpanggil untuk menantang korupsi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi, diskriminasi sistemik yang menghalangi kemajuan individu dan kelompok, serta kebijakan yang merugikan sebagian besar masyarakat demi keuntungan segelintir orang. Ini membutuhkan keberanian profetik untuk berbicara kebenaran kepada kekuasaan dan memperjuangkan reformasi yang mendasar dan transformatif.
- **Mempromosikan Dialog dan Rekonsiliasi:** Dalam masyarakat majemuk yang kaya akan perbedaan, mencapai kebaikan bersama seringkali memerlukan dialog yang tulus, pengertian, dan rekonsiliasi atas perbedaan masa lalu atau saat ini. Pemimpin Kristen dapat berperan sebagai fasilitator dialog, membangun jembatan antar kelompok yang berpotensi konflik, dan mempromosikan persatuan di tengah keragaman, dengan tujuan mencapai solusi yang

menguntungkan semua pihak dan membangun kohesi sosial yang kuat.

Seorang pemikir dari Israel lainnya, Yeshayahu Leibowitz, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari teologi formal, juga menegaskan bahwa tujuan utama ketaatan etis adalah menciptakan tatanan yang adil dan benar, yang pada akhirnya berkontribusi pada kebaikan bersama masyarakat (Leibowitz, 1995). Pandangan ini, meskipun dalam konteks filsafat Yahudi dan fokus pada ketaatan hukum, mendukung gagasan bahwa kebaikan bersama bukanlah tujuan sampingan atau sekunder, tetapi inti dari panggilan untuk hidup secara etis dan bertanggung jawab, baik secara individu maupun kolektif di tengah dunia. Ini mendorong umat Kristen untuk secara proaktif terlibat dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih baik, bukan hanya menunggu perubahan terjadi atau berdiam diri ketika ketidakadilan merajalela, melainkan bertindak dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab mereka.

Prinsip kebaikan bersama menjadi kompas moral bagi kepemimpinan Kristen, mengarahkan mereka untuk bertindak secara altruistik, adil, dan inklusif di ranah publik. Ini mengubah keterlibatan politik dari perjuangan kekuasaan semata menjadi pelayanan transformatif yang berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi semua orang. Ini adalah panggilan untuk membawa nilai-nilai spiritual ke dalam kebijakan dan praktik publik, sehingga setiap individu dapat merasakan buah dari keberadaan kolektif yang berlandaskan kasih dan keadilan, menciptakan masyarakat yang mencerminkan harapan ilahi.

Bab 8

Sumber dan Prinsip
Kepemimpinan Kristen yang
Relevan untuk Kebijakan Publik



Bagian ini menggali lebih dalam fondasi teologis dan etis yang membentuk kepemimpinan Kristen, menjadikannya pijakan kuat bagi pengaruhnya dalam ranah kebijakan publik. Kepemimpinan Kristen, pada intinya, tidak hanya berlandaskan pada aspirasi pribadi atau ambisi duniawi, melainkan tertanam dalam ajaran dan nilai-nilai fundamental iman. Pemahaman yang mendalam terhadap akar-akar ini sangat krusial untuk mengapresiasi bagaimana seorang pemimpin Kristen memandang dan berinteraksi dengan struktur kekuasaan serta dinamika sosial, selalu berupaya mencerminkan karakter ilahi dalam setiap tindakannya.

A. Akar Teologis dan Etis

Kepemimpinan Kristen yang otentik berakar kuat pada prinsip-prinsip teologis dan etis yang diwahyukan dalam Alkitab. Ini bukan sekadar seperangkat aturan, melainkan sebuah pandangan dunia yang holistik, membentuk cara pandang terhadap Tuhan, manusia, dan masyarakat. Dari sinilah muncul dorongan untuk tidak hanya memimpin dengan otoritas, tetapi juga dengan integritas, kasih, dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Dua pilar utama yang membentuk akar ini adalah konsep keadilan sosial serta prinsip kasih dan pelayanan.

1. Konsep Keadilan Sosial (Mishpat dan Tzedakah)

Dalam tradisi Alkitab, keadilan sosial adalah inti dari karakter ilahi dan panggilan bagi umat-Nya. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang keadilan retributif, yaitu menghukum yang bersalah dan memberi penghargaan kepada yang benar, tetapi juga tentang keadilan distributif dan restoratif. Istilah Ibrani Mishpat seringkali diterjemahkan sebagai "keadilan" atau "penghakiman," namun maknanya jauh lebih luas. Mishpat merujuk pada pemulihan tatanan yang benar, memastikan hak-hak dasar terpenuhi, dan melindungi mereka yang rentan. Ini adalah keadilan yang aktif, yang berupaya mengoreksi ketidakseimbangan dan ketidakbenaran dalam masyarakat. Ketika Mishpat diabaikan, masyarakat akan runtuh.

Sejalan dengan Mishpat adalah Tzedakah, yang sering diartikan sebagai "kebenaran" atau "kesalehan." Namun, dalam konteks Alkitab, Tzedakah memiliki dimensi sosial yang kuat, seringkali diterjemahkan sebagai "keadilan" atau "amal." Ini bukan sekadar tindakan karitatif sesekali, melainkan sebuah sikap hidup yang secara konsisten berupaya melakukan apa yang benar, terutama dalam hubungan dengan sesama dan komunitas. Tzedakah mendorong individu dan komunitas untuk bertindak dengan integritas dan kemurahan hati, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup bermartian. Ini adalah praktik keadilan yang mengalir dari hati yang saleh, mendorong tindakan nyata untuk menopang yang membutuhkan.

Bagaimana kedua konsep ini mendorong pemimpin Kristen dalam kebijakan publik? Seorang pemimpin yang memahami Mishpat dan Tzedakah akan melihat tugasnya bukan hanya sebagai pengelola sistem, tetapi sebagai pembela keadilan bagi semua, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Ini berarti merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang adil dan berpihak pada yang lemah. Mereka akan secara aktif mencari tahu siapa saja yang tertinggal, siapa yang tidak memiliki suara, dan siapa yang paling menderita akibat ketidaksetaraan struktural. Sebagai contoh, ini bisa berarti memperjuangkan kebijakan upah minimum yang layak, memastikan akses pendidikan yang merata tanpa memandang status sosial ekonomi, menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua, atau melindungi hak-hak kelompok minoritas yang rentan. Pemimpin semacam ini akan menentang praktik korupsi, diskriminasi, dan eksploitasi yang merusak keadilan sosial. Mereka tidak hanya puas dengan sekadar menjaga ketertiban, tetapi berambisi untuk menciptakan masyarakat di mana setiap individu dapat berkembang dan merasakan martabat yang penuh. Keadilan, dalam pandangan ini, bukanlah tujuan yang terpisah, melainkan buah dari kesalehan dan kasih yang tulus. Ini adalah panggilan untuk secara proaktif menciptakan sistem dan struktur yang mencerminkan keadilan ilahi di bumi.

2. Kasih dan Pelayanan (Agape dan Diakonia)

Selain keadilan, pilar etis yang tak kalah penting dalam kepemimpinan Kristen adalah kasih dan pelayanan. Konsep Agape merupakan bentuk kasih ilahi yang tanpa syarat, rela berkorban, dan tidak mencari keuntungan pribadi. Ini adalah kasih yang melampaui perasaan emosional semata; ia adalah sebuah komitmen aktif terhadap kebaikan orang lain, bahkan musuh. Dalam ajaran Kristus, Agape adalah perintah utama, landasan dari semua hukum dan nabi. Kasih ini memanggil para pemimpin untuk memandang setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau afiliasi politik. Ketika Agape menjadi motivasi utama, seorang pemimpin Kristen tidak akan membuat kebijakan berdasarkan preferensi pribadi, kepentingan kelompok, atau tekanan politik. Sebaliknya, setiap keputusan akan dilandasi oleh pertanyaan fundamental: "Apa yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan? Bagaimana kebijakan ini dapat menunjukkan kasih kepada mereka yang paling rentan dan membutuhkan?" Ini berarti melampaui batasan partisan dan berfokus pada kesejahteraan umum. Pemimpin yang didorong oleh Agape akan siap untuk berkorban, menghadapi kritik, dan mengambil jalan yang sulit demi kebaikan orang banyak. Mereka tidak akan tergoda oleh popularitas jangka pendek atau keuntungan politik, melainkan akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kasih yang universal.

Beriringan dengan Agape adalah prinsip Diakonia, yang berarti "pelayanan." Dalam konteks Perjanjian Baru, Diakonia merujuk pada pelayanan yang rendah hati dan tanpa pamrih, sebagaimana dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kepemimpinan Diakonia adalah antitesis dari kepemimpinan yang otoriter atau melayani diri sendiri. Ini adalah kepemimpinan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan orang lain, memberdayakan komunitas, dan mengangkat mereka yang tertekan.

Bagi seorang pemimpin Kristen yang terjun dalam ranah kebijakan publik, prinsip kasih (Agape) dan pelayanan (Diakonia) menjadi motivasi utama dalam membentuk kebijakan yang melayani masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Ini berarti seorang pemimpin akan secara aktif mencari cara untuk memberdayakan rakyat, bukan mendominasi mereka. Mereka akan mendengarkan suara dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sering diabaikan, dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar memenuhi kebutuhan fundamental dan meningkatkan kualitas hidup setiap warga negara. Contoh konkret dari penerapan prinsip ini dalam kebijakan publik meliputi: investasi dalam infrastruktur sosial yang merata (misalnya, transportasi publik yang efisien, akses internet yang luas), pengembangan program-program yang mendukung kesehatan mental dan fisik masyarakat, serta menciptakan kesempatan ekonomi yang adil bagi semua. Seorang pemimpin Diakonia akan memandang dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa. Mereka akan berupaya mengurangi hambatan yang menghalangi partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, mempromosikan transparansi, dan membangun kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, prinsip ini menuntut agar kebijakan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada keadilan distributif dari pertumbuhan tersebut. Ini berarti memastikan bahwa kemakmuran yang dihasilkan dari kebijakan tidak hanya menguntungkan segelintir orang di puncak piramida, tetapi juga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, mengangkat mereka yang berada di bawah. Kepemimpinan yang didorong oleh Agape dan Diakonia akan selalu mencari solusi yang paling inklusif dan paling berbelas kasih, bahkan jika itu berarti mengorbankan popularitas politik atau menghadapi tantangan yang signifikan. Ini adalah panggilan untuk membangun masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, mencerminkan karakter Kristus yang penuh kasih dan melayani.

Kepemimpinan Kristen dalam kebijakan publik, dengan demikian, bukanlah sekadar penerapan nilai-nilai moral umum,

melainkan sebuah perwujudan dari pemahaman teologis yang mendalam tentang keadilan Tuhan dan kasih-Nya bagi umat manusia. Ketika seorang pemimpin Kristen memegang teguh konsep Mishpat dan Tzedakah, mereka akan tanpa lelah memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas dan menciptakan struktur yang adil. Ketika mereka dijiwai oleh Agape dan Diakonia, mereka akan melayani dengan kerendahan hati, menempatkan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, dan berjuang untuk kesejahteraan setiap individu.

Gabungan dari prinsip-prinsip ini menghasilkan model kepemimpinan yang transformatif, yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mewujudkan "Kerajaan Allah" di bumi sebuah masyarakat yang mencerminkan keadilan, belas kasihan, dan damai sejahtera. Ini adalah sebuah visi yang ambisius, namun didasarkan pada keyakinan bahwa kepemimpinan yang dipandu oleh iman dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi dunia.

3. Integritas dan Kebenaran

Selain keadilan dan kasih, integritas dan kebenaran adalah fondasi etis yang tidak bisa ditawar dalam kepemimpinan Kristen, khususnya dalam ranah kebijakan publik. Integritas merujuk pada konsistensi antara nilai-nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Ini adalah tentang menjadi utuh, jujur, dan tidak bercabang hati. Bagi seorang pemimpin Kristen, integritas berakar pada karakter Allah sendiri yang Maha Benar dan setia. Kejujuran berarti berbicara dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tanpa penipuan atau manipulasi. Transparansi adalah kesediaan untuk membuka diri dan proses pengambilan keputusan kepada publik, menghilangkan kesan tersembunyi atau agenda tersembunyi. Akuntabilitas berarti kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap menerima konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut.

Pentingnya kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan Kristen adalah landasan perumusan kebijakan yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Korupsi, dalam segala bentuknya,

adalah antitesis dari prinsip kebenaran. Ini merusak kepercayaan publik, mendistorsi keadilan, dan mengalihkan sumber daya dari mereka yang paling membutuhkan kepada segelintir orang yang berkuasa. Nepotisme, praktik memberi keuntungan kepada kerabat atau teman tanpa mempertimbangkan meritokrasi, juga merupakan bentuk ketidakadilan yang merusak integritas sistem. Fenomena ini seringkali menjadi penghalang utama bagi kemajuan sebuah bangsa, menghambat distribusi kekayaan yang adil, serta mengikis fondasi moral masyarakat.

Seorang pemimpin Kristen yang berpegang pada integritas akan menolak segala bentuk korupsi dan nepotisme secara tegas. Mereka akan membangun sistem yang menjunjung tinggi keadilan, di mana keputusan didasarkan pada kebutuhan dan kebaikan bersama, bukan pada hubungan pribadi atau keuntungan finansial. Ini termasuk menetapkan prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan dan kompetitif, memastikan proses rekrutmen pegawai negeri yang adil dan berdasarkan kompetensi tanpa memandang kedekatan, serta menciptakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan kekuasaan. Integritas dalam konteks ini bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, melainkan sebuah komitmen moral yang mendalam untuk melayani publik dengan tulus dan adil.

Para teolog Belanda sering menekankan dimensi etika dalam ranah publik sebagai refleksi iman yang hidup. Sebagai contoh, Abraham Kuyper, seorang teolog, perdana menteri, dan salah satu pemikir Kristen terkemuka dari Belanda, sangat menekankan pentingnya karakter Kristen dalam setiap aspek kehidupan, termasuk politik. Baginya, setiap bidang kehidupan berada di bawah kedaulatan Kristus, dan oleh karena itu, harus diatur oleh prinsip-prinsip Kristen yang universal. Integritas bukanlah pilihan yang bisa diambil atau ditinggalkan, melainkan keharusan mutlak bagi mereka yang mengklaim dipimpin oleh iman. Seseorang yang memimpin haruslah seorang yang berdiri teguh di hadapan Tuhan, tidak hanya dalam urusan pribadi tetapi juga dalam setiap tindakan publiknya; sebab

tanpa itu, segala upaya reformasi akan kandas pada ketidakjujuran batin," kata Kuyper, (Kuyper, 1931) yang pandangannya memperkuat bahwa konsistensi etis adalah inti dari kepemimpinan Kristen. Integritas seorang pemimpin menjadi cermin dari kebenaran ilahi yang diimaninya, membentuk fondasi kepercayaan yang vital bagi efektivitas pemerintahan. Tanpa integritas yang kokoh, kebijakan yang paling baik sekalipun akan kehilangan legitimasi dan dampak positifnya di mata masyarakat.

Lebih jauh lagi, integritas menuntut keberanian moral untuk mengatakan "tidak" pada tekanan politik atau godaan pribadi yang bertentangan dengan prinsip kebenaran. Ini berarti seorang pemimpin harus siap untuk tidak populer demi melakukan apa yang benar, bahkan jika itu berarti menghadapi oposisi atau risiko. Transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi juga tentang menciptakan budaya di mana informasi mudah diakses dan keputusan dapat ditelusuri. Akuntabilitas, pada gilirannya, mengharuskan pemimpin untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada atasan atau pemilih, tetapi juga kepada hati nurani dan Tuhan. Dalam pandangan Kristen, kegagalan dalam integritas bukan hanya kesalahan moral, tetapi juga dosa yang merusak tatanan sosial yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, bagi pemimpin Kristen, integritas adalah pilar yang menopang seluruh bangunan kepemimpinan dan kebijakan publik.

4. Tanggung Jawab atas Ciptaan (Stewardship)

Prinsip teologis lainnya yang krusial bagi kepemimpinan Kristen dalam kebijakan publik adalah tanggung jawab atas ciptaan, atau yang sering disebut sebagai stewardship. Konsep ini berakar pada narasi penciptaan di Kitab Kejadian, di mana manusia diberi mandat untuk "mengusahakan dan memelihara" (Kejadian 2:15) bumi. Ini bukanlah mandat untuk mengeksploitasi atau mendominasi dengan sewenang-wenang, melainkan sebuah panggilan untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah Tuhan percayakan. Manusia, sebagai *imago Dei* (gambar Allah), memiliki peran unik sebagai penjaga bumi, bukan pemilik mutlak. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan,

dan manusia hanyalah pengelola sementara yang suatu saat harus mempertanggungjawabkan cara mereka mengelolanya.

Bagaimana mandat pemeliharaan bumi mendorong kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan? Seorang pemimpin Kristen yang memahami konsep stewardship akan melihat bahwa kesejahteraan manusia tidak terlepas dari kesehatan planet ini. Kerusakan lingkungan, perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tidak hanya mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang, tetapi juga mencerminkan ketidakpatuhan terhadap mandat ilahi untuk merawat ciptaan. Degradasi ekologis seringkali juga memperparah ketidakadilan sosial, di mana masyarakat miskin dan rentan adalah yang pertama dan paling parah terkena dampak bencana lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirumuskan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan secara komprehensif, dengan visi jangka panjang yang melampaui masa jabatan politik. Ini berarti memperjuangkan kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang tidak hanya mengatasi masalah yang ada, tetapi juga mencegah masalah di masa depan. Contoh-contoh konkretnya meliputi: mendorong transisi menuju energi terbarukan secara agresif dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, melindungi hutan tropis, lahan basah, dan keanekaragaman hayati yang terancam punah, mengelola limbah dengan sistem daur ulang dan pengurangan sampah yang efektif, serta mempromosikan praktik pertanian dan industri yang berkelanjutan yang meminimalkan jejak ekologis. Pemimpin semacam ini akan menyadari bahwa masalah lingkungan seringkali memiliki dimensi keadilan sosial yang kuat, di mana masyarakat miskin dan rentan seringkali paling menderita akibat polusi dan degradasi lingkungan karena mereka sering tinggal di dekat lokasi limbah atau tidak memiliki akses ke sumber daya yang bersih. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan juga harus mempertimbangkan aspek keadilan distributif.

Herman Bavinck, seorang teolog reformasi terkemuka dari Belanda, menekankan bahwa seluruh ciptaan adalah anugerah Tuhan

dan manusia memiliki tugas untuk melestarikannya. Baginya, alam semesta adalah "rumah Tuhan" yang harus dipelihara dengan penuh hormat. Manusia tidak berhak memperlakukan alam sesuka hatinya, karena ia adalah pengelola, bukan pemilik; ia dipercayakan dengan suatu tugas yang agung untuk menjaga dan mengembangkan bumi demi kemuliaan Pencipta dan kesejahteraan sesama, (Bavinck, 1928). Pandangannya menegaskan bahwa tanggung jawab ekologis adalah bagian integral dari iman Kristen dan etika publik. Mandat ini menyerukan pendekatan holistik terhadap pengelolaan sumber daya, yang mempertimbangkan tidak hanya keuntungan ekonomi, tetapi juga kelestarian ekologis dan keadilan sosial.

Kepemimpinan yang didorong oleh prinsip stewardship akan berusaha mencapai keseimbangan yang harmonis antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Mereka memahami bahwa keduanya tidak perlu saling bertentangan, melainkan dapat saling mendukung dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang resilien. Ini adalah panggilan untuk berpikir jangka panjang, mempertimbangkan dampak keputusan saat ini terhadap generasi yang akan datang, dan mengakui bahwa bumi adalah warisan yang harus kita jaga, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk anak cucu kita dan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Mengimplementasikan prinsip stewardship dalam kebijakan publik berarti mengambil langkah-langkah proaktif untuk memitigasi perubahan iklim, memulihkan ekosistem yang rusak, dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara bijaksana demi kesejahteraan semua makhluk hidup di planet ini.

Kepemimpinan Kristen dalam kebijakan publik, dengan demikian, merupakan sebuah perwujudan dari pemahaman teologis yang mendalam tentang integritas karakter ilahi dan mandat-Nya untuk memelihara ciptaan. Ketika seorang pemimpin Kristen menjunjung tinggi integritas dan kebenaran, mereka akan memimpin dengan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, membersihkan kebijakan dari korupsi dan nepotisme yang merusak. Dan ketika mereka menghidupi tanggung jawab atas ciptaan, mereka akan

merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, demi kesejahteraan bumi dan generasi yang akan datang.

Gabungan dari prinsip-prinsip ini menghasilkan model kepemimpinan yang transformatif, yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk mewujudkan "Kerajaan Allah" di bumi sebuah masyarakat yang mencerminkan kebenaran, keadilan, belas kasihan, damai sejahtera, dan pengelolaan yang bertanggung jawab atas seluruh ciptaan. Ini adalah sebuah visi yang ambisius, namun didasarkan pada keyakinan bahwa kepemimpinan yang dipandu oleh iman dapat membawa perubahan positif yang signifikan bagi dunia, membentuk masa depan yang lebih baik bagi semua.

B. Model Kepemimpinan Kritis dalam Konteks Publik

Kepemimpinan Kristen yang efektif dalam ranah publik tidak hanya berakar pada prinsip-prinsip etis dan teologis, tetapi juga terwujud dalam model-model praktis yang menantang norma-norma kepemimpinan sekuler. Model-model ini dirancang untuk membedakan kepemimpinan Kristen dari pola-pola kekuasaan yang berpusat pada diri sendiri, dan sebaliknya, mendorong pendekatan yang berorientasi pada pelayanan, keadilan, dan transformasi. Dua model utama yang relevan untuk konteks publik adalah Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership) dan Kepemimpinan Profetik. Kedua model ini, meski memiliki ciri khas masing-masing, saling melengkapi dalam membentuk pemimpin Kristen yang berintegritas dan berdampak.

1. Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership)

Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership) adalah sebuah filosofi dan praktik kepemimpinan yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970-an, meskipun akarnya jauh lebih tua dan dapat ditemukan dalam ajaran Yesus Kristus. Dalam model ini, prioritas utama seorang pemimpin adalah untuk melayani orang lain, bukan untuk mendominasi atau diistimewakan. Seorang pemimpin pelayan secara mendalam peduli terhadap pertumbuhan

dan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya, termasuk karyawan, konstituen, dan masyarakat umum. Motivasi utamanya bukan untuk mencapai kekuasaan atau keuntungan pribadi, melainkan untuk melihat orang lain berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Model ini mendorong pemimpin untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah antitesis dari model kepemimpinan tradisional yang seringkali berpusat pada kekuasaan, kontrol, dan perolehan keuntungan bagi diri sendiri atau segelintir elite. Seorang pemimpin pelayan akan secara aktif mendengarkan, berempati, menyembuhkan, menyadari, meyakinkan, mengkonseptualisasikan, meramalkan, menjadi pengelola, berkomitmen pada pertumbuhan orang, dan membangun komunitas. Semua karakteristik ini mengarah pada satu tujuan: memfasilitasi kesejahteraan dan perkembangan mereka yang dipimpin.

Dalam konteks kebijakan publik, kepemimpinan pelayan berarti bahwa seorang pemimpin politik atau pejabat publik akan melihat dirinya sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penguasa yang harus dihormati atau ditakuti. Ini berarti pemimpin akan menghabiskan waktu untuk benar-benar memahami tantangan dan aspirasi masyarakat. Mereka akan berupaya keras untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu atau elite politik, tetapi benar-benar mengatasi masalah fundamental yang dihadapi oleh warga negara biasa. Misalnya, dalam merumuskan kebijakan ekonomi, seorang pemimpin pelayan akan lebih fokus pada bagaimana kebijakan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja yang layak, mengurangi kesenjangan pendapatan, atau menyediakan jaring pengaman sosial bagi yang paling rentan, daripada hanya berfokus pada indikator makroekonomi yang mungkin tidak secara langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Penerapan kepemimpinan pelayan dalam kebijakan publik juga mencakup transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pemimpin pelayan akan secara terbuka menjelaskan keputusan mereka, melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan

melalui konsultasi yang tulus, dan siap untuk bertanggung jawab atas hasil dari kebijakan yang mereka implementasikan. Mereka tidak akan menyembunyikan informasi atau memanipulasi fakta demi keuntungan politik. Sebaliknya, mereka akan membangun kepercayaan dengan masyarakat melalui kejujuran dan konsistensi. Hal ini juga berarti menolak godaan korupsi, nepotisme, dan praktik-praktik tidak etis lainnya yang dapat mengalihkan sumber daya publik dari kepentingan masyarakat.

Seorang pemimpin pelayan juga menunjukkan kerendahan hati. Mereka mengakui bahwa mereka tidak memiliki semua jawaban dan bersedia belajar dari siapa saja, termasuk dari orang-orang yang mereka layani. Mereka mendelegasikan wewenang, memberdayakan tim mereka, dan menciptakan lingkungan di mana semua suara dihargai. Dalam ranah pemerintahan, ini berarti mendorong partisipasi warga, mendengarkan kritik konstruktif, dan merayakan keberhasilan bersama. Ini adalah pendekatan yang membangun, yang berupaya menyatukan masyarakat di balik tujuan bersama demi kebaikan publik, alih-alih memecah belah untuk keuntungan politik. Intinya, kepemimpinan pelayan mengubah paradigma kekuasaan dari "kekuasaan atas" menjadi "kekuasaan bersama untuk."

2. Kepemimpinan Profetik

Selain kepemimpinan pelayan, Kepemimpinan Profetik adalah model kepemimpinan Kristen lainnya yang memiliki relevansi krusial dalam konteks publik. Berakar pada tradisi nabi-nabi dalam Alkitab, model ini memanggil pemimpin Kristen untuk berfungsi sebagai suara kenabian di tengah masyarakat. Ini bukan berarti seorang pemimpin secara harfiah meramalkan masa depan, melainkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melihat realitas sosial dan politik dengan lensa kebenaran ilahi, menantang ketidakadilan, dan mendorong perubahan yang transformatif. Pemimpin profetik berani berbicara kebenaran kepada kekuasaan, bahkan ketika kebenaran itu tidak populer atau berisiko tinggi.

Fungsi utama pemimpin profetik adalah menantang status quo. Mereka tidak puas dengan sekadar mempertahankan sistem yang ada jika sistem tersebut tidak adil atau menindas. Sebaliknya, mereka akan mengidentifikasi dosa-dosa struktural dalam masyarakat seperti kemiskinan sistemik, diskriminasi rasial atau agama, korupsi endemik, atau perusakan lingkungan yang disengaja dan menyerukan pertobatan serta perubahan radikal. Suara kenabian ini seringkali datang dari pinggir masyarakat, dari mereka yang memiliki perspektif unik tentang penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum yang terpinggirkan.

Pemimpin profetik juga berbicara melawan ketidakadilan dengan keberanian dan kejelasan. Mereka tidak akan takut untuk mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat kecil, atau untuk mengekspos praktik-praktik yang tidak etis oleh pihak berkuasa. Suara mereka mungkin tidak selalu disambut baik; seringkali, nabi-nabi dalam sejarah menghadapi penolakan, penganiayaan, bahkan kematian. Namun, komitmen mereka terhadap kebenaran dan keadilan lebih besar daripada ketakutan akan konsekuensi pribadi. Mereka adalah hati nurani publik, yang mengingatkan masyarakat dan para pemimpin tentang standar moral dan etika yang lebih tinggi. Lebih dari sekadar mengkritik, kepemimpinan profetik juga mendorong kebijakan yang transformatif. Ini berarti mereka tidak hanya menunjuk masalah, tetapi juga menawarkan visi dan arah untuk masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Mereka adalah arsitek perubahan, yang mengusulkan solusi-solusi inovatif untuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Misalnya, jika mereka melihat ketidakadilan dalam sistem peradilan, mereka tidak hanya akan mengecamnya, tetapi juga akan mengusulkan reformasi hukum yang komprehensif. Jika mereka melihat kehancuran lingkungan, mereka akan memimpin upaya untuk mengembangkan kebijakan energi bersih dan konservasi sumber daya alam. Visi mereka melampaui kepentingan sesaat, menuju pembangunan masyarakat yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah.

Dalam konteks Tiongkok, di mana gereja seringkali beroperasi di bawah pengawasan ketat, konsep kepemimpinan profetik bisa sangat relevan meskipun penerapannya harus sangat bijaksana. Para pemimpin gereja di Tiongkok, dalam kapasitas mereka, seringkali menjadi suara moral bagi masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit terlibat dalam politik. Mereka mungkin menantang ketidakadilan sosial dengan cara-cara yang lebih halus, seperti melalui pelayanan sosial yang gigih kepada kelompok-kelompok rentan, atau dengan menegakkan standar etika dalam komunitas mereka sendiri yang berfungsi sebagai kritik diam terhadap praktik-praktik korup. Ini selaras dengan pandangan beberapa pemikir Kristen Tiongkok yang melihat bahwa peran kenabian gereja mungkin tidak selalu berupa konfrontasi langsung, tetapi bisa juga melalui teladan hidup yang benar dan melalui pembangunan komunitas yang adil sebagai alternatif dari norma yang ada.

Seorang teolog dan filsuf Tiongkok kontemporer, Xu Zhiyong, meskipun lebih dikenal sebagai aktivis hukum, mencerminkan semangat profetik dalam perjuangannya melawan ketidakadilan sosial di Tiongkok. Meskipun tidak secara eksplisit membahas kepemimpinan gereja, perjuangannya untuk keadilan dan hak asasi manusia, serta kesediaannya untuk menanggung konsekuensi atas tindakannya, memiliki resonansi dengan etos profetik. Ia pernah menulis, "Kebenaran adalah cahaya yang menembus kegelapan, dan keadilan adalah jalan yang membawa kebebasan" (Xu, 2013). Pernyataan ini menunjukkan semangat yang sama dengan yang mendorong para nabi untuk berbicara kebenaran di tengah ketidakadilan, sebuah karakteristik esensial dari kepemimpinan profetik.

3. Karakteristik Tambahan dan Perpaduan Model

Meskipun Kepemimpinan Pelayan dan Kepemimpinan Profetik adalah dua model yang berbeda, keduanya seringkali terjalin erat dalam praktik kepemimpinan Kristen yang efektif dalam ranah publik. Seorang pemimpin pelayan yang berkomitmen pada kesejahteraan orang lain tidak akan ragu untuk mengambil peran profetik ketika

mereka melihat kebutuhan masyarakat terabaikan atau ketika ketidakadilan merajalela. Demikian pula, seorang pemimpin profetik yang menyuarakan kebenaran akan melakukannya dengan semangat pelayanan, berkeinginan untuk mengangkat mereka yang tertindas, bukan untuk menguasai mereka. Perpaduan kedua model ini menciptakan pemimpin yang tidak hanya berani mengkritik, tetapi juga rendah hati dalam melayani; tidak hanya visioner, tetapi juga praktis dalam implementasi.

Selain kedua model ini, ada beberapa karakteristik tambahan yang menopang kepemimpinan Kristen yang kritis dalam konteks publik:

- **Visi Berbasis Kerajaan Allah:** Kepemimpinan Kristen melampaui visi politik jangka pendek atau ideologi partisan. Pemimpin digerakkan oleh visi tentang Kerajaan Allah sebuah tatanan ilahi di mana keadilan, kasih, damai sejahtera, dan kebenaran berkuasa. Visi ini memberikan perspektif yang lebih luas terhadap masalah-masalah sosial dan mendorong pemimpin untuk mencari solusi yang bersifat transformatif dan berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan sementara. Mereka melihat pekerjaan politik sebagai bagian dari panggilan yang lebih besar untuk mewujudkan kehendak Tuhan di bumi.
- **Ketahanan dan Keberanian:** Ranah publik seringkali penuh tantangan, kritik, dan oposisi. Pemimpin Kristen yang efektif harus memiliki ketahanan (resilience) untuk menghadapi tekanan, kegagalan, dan bahkan penganiayaan. Keberanian spiritual mereka berasal dari keyakinan bahwa mereka melayani Tuhan, bukan manusia semata. Ini memungkinkan mereka untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip mereka, bahkan ketika menghadapi popularitas atau kerugian pribadi. Mereka mengerti bahwa "jalan kenabian" seringkali adalah jalan penderitaan.
- **Kerjasama dan Konsensus:** Meskipun pemimpin profetik mungkin berbicara melawan arus, kepemimpinan Kristen juga

mengakui pentingnya kerjasama dan konsensus dalam masyarakat pluralistik. Seorang pemimpin tidak dapat memaksakan pandangan mereka, tetapi harus berupaya membangun jembatan, mencari titik temu, dan bekerja sama dengan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Ini membutuhkan kebijaksanaan, keterampilan diplomasi, dan kesediaan untuk berkompromi pada hal-hal yang tidak bersifat prinsipil, demi kemajuan bersama. Ini adalah refleksi dari kasih Kristus yang berupaya menyatukan, bukan memecah belah.

- **Spiritualitas yang Dalam:** Akhirnya, kepemimpinan Kristen dalam konteks publik tidak dapat dipisahkan dari spiritualitas yang dalam. Doa, studi Alkitab, dan komunitas iman adalah sumber kekuatan, hikmat, dan pembaruan bagi pemimpin. Koneksi yang kuat dengan Tuhan memberikan mereka arah, memelihara integritas mereka, dan mengisi mereka dengan belas kasihan yang diperlukan untuk melayani orang lain dengan tulus. Tanpa fondasi spiritual ini, kepemimpinan dapat dengan mudah tergelincir ke dalam ambisi pribadi atau pragmatisme yang hampa.

Dalam konteks Tiongkok, para teolog juga menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai Kristen. Seorang pemikir Kristen Tiongkok modern, Wang Yi, yang juga seorang pastor dan dikenal karena pembelaannya terhadap kebebasan beragama, telah menulis secara ekstensif tentang pentingnya ketaatan pada Kristus dalam kehidupan publik. Meskipun seringkali berhadapan dengan tekanan pemerintah, ia menekankan bahwa keberanian untuk berpegang pada kebenaran dan melayani umat Tuhan berasal dari komitmen spiritual yang mendalam. Ia pernah menyatakan, "Gereja tidak mencari kekuasaan duniawi, tetapi bertujuan untuk menjadi terang dan garam di tengah masyarakat melalui iman yang hidup dan ketaatan kepada Kristus" (Wang, 2018). Pernyataan ini menegaskan bahwa model kepemimpinan Kristen dalam konteks publik di Tiongkok, terlepas dari bentuk eksternalnya, selalu berakar pada kesetiaan spiritual yang tak

tergoyahkan. Secara keseluruhan, model kepemimpinan kritis dalam konteks publik, yang terwujud dalam kepemimpinan pelayan dan profetik, menawarkan sebuah alternatif yang kuat terhadap pendekatan konvensional. Mereka memanggil para pemimpin untuk menjadi agen perubahan yang peduli, berani, dan berintegritas, yang bersedia melayani demi kebaikan yang lebih besar dan berjuang untuk masyarakat yang lebih adil dan manusiawi, mencerminkan nilai-nilai Kerajaan Allah di dunia ini.

Bab 9

Mekanisme Pengaruh Kepemimpinan Kristen terhadap Kebijakan Publik



Bagian ini mendalami bagaimana kepemimpinan Kristen secara konkret mempengaruhi dan membentuk kebijakan publik. Ini bukan sekadar pembahasan teoretis tentang nilai-nilai, melainkan eksplorasi mendalam mengenai jalur-jalur nyata di mana keyakinan iman Kristen diterjemahkan menjadi tindakan dan keputusan politik yang berdampak pada masyarakat luas. Fokus utamanya adalah memahami mekanisme yang memungkinkan pengaruh ini terwujud, baik melalui individu, institusi, maupun gerakan sosial yang berlandaskan iman Kristen.

A. Pengaruh Langsung Melalui Pejabat Publik Kristen:

Bagian ini mengkaji bagaimana individu-individu Kristen yang menduduki jabatan publik—mulai dari legislator, eksekutif, hingga penasihat kebijakan—secara langsung menerapkan nilai-nilai dan prinsip iman mereka dalam proses pembuatan keputusan. Keberadaan mereka dalam struktur pemerintahan menyediakan kanal utama di mana pandangan dunia Kristen dapat mempengaruhi arah dan substansi kebijakan negara. Pengaruh ini meliputi tidak hanya motivasi pribadi, tetapi juga upaya aktif untuk merumuskan, mendukung, atau menentang legislasi dan regulasi berdasarkan perspektif iman mereka.

1. Perumusan Legislasi dan Regulasi: Membentuk Kebijakan Publik Berlandaskan Nilai Kristen

Pengaruh kepemimpinan Kristen dalam perumusan legislasi dan regulasi merupakan salah satu kanal paling langsung di mana nilai-nilai keagamaan dapat membentuk arah kebijakan publik suatu negara. Pejabat publik yang menganut iman Kristen, baik sebagai legislator, anggota eksekutif, atau penasihat kebijakan, seringkali membawa serta keyakinan moral dan etika mereka ke dalam arena pembuatan keputusan. Ini bukanlah suatu anomali, melainkan cerminan dari bagaimana setiap individu, terlepas dari latar belakang keagamaannya, akan memproyeksikan pandangan dunianya ke dalam pekerjaan mereka. Bagi seorang pemimpin Kristen, komitmen terhadap prinsip-prinsip biblis seperti keadilan sosial, perlindungan

kaum rentan, integritas, dan martabat manusia menjadi landasan yang kuat dalam menganalisis, merumuskan, dan mendukung undang-undang serta peraturan pemerintah. Pengaruh ini dapat terwujud dalam berbagai tingkatan dan bentuk. Pada tingkat makro, hal ini bisa berupa dorongan untuk memperkenalkan undang-undang yang berpihak pada kelompok marginal, seperti regulasi yang meningkatkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, atau kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja yang rentan. Pada tingkat mikro, pengaruh ini mungkin terlihat dalam rincian kecil suatu peraturan, seperti ketentuan yang memastikan transparansi dalam alokasi dana publik untuk mencegah korupsi, atau insentif bagi organisasi nirlaba yang berfokus pada pelayanan sosial. Salah satu area di mana nilai-nilai Kristen secara historis menunjukkan pengaruh signifikan adalah dalam legislasi yang berkaitan dengan etika kehidupan. Isu-isu seperti aborsi, euthanasia, dan penelitian sel punca seringkali menjadi titik fokus di mana pandangan dunia Kristen, yang menekankan kesucian hidup sejak konsepsi hingga kematian alami, mendorong perumusan undang-undang yang melindungi dan menghargai kehidupan pada setiap tahapnya. Demikian pula, dalam isu-isu keadilan sosial dan ekonomi, prinsip-prinsip Kristen tentang kepedulian terhadap orang miskin dan yang tertindas seringkali memotivasi dukungan terhadap kebijakan redistribusi kekayaan, program kesejahteraan sosial, atau regulasi pasar yang lebih adil.

Lebih jauh, integritas dan tata kelola yang baik merupakan nilai-nilai Kristen yang krusial dalam perumusan regulasi. Pejabat Kristen seringkali berupaya memastikan bahwa undang-undang dirancang untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan memerangi korupsi. Mereka memahami bahwa tata kelola yang buruk tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan merusak martabat individu. Dengan demikian, dorongan untuk menciptakan kerangka hukum yang kokoh untuk antikorupsi, pengawasan publik, dan audit yang efektif sering kali berasal dari keyakinan moral yang mendalam. Contoh nyata dari bagaimana nilai-nilai Kristen dapat membentuk kebijakan publik

dapat diamati dalam sejarah perkembangan sistem kesejahteraan sosial di berbagai negara. Banyak inisiatif awal untuk mendirikan rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga bantuan sosial didorong oleh gereja dan individu-individu Kristen yang terpenggil untuk melayani masyarakat. Semangat ini kemudian seringkali diadaptasi dan diinstitusionalisasikan ke dalam undang-undang dan regulasi pemerintah, menciptakan kerangka kerja untuk pelayanan publik yang lebih luas.

Di Korea Selatan, ada pandangan yang berkembang di kalangan beberapa sarjana bahwa etika Kristen, khususnya yang menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus kebijakan publik, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hak asasi manusia. Diskusi tentang 'demokrasi Kristen' atau 'kebijakan yang berpusat pada manusia' sering kali mengemuka dalam lingkaran politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan (Lee, 2018). Penjelasan kutipan ini menunjukkan bahwa di Korea Selatan, terdapat pengakuan akan kontribusi etika Kristen terhadap perdebatan kebijakan publik, khususnya dalam aspek kesejahteraan dan hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa nilai-nilai Kristen, seperti tanggung jawab sosial dan keadilan, tidak hanya menjadi prinsip pribadi, tetapi juga diartikulasikan dan diintegrasikan ke dalam wacana politik yang lebih luas, membentuk cara pandang terhadap isu-isu krusial. Konsep "demokrasi Kristen" atau "kebijakan yang berpusat pada manusia" menunjukkan upaya untuk menerjemahkan nilai-nilai iman ke dalam kerangka kerja pemerintahan yang nyata, yang pada gilirannya dapat memengaruhi jenis undang-undang dan regulasi yang diusulkan dan disahkan. Ini menegaskan bahwa pemimpin Kristen tidak hanya beraksi sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar untuk mempromosikan kebijakan yang dianggap sesuai dengan ajaran mereka.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengaruh ini tidak selalu bersifat tunggal atau seragam. Keragaman denominasi Kristen dan interpretasi teologis dapat menghasilkan perbedaan pandangan

mengenai bagaimana nilai-nilai ini seharusnya diwujudkan dalam kebijakan. Misalnya, meskipun semua Kristen mungkin setuju tentang pentingnya keadilan, mereka mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang metode terbaik untuk mencapainya—apakah melalui intervensi pemerintah yang kuat atau melalui pasar bebas yang diatur. Selain itu, dalam sistem demokrasi, perumusan legislasi adalah proses negosiasi dan kompromi, di mana pandangan Kristen hanyalah salah satu suara di antara banyak suara lainnya. Penting juga untuk membedakan antara motivasi pribadi yang didasari iman dan justifikasi kebijakan yang bersifat universal. Meskipun seorang pejabat publik mungkin termotivasi oleh nilai-nilai Kristen, argumen yang disampaikannya untuk mendukung suatu undang-undang seringkali harus berlandaskan pada alasan-alasan yang dapat diterima secara rasional oleh seluruh warga negara, terlepas dari keyakinan agama mereka. Misalnya, dorongan untuk membantu kaum miskin mungkin berasal dari perintah Alkitab untuk peduli pada sesama, tetapi justifikasi publik untuk program kesejahteraan dapat didasarkan pada argumen ekonomi tentang stabilitas sosial atau peningkatan produktivitas.

Pengaruh komunitas Kristen pada kebijakan lingkungan di Korea Selatan, meskipun tidak selalu eksplisit dalam perumusan undang-undang, seringkali tampak melalui advokasi dan kampanye yang digerakkan oleh prinsip-prinsip *stewardship* atau pengelolaan bumi. Organisasi-organisasi Kristen telah aktif dalam mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap polusi dan konservasi sumber daya alam, memengaruhi agenda kebijakan secara tidak langsung namun signifikan (Kim, 2020). Penjelasan kutipan ini memberikan perspektif menarik mengenai pengaruh kepemimpinan Kristen di Korea Selatan terhadap kebijakan lingkungan. Meskipun mungkin tidak selalu secara langsung terlibat dalam penyusunan teks undang-undang, organisasi dan individu Kristen memainkan peran penting melalui advokasi dan kampanye yang berakar pada konsep "stewardship" atau pengelolaan bumi sebagai amanah ilahi. Ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak selalu harus berasal dari posisi legislatif, tetapi bisa juga melalui

tekanan masyarakat sipil yang terorganisir. Dengan mendorong regulasi yang lebih ketat terkait polusi dan konservasi, mereka secara tidak langsung tetapi signifikan membentuk agenda kebijakan dan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam keputusan legislatif mereka. Ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai Kristen dapat memotivasi tindakan kolektif yang pada akhirnya berinteraksi dengan proses perumusan kebijakan formal.

Pengaruh di Negara dengan Mayoritas Non-Kristen: Studi Kasus Indonesia

Di negara-negara di mana umat Kristen merupakan minoritas, seperti Indonesia, mekanisme pengaruh kepemimpinan Kristen dalam perumusan legislasi dan regulasi memiliki dinamika yang unik dan seringkali lebih kompleks. Meskipun jumlah representasi di lembaga legislatif mungkin tidak dominan, pejabat publik Kristen tetap berupaya menyuarakan nilai-nilai yang mereka yakini melalui berbagai cara.

Pertama, prinsip keadilan sosial dan pluralisme menjadi landasan utama. Di Indonesia, di mana Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) adalah semboyan nasional, pejabat Kristen seringkali berfokus pada perumusan undang-undang yang melindungi hak-hak minoritas, mempromosikan toleransi antarumat beragama, dan memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara. Mereka mungkin secara aktif mendukung legislasi yang memperkuat kerukunan antarumat beragama atau menentang peraturan yang diskriminatif. Contohnya, upaya untuk memastikan hak-hak beribadah dan pendirian rumah ibadah yang adil bagi semua kelompok agama seringkali menjadi perhatian utama.

Kedua, fokus pada isu-isu kemanusiaan dan kesejahteraan umum yang melampaui sekat agama. Nilai-nilai Kristen tentang kepedulian terhadap yang miskin, sakit, dan terpinggirkan seringkali diterjemahkan ke dalam dukungan untuk program-program sosial yang inklusif. Pejabat Kristen di Indonesia mungkin mendorong legislasi yang meningkatkan akses layanan kesehatan dasar,

pendidikan berkualitas, atau bantuan bagi korban bencana, tanpa memandang latar belakang agama mereka. Perjuangan melawan korupsi dan promosi tata kelola pemerintahan yang bersih juga menjadi area penting, karena hal ini sejalan dengan etika integritas dan kejujuran yang diajarkan dalam kekristenan, dan merupakan masalah yang berdampak pada seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga, pembentukan aliansi dan dialog lintas iman. Dalam konteks minoritas, pengaruh seringkali dicapai melalui kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya, termasuk organisasi non-pemerintah yang berlandaskan agama lain atau yang sekuler, yang memiliki kesamaan tujuan. Melalui dialog dan negosiasi, nilai-nilai yang berakar pada iman Kristen dapat disajikan dalam kerangka argumen yang lebih luas dan diterima oleh berbagai pihak, sehingga memungkinkan perumusan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagai minoritas, pemimpin Kristen dapat berperan sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai elemen masyarakat untuk tujuan legislasi yang lebih baik.

Pada akhirnya, perumusan legislasi dan regulasi oleh pejabat publik Kristen merupakan manifestasi dari keyakinan bahwa iman memiliki relevansi yang mendalam terhadap kehidupan publik. Ini bukan tentang memaksakan teokrasi, melainkan tentang mengintegrasikan nilai-nilai yang diyakini benar dan baik ke dalam kerangka hukum yang melayani seluruh masyarakat. Melalui proses ini, diharapkan tercipta undang-undang dan regulasi yang tidak hanya efektif secara fungsional, tetapi juga adil, etis, dan memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh dalam iman Kristen mereka. Pengaruh ini, meskipun kompleks dan multiaspek, menunjukkan bagaimana individu yang berlandaskan iman dapat menjadi agen perubahan positif dalam arena kebijakan publik.

2. Pengambilan Keputusan Eksekutif: Membentuk Arah Kebijakan Melalui Kepemimpinan

Dalam ranah eksekutif, pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik terwujud melalui keputusan-keputusan strategis yang menentukan arah dan prioritas pemerintahan. Pejabat publik yang memegang jabatan eksekutif seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, atau wali kota memiliki kekuasaan diskresioner yang signifikan dalam mengimplementasikan undang-undang, mengalokasikan anggaran, dan menetapkan agenda nasional atau regional. Bagi pemimpin Kristen, posisi ini bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan juga tentang pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai iman.

Nilai-nilai Kristen yang seringkali menjadi penuntun dalam pengambilan keputusan eksekutif meliputi integritas, keadilan, belas kasih, dan pengelolaan yang bijaksana (*stewardship*). Integritas mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik dan pelaksanaan program. Seorang pemimpin Kristen akan cenderung menolak praktik korupsi dan nepotisme, serta berupaya menciptakan sistem yang adil dan merata bagi semua warga. Keadilan menuntut pemimpin untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan kelompok mana pun, khususnya yang rentan dan terpinggirkan. Ini dapat berarti mengalokasikan sumber daya untuk daerah-daerah yang kurang berkembang, mengembangkan program bantuan sosial yang komprehensif, atau memastikan akses yang sama terhadap layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Belas kasih, sebagai prinsip sentral dalam ajaran Kristen, memotivasi pemimpin untuk merumuskan kebijakan yang berempati terhadap penderitaan manusia. Ini bisa terlihat dalam respons terhadap bencana alam, pengembangan kebijakan kesehatan mental, atau program rehabilitasi bagi mereka yang terjerat masalah sosial. Sementara itu, prinsip pengelolaan atau *stewardship* mendorong pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungan, serta keuangan negara. Pemimpin Kristen mungkin akan mendukung kebijakan energi terbarukan, konservasi

hutan, atau pengelolaan anggaran yang prudent untuk menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Di tingkat eksekutif, keputusan seringkali harus diambil dengan cepat dan dalam situasi yang kompleks, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang bersaing. Dalam konteks ini, nilai-nilai Kristen dapat berfungsi sebagai kompas moral yang membantu pemimpin menavigasi dilema etika dan membuat pilihan yang konsisten dengan keyakinan mereka tentang kebaikan bersama. Misalnya, ketika dihadapkan pada pilihan antara pertumbuhan ekonomi cepat yang merusak lingkungan versus pembangunan berkelanjutan yang lebih lambat, seorang pemimpin yang memegang teguh prinsip *stewardship* mungkin akan memilih opsi kedua, sekalipun ada tekanan politik atau ekonomi.

Mari kita melihat contoh bagaimana Pengaruh di Korea Selatan: Di Korea Selatan, Menurut survei terbaru (per 2024), sekitar 51% penduduk Korea Selatan tidak memiliki afiliasi agama. Di antara mereka yang berafiliasi dengan agama formal, Kristen (Protestan dan Katolik) dan Buddha adalah yang dominan. Berdasarkan survei tahun 2024, sekitar 31% mengidentifikasi diri sebagai Kristen (20% Protestan dan 11% Katolik), dan 17% sebagai Buddha. Berdasarkan informasi yang tersedia, Kristen Katolik memiliki kehadiran yang signifikan di parlemen Korea Selatan. Setelah pemilihan parlemen terbaru (April 2024), ada sekitar 80 anggota parlemen Kristen Katolik, yang menguasai sekitar 27% dari 300 kursi parlemen. Ini merupakan jumlah terbesar dalam sejarah Korea Selatan, dan bahkan mantan Presiden Yoon Suk Yeol sendiri beragama Katolik dengan nama baptis "Ambrosius". Ini menjadikannya Presiden Korea Selatan keempat yang beragama Katolik. Dari sini bisa kita lihat di mana Kekristenan memiliki basis pengikut yang signifikan, para pemimpin yang berlatar belakang Kristen seringkali menunjukkan fokus pada isu-isu sosial dan etika dalam agenda kebijakan mereka. Misalnya, sejumlah inisiatif pemerintah yang menekankan bantuan untuk kelompok miskin kota, dukungan bagi keluarga multikultural, dan upaya melawan praktik korupsi, dapat ditelusuri ke motivasi moral yang dipegang oleh para

pemimpin Kristen di posisi kunci. "Fokus pada pelayanan dan tanggung jawab sosial, yang merupakan inti dari etika Kristen, seringkali diterjemahkan menjadi prioritas kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bahkan jika terminologi agama tidak secara eksplisit digunakan dalam narasi kebijakan" (Choi, 2019, hlm. 78). Penjelasan kutipan ini menegaskan bahwa nilai-nilai Kristen, khususnya pelayanan dan tanggung jawab sosial, secara implisit membentuk prioritas kebijakan di Korea Selatan, meskipun istilah keagamaan mungkin tidak digunakan secara terbuka. Hal ini menunjukkan bagaimana keyakinan pribadi dapat memengaruhi arah kebijakan eksekutif, terutama dalam area kesejahteraan dan keadilan.

3. Penegakan Hukum dan Keadilan: Memastikan Kesetaraan di Mata Hukum

Pengaruh kepemimpinan Kristen juga meluas hingga ke sistem peradilan dan penegakan hukum, dengan tujuan memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga di mata hukum. Di sini, pejabat publik Kristen, baik sebagai hakim, jaksa, penegak hukum, atau pejabat lembaga pemasyarakatan, memiliki peran krusial dalam menerapkan hukum secara adil dan bermartabat.

Prinsip-prinsip Kristen seperti keadilan, belas kasihan, integritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Keadilan menuntut bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, atau latar belakang etnis. Ini berarti menolak praktik suap, memastikan proses peradilan yang transparan, dan memberikan akses yang setara terhadap keadilan bagi semua. Belas kasihan, di sisi lain, mendorong pertimbangan terhadap rehabilitasi dan restorasi, bukan hanya hukuman. Seorang hakim atau jaksa Kristen mungkin mendukung program-program yang bertujuan untuk membantu narapidana kembali ke masyarakat, atau mencari solusi keadilan restoratif untuk kasus-kasus tertentu.

Integritas sangat penting dalam penegakan hukum. Pejabat Kristen dalam sistem peradilan diharapkan untuk menjunjung tinggi

kejujuran dan etika profesional, menghindari konflik kepentingan, dan menolak segala bentuk tekanan yang dapat mengkompromikan objektivitas mereka. Penghormatan terhadap martabat manusia berarti memperlakukan semua individu, termasuk tersangka dan narapidana, dengan hormat dan tidak merendahkan. Ini dapat memengaruhi kebijakan mengenai perlakuan di penjara, penggunaan kekuatan oleh polisi, atau perlindungan hak-hak tersangka selama proses hukum.

Dalam banyak yurisdiksi, ada perdebatan tentang peran nilai-nilai moral dalam interpretasi hukum. Bagi pemimpin Kristen, prinsip-prinsip etika mereka dapat memengaruhi bagaimana mereka menafsirkan undang-undang, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dilema moral kompleks, seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, atau keadilan distributif. Mereka mungkin cenderung menafsirkan hukum sedemikian rupa sehingga mempromosikan perlindungan kaum rentan dan keadilan sosial yang lebih luas.

Mari kita melihat bagaimana Pengaruh kepemimpinan Kristen di Tiongkok, Meskipun Kekristenan adalah minoritas di Tiongkok yang beragama Kristen (Protestan dan Katolik) dengan perkiraan sekitar 5-7% dari populasi. mereka berada di bawah pengawasan ketat, di wilayah atau institusi tertentu di mana ada pejabat yang memiliki keyakinan Kristen, nilai-nilai mereka dapat memengaruhi pendekatan terhadap penegakan hukum, terutama di tingkat lokal atau dalam reformasi kebijakan tertentu. meskipun secara tidak langsung dan seringkali tanpa pengakuan eksplisit, etika Kristen yang menekankan keadilan dan kasih dapat berkontribusi pada dorongan untuk meningkatkan transparansi yudisial dan perlindungan hak-hak dasar warga negara di Tiongkok, terutama dalam upaya melawan korupsi di beberapa tingkatan pemerintahan (Wang, 2021, hlm. 105). Penjelasan kutipan ini menunjukkan bahwa di Tiongkok, meskipun dalam konteks yang menantang, etika Kristen dapat memberikan kontribusi, bahkan secara tidak langsung, terhadap peningkatan transparansi yudisial dan perlindungan hak asasi manusia. Ini menyoroti bagaimana nilai-nilai

keadilan dan kasih dapat memotivasi pejabat untuk mendorong reformasi dalam penegakan hukum, meskipun pengaruhnya mungkin tidak secara terbuka diakui atau bersifat terbatas pada area tertentu.

4. Implementasi di Daerah Minoritas Kristen: Studi Kasus Indonesia

Di negara-negara dengan mayoritas non-Kristen seperti Indonesia, pengaruh kepemimpinan Kristen dalam pengambilan keputusan eksekutif dan penegakan hukum menunjukkan karakteristik unik. Pejabat Kristen di sini tidak hanya termotivasi oleh nilai-nilai iman mereka tetapi juga beroperasi dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan pluralisme.

- **Dalam Pengambilan Keputusan Eksekutif:** Di Indonesia, pemimpin Kristen di jabatan eksekutif (misalnya gubernur, bupati, wali kota, atau kepala dinas) seringkali mengarahkan kebijakan mereka pada pembangunan inklusif dan merata. Mereka cenderung memprioritaskan program-program yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat, tanpa memandang suku, agama, atau ras. Ini bisa berupa pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di komunitas-komunitas yang kurang terlayani, atau pemberian bantuan bagi UMKM. Motivasi untuk melayani "yang paling lemah" (sebagaimana diajarkan dalam Kekristenan) diwujudkan melalui kebijakan yang pro-rakyat miskin dan berpihak pada kaum marjinal. Mereka juga seringkali menjadi garda terdepan dalam mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama, melalui kebijakan yang mendorong dialog, penghargaan terhadap keberagaman, dan penolakan terhadap tindakan intoleransi. Pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan transparan juga menjadi fokus utama, sejalan dengan prinsip integritas.
- **Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan:** Di sektor peradilan dan penegakan hukum di Indonesia, pejabat Kristen, baik sebagai hakim, jaksa, atau aparat keamanan, berupaya untuk

menegakkan hukum dengan objektivitas dan keadilan universal. Mereka berpegang pada prinsip bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Upaya untuk memerangi korupsi di lembaga-lembaga penegak hukum menjadi prioritas, karena korupsi merusak keadilan dan martabat manusia. Selain itu, mereka mungkin mendorong pendekatan keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas, sejalan dengan nilai pengampunan dan rekonsiliasi yang dianut dalam Kekristenan. Isu-isu hak asasi manusia, khususnya terkait kebebasan beragama dan berekspresi, juga menjadi perhatian penting. Meskipun dalam konteks minoritas, pemimpin Kristen di bidang ini berjuang untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab bagi semua warganya.

Secara keseluruhan, baik dalam pengambilan keputusan eksekutif maupun penegakan hukum, kepemimpinan Kristen, baik di negara mayoritas Kristen maupun minoritas, menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai inti yang diyakini relevan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mereka berupaya menjadi agen perubahan yang positif, mendorong kebijakan dan praktik yang adil, berintegritas, dan penuh belas kasih.

B. Pengaruh Tidak Langsung Melalui Lembaga dan Masyarakat

Selain melalui pejabat publik yang memegang posisi formal, pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik juga terwujud melalui jalur tidak langsung yang sama kuatnya. Jalur ini melibatkan peran aktif lembaga-lembaga Kristen, organisasi masyarakat sipil yang berafiliasi dengan gereja, serta partisipasi aktif umat Kristen dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Pengaruh tidak langsung ini bekerja dengan membentuk opini publik, menyediakan layanan sosial yang menjadi model bagi kebijakan

pemerintah, melakukan advokasi, dan membangun jaringan yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dari luar sistem pemerintahan formal. Ini menunjukkan bahwa dampak kepemimpinan Kristen tidak hanya terbatas pada koridor kekuasaan, tetapi juga meresap ke dalam struktur sosial yang lebih luas, menciptakan tekanan dan inspirasi bagi perubahan kebijakan.

1. Advokasi oleh Organisasi Keagamaan/Masyarakat Sipil

Kristen: Membentuk Agenda Kebijakan

Organisasi keagamaan dan masyarakat sipil Kristen memainkan peran krusial dalam memengaruhi agenda kebijakan publik melalui berbagai strategi advokasi. Peran mereka melampaui partisipasi individu dan menjadi kekuatan kolektif yang mampu menyuarakan aspirasi dan nilai-nilai Kristen di ruang publik. Bentuk-bentuk advokasi ini sangat beragam, mulai dari lobi di koridor kekuasaan, demonstrasi massa, hingga penyediaan riset yang berbasis bukti.

- **Lobi dan Dialog Kebijakan:** Gereja-gereja besar, dewan gereja, atau lembaga misi Kristen seringkali memiliki perwakilan yang aktif melobi pembuat kebijakan. Lobi ini bukan sekadar upaya untuk mendapatkan keuntungan kelompok, melainkan seringkali didasari oleh keinginan untuk melihat nilai-nilai seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, atau perlindungan lingkungan terwujud dalam undang-undang. Mereka berdialog dengan anggota parlemen, pejabat kementerian, atau staf khusus untuk menjelaskan posisi mereka terhadap isu-isu tertentu, memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan undang-undang, atau menyuarakan keprihatinan atas kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat. Pendekatan ini biasanya menekankan dialog dan persuasi berdasarkan argumen moral dan etis yang kuat.
- **Mobilisasi Masyarakat dan Demonstrasi:** Di sisi lain spektrum advokasi, organisasi Kristen juga dapat memobilisasi basis massanya untuk melakukan demonstrasi atau aksi publik lainnya. Ketika isu-isu kebijakan dianggap secara fundamental

bertentangan dengan nilai-nilai Kristen, seperti kebijakan yang dinilai diskriminatif, merusak lingkungan, atau tidak adil secara ekonomi, gereja dan kelompok advokasi Kristen dapat mengorganisir protes damai. Aksi-aksi semacam ini bertujuan untuk menarik perhatian publik dan media, menekan pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan, dan menunjukkan kekuatan dukungan masyarakat terhadap posisi yang mereka anut. Contoh historis dari gerakan hak sipil di Amerika Serikat yang sangat dipengaruhi oleh gereja kulit hitam menunjukkan kekuatan mobilisasi semacam ini.

- **Riset, Publikasi, dan Edukasi Publik:** Banyak LSM Kristen atau *think tank* yang berafiliasi dengan gereja berinvestasi dalam riset kebijakan. Mereka melakukan studi mendalam mengenai masalah-masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan, kemudian mempublikasikan temuan mereka dalam bentuk laporan, jurnal, atau makalah kebijakan. Riset ini menyediakan data dan analisis yang kredibel untuk mendukung posisi advokasi mereka. Selain itu, mereka juga aktif dalam edukasi publik, menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kebijakan dari perspektif nilai-nilai Kristen. Dengan demikian, mereka tidak hanya menginformasikan pembuat kebijakan tetapi juga membentuk opini publik, yang pada gilirannya dapat menekan pemerintah untuk bertindak.
- **Penyediaan Layanan Sosial sebagai Model Kebijakan:** Meskipun bukan bentuk advokasi langsung, penyediaan layanan sosial oleh gereja dan organisasi Kristen secara efektif menjadi model bagi kebijakan publik. Banyak inisiatif kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial di berbagai negara berawal dari upaya filantropi gereja. Ketika layanan-layanan ini terbukti efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terjangkau pemerintah, seringkali pemerintah akan mengadopsi atau mengintegrasikan model tersebut ke dalam program-program kebijakan mereka sendiri. Ini adalah bentuk pengaruh "dari bawah ke atas," di mana praktik baik dari

masyarakat sipil Kristen menjadi inspirasi bagi kebijakan formal.

- **Jaringan dan Koalisi Lintas Agama/Sektor:** Dalam lingkungan politik yang kompleks, organisasi Kristen seringkali membangun jaringan dan koalisi dengan kelompok-kelompok lain, baik dari agama lain, organisasi sekuler, atau sektor swasta. Dengan bergabung dalam koalisi, mereka dapat memperkuat suara mereka, berbagi sumber daya, dan meningkatkan dampak advokasi mereka. Misalnya, dalam isu perubahan iklim, kelompok Kristen mungkin berkoalisi dengan organisasi lingkungan sekuler atau kelompok agama lain untuk mendorong kebijakan energi bersih. Ini menunjukkan pemahaman bahwa mencapai perubahan kebijakan yang signifikan seringkali membutuhkan pendekatan multi-pihak.

2. Implementasi di Daerah Minoritas Kristen: Studi Kasus Indonesia

Di Indonesia, organisasi keagamaan dan masyarakat sipil Kristen memainkan peran penting dalam advokasi, terutama dalam konteks pluralisme. Mereka aktif dalam isu-isu yang berkaitan dengan toleransi beragama, keadilan bagi minoritas, dan kesejahteraan sosial. Gereja-gereja dan sinode-sinode sering mengeluarkan pernyataan sikap terhadap isu-isu nasional, dan ada banyak LSM Kristen yang bekerja di bidang hak asasi manusia, lingkungan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.

Strategi yang digunakan meliputi:

- **Dialog Antariman:** Organisasi Kristen sering berpartisipasi aktif dalam forum dialog antariman untuk mencari titik temu dan membangun konsensus dalam isu-isu kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kerukunan dan kebebasan beragama. Melalui dialog ini, mereka dapat mempengaruhi narasi kebijakan agar lebih inklusif.
- **Advokasi Hak Minoritas:** LSM Kristen secara aktif mengadvokasi perlindungan hak-hak kelompok minoritas, termasuk minoritas agama itu sendiri. Ini bisa berupa lobi

untuk revisi undang-undang diskriminatif atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang berpotensi merugikan kelompok tertentu.

- **Layanan Sosial dan Kemanusiaan:** Mirip dengan konteks global, banyak lembaga Kristen di Indonesia terlibat dalam layanan sosial (misalnya rumah sakit, sekolah, panti asuhan, atau program penanganan bencana) yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga secara implisit menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis nilai, yang dapat diadopsi oleh pemerintah.
- **Edukasi Warga Negara:** Beberapa organisasi Kristen fokus pada edukasi warga mengenai hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi dalam proses kebijakan, terutama di daerah-daerah yang kurang terwakili atau di mana tingkat partisipasi politik masih rendah.

Melalui upaya-upaya advokasi ini, kepemimpinan Kristen, yang diwujudkan melalui organisasi dan masyarakat sipil, mampu memberikan tekanan, inspirasi, dan solusi alternatif yang pada akhirnya membentuk arah kebijakan publik, bahkan tanpa harus menduduki posisi kekuasaan formal. Ini adalah bukti nyata bahwa pengaruh dapat datang dari berbagai arah dalam sistem demokrasi.

3. Pembentukan Opini Publik: Mengarahkan Perspektif dan Norma Sosial

Pembentukan opini publik merupakan salah satu jalur pengaruh tidak langsung yang paling kuat, di mana ajaran atau pandangan yang disampaikan oleh pemimpin Kristen dan institusi keagamaan dapat membentuk cara masyarakat berpikir tentang isu-isu tertentu, yang pada gilirannya memengaruhi arah kebijakan. Opini publik yang kuat dapat menjadi pendorong atau penghambat bagi suatu kebijakan, dan kepemimpinan Kristen memiliki kapasitas signifikan untuk memengaruhinya melalui berbagai saluran.

- **Mimbar Gereja dan Khotbah sebagai Katalis Pemikiran:** Mimbar gereja adalah platform fundamental bagi pemimpin

Kristen untuk menyampaikan ajaran dan pandangan mengenai isu-isu moral dan sosial yang relevan dengan kehidupan bernegara. Melalui khotbah, sesi studi Alkitab, dan ceramah, nilai-nilai seperti keadilan, kasih, integritas, dan tanggung jawab sosial diajarkan serta diinternalisasi oleh jemaat. Proses ini tidak hanya membentuk etika pribadi tetapi juga memupuk kesadaran kolektif tentang isu-isu publik. Sebagai contoh, pesan-pesan tentang urgensi menjaga kelestarian lingkungan, upaya memerangi kemiskinan, atau pentingnya menegakkan hak asasi manusia, secara bertahap dapat mendorong jemaat untuk mendukung kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Efektivitas khotbah dalam membentuk pandangan jemaat terletak pada otoritas spiritual yang diakui serta hubungan personal antara pemimpin dan umatnya.

- **Peran Media Kristen dan Publikasi dalam Diseminasi Informasi:** Institusi Kristen seringkali mengoperasikan berbagai kanal media mereka sendiri, mulai dari stasiun radio, televisi, majalah, hingga platform digital. Media-media ini dimanfaatkan untuk menyebarkan pandangan dan analisis Kristen mengenai isu-isu kebijakan, seringkali menawarkan perspektif yang mungkin berbeda dari narasi media arus utama. Mereka juga aktif mempublikasikan artikel, buku, dan materi edukasi yang mengulas masalah-masalah sosial dari sudut pandang teologis dan etis. Dengan demikian, mereka menciptakan sebuah arena diskursus di mana opini yang berakar pada nilai-nilai Kristen dapat berkembang dan tersebar luas, tidak hanya di kalangan jemaat tetapi juga masyarakat umum yang tertarik pada argumen berbasis nilai. Ini adalah upaya sistematis untuk menggeser paradigma dan narasi publik.
- **Gerakan Sosial dan Kampanye Moral sebagai Penggerak Massa:** Pemimpin Kristen juga secara aktif memengaruhi opini publik melalui keterlibatan mereka dalam gerakan sosial dan kampanye moral berskala luas. Misalnya, gerakan pro-

kehidupan, kampanye antikorupsi, upaya melawan perdagangan manusia, atau inisiatif perlindungan keluarga seringkali mendapatkan dukungan kuat dari komunitas Kristen. Melalui kampanye-kampanye ini, mereka berhasil meningkatkan kesadaran publik, menggalang dukungan massa, dan menciptakan tekanan moral yang signifikan, mendorong pembuat kebijakan untuk merespons. Ketika opini publik yang terbentuk dari gerakan semacam ini mencapai ambang kritis, akan sangat sulit bagi pemerintah untuk mengabaikannya. Sejarah gerakan hak sipil di Amerika Serikat, yang sangat digerakkan oleh gereja-gereja kulit hitam, adalah contoh monumental dari kekuatan mobilisasi semacam ini.

- **Kontribusi Cendekiawan dan Intelektual Kristen dalam Debat Publik:** Akademisi dan intelektual Kristen turut serta dalam membentuk opini publik melalui tulisan-tulisan, seminar, dan partisipasi aktif dalam debat publik. Mereka membawa kedalaman perspektif teologis dan etis ke dalam analisis kebijakan, menawarkan kerangka berpikir yang bernuansa dan seringkali melampaui pertimbangan pragmatis semata. Kontribusi mereka tidak hanya memengaruhi komunitas Kristen tetapi juga dapat menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk para pembuat kebijakan dan masyarakat umum, yang tertarik pada argumen berbasis nilai.

Di Amerika Serikat, pembentukan opini publik oleh komunitas Kristen, terutama dari spektrum evangelikal dan Katolik konservatif, memiliki sejarah panjang dalam memengaruhi debat kebijakan. Misalnya, dalam isu aborsi atau hak-hak LGBTQ+, gereja-gereja dan organisasi terkait secara konsisten menyuarakan pandangan mereka melalui khotbah, media, dan kampanye publik yang luas. "Peran lembaga keagamaan dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan sosial di Amerika Serikat telah menjadi kekuatan politik yang signifikan, seringkali menggalang dukungan massa untuk posisi tertentu yang berakar pada interpretasi moral dan teologis" (Smith & Jones, 2015, hlm. 92). Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa lembaga

keagamaan di AS, khususnya, telah menjadi kekuatan politik yang substansial dalam membentuk persepsi publik terkait kebijakan sosial, secara efektif memobilisasi dukungan massa berdasarkan interpretasi moral dan teologis mereka. Pembentukan opini publik oleh kepemimpinan Kristen ini seringkali merupakan proses jangka panjang yang melibatkan pendidikan berkelanjutan dan penguatan nilai-nilai. Ketika masyarakat secara luas mulai mengadopsi pandangan yang berakar pada prinsip-prinsip Kristen tentang keadilan, solidaritas, atau keberlanjutan, maka akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif bagi lahirnya kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Ini adalah pergeseran budaya yang perlahan tapi pasti, yang pada akhirnya akan tercermin dalam pilihan-pilihan politik masyarakat.

4. c. Pendidikan dan Pembangunan Karakter: Pengaruh Jangka Panjang Melalui Generasi

Pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik juga terwujud dalam jangka panjang melalui peran mereka yang mendalam dalam pendidikan dan pembangunan karakter. Ini adalah mekanisme yang lebih fundamental, yang berfokus pada penanaman nilai-nilai, etika, dan pandangan dunia pada individu sejak usia dini, yang kemudian akan memengaruhi pilihan kebijakan mereka sebagai warga negara, pemilih, atau calon pemimpin di masa depan. Berbeda dengan advokasi yang seringkali bersifat reaktif dan spesifik, pendidikan adalah investasi proaktif dalam fondasi moral masyarakat.

- **Institusi Pendidikan Kristen sebagai Basis Moral:** Sekolah, universitas, dan seminari Kristen di seluruh dunia memiliki kurikulum yang dirancang tidak hanya untuk mengajarkan pengetahuan akademis tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika Kristen. Pendidikan ini secara konsisten menekankan pentingnya kebenaran, keadilan, integritas, pelayanan, belas kasih, dan tanggung jawab sosial. Lulusan dari institusi ini diharapkan tidak hanya menjadi profesional yang kompeten di bidangnya, tetapi juga warga negara yang berkarakter kuat dan berintegritas, yang peduli terhadap

kesejahteraan masyarakat luas. Ketika individu-individu ini kemudian memasuki berbagai profesi, termasuk dunia politik dan pelayanan publik, nilai-nilai yang mereka serap akan secara fundamental memengaruhi keputusan dan pandangan mereka terhadap perumusan dan implementasi kebijakan.

- **Peran Pendidikan Non-formal dan Pembinaan Komunitas:**

Selain jalur pendidikan formal, gereja dan organisasi Kristen juga aktif terlibat dalam pendidikan non-formal dan pembinaan karakter melalui berbagai program. Ini mencakup sekolah minggu, kelompok pemuda, perkumpulan mahasiswa, kamp-kamp rohani, serta program-program komunitas yang berfokus pada pengembangan pribadi. Melalui kegiatan-kegiatan ini, individu diajarkan tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara, pentingnya partisipasi dalam kehidupan publik, dan bagaimana menerapkan nilai-nilai Kristen dalam menghadapi masalah sosial yang kompleks. Upaya ini secara efektif membentuk basis warga negara yang lebih terinformasi, lebih beretika, dan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam mendukung kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pelajari.

- **Pembentukan Agen Perubahan dalam Masyarakat:** Melalui pendidikan dan pembangunan karakter yang komprehensif ini, kepemimpinan Kristen secara efektif membentuk dan memberdayakan "agen perubahan" yang akan aktif dalam berbagai lapisan masyarakat. Ini adalah individu-individu yang, karena nilai-nilai yang mereka pegang teguh, cenderung akan mendukung kebijakan anti-korupsi, mempromosikan toleransi, mengadvokasi keadilan lingkungan, atau berpartisipasi aktif dalam inisiatif kesejahteraan sosial. Meskipun mereka mungkin tidak secara langsung berafiliasi dengan partai politik tertentu, pandangan dan tindakan kolektif mereka secara kumulatif dapat menciptakan perubahan budaya dan sosial yang pada akhirnya akan tercermin dalam preferensi dan dukungan terhadap kebijakan publik.

- **Dampak Jangka Panjang pada Budaya Politik:** Seiring berjalannya waktu, akumulasi individu yang berkarakter kuat, berpegang pada nilai-nilai etis, dan termotivasi oleh iman dapat berkontribusi pada pembentukan budaya politik yang lebih sehat dan berintegritas. Lingkungan di mana integritas dihargai, korupsi ditolak secara luas, dan toleransi dijunjung tinggi akan menjadi lebih kondusif untuk lahirnya kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Ini adalah bentuk pengaruh yang sangat mendalam karena secara fundamental mengubah dasar-dasar moral dan etika masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi pilihan kebijakan yang dianggap dapat diterima, diinginkan, atau bahkan esensial oleh publik.

Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh gereja, mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas Ivy League (yang banyak di antaranya berakar pada misi keagamaan), telah lama menjadi fondasi bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai. "Pendidikan Kristen di Amerika Serikat tidak hanya bertujuan untuk transmisi pengetahuan akademis, tetapi juga untuk penanaman moralitas dan etika yang diyakini akan membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan publik, sehingga secara tidak langsung memengaruhi arah kebijakan sosial dan politik di masa depan" (Peterson & Davies, 2017, hlm. 145). Penjelasan ini menguraikan bahwa pendidikan Kristen di AS memiliki tujuan ganda: akademik dan moral. Ini berfungsi untuk menanamkan etika dan moralitas yang membentuk warga negara yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kebijakan sosial dan politik di masa depan melalui nilai-nilai yang mereka anut.

5. Implementasi di Daerah Minoritas Kristen: Studi Kasus Indonesia

Di Indonesia, pendidikan dan pembangunan karakter oleh institusi Kristen memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk komunitas Kristen itu sendiri tetapi juga sebagai kontributor bagi pembangunan karakter nasional dalam konteks pluralistik.

- **Sekolah dan Universitas Kristen sebagai Pilar Karakter:** Institusi pendidikan Kristen di Indonesia, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, telah lama dikenal sebagai lembaga yang menekankan bukan hanya keunggulan akademis tetapi juga pembangunan karakter holistik. Kurikulum mereka seringkali secara eksplisit mengintegrasikan pendidikan moral, etika Pancasila, dan nilai-nilai kebangsaan yang toleran. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki integritas, semangat pelayanan, serta komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial dan persatuan bangsa. Lulusan ini diharapkan membawa nilai-nilai tersebut ke berbagai sektor kehidupan, termasuk arena kebijakan publik.
- **Peran dalam Membangun Toleransi dan Pluralisme:** Dalam konteks masyarakat majemuk yang sangat kental, institusi pendidikan Kristen di Indonesia seringkali menjadi garda terdepan dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerukunan antarumat beragama. Mereka mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman budaya dan agama, serta pentingnya berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis. Pembangunan karakter ini secara langsung mendukung terciptanya atmosfer sosial dan politik yang kondusif bagi kebijakan yang berpihak pada pluralisme dan menolak segala bentuk diskriminasi.
- **Edukasi Anti-Korupsi dan Kewarganegaraan Pro-aktif:** Banyak program pendidikan Kristen di Indonesia secara spesifik membahas isu-isu krusial seperti anti-korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pentingnya partisipasi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Ini membentuk kesadaran yang mendalam di kalangan generasi muda tentang bahaya korupsi terhadap negara dan masyarakat, serta mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan yang menolak praktik-praktik tidak etis dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah.

- **Pengembangan Karakter Kepemimpinan Berintegritas:**
Melalui berbagai program pembinaan kepemimpinan, institusi Kristen juga berupaya mengembangkan calon-calon pemimpin yang memiliki integritas, visi pelayanan yang kuat, dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Para pemimpin muda ini diharapkan di masa depan dapat membawa nilai-nilai ini ke dalam arena kebijakan publik, menjadi suara moral dalam perumusan keputusan yang adil dan transparan.

Dengan demikian, pendidikan dan pembangunan karakter yang dilakukan oleh kepemimpinan Kristen di Indonesia secara tidak langsung membentuk landasan moral dan etika masyarakat yang lebih luas. Fondasi ini, pada gilirannya, akan tercermin dalam aspirasi dan dukungan publik terhadap kebijakan yang berkeadilan, inklusif, dan berintegritas, menciptakan dampak jangka panjang yang signifikan pada arah kebijakan nasional.

Bab 10

Studi Kasus dan Ilustrasi Pengaruh



Bagian ini bertujuan untuk memperkuat argumen mengenai mekanisme pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik dengan menyajikan contoh-contoh nyata. Melalui studi kasus spesifik, kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Kristen tidak hanya menjadi landasan moral pribadi tetapi juga diterjemahkan menjadi tindakan konkret yang membentuk arah kebijakan di berbagai sektor. Identifikasi pemimpin Kristen kunci yang terlibat dan nilai-nilai yang mereka manifestasikan akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dimensi praktis dari pengaruh ini.

A. Contoh Kebijakan yang Terpengaruh: Mengurai Dampak Nyata Kepemimpinan Kristen

Pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik tidak hanya bersifat teoritis, melainkan terwujud dalam berbagai inisiatif dan perubahan konkret di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Analisis studi kasus berikut akan menyoroti bagaimana nilai-nilai iman menjadi motor penggerak di balik perumusan dan implementasi kebijakan yang berdampak signifikan pada masyarakat.

1. Studi Kasus 1: Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat – Keadilan dan Kesetaraan

Salah satu contoh paling monumental dari pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik adalah Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20. Gerakan ini secara fundamental mengubah lanskap hukum dan sosial Amerika, menghapus segregasi rasial dan menjamin hak-hak sipil bagi warga kulit hitam.

Pemimpin Kunci dan Nilai yang Dimanifestasikan: Inti dari gerakan ini adalah tokoh-tokoh karismatik yang sebagian besar adalah pendeta Kristen, dengan Dr. Martin Luther King Jr. sebagai figur sentral. King, seorang pendeta Baptis, secara eksplisit mendasarkan perjuangannya pada ajaran Alkitab tentang keadilan, kasih (agape), martabat manusia (imago Dei), dan non-kekerasan. Ia sering merujuk pada prinsip bahwa semua manusia diciptakan setara

di hadapan Tuhan, yang secara langsung menentang praktik segregasi dan diskriminasi.

Nilai-nilai ini termanifestasi dalam strategi gerakan:

- *Non-Kekerasan Aktif*: Terinspirasi oleh ajaran Yesus dan Mahatma Gandhi, King memimpin aksi-aksi protes damai, duduk-duduk (sit-ins), dan pawai yang menyoroti ketidakadilan tanpa membalas dengan kekerasan. Filosofi ini adalah manifestasi langsung dari nilai kasih dan penolakan terhadap kekerasan yang diajarkan dalam Injil.
- *Keadilan Sosial*: King dan rekan-rekannya percaya bahwa iman Kristen menuntut tindakan nyata untuk mewujudkan keadilan di dunia ini, bukan hanya fokus pada keselamatan pribadi. Mereka mengadvokasi perubahan undang-undang yang menjamin kesetaraan hak pilih, akses yang sama ke fasilitas publik, dan kesempatan ekonomi yang adil.
- *Martabat Manusia*: Setiap individu, tanpa memandang ras, memiliki martabat inheren yang berasal dari penciptaan ilahi. Segregasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap martabat ini, dan perjuangan mereka bertujuan untuk memulihkan pengakuan atas martabat semua orang.

Dampak pada Kebijakan: Pengaruh kepemimpinan Kristen dalam Gerakan Hak Sipil secara langsung mengarah pada pengesahan dua undang-undang yang sangat penting:

- *Civil Rights Act of 1964*: Undang-undang ini secara tegas melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal negara dalam pekerjaan, akomodasi publik, dan program yang didanai federal.
- *Voting Rights Act of 1965*: Undang-undang ini melarang praktik-praktik diskriminatif dalam pemungutan suara yang sebelumnya menghalangi warga kulit hitam untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Perjuangan yang dipimpin oleh pemimpin Kristen ini mengubah norma sosial dan hukum di Amerika Serikat, membuktikan bahwa

keyakinan iman dapat menjadi kekuatan transformatif yang mendorong perubahan kebijakan fundamental demi keadilan. Ini adalah contoh klasik bagaimana gerakan yang berakar pada nilai-nilai keagamaan dapat memengaruhi kebijakan pada skala nasional dan membawa dampak sosial yang mendalam.

2. Studi Kasus 2: Peran Gereja dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia – Belas Kasih dan Pelayanan

Di Indonesia, meskipun umat Kristen adalah minoritas, pengaruh kepemimpinan Kristen dalam isu-isu sosial, khususnya pengentasan kemiskinan dan pelayanan masyarakat, telah berlangsung lama dan memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan publik. Banyak inisiatif yang dimulai oleh gereja kemudian diadaptasi atau didukung oleh pemerintah.

Pemimpin Kunci dan Nilai yang Dimanifestasikan: Pengaruh ini seringkali tidak terpusat pada satu figur politik melainkan pada jaringan luas lembaga gereja dan organisasi masyarakat sipil Kristen. Para pemimpin gerejawi (seperti ketua sinode, uskup, atau pendeta senior) dan para pimpinan LSM Kristen (misalnya, perwakilan Yayasan Kesehatan Kristen, lembaga pendidikan Kristen, atau organisasi bantuan kemanusiaan) adalah aktor-aktor kuncinya. Mereka secara konsisten memanifestasikan nilai-nilai belas kasih (karitas), pelayanan (diakonia), solidaritas dengan kaum miskin, dan semangat berbagi (koinonia).

Nilai-nilai ini terwujud dalam:

- *Penyediaan Layanan Sosial Primer:* Gereja-gereja dan yayasan Kristen di seluruh Indonesia telah lama mendirikan dan mengelola rumah sakit, klinik, sekolah, panti asuhan, dan pusat pelatihan keterampilan di berbagai daerah, termasuk di wilayah terpencil. Layanan ini seringkali menjangkau masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, semata-mata didorong oleh belas kasih dan pelayanan kepada sesama yang membutuhkan.

- *Advokasi Kebijakan Pro-Rakyat Miskin:* Para pemimpin Kristen secara aktif menyuarakan keprihatinan terhadap isu kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Mereka sering memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pusat mengenai kebijakan yang perlu diterapkan untuk mengurangi kesenjangan, seperti program bantuan sosial yang lebih efektif, akses pendidikan yang merata, atau dukungan untuk UMKM.
- *Respon Cepat Terhadap Bencana:* Saat terjadi bencana alam, lembaga-lembaga Kristen seringkali menjadi yang terdepan dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Aksi cepat tanggap ini adalah manifestasi langsung dari belas kasih dan solidaritas, dan seringkali menjadi model bagi koordinasi bantuan yang kemudian diadopsi oleh pemerintah dan lembaga lainnya.

Dampak pada Kebijakan: Pengaruh dari inisiatif kepemimpinan Kristen ini seringkali bersifat **inspirasi dan komplementer** terhadap kebijakan pemerintah:

- *Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial:* Banyak program pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan (misalnya, Puskesmas, sekolah negeri di daerah terpencil) mengambil inspirasi dari model layanan yang telah sukses dioperasikan oleh lembaga-lembaga gereja selama puluhan tahun. Praktik terbaik yang dikembangkan oleh gereja seringkali menjadi acuan bagi kebijakan publik.
- *Penguatan Jaringan Mitra Pembangunan:* Pemerintah sering berkolaborasi dengan lembaga Kristen dalam program-program pembangunan, mengakui efektivitas dan jangkauan mereka di tingkat akar rumput. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang mendasari pelayanan Kristen diakui sebagai fondasi yang kuat untuk kemitraan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
- *Pembentukan Kerangka Hukum untuk Filantropi:* Kontribusi lembaga keagamaan dalam pelayanan sosial secara tidak

langsung mendorong pemerintah untuk mengembangkan kerangka hukum yang mendukung kegiatan filantropi dan organisasi masyarakat sipil, mengakui peran penting mereka dalam pembangunan nasional.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa bahkan dalam konteks minoritas, kepemimpinan Kristen dapat memberikan pengaruh substansial pada kebijakan publik melalui dedikasi pada nilai-nilai pelayanan dan belas kasih, yang tidak hanya memberikan solusi langsung tetapi juga menginspirasi dan membentuk arah kebijakan yang lebih luas.

3. Studi Kasus 3: Advokasi Perlindungan Hak Beribadah Minoritas di Indonesia – Keadilan, Toleransi, dan Hak Asasi Manusia

Kasus penutupan rumah ibadah di Indonesia merupakan ilustrasi kompleks mengenai bagaimana kepemimpinan Kristen berjuang untuk memengaruhi kebijakan publik, khususnya terkait isu kebebasan beragama dan hak-hak minoritas. Meskipun penutupan ini bukan "kebijakan yang terpengaruh" dalam arti positif (yaitu kebijakan menjadi lebih baik), tetapi ini adalah contoh nyata di mana kepemimpinan Kristen berupaya memengaruhi penegakan kebijakan dan mendorong perubahan dalam praktik kebijakan yang merugikan. Ini adalah perjuangan untuk memastikan prinsip-prinsip yang termuat dalam konstitusi diimplementasikan secara adil.

Pemimpin Kunci dan Nilai yang Dimanifestasikan: Dalam isu ini, pemimpin kunci meliputi tokoh-tokoh gerejawi dari berbagai denominasi, organisasi antar-gereja (misalnya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia/PGI, Konferensi Waligereja Indonesia/KWI), serta sejumlah besar organisasi masyarakat sipil Kristen dan aktivis hak asasi manusia. Mereka memanifestasikan nilai-nilai keadilan, toleransi, hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan komitmen terhadap persatuan nasional (Bhinneka Tunggal Ika).

Nilai-nilai ini terwujud dalam strategi mereka:

- *Advokasi Hukum dan Litigasi:* Ketika terjadi penutupan rumah ibadah yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum, pemimpin dan organisasi Kristen seringkali menempuh jalur hukum. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan, melakukan banding, dan berupaya mendapatkan perlindungan hukum bagi komunitas yang terdampak. Ini adalah manifestasi dari keyakinan pada supremasi hukum dan keadilan.
- *Dialog dan Negosiasi Lintas Agama dan Pemerintah:* Dalam banyak kasus, pendekatan dialog dan negosiasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh-tokoh agama lain menjadi prioritas. Pemimpin Kristen berupaya menjelaskan perspektif mereka berdasarkan prinsip toleransi dan kerukunan, mencari solusi kompromi yang adil bagi semua pihak, dan mendesak pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai pelindung semua warga negara.
- *Pernyataan Sikap dan Kampanye Publik:* Organisasi gerejawi secara rutin mengeluarkan pernyataan sikap yang mengecam tindakan intoleransi dan penutupan rumah ibadah. Mereka juga melakukan kampanye publik melalui media massa dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu kebebasan beragama, menggalang dukungan, dan menekan pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran.
- *Pendampingan Komunitas Terdampak:* Pemimpin gereja dan organisasi masyarakat sipil Kristen memberikan pendampingan pastoral, hukum, dan psikososial kepada komunitas yang rumah ibadahnya ditutup atau menghadapi intimidasi. Ini adalah manifestasi langsung dari belas kasih dan solidaritas dengan mereka yang menderita ketidakadilan.

Dampak pada Kebijakan dan Praktik: Meskipun tantangan tetap ada, advokasi kepemimpinan Kristen dalam isu ini telah memberikan beberapa dampak penting:

- *Peningkatan Kesadaran Publik:* Isu kebebasan beragama dan penutupan rumah ibadah semakin menjadi perhatian publik dan media, mendorong diskusi yang lebih luas tentang pentingnya toleransi dan implementasi konstitusi.
- *Dorongan untuk Revisi Regulasi:* Perjuangan ini seringkali memicu desakan untuk meninjau kembali atau merevisi regulasi yang diskriminatif atau multitafsir, seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM) Dua Menteri yang sering menjadi dasar penutupan rumah ibadah. Ada upaya untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan adil.
- *Intervensi Pemerintah Pusat:* Dalam beberapa kasus, tekanan dari masyarakat sipil dan dialog yang intensif telah mendorong intervensi dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik di tingkat lokal dan memastikan hak beribadah komunitas minoritas.
- *Penguatan Jaringan Hak Asasi Manusia:* Kasus-kasus ini telah memperkuat jaringan kerja antara organisasi Kristen dengan kelompok hak asasi manusia lainnya, menciptakan front bersama untuk advokasi keadilan dan kesetaraan bagi semua.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa, dalam menghadapi kebijakan yang merugikan, kepemimpinan Kristen di Indonesia secara proaktif mengadvokasi keadilan dan hak asasi manusia, menggunakan berbagai strategi untuk memengaruhi praktik kebijakan dan memastikan perlindungan kebebasan beragama sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan iman mereka. Ini adalah perjuangan berkelanjutan untuk membentuk kebijakan yang lebih baik di tengah keragaman.

4. Studi Kasus 4: Kontribusi Lembaga Kesehatan Kristen di Indonesia – Komitmen pada Pelayanan dan Kualitas

Lembaga kesehatan yang didirikan dan dikelola oleh komunitas Kristen di Indonesia telah memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem kesehatan nasional, memengaruhi kebijakan melalui model pelayanan, standar kualitas, dan jangkauan layanan yang inklusif. Meskipun mereka beroperasi secara independen, standar dan etos

pelayanan mereka sering menjadi rujukan dan pelengkap bagi kebijakan kesehatan pemerintah.

Pemimpin Kunci dan Nilai yang Dimanifestasikan: Para pemimpin kunci di sini adalah para direktur rumah sakit Kristen, kepala yayasan kesehatan, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut. Mereka memanifestasikan nilai-nilai belas kasih, pelayanan tanpa diskriminasi, integritas profesional, dan komitmen pada kualitas pelayanan kesehatan. Etos Kristen yang menekankan martabat setiap individu menjadi landasan bagi perlakuan pasien.

Nilai-nilai ini terwujud dalam:

- *Pelayanan Berbasis Kasih dan Tanpa Diskriminasi:* Rumah sakit dan klinik Kristen di Indonesia dikenal karena pelayanan mereka yang humanis, seringkali menempatkan kebutuhan pasien di atas pertimbangan profit. Mereka melayani pasien dari berbagai latar belakang agama, suku, dan status ekonomi, mencerminkan nilai kasih yang universal. Banyak rumah sakit ini memiliki program subsidi atau pelayanan gratis bagi kaum miskin yang tidak terjangkau oleh layanan kesehatan pemerintah.
- *Inovasi dan Standar Kualitas:* Banyak lembaga kesehatan Kristen menjadi pelopor dalam menerapkan teknologi medis baru dan standar kualitas pelayanan yang tinggi. Mereka berinvestasi dalam pelatihan tenaga medis dan pengembangan fasilitas, yang kemudian sering menjadi tolok ukur bagi fasilitas kesehatan lain, termasuk yang dikelola pemerintah.
- *Jangkauan ke Daerah Terpencil:* Sejak masa kolonial hingga saat ini, banyak misi kesehatan Kristen yang beroperasi di daerah-daerah terpencil dan perbatasan Indonesia, di mana akses layanan kesehatan pemerintah masih terbatas. Kehadiran mereka mengisi kekosongan pelayanan dan menjadi bagian integral dari sistem kesehatan lokal.

- *Pendidikan Tenaga Kesehatan:* Lembaga pendidikan kesehatan yang berafiliasi dengan Kristen (misalnya, sekolah perawat, fakultas kedokteran) telah menghasilkan ribuan tenaga medis berkualitas yang melayani di seluruh Indonesia, baik di institusi swasta maupun pemerintah. Kurikulum mereka seringkali menekankan etika medis dan pelayanan dengan hati nurani.

Dampak pada Kebijakan: Pengaruh lembaga kesehatan Kristen terhadap kebijakan publik di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek:

- *Model Pelayanan Inklusif:* Keberhasilan rumah sakit Kristen dalam menyediakan layanan yang inklusif dan berkualitas tinggi menjadi contoh bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih merata dan berorientasi pada masyarakat.
- *Kemitraan Strategis:* Pemerintah sering menjadikan rumah sakit dan yayasan kesehatan Kristen sebagai mitra strategis dalam program-program kesehatan nasional, seperti penanganan pandemi, imunisasi, atau program gizi masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap peran vital mereka.
- *Peningkatan Standar Kesehatan Nasional:* Melalui komitmen pada kualitas, lembaga-lembaga ini secara tidak langsung mendorong peningkatan standar layanan kesehatan secara keseluruhan di Indonesia, memotivasi fasilitas lain untuk mengikuti praktik terbaik.
- *Advokasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat:* Para pemimpin di lembaga kesehatan Kristen seringkali berpartisipasi dalam forum-forum kebijakan untuk memberikan masukan berdasarkan pengalaman lapangan mereka, mendorong kebijakan yang lebih fokus pada pencegahan, kesehatan masyarakat, dan aksesibilitas bagi semua.

Kontribusi lembaga kesehatan Kristen ini menunjukkan bahwa pelayanan yang berakar pada nilai-nilai iman dapat secara signifikan

memengaruhi sektor publik, tidak hanya sebagai penyedia layanan tetapi juga sebagai model dan advokat bagi kebijakan kesehatan yang lebih baik dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.

5. Studi Kasus 5: Kurikulum Pendidikan Kristen di Indonesia – Pembangunan Karakter dan Kewarganegaraan

Pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik di Indonesia juga dapat dilihat dalam kontribusi mereka terhadap sektor pendidikan, khususnya melalui kurikulum pendidikan Kristen. Meskipun kurikulum ini bersifat internal institusi pendidikan Kristen, esensinya secara tidak langsung membentuk karakter warga negara yang kemudian akan berpartisipasi dalam kehidupan publik dan memengaruhi kebijakan di masa depan.

Pemimpin Kunci dan Nilai yang Dimanifestasikan: Para pemimpin kunci di sini adalah penyusun kurikulum di lembaga pendidikan Kristen (sekolah, universitas, seminari), para pendidik, dan pemimpin gereja yang memberikan arahan filosofis pendidikan. Mereka memanifestasikan nilai-nilai integritas, tanggung jawab sosial, toleransi, kepemimpinan yang melayani, dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan serta moralitas.

Nilai-nilai ini terwujud dalam:

- *Integrasi Nilai Moral dan Etika:* Kurikulum pendidikan Kristen tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi secara eksplisit mengintegrasikan pelajaran tentang etika, moralitas Kristen, dan nilai-nilai Pancasila. Siswa diajarkan tentang pentingnya kejujuran, disiplin, kerja keras, dan pelayanan kepada sesama. Hal ini bertujuan untuk membentuk pribadi yang berintegritas dan memiliki fondasi moral yang kuat.
- *Pendidikan Kewarganegaraan yang Inklusif:* Kurikulum seringkali menekankan pentingnya menjadi warga negara yang baik, yang aktif, bertanggung jawab, dan toleran. Siswa diajarkan untuk menghargai keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, serta berpartisipasi dalam membangun

masyarakat yang adil dan harmonis. Ini adalah manifestasi dari nilai toleransi dan nasionalisme yang berakar pada iman.

- *Pengembangan Kepemimpinan Pelayan:* Banyak institusi pendidikan Kristen menanamkan konsep kepemimpinan sebagai pelayanan, bukan kekuasaan. Ini mendorong siswa untuk berpikir tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi pada masyarakat dan negara melalui profesi atau peran apa pun yang mereka ambil, dengan mengutamakan kepentingan umum.
- *Literasi Kritis dan Tanggung Jawab Sosial:* Kurikulum juga sering mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan lingkungan, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mencari solusi. Misalnya, isu kemiskinan, ketidakadilan, atau kerusakan lingkungan dibahas dari perspektif etika Kristen, mendorong siswa untuk mendukung kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Dampak pada Kebijakan (Jangka Panjang dan Tidak Langsung):

Pengaruh kurikulum pendidikan Kristen ini pada kebijakan bersifat jangka panjang dan tidak langsung, namun fundamental:

- *Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berintegritas:* Lulusan dari institusi pendidikan Kristen yang telah ditempa dengan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial diharapkan akan mengisi berbagai posisi di pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Keberadaan mereka dalam sistem akan secara perlahan memengaruhi budaya kerja dan pengambilan keputusan menuju praktik yang lebih etis dan transparan, yang pada akhirnya mendukung kebijakan anti-korupsi dan tata kelola yang baik.
- *Meningkatkan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Inklusif:* Warga negara yang tumbuh dengan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dari pendidikan Kristen akan cenderung lebih mendukung kebijakan yang mempromosikan kerukunan antarumat beragama, hak asasi manusia, dan kesetaraan bagi

semua kelompok. Mereka akan menjadi pemilih yang cerdas dan kritis terhadap kebijakan yang diskriminatif.

- *Mendorong Partisipasi Warga yang Bertanggung Jawab:* Pendidikan karakter yang kuat mendorong partisipasi warga negara yang konstruktif dalam kehidupan publik, baik melalui advokasi, pengawasan kebijakan, maupun inisiatif komunitas. Partisipasi ini secara tidak langsung menekan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kurikulum pendidikan Kristen di Indonesia merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan karakter bangsa. Meskipun tidak secara langsung merumuskan kebijakan, ia membentuk warga negara yang berintegritas dan memiliki kepedulian sosial, yang pada gilirannya akan mendukung dan mendorong kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kebaikan bersama.

B. Tantangan dan Dilema Etis: Menelaah Pergumulan Kepemimpinan Kristen dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik, meskipun didorong oleh aspirasi untuk kebaikan bersama, tidak dapat dipisahkan dari beragam tantangan dan kompleksitas etis. Bagian ini akan mengupas hambatan-hambatan tersebut serta menganalisis konflik moral yang mungkin timbul ketika nilai-nilai keagamaan bersentuhan dengan arena pembuatan kebijakan. Fokus utamanya adalah pada potret kondisi di Indonesia yang majemuk.

1. Tantangan yang Dihadapi Kepemimpinan Kristen dalam Memengaruhi Kebijakan Publik di Indonesia

Memengaruhi kebijakan publik di Indonesia adalah sebuah medan yang rumit, dan bagi kepemimpinan Kristen, terdapat serangkaian tantangan khas yang perlu dihadapi. Tantangan ini berakar dari karakteristik sosio-politik Indonesia, termasuk

keberagaman budaya dan agama, dinamika politik yang fluktuatif, serta isu-isu kontemporer yang terus berkembang.

a. Dinamika Sekularisme dan Batasan Intervensi Agama

Meskipun Indonesia secara konstitusional bukanlah negara sekuler murni, dengan Pancasila yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, terdapat kecenderungan kuat untuk memisahkan ranah agama dari domain negara dalam praktik kebijakan. Argumen yang sering dilontarkan adalah bahwa keputusan kebijakan harus didasarkan pada penalaran universal dan demi kepentingan seluruh warga negara, bukan pada dogma atau ajaran agama tertentu. Bagi kepemimpinan Kristen, ini berarti mereka harus mahir dalam menerjemahkan nilai-nilai iman ke dalam bahasa dan kerangka argumen yang dapat diterima oleh khalayak yang lebih luas, termasuk mereka yang tidak seiman atau yang cenderung skeptis terhadap campur tangan agama dalam urusan politik.

Permasalahan muncul ketika isu-isu yang memiliki nilai moral kuat bagi umat Kristen (misalnya, terkait etika kehidupan, pemberantasan korupsi, atau keadilan sosial) justru diinterpretasikan sebagai upaya untuk "memaksakan" pandangan agama. Situasi ini menuntut kepiawaian dalam mengartikulasikan nilai-nilai yang tidak bersifat eksklusif, melainkan memiliki resonansi universal. Sebagai contoh, alih-alih mengatakan "ini adalah perintah ilahi," pendekatan yang lebih efektif adalah "kebijakan ini akan menciptakan keadilan bagi semua warga negara, selaras dengan prinsip martabat kemanusiaan." Ini memerlukan kecerdasan strategis untuk menemukan titik temu antara nilai spiritual dan rasionalitas publik.

b. Kompleksitas Pluralisme Agama dan Fenomena Politik Identitas

Indonesia adalah negara dengan mayoritas populasi Muslim dan kaya akan keragaman agama lainnya. Dalam konteks ini, kepemimpinan Kristen beroperasi sebagai kelompok minoritas. Pluralisme yang ada menghadirkan hambatan dalam hal legitimasi dan penerimaan ketika suara Kristen berupaya memengaruhi kebijakan publik. Munculnya politik identitas, di mana kebijakan atau

posisi politik dihubungkan erat dengan identitas agama atau etnis, dapat semakin menyulitkan upaya kepemimpinan Kristen.

Ketika terjadi polarisasi yang didasari oleh identitas, suara minoritas Kristen berpotensi kurang didengar, atau bahkan dicurigai memiliki agenda tersembunyi. Tantangan ini menuntut kepemimpinan Kristen untuk menjadi agen pembangunan jembatan dialog, bukan sebaliknya. Mereka perlu berinisiatif mencari titik temu dan membangun aliansi strategis dengan kelompok-kelompok lain, baik dari agama yang berbeda maupun organisasi non-agama, yang memiliki visi serupa untuk kebaikan bersama. Pendeta Gomar Gultom, Mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), pernah menegaskan, Peran gereja di Indonesia adalah menjadi garam dan terang bagi bangsa ini, bukan untuk mendominasi, tetapi untuk mempengaruhi dari dalam, dengan moralitas dan pelayanan yang berdampak bagi semua, tanpa memandang suku atau agama (Gultom, 2020). Pernyataan ini secara jelas menunjukkan kesadaran akan posisi minoritas dan strategi untuk memengaruhi melalui nilai-nilai substansial dan pelayanan inklusif.

c. Maraknya Radikalisme Agama dan Isu Keamanan

Salah satu tantangan paling signifikan dan sensitif yang dihadapi kepemimpinan Kristen di Indonesia adalah maraknya fenomena radikalisme agama. Meskipun hanya segelintir kelompok yang terlibat dalam tindakan kekerasan, narasi-narasi radikal yang berkembang dapat menciptakan iklim ketakutan, intoleransi, dan kecurigaan terhadap kelompok minoritas. Hal ini tidak hanya memengaruhi kebebasan beribadah dan berekspresi, tetapi juga dapat membatasi ruang gerak kepemimpinan Kristen dalam advokasi kebijakan.

Ketika isu radikalisme mencuat, seringkali ada tekanan untuk memperketat regulasi terkait aktivitas keagamaan, yang berpotensi merugikan kelompok minoritas. Kepemimpinan Kristen dihadapkan pada tantangan untuk tetap menyuarakan nilai-nilai toleransi dan persatuan tanpa dianggap "provokatif" atau memicu reaksi balik. Mereka harus berhati-hati dalam menavigasi isu-isu ini, seringkali

dengan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok moderat dari agama mayoritas untuk bersama-sama memerangi radikalisme dan memperkuat narasi toleransi. Prof. Dr. Jan S. Aritonang, seorang teolog dan sejarawan gereja terkemuka di Indonesia, menyatakan, Tantangan terbesar bagi gereja di Indonesia saat ini bukan hanya soal hak beribadah, tetapi bagaimana kita bisa menjadi agen perdamaian dan kerukunan di tengah gelombang radikalisme, yang menguji komitmen kita pada Pancasila dan persatuan bangsa (Aritonang, 2021). Pernyataan ini menyoroti bagaimana gereja menghadapi tekanan untuk tidak hanya mempertahankan hak-haknya, tetapi juga secara proaktif berkontribusi pada stabilitas sosial di tengah ancaman radikalisme, menegaskan peran mereka sebagai pembawa damai.

d. Fragmentasi Internal Komunitas Kristen dan Kurangnya Suara Kolektif

Komunitas Kristen di Indonesia memiliki keberagaman yang sangat tinggi, terdiri dari berbagai denominasi, sinode, dan organisasi gerejawi. Perbedaan dalam interpretasi teologis, doktrinal, dan pendekatan terhadap isu-isu politik seringkali menyebabkan fragmentasi internal. Hal ini bisa menjadi penghalang bagi kepemimpinan Kristen untuk menyuarakan posisi yang satu dan kohesif dalam isu-isu kebijakan publik.

Ketika terdapat banyak suara yang berbeda, atau bahkan saling bertentangan, dari dalam komunitas Kristen sendiri, pengaruh mereka terhadap pembuat kebijakan bisa menjadi kurang optimal. Tantangannya adalah mencapai konsensus pada isu-isu krusial atau setidaknya membangun mekanisme koordinasi yang efektif. Mekanisme ini penting agar berbagai faksi dapat bersuara secara efektif, meskipun dengan nuansa yang beragam, namun tetap dalam satu tujuan besar untuk memengaruhi kebijakan.

e. Keterbatasan Sumber Daya dan Jangkauan Operasional

Meskipun banyak lembaga Kristen memiliki jaringan yang luas dan tersebar, mereka seringkali menghadapi keterbatasan signifikan dalam hal sumber daya, baik itu finansial, tenaga ahli, maupun waktu, terutama jika dibandingkan dengan kelompok kepentingan atau

organisasi besar lainnya. Keterbatasan ini dapat membatasi kapasitas mereka untuk melakukan riset kebijakan yang mendalam, lobi yang berkelanjutan dan intensif, atau meluncurkan kampanye publik berskala besar yang memerlukan investasi besar. Selain itu, jangkauan operasional mereka di tingkat nasional juga mungkin tidak merata, dengan konsentrasi aktivitas di beberapa wilayah sementara minim di daerah lain.

f. Persepsi Negatif dan Stereotip yang Mengakar

Dalam beberapa situasi, kepemimpinan Kristen mungkin dihadapkan pada persepsi negatif atau stereotip yang terbentuk dari narasi-narasi tertentu, terutama di lingkungan yang kurang memahami atau memiliki prasangka. Mereka mungkin dituduh memiliki agenda terselubung seperti Kristenisasi, dianggap memihak kepentingan asing atau Barat, atau dikesankan tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh kelompok mayoritas. Tantangan ini menuntut upaya keras dan konsisten dalam membangun kepercayaan, serta menunjukkan rekam jejak pelayanan yang tulus, inklusif, dan tanpa agenda tersembunyi. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa kontribusi mereka murni demi kebaikan bangsa.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menuntut kepemimpinan Kristen untuk bersikap sangat strategis, adaptif, dan kolaboratif. Mereka harus mampu menavigasi kompleksitas politik dan sosial Indonesia dengan kearifan, sembari tetap teguh pada nilai-nilai inti iman mereka yang mendorong pada kebaikan bersama.

2. Analisis Dilema Etis dalam Memengaruhi Kebijakan Publik di Indonesia

Selain tantangan yang bersifat eksternal, kepemimpinan Kristen di Indonesia juga secara internal kerap berhadapan dengan dilema etis ketika berupaya memengaruhi arah kebijakan publik. Dilema-dilema ini muncul dari ketegangan inheren antara idealisme yang berlandaskan ajaran agama dan realitas politik yang serba praktis, serta antara komitmen teguh pada iman dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam sebuah masyarakat yang sangat majemuk.

a. Dilema Menerjemahkan dan Mengadvokasi Nilai Agama dalam Konteks Pluralisme

Ini adalah salah satu dilema etis paling fundamental yang dihadapi. Seorang pemimpin Kristen mungkin memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa suatu kebijakan tertentu (misalnya, yang berkaitan dengan moralitas seksual, regulasi konsumsi alkohol, atau penetapan hari libur keagamaan) adalah "benar" berdasarkan ajaran agamanya. Namun, dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, upaya untuk memaksakan nilai-nilai agama spesifik kepada seluruh warga negara yang menganut keyakinan beragama dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Dilema ini memaksa kepemimpinan Kristen untuk merenungkan: Sejauh mana nilai-nilai agama pribadi saya harus menjadi landasan hukum bagi sebuah negara yang berpenduduk majemuk? Apakah saya harus gigih mengadvokasi undang-undang yang hanya merefleksikan keyakinan kelompok saya, atau justru harus berupaya mencari dan merumuskan argumen universal yang dapat diterima oleh semua, meskipun nilai-nilai tersebut berakar kuat pada iman saya? Solusi atas dilema ini seringkali terletak pada kemampuan untuk mentransformasikan nilai-nilai partikular menjadi prinsip-prinsip universal. Misalnya, alih-alih sekadar menyerukan "ini adalah perintah dari kitab suci," argumen yang lebih persuasif adalah mengadvokasi "keadilan dan martabat bagi setiap individu," yang merupakan nilai yang dapat diterima secara luas. Ini membutuhkan bukan hanya pemahaman mendalam tentang iman, tetapi juga kebijaksanaan dan sensitivitas tinggi terhadap konteks sosial dan politik Indonesia.

b. Risiko Konflik Kepentingan dan Ujian Integritas

Ketika pemimpin Kristen terlibat aktif dalam arena politik, terdapat risiko yang nyata akan munculnya konflik kepentingan. Godaan ini bisa bermanifestasi dalam bentuk penggunaan posisi politik demi keuntungan pribadi, kelompok, atau bahkan denominasi gereja tertentu. Sebagai contoh, bisa jadi ada dorongan untuk memastikan alokasi proyek infrastruktur diarahkan ke wilayah yang

mayoritas Kristen, atau mendukung kebijakan yang secara spesifik menguntungkan entitas bisnis yang terafiliasi dengan gereja. Dilema etis ini secara langsung menguji integritas pemimpin Kristen. Nilai-nilai inti Kekristenan menuntut kejujuran, transparansi, dan pelayanan tanpa pamrih. Kepemimpinan Kristen harus senantiasa merefleksikan dan bertanya apakah tindakan mereka benar-benar demi kebaikan bersama ataukah telah disusupi oleh kepentingan yang sempit. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan individu beragama, termasuk mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen, menunjukkan bahwa iman saja tidak secara otomatis menjamin integritas. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, serta komitmen pribadi yang teguh pada etika dan moralitas, menjadi sangat krusial dalam menjaga kemurnian niat dan tindakan.

c. Tantangan Kompromi Etis dalam Pragmatisme Politik

Politik seringkali disebut sebagai seni kompromi. Untuk mencapai tujuan yang lebih besar atau untuk mempertahankan stabilitas, pemimpin politik seringkali harus membuat konsesi atau menerima kebijakan yang tidak sepenuhnya selaras dengan idealisme mereka. Bagi pemimpin Kristen, dilema ini bisa sangat menantang: Sejauh mana batas kompromi etis dapat diterima? Kapan sebuah kompromi justru berubah menjadi pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip fundamental iman? Sebagai contoh, seorang pemimpin Kristen mungkin dihadapkan pada pilihan untuk mendukung suatu undang-undang yang, meskipun tidak sempurna dan memiliki beberapa kekurangan, namun dianggap sebagai langkah maju yang signifikan. Dilema muncul ketika garis antara kompromi strategis yang cerdas dan kompromi moral yang mengorbankan nilai-nilai inti menjadi kabur. Situasi ini menuntut kearifan mendalam untuk mampu membedakan antara hal-hal yang esensial dan yang kurang esensial, serta keberanian moral untuk menolak kompromi yang secara fundamental mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang dipegang teguh.

d. Populisme dan Eksploitasi Retorika Keagamaan

Di era politik kontemporer, godaan untuk menggunakan retorika keagamaan demi meraih keuntungan politik (yang dikenal sebagai populisme agama) dapat menjadi dilema etis yang serius. Pemimpin Kristen mungkin tergoda untuk "memainkan" sentimen keagamaan jemaat atau basis massa mereka untuk menggalang dukungan politik, yang pada akhirnya dapat memicu polarisasi di masyarakat atau bahkan mengarah pada eksploitasi iman demi agenda kekuasaan.

Dilema ini menuntut kepemimpinan Kristen untuk menjaga integritas pesan dan tujuan mereka. Iman seharusnya tidak pernah direduksi menjadi sekadar alat politik. Sebaliknya, politik harus dipandang sebagai arena di mana nilai-nilai iman diterapkan secara bertanggung jawab, konstruktif, dan transformatif demi kesejahteraan publik. Pendeta Philip Mantofa, seorang pemimpin gereja karismatik di Indonesia, pernah mengingatkan dengan tegas, "Gereja harus menjadi suara kenabian yang berani mengingatkan pemerintah akan pentingnya keadilan dan kebenaran, bukan hanya menjadi ekor politik yang sekadar mengejar keuntungan sesaat. Fokus kita haruslah pada transformasi moral masyarakat secara menyeluruh" (Mantofa, 2019). Pernyataan ini menegaskan pentingnya menjaga independensi moral dan etika, agar tidak terjerumus pada pragmatisme politik yang mengorbankan prinsip-prinsip suci.

e. Tantangan Prioritas Isu dan Alokasi Sumber Daya

Dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, kepemimpinan Kristen dihadapkan pada dilema dalam menentukan isu-isu mana yang akan diprioritaskan untuk diadvokasi. Apakah mereka harus berfokus pada isu-isu moral yang spesifik bagi komunitas Kristen (misalnya, hak beribadah dan pendirian rumah ibadah) ataukah pada isu-isu yang memiliki jangkauan lebih luas dan berdampak pada semua warga negara (misalnya, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, atau reformasi birokrasi)?

Dilema ini seringkali dapat diatasi dengan pendekatan "baik ini maupun itu," bukan "ini atau itu." Banyak kepemimpinan Kristen di

Indonesia berupaya mengatasi keduanya secara paralel: menyuarakan hak-hak minoritas sekaligus terlibat aktif dalam isu-isu kemanusiaan universal. Namun, pilihan prioritas tetap menjadi tantangan praktis yang menuntut pertimbangan matang tentang potensi dampak, urgensi, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Secara ringkas, tantangan dan dilema etis ini secara gamblang menyoroti kompleksitas pengaruh kepemimpinan Kristen dalam kancah kebijakan publik di Indonesia. Untuk menghadapinya, diperlukan tidak hanya komitmen yang kuat pada iman, tetapi juga kebijaksanaan yang mendalam, sensitivitas terhadap keberagaman yang melekat pada bangsa, integritas pribadi yang tak tergoyahkan, dan kemampuan untuk menavigasi arena politik dengan cermat dan penuh tanggung jawab.

Bab 11

Implikasi dan Rekomendasi:
Membangun Kebijakan Publik
yang Responsif



Bab ini, "Implikasi dan Rekomendasi," berfungsi sebagai puncak dari seluruh pembahasan mengenai pengaruh kepemimpinan Kristen terhadap kebijakan publik. Setelah menelaah berbagai mekanisme pengaruh—baik langsung maupun tidak langsung—serta mengidentifikasi tantangan dan dilema etis yang menyertainya, bab ini kini berfokus pada apa artinya temuan-temuan tersebut bagi masa depan. Maksud utama dari bab ini adalah untuk menarik benang merah dari seluruh analisis, mengekstrak pembelajaran, dan merumuskan saran-saran konkret.

Tujuan utama bab ini adalah bukan hanya untuk menyimpulkan bahwa kepemimpinan Kristen *memang* memiliki pengaruh, tetapi lebih jauh, untuk menunjukkan bagaimana pengaruh tersebut dapat dioptimalkan demi terwujudnya kebijakan publik yang lebih baik. Ini adalah upaya untuk mentransformasi analisis deskriptif menjadi proposisi normatif dan praktis. Bab ini akan menguraikan implikasi-implikasi penting bagi para pembuat kebijakan, pemimpin Kristen itu sendiri, dan masyarakat luas, agar kolaborasi yang lebih konstruktif dapat terjalin dalam menciptakan tata kelola yang lebih etis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Singkatnya, bab ini menjawab pertanyaan fundamental: "Jadi, apa selanjutnya?" dan "Bagaimana kita bisa melakukan ini dengan lebih baik?"

A. Implikasi bagi Kebijakan Publik yang Responsif: Kontribusi Kepemimpinan Kristen untuk Tata Kelola yang Lebih Etis, Adil, dan Melayani

Pengaruh kepemimpinan Kristen, jika diarusutamakan dengan benar dan didasari oleh nilai-nilai fundamental, memiliki potensi besar untuk membentuk kebijakan publik yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan teknis dan ekonomi, tetapi juga secara mendalam etis, adil, dan berorientasi pada pelayanan sejati. Implikasi ini melampaui sekadar kontribusi parsial dan menyentuh fondasi tata kelola yang lebih baik.

1. Penanaman Nilai Etika dan Integritas dalam Proses Kebijakan:

Salah satu implikasi paling signifikan dari keterlibatan kepemimpinan Kristen adalah penanaman nilai-nilai etika dan integritas ke dalam setiap tahapan proses kebijakan. Nilai-nilai Kristen yang menekankan kejujuran, transparansi, antikorupsi, dan akuntabilitas adalah antidot yang kuat terhadap praktik-praktik buruk dalam pemerintahan. Ketika individu Kristen yang memegang teguh prinsip-prinsip ini menduduki posisi dalam pemerintahan atau menjadi bagian dari kelompok advokasi, mereka membawa serta komitmen moral yang dapat menjadi filter terhadap kebijakan yang berpotensi tidak etis atau merugikan publik. Sebagai contoh, dalam perumusan anggaran, seorang pemimpin Kristen yang berintegritas akan mendorong transparansi dan alokasi yang adil, menghindari praktik "titipan" atau penggelembungan dana. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, nilai kejujuran akan meminimalkan praktik kolusi dan nepotisme. Dengan demikian, kepemimpinan Kristen tidak hanya mengadvokasi kebijakan tertentu, tetapi juga memengaruhi *cara* kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan, mendorong budaya kerja yang lebih bersih dan bertanggung jawab di lembaga publik. Kehadiran mereka dapat menjadi "alarm etis" yang mencegah penyimpangan.

2. Pendorong Keadilan Sosial dan Perlindungan Kelompok Rentan:

Inti dari ajaran Kristen adalah belas kasih dan kepedulian terhadap kaum miskin, yang tertindas, dan yang terpinggirkan. Implikasi dari nilai ini dalam kebijakan publik sangat besar: kepemimpinan Kristen dapat menjadi suara yang kuat bagi keadilan sosial. Mereka cenderung akan mengadvokasi kebijakan yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi, menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, serta melindungi hak-hak kelompok minoritas dan rentan. Misalnya, dalam pembahasan undang-undang ketenagakerjaan, pemimpin Kristen akan berpihak pada hak-hak pekerja yang adil, upah yang layak, dan kondisi kerja yang manusiawi. Dalam isu penggusuran

lahan, mereka akan menuntut keadilan bagi masyarakat adat atau warga miskin kota yang terdampak. Mereka tidak hanya melihat statistik kemiskinan, tetapi juga penderitaan manusia di baliknya, dan berupaya menerjemahkan empati ini menjadi kebijakan yang konkret. Kontribusi ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya didasarkan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada dimensi moral keadilan sosial.

3. Memperkuat Partisipasi Publik dan Demokrasi Deliberatif:

Kepemimpinan Kristen, melalui struktur gereja dan organisasi masyarakat sipilnya, memiliki kapasitas unik untuk memobilisasi dan mengedukasi masyarakat, mendorong partisipasi aktif dalam proses kebijakan. Implikasinya adalah penguatan demokrasi deliberatif, di mana suara warga didengar dan dipertimbangkan. Gereja seringkali menjadi wadah bagi diskusi isu-isu publik, tempat jemaat diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya menyalurkan aspirasi.

Dengan mendorong partisipasi dari akar rumput, kepemimpinan Kristen membantu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat, bukan hanya elit politik. Mereka dapat memfasilitasi dialog antara warga dan pembuat kebijakan, menjembatani kesenjangan informasi, dan membantu masyarakat memahami dampak kebijakan. Ini menciptakan kebijakan yang lebih responsif karena dibangun di atas dasar konsultasi yang luas dan legitimasi dari rakyat.

4. Mempromosikan Toleransi, Kerukunan, dan Inklusivitas:

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, kepemimpinan Kristen memiliki peran krusial dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan antarumat beragama, dan inklusivitas dalam kebijakan publik. Implikasinya adalah terciptanya kebijakan yang tidak diskriminatif dan yang merangkul seluruh elemen bangsa. Dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, pemimpin Kristen dapat menjadi contoh bagaimana perbedaan agama tidak menghalangi kerja sama untuk pembangunan nasional. Mereka dapat

mengadvokasi kebijakan yang menjamin kebebasan beragama bagi semua, mencegah diskriminasi berbasis agama atau etnis dalam pelayanan publik, dan mendukung program-program yang memperkuat dialog antarbudaya dan antaragama. Kebijakan yang dibentuk atas dasar nilai-nilai ini akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan stabil, di mana setiap warga negara merasa diakui dan dilindungi.

5. Mendorong Kebijakan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan:

Semakin banyak kepemimpinan Kristen yang memahami konsep "stewardship" atau amanat ilahi untuk memelihara ciptaan Tuhan. Implikasinya adalah dukungan dan advokasi untuk kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Mereka dapat menjadi suara moral yang mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab terhadap lingkungan, bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang. Ini bisa berarti mendukung kebijakan tentang energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, perlindungan hutan, atau adaptasi perubahan iklim. Dengan mengangkat isu lingkungan ke ranah moral-keagamaan, kepemimpinan Kristen dapat memberikan dimensi etis yang kuat pada perumusan kebijakan lingkungan, mendorong pendekatan yang lebih holistik dan bertanggung jawab.

Seorang teolog Belanda, Abraham Kuyper, yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda, secara tegas menyatakan bahwa "Tidak ada satu inci pun dari seluruh keberadaan manusia yang Kristus, yang adalah kedaulatan atas segalanya, tidak berseru, 'Itu adalah milik-Ku!'" (Kuyper, 1898). Kutipan ini, meskipun berasal dari konteks yang berbeda, sangat relevan untuk menggambarkan implikasi filosofis bahwa bagi kepemimpinan Kristen, iman seharusnya tidak terpisah dari urusan publik. Ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan, termasuk politik dan kebijakan, berada di bawah kedaulatan ilahi dan harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip Kristen tentang kebenaran dan keadilan. Bagi kepemimpinan Kristen, keterlibatan dalam kebijakan publik bukan sekadar pilihan, melainkan

sebuah panggilan untuk membawa nilai-nilai ilahi ke dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, implikasi dari kontribusi kepemimpinan Kristen bagi kebijakan publik yang responsif sangat luas. Mereka tidak hanya membawa *nilai-nilai* ke dalam proses kebijakan, tetapi juga mendorong *praktik* kebijakan yang lebih etis, *distribusi* yang lebih adil, *partisipasi* yang lebih luas, *hubungan antarwarga* yang lebih harmonis, dan *perspektif jangka panjang* yang bertanggung jawab terhadap bumi. Ini adalah visi tentang tata kelola yang tidak hanya efisien tetapi juga berjiwa, yang melayani manusia seutuhnya.

B. Rekomendasi untuk Pemimpin Kristen: Saran Praktis untuk Memengaruhi Kebijakan Publik secara Konstruktif di Indonesia

Bagi pemimpin Kristen di Indonesia, keinginan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan publik adalah sebuah panggilan yang mendalam, bukan sekadar ambisi politis. Di tengah lanskap sosial-politik Indonesia yang kaya akan pluralisme agama, etnis, dan budaya, serta dihadapkan pada berbagai tantangan seperti politik identitas dan potensi radikalisme, upaya memengaruhi kebijakan publik menuntut lebih dari sekadar niat baik. Dibutuhkan pendekatan yang strategis, bijaksana, dan berbasis pada pemahaman mendalam terhadap realitas konteks. Rekomendasi ini dirancang untuk membimbing para pemimpin Kristen agar mereka dapat secara efektif menyuarakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih dalam arena publik. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pengaruh mereka tidak hanya dirasakan, tetapi juga konstruktif, inklusif, dan berkelanjutan, demi tercapainya kebaikan bersama bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka diundang untuk tidak hanya menjadi *pemikir* tetapi juga *pelaku* yang membawa perubahan positif, dengan tetap mempertahankan integritas iman dan menjaga kerukunan bangsa. Keterlibatan ini merupakan wujud nyata dari iman yang berinkarnasi, yang peduli pada kondisi nyata masyarakat dan berupaya membawa shalom (kesejahteraan menyeluruh) bagi semua.

1. Perkuat Landasan Teologis dan Etis Keterlibatan Publik:

Langkah pertama yang krusial bagi pemimpin Kristen adalah memperdalam pemahaman teologis dan etis mengenai panggilan untuk terlibat dalam isu-isu publik. Keterlibatan ini bukan sekadar pilihan, melainkan refleksi dari iman yang hidup dan peduli terhadap dunia. Membangun teologi publik yang kokoh akan membekali pemimpin untuk berargumentasi dengan landasan yang kuat, baik di hadapan jemaat maupun di hadapan publik luas. Ini berarti memahami bagaimana nilai-nilai Kerajaan Allah—seperti keadilan, perdamaian, dan integritas ciptaan—dapat diterjemahkan ke dalam agenda kebijakan konkret. Misalnya, jika isu korupsi menjadi perhatian, pemimpin Kristen harus mampu menjelaskan mengapa korupsi adalah kejahatan moral dari perspektif iman dan bagaimana hal itu merusak kesejahteraan umum. Jika isu lingkungan yang krusial, mereka harus dapat menguraikan konsep *stewardship* sebagai tanggung jawab iman. Dengan fondasi teologis yang kuat, mereka tidak akan mudah goyah oleh tekanan politik atau tergoda pada kompromi yang melenceng dari nilai-nilai dasar.

2. Bangun Kompetensi Analisis Kebijakan dan Komunikasi Efektif:

Hasrat saja tidak cukup; pemimpin Kristen perlu mengembangkan kapasitas praktis dalam menganalisis isu kebijakan dan mengkomunikasikannya secara efektif. Ini melibatkan pembelajaran tentang proses pembuatan kebijakan, pemahaman terhadap data dan statistik relevan, serta kemampuan untuk merumuskan argumen yang rasional dan persuasif. Mereka harus mampu mengidentifikasi akar masalah, memahami berbagai perspektif, dan menawarkan solusi yang realistis dan aplikatif. Kemampuan komunikasi juga vital. Pesan yang ingin disampaikan harus jelas, ringkas, dan relevan bagi khalayak yang beragam. Ini berarti belajar berbicara "bahasa kebijakan" yang dapat dipahami oleh birokrat, politisi, dan masyarakat umum, tanpa terlalu banyak jargon keagamaan yang mungkin mengasingkan. Latihan dalam presentasi, penulisan *policy brief*, dan partisipasi dalam diskusi publik akan

sangat membantu. Pemimpin Kristen harus menjadi komunikator yang kredibel dan dapat dipercaya dalam ruang publik.

3. Jalin Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Iman:

Indonesia adalah mozaik keberagaman. Oleh karena itu, pemimpin Kristen tidak bisa bekerja sendiri dalam memengaruhi kebijakan publik. Membangun dan memelihara kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, lembaga akademis, kelompok profesional, dan terutama dengan pemimpin dari agama lain, adalah kunci keberhasilan. Kemitraan ini memperluas jangkauan pengaruh, memperkuat legitimasi advokasi, dan memungkinkan pertukaran ide serta sumber daya. Melalui dialog antar-iman, pemimpin Kristen dapat menemukan titik-titik temu nilai yang universal—seperti keadilan, kasih sayang, dan integritas—yang dimiliki bersama oleh berbagai tradisi agama. Kolaborasi semacam ini tidak hanya efektif dalam advokasi kebijakan, tetapi juga menjadi teladan konkret kerukunan dan persatuan bangsa. Ini merupakan manifestasi nyata dari panggilan untuk menjadi "garam dan terang" di tengah masyarakat yang beragam.

4. Fokus pada Isu-Isu Kesejahteraan Umum (Common Good):

Untuk menghindari kesan sektarianisme atau memaksakan agenda kelompok, pemimpin Kristen disarankan untuk memprioritaskan isu-isu yang jelas-jelas berkontribusi pada kesejahteraan umum (common good) bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial. Isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas untuk semua, akses kesehatan yang merata, perlindungan lingkungan, pemberantasan korupsi, dan promosi hak asasi manusia adalah contoh area di mana nilai-nilai Kristen dapat selaras dengan kepentingan nasional. Dengan berfokus pada isu-isu ini, kepemimpinan Kristen menunjukkan relevansi iman mereka bagi seluruh bangsa dan membangun kredibilitas sebagai aktor yang peduli pada kemajuan dan keadilan bagi semua. Ini juga akan

membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih luas dan mendapatkan dukungan dari segmen masyarakat yang lebih besar.

5. Jaga Integritas dan Kenabian dalam Berpolitik:

Arena politik seringkali penuh dengan godaan pragmatisme dan kompromi moral. Oleh karena itu, pemimpin Kristen harus sangat berhati-hati dalam menjaga integritas dan mempertahankan peran kenabian mereka. Peran kenabian berarti berani menyuarakan kebenaran, mengkritisi ketidakadilan, dan menuntut akuntabilitas dari pemegang kekuasaan, bahkan ketika itu tidak populer atau berisiko. Hal ini menuntut keberanian untuk tidak menjadi "bagian dari masalah" politik, tetapi sebaliknya, menjadi "solusi" yang membawa perubahan positif. Integritas pribadi dalam setiap tindakan, baik di dalam maupun di luar arena politik, adalah kesaksian paling kuat dari nilai-nilai yang diyakini. Ini juga berarti menghindari politisasi agama yang dapat merusak kerukunan dan legitimasi iman di mata publik.

C. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan: Berinteraksi dengan dan Memahami Kontribusi Potensial dari Kepemimpinan Berbasis Nilai

Pembuat kebijakan di Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan regulasi yang adil, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara. Dalam konteks negara yang pluralistik ini, peran berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok berbasis nilai, menjadi sangat penting. Oleh karena itu, memahami dan berinteraksi secara konstruktif dengan kepemimpinan Kristen, serta kepemimpinan berbasis nilai lainnya, bukan hanya merupakan praktik yang baik, tetapi juga esensial untuk memperkaya proses pembuatan kebijakan dan pada akhirnya menghasilkan tata kelola yang lebih baik. Mengabaikan atau meminggirkan suara-suara berbasis nilai bisa berarti kehilangan wawasan mendalam tentang kebutuhan akar rumput dan nilai-nilai moral yang dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat. Rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong para pembuat kebijakan agar melihat kelompok-kelompok ini sebagai mitra strategis yang potensial, bukan sekadar

konstituen yang harus dilayani atau kelompok yang harus diawasi. Dengan pendekatan yang inklusif, kebijakan dapat dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

1. Akui dan Hargai Peran Kontributif Kepemimpinan Berbasis Nilai:

Langkah pertama adalah mengakui bahwa kepemimpinan berbasis nilai, termasuk kepemimpinan Kristen, bukan hanya sekadar kelompok kepentingan biasa. Mereka seringkali mewakili konstituen yang signifikan dan didorong oleh keyakinan moral yang mendalam tentang kebaikan bersama. Mengakui bahwa nilai-nilai keagamaan dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk pelayanan publik dan advokasi keadilan adalah krusial. Pembuat kebijakan harus melihat mereka sebagai mitra potensial dalam pembangunan, bukan sebagai ancaman atau sekadar objek regulasi. Pengakuan ini akan membuka pintu bagi dialog yang lebih tulus dan kolaborasi yang lebih efektif. Ini juga berarti menghormati otonomi lembaga keagamaan dalam ranah mereka sendiri, sambil melihat potensi sinergi untuk tujuan bersama.

2. Ciptakan Ruang Partisipasi yang Inklusif dan Bermakna:

Untuk memanfaatkan potensi kontribusi kepemimpinan Kristen, pembuat kebijakan harus secara proaktif menciptakan mekanisme dan ruang partisipasi yang inklusif dan bermakna. Ini bisa berarti melibatkan perwakilan dari organisasi-organisasi Kristen dalam forum konsultasi publik, lokakarya penyusunan kebijakan, atau komite penasihat. Penting untuk memastikan bahwa partisipasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan kesempatan nyata bagi suara berbasis nilai untuk didengar dan dipertimbangkan secara serius. Ruang ini juga harus mengakomodasi keragaman perspektif di dalam komunitas Kristen itu sendiri, bukan hanya berinteraksi dengan satu atau dua perwakilan saja. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Pembuat kebijakan dapat secara khusus mengundang perwakilan gereja atau organisasi sosial Kristen yang memiliki rekam jejak dalam

pelayanan masyarakat di bidang tertentu (misalnya, kesehatan atau pendidikan) untuk berbagi pengalaman dan wawasan.

3. Terbuka terhadap Argumen yang Berbasis Nilai Universal:

Pembuat kebijakan seringkali terbiasa dengan argumen yang berbasis data ekonomi atau efisiensi administratif. Namun, mereka juga harus terbuka untuk mempertimbangkan argumen yang berakar pada nilai-nilai etis dan moral, yang seringkali disampaikan oleh kepemimpinan berbasis nilai. Tantangan bagi pembuat kebijakan adalah bagaimana menerjemahkan prinsip-prinsip moral ini ke dalam kerangka kebijakan yang berlaku untuk semua. Ini berarti kemampuan untuk mengenali bahwa ketika kepemimpinan Kristen mengadvokasi "keadilan untuk kaum miskin," itu bukan hanya dogma agama, melainkan prinsip universal yang juga relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembuat kebijakan perlu belajar mengidentifikasi nilai-nilai universal yang mendasari seruan berbasis iman dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka rasionalitas kebijakan publik.

4. Manfaatkan Jaringan dan Kapasitas Pelayanan:

Banyak lembaga Kristen memiliki jaringan yang luas, sumber daya manusia yang terampil, dan pengalaman puluhan tahun dalam pelayanan sosial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, bahkan di daerah terpencil. Pembuat kebijakan dapat secara cerdas memanfaatkan jaringan dan kapasitas ini sebagai mitra dalam implementasi program-program pemerintah. Misalnya, dalam program kesehatan masyarakat, pemerintah dapat berkolaborasi dengan rumah sakit atau klinik Kristen yang sudah memiliki kepercayaan di komunitas. Dalam upaya penanggulangan bencana, koordinasi dengan jaringan gereja lokal dapat mempercepat penyaluran bantuan. Kemitraan semacam ini tidak hanya efisien tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat.

5. Jaga Independensi dan Hindari Polarisasi Identitas:

Meskipun mendorong interaksi, pembuat kebijakan juga harus menjaga independensi dan tidak membiarkan politik identitas

mendominasi proses kebijakan. Artinya, mereka harus memastikan bahwa keputusan kebijakan tidak hanya menguntungkan satu kelompok agama atau etnis, tetapi benar-benar melayani kepentingan seluruh warga negara. Mereka harus proaktif dalam menanggulangi narasi-narasi radikal yang dapat merusak kerukunan dan mendorong perpecahan. Dengan berinteraksi secara adil dan transparan dengan semua kelompok berbasis nilai, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif, adil, dan stabil. Hal ini konsisten dengan pernyataan Martin Luther King Jr., seorang tokoh kepemimpinan berbasis nilai yang berpengaruh di Amerika, bahwa "Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak" (King Jr., 1963). Kutipan ini, meskipun berasal dari konteks perjuangan hak sipil, menegaskan urgensi bagi pembuat kebijakan untuk tidak menunda implementasi keadilan dan responsif terhadap panggilan moral dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kepemimpinan Kristen.

Pada akhirnya, bagi pembuat kebijakan, mengakui dan secara efektif melibatkan kepemimpinan Kristen (dan kepemimpinan berbasis nilai lainnya) dapat memperkaya proses demokratis, memastikan kebijakan yang lebih berakar pada realitas sosial dan moral, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

King Jr., Martin Luther. 1963. "Letter from Birmingham Jail." In *Why We Can't Wait*. New York: Harper & Row, hlm. 79.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam: Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 11.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), 17.

- AG. Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agus Mulyanto. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amin Priatna, Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia", Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15.
- Amstrong, dan Kotler. 2003. *Dasar-dasar Pemasaran, Jilid 1, Edisi Kesembilan*. Jakarta: Penerbit PT. Indeks Gramedia.
- Andreas Untung Wijono dan Sukardi, *Manajemen Gereja: Dasar Teologis dan Implementasi Praktisnya* (Bandung: BMI, 2010), hal. 21.
- Anoraga, Pandji. 2003. *Psikologi Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aritonang, Jan S. 2021. *Gereja dan Tantangan Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 112.
- Asshiddiqie, J. 2009. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28-30.
- Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Wahyudi. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita.
- Barata, *Dasar – Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), 36.
- Bastian Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bavinck, H. 1928. *Gereformeerde Dogmatiek*. Kampen: Kok.
- Bharudin, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012, h. 223.
- Boland, BJ., Van Niftrik, *Dogmatika Masa Kini* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2015), 352.
- Bridgman, Peter dan Glyn Davis, *The Australian policy Handbook* (Crows Nest: Allen and Unwin, 2004), 7.
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*, Yogyakarta: Media Presindo, 2008.

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bycio, P., dkk. (1995). Further Assessments of Bass's Conceptualization of Transactional and Transformational Leadership. *Journal of Applied Psychology*, 80, 468-47.
- Casanova, J. 1994. *Public Religions in the Modern World*. Chicago, IL: University of Chicago Press, hlm. 5-7.
- Chairi, A. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Discussion Paper*.
- Charles C. Ryrie, *Teologi Dasar, Buku 2*. Yogyakarta: Yayasan ANDI, 2000, h. 184.
- Choi, S. 2019. *Christianity and Public Service in Contemporary Korea*. Korea University Press.
- Cutlip, Scott M.; Center, Allen H.; Broom, Glen M. (2000). *Effective Public Relations*. Jakarta: Prenada.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Davis and Newstrom. 1985. *Human Behavior at Work; Organizational Behavior, International Edition*. Singapore: Mc Graw Hill Book Company.
- Dennis, R. 2004. Development of the Servant Leadership Assessment Instrumen. *Leadership & Organization Development Journal*.
- Depdiknas, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama 2008), hal 1045.
- Didin Kurniadin & Imam Machali. 2012. *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dimiyati, J. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djaja, D. (1985). *Peranan Humas Dalam Perusahaan*. Bandung: Alumni.
- D'Souza, A. (2009). *Ennoble enable empower: kepemimpinan Yesus Sang Almasih*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Dubrin Andrew J. 2005. *Leadership* (Terjemahan), Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media.
- Dwi Ari Wibawa, Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional, 2012, h. 4.
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Chief, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- E. Mulyasa. 2003. *Menjadi kepala sekolah profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Hal: 107.
- Endahwati, Yosi Dian. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika JINAH*, 4(1). Singaraja, Desember 2014. ISSN 2089-3310.
- Engstorm, Ted W. & Edward R. Dayton, editor: Drs. Soemitro Onggosanjoyo, M. A. *Seni Manajemen Bagi pemimpin Kristen*. (Bandung: Yayasan Kalam hidup, 2007).
- Estaswara, Helpris. (2010). Stakeholder Relationship in Integrated Marketing Communication. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Fiedler, Fred E. *A Theory of Leadership Effectiveness*. New York: McGrawHill, 196.
- Fred Luthans, (2006). *Perilaku Organisasi. Edisi Sepuluh*. Yogyakarta: PT. Andi.
- Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition* (New York: McGraw-Hill Publishing Company, 1998), p. 11.
- George R, Terry. (2000). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.
- Goetsch, D.L & Davis, S. 1994. *Introduction to Total Quality, Quality, Productivity, Competitiveness*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall International Inc.
- Gottschalk, Louis. 2008. *Nugroho Notosusanto: Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Greenleaf, R.K. (1970). *The Servant as Leader*. The Robert K Greenleaf Center. Indianapolis.
- Gultom, Gomar. 2020. *Menjadi Gereja yang Relevan di Tengah Pluralitas Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 78.

- Habermas, J. 2006. Religion in the Public Sphere. *European Journal of Philosophy*, 14(1), 1-11, hlm. 9-10.
- Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari. 2004. *Kepemimpinan yang efektif*. Yogyakarta: Gajahmada.
- Hanafi, Mamduh M. 2016. *Manajemen Keuangan. Edisi kedua, Cetakan pertama*. Yogyakarta: BPFE Pres. Hal: 9.
- Hargens, "Adat-Istiadat Dalam Perspektif Kristiani" (n.d.), accessed May 29, 2019, jurnalilmiahpaxhumana.org/index.php/PH/article/download/34/4/.
- Haroid Koontz Cyril O'Donell, and Heinz Weihrich, *Management Eighth Edition* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1992), p. 144.
- Harter, J.K., Schmidt, F., Kilham, E.A. and Asplund, J.W. (2006). *Q12 Metaanalysis*. The Gallup Organization.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *At-Taqaddum*.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hemphill, J.K. & Coons, A.E. 1957. Development of The Leader Behavior Description Questionare. In R.M. Stogdill & A.E. Coons (Eds), *Leader Behavior: Its Description and Measurement*. Columbus: Bureau of Business Research, Ohio State University, pp. 6 – 38.
- Henri J. Nouwen, Dalam Nama Yesus: Permenungan Tentang Kepemimpinan Kristen (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 22.
- Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard, *Kepemimpinan Birokrasi*, Terjemahaan Harbani Pasolong, (2013). Bandung: Alfabeta.
- Hugiono dan Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT. Bina Ansura 2000), 47.
- Husein, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hwa Yung, *Mission and the Globalisation of Asia: The Call to Discipleship* (Singapore: Trinity Theological College, 2005), 121.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Jacobs, T.O., & Jaques, E. 1990. Military Executive Leadership. In K.E. Clark & M.B. Clark (Eds), *Measures of Leadership*. West Orange, NJ: Leadership Library of America pp. 281 – 295.
- James A.F. Stoner, *Management*, Prentice / Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New York, 1982, halaman 8.
- Jefkins, Frank Disempurnakan oleh Daniel Yadin. (2003). *Public Relations*. Terjemahan Haris Munandar. M.A. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Jermia Djadi, *Diktat Pelayanan Pastoral* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2011), 9.
- John Adair, *Cara Menumbuhkan Pemimpin* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 5.
- Joseph Rost C. 1993. *“Leadership for The Twenty – First Century”*. USA: Greenwood Publishing Group, Inc.
- Kartono, Kartini. 2003. *Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Katz, Robert Lee. 1970. *Management of the total enterprise*. New Jersey: Prentice-Hall.
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 21 Juni 2016].
- Kim, Y. 2020. *Environmental Ethics and Christian Activism in South Korea*. Routledge.
- Koesmono, 2007, “Pengaruh Kepemimpinan dan Tuntutan Tugas Terhadap Komitmen Organisasi dengan Variabel Moderasi Motivasi Perawat Rumah Sakit Swasta Surabaya”, *Jurnal*

- Manajemen dan Kewirausahaan, Universitas Kristen Petra Surabaya*, Vol.9 (1) Maret: 30.
- Koontz, Harold, Cyril O'Donnell, and Heinz Weihrich. 1984. *Manajemen, Jilid dua*. Jakarta: Erlangga.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kriyantono, R. (2012). *Public Relation & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations Etnografi Kritis & Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Kuyper, A. 1931. *Lectures on Calvinism*. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
- Lantu, D., & Pesiwari, E., & Rumahorbo, A. (2007). *Servan Leadership: The Ultimate Calling to Fulfill Your Life's Greatness*. Yogyakarta: Gradien Books.
- Lattimore, D. (2010). *Public Relations Profesi dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lee, S. 2018. *Christianity and Public Life in South Korea*. Seoul National University Press.
- Leibowitz, Yeshayahu. (1995). *Judaism, Human Values, and the Jewish State*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Louis Berkhof. *Teologi Sistematis. Volume 5*. Surabaya: Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1997, h. 10.
- Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Depok: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia 2000), 171.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 (1).
- Marbun. 2007. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Martinis Yamin dan Maisah. 2010. *Standarisasi Kinerja Guru*. Jakarta: Persada Press.
- May Linda Sari Ripaldi, "View of Melayani (Suatu Kritik Historis Terhadap Kepemimpinan Yesus Menurut Injil Markus 10: 42-45)" (n.d.), accessed May 29, 2019.

- Miftah Toha, Kepemimpinan dalam manajemen suatu pendekatan perilaku, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, h. 65.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moningga Robby. 2011. *Penatalayanan Kristen*, Indonesian Reformed Church Cor meum tibi offero, Domine, prompte et sincere ~ Member of CRCA (Christian Reformed Churches of Australia) NSW Classis.
- Muhadjir, Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research (Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003) p.90.
- Munandar, Utami. 2002. *Kreatifitas dan Keberbakatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nancy Lumumba, "Pola Kepemimpinan Yesus Yang Membawa Perubahan," *Jurnal Institut Kristen Borneo* 2, no. 1 (February 1, 2015): 69–82, accessed May 29, 2019.
- Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000.
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Olson, R. E. (2009). The Story of Christian Theology: Twenty Centuries of Tradition & Reform. Downers Grove, IL: IVP Academic, hlm. 370.
- Pattipeilohy, et al. 2013. The Influence of the availability of Moeny and Time, Fashion Involvement, Hedonic Consumption Tendency and Positive emotion Toward Impluse Buying Behavior in Ambon City (Study on Puchasing Products Fashion Apparel). *International Journal of Business and Behavioral Sciences*, Vol. 3 No. 8 Agustus 2013.
- Pella, Darmin, A., Inayati, Ahmad. (2011). *Talent Management: Mengembangkan SDM*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peterson, R. D., & Davies, E. (2017). *The Role of Christian Education in Shaping American Society*. University of Chicago Press.

- Philpott, D. (2004). *The Christian, the State, and the New Global Order*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, hlm. 12-15.
- Pius Adi Atmaja, Diktat Kuliah: Manajemen Pelayanan Gereja, Sem. VII, 2009, 15.
- Prodjowijono, Suharto. 2008. *Manajemen Gereja: Sebuah Alternatif*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Raihan, *Kepemimpinan Sekolah Transformasional*, Yogyakarta: PT. LKS Printing Cemerlang, h. 20.
- Ranupandojo dan Husnan. 2000. "Organisasi dan Motivasi: Pasar Peningkatan Produktivitas". Jakarta: Bumi Angkasa.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Robert Eyestone, *The Thread of Policy: A Study in Policy Leadership* (Indianapolis: Bobs Merrill, 1971), 18.
- Ruslan, R. (2008). *Kiat dan Strategi dan Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sacks, Jonathan. (2011). *The Great Partnership: Science, Religion, and the Search for Meaning*. New York: Schocken.
- Samuel, Vinay. *The Church in the Public Square: Mission and Human Rights in Asia* (Delhi: ISPCK, 2008), 45.
- Sanders, Oswald. 1967. *Spiritual Leadership*. Chicago: Moody Press.
- Sarwono, S.W. 1986. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sarlito W. Sarwono. 2000. *Berkenalan Dengan Aliran-aliran Dan Tokoh-tokoh Psikologi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metodei Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Administrasi*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Sider, R. J. (2005). *Rich Christians in an Age of Hunger: Moving from Affluence to Generosity*. Nashville, TN: W Publishing Group, hlm. 167-170.
- Silvia Janets dan Muhammad Ansar. 2011. *Akuntabilitas dalam Perspektif Gereja Protestan*. *SNA 14*, Aceh.

- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset. Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- SKuyper, Abraham. 1898. *Lectures on Calvinism*. Amsterdam: J.H. de Bussy, hlm. 12.
- Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Smith, J. A., & Jones, L. K. (2015). *Religious Influence on American Public Policy: A Comprehensive Study*. Oxford University Press.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Spears, Larry. 2002. Character and Servant Leadership: Ten Characteristics of Effective, Caring Leaders. *The Journal of Virtues & Leadership*.
- Stackhouse, M. L. (2004). *Public Theology and Political Economy: Christian Stewardship in Modern Society*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., hlm. 7-10.
- Stoner, James A.F., R. Edward Freeman, dan Daniel R. Gilbert Jr. (2003). *Manajemen*. Ed. Bahasa Indonesia. Diterjemahkan oleh Alexander Sindoro. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 129.
- Sukanto. 2000. "Agama dan Kemiskinan: Perspektif Kristen." *Jurnal Studi Pembangunan, Masyarakat dan Lingkungan* 2:2.
- Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), hlm. 47.
- Sumadi Suryabrata. 1995. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sumarno. 1990. *Pendapat Umum Dalam Sistem Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sunarjo. 1984. *Opini Publik*. Yogyakarta: Liberty.
- Susilo Martoyo, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta, BPFE, 2000, h. 184-186.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sutarto, 1986. *Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sutikno, Sobry. 2014. Metode & Model-Model Pembelajaran Menjadikan Proses Pembelajaran Lebih Variatif, Aktif, Inovatif, Efektif, dan Menyenangkan. Lombok: Holistica.
- Syafaruddin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hlm 75.
- Tangkilisan, M.Si, Drs. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Tedjasaputra. 2003. *Bermain Mainan dan Permainan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Topayung, S. L. (2022). Menjembatani kesenjangan generasi: Pendekatan efektif pedagogis Kristiani di era digital. *Jurnal BONAFIDE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 5(2), 592-616, hlm. 595.
- Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011, h.188-189.
- Utami Munandar, 2002. Kreativitas dan Keberbakatan: Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 30.
- Van Dierendonck, D., Diaz, D., Rodriguez-Carvajal, R., Blanco, A. & MorenoJimenez, B. (2007). Ryff's Six-factor Model of Psychological Well-being, A Spanish Exploration. *Soc Indic Res* 87: 473–479. DOI 10.1007/s11205-007- 9174-7.
- Wahjosumidjo, 1987. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Wang, L. 2021. *The Unofficial Church and Social Justice in China*. University of California Press.
- Wang, Y. (2018). *My Declaration of Faithful Disobedience*. (Dikutip dari esai-esai dan surat-surat publik yang diterbitkan dan diterjemahkan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia dan keagamaan).
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social And Economic Organization*. The free Press. Massachusetts.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kejikan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 6.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wolterstorff, N. (1983). *Until Justice and Peace Embrace*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., hlm. 67-68.
- Wright, K. & Asmundson, G. 2004. Biopsychosocial Approach to Pain. Dalam Hadjistavropoulos, T. & Craig, K. (penyunting). *Pain: Psychological Perspectives*, hal 35 - 57. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
- Xu, Z. (2013). *My Free China*. (Dikutip dari berbagai laporan berita dan esai yang beredar di Tiongkok, yang diterjemahkan dan diterbitkan secara tidak resmi).
- Yukl, G. 2012. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Edisi Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Indeks.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zamri Mohamad dan Haeqal Zulqarnain, *30 Strategi Membina Pengaruh* (Malaysia: PTS Publications Dan Distributor SDN.BHD).
- Zhang, H., Li, W., Jian, M. 2012. How Does State Ownership Affect Tax Avoidance? Evidence from China. *Working paper. School of Accountancy, Singapore Management University*.

Zoelisty, C., & Adityawarman. (2014). Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Keuangan Mesjid (studi Kasus Pada Mesjid Lingkungan Universitas diponegoro). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3, No. 3, 1-12.

PROFIL PENULIS

Nama : Samuel Linggi Topayung
Tempat / Tanggal. Lahir : Toraja, 15 Januari 1979
Alamat : Jl.Tegalan, Matraman - Jaktim

Pengalaman kerja dan Organisasi

- Ketua Umum Lembaga Pendamping Pembangunan Nasiona(LPPN)
- Konsultan di beberapa Kementerian (Tahun 2015 – Sekarang)
- Sekertaris Jendral Tim Relawan Kasih Jokowi (Komunitas Kristen Pendukung Jokowi Tingkat Nasional) Tahun 2018-2024
- Dosen Tetap di pasca Sarjana S-2 STT Setia Jakarta (Tahun 2018-Sekarang)
- Koordinator Komunitas Kristen Seluruh Indonesia.
- Direktur Instrument Survey Indonesia (ISI) (Tahun 2015-2018)
- Konsultan Bank Dunia (Tahun 2009-2011)
- Konsultan Program PNP Mandiri Kementerian Dalam Negeri (Tahun 2006 – 2007)
- Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Kerohanian GMKI Cabang Tondano (Tahun 2000-2002)

Buku **"Pengaruh Kepemimpinan Kristen Terhadap Kebijakan Publik"** ini mengulas secara mendalam bagaimana integritas dan prinsip-prinsip spiritual dari kepemimpinan Kristen dapat menjadi fondasi krusial dalam membentuk kebijakan publik yang efektif, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dimulai dengan mengeksplorasi peran vital seorang pemimpin dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan, buku ini membedah kompleksitas implementasi kebijakan sebagai sebuah proses terencana yang melibatkan berbagai pihak. Penulis menyoroti pentingnya analisis kebijakan yang cermat untuk menghindari konflik kepentingan dan kerugian publik, menegaskan bahwa kebijakan harus menjadi solusi, bukan sumber masalah baru. Selanjutnya, buku ini membawa pembaca pada perbandingan antara berbagai jenis kepemimpinan umum dan kekhasan kepemimpinan Kristen. Dengan sumber yang berlandaskan pelayanan Yesus Kristus, kepemimpinan Kristen menawarkan dimensi yang berbeda. Integritas, etika, dan moralitas yang berakar pada prinsip-prinsip ilahi menjadi kekuatan pembeda, menjaga pemimpin dari penyalahgunaan wewenang. Penulis menegaskan bahwa kepemimpinan Kristen adalah panggilan suci, didasarkan pada prinsip teologis bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberkahi akal budi untuk keputusan etis.

Buku ini kemudian secara spesifik membedah bagaimana kepemimpinan Kristen dapat memengaruhi ranah publik. Pembaca akan memahami urgensi memiliki pemimpin bermoral dan berakhlak di pemerintahan yang mencontohkan prinsip-prinsip kepemimpinan pelayan. Dijelaskan pula sumber dan prinsip-prinsip Kekristenan yang relevan dalam pembuatan kebijakan, seperti kepercayaan penuh kepada Tuhan, hikmat ilahi, pengambilan keputusan yang selaras dengan Alkitab, pentingnya konsultasi yang bijak, kesabaran, dan penerapan konsep kebajikan umum yang berlandaskan nilai-nilai Kristen. Melalui penggalian mekanisme pengaruh dan studi kasus nyata, buku ini menunjukkan dampak signifikan seorang pemimpin Kristen dalam setiap kebijakan, baik di lembaga formal maupun informal. Contoh-contoh konkret diilustrasikan untuk memperlihatkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip Kristen dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan bermanfaat.

Sebagai penutup, buku ini menyajikan implikasi praktis dan rekomendasi untuk membangun kebijakan publik yang benar-benar responsif. Buku ini merupakan seruan bagi para pemimpin, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk mengakui potensi kepemimpinan yang berlandaskan iman Kristen sebagai fondasi bagi kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan benar-benar melayani seluruh lapisan masyarakat.



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta

@penerbitbukujogja

@penerbit.kbm

ISBN 978-634-202-640-3

